PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RPJMD

KABUPATEN BENGKALIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN

2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
https://bappeda.bengkaliskab.go.id/

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9. Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang merupakan Dokumen Perencana SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 5 (lima) Tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja SKPD.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran struktur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaannya setiap tahun dituangkan ke dalam RKPD.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai dasar yuridis dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

i. BAB IX : Penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kurun waktu tertentu sesuai kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati bersama DPRD menyempurnakan RPJMD.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses rumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Merugikan kebijakan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebelum periode RPJMD berakhir sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

(1) Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan dan/atau penyelesaian permasalahan pembangunan DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

(3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat perubahan perubahan Organisasi Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk, berpedoman pada:

a. tujuan dan saran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan

b. program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

(2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan perubahan RPJMD.

Pasal 10

Dalam hal dokumen RPJMD 2021-2026 berakhir, maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkandi Bengkalis
pada tanggal 25 AGUSTUS 2021
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 AGUSTUS 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALISTAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.39.A/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Pasal 260-263 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang penyusunannya mempedomani Bagian Keempat: Tata Cara Penyusunan RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RPJMD ini memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalah pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya serta perumusan isu strategis daerah, pengintegrasian visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih 2021, perumusan strategi dan arah kebijakan, kerangka pendanaan program dan perumusan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan.

Akhir kata, demikianlah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam membangun masyarakat Kabupaten Bengkalis selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran lima tahunan dari arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 untuk penggalan tahun 2021-2025.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar: viii
BAB I. PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-6
1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-47
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-116
2.5 Evaluasi Hasil RPJMD Periode lalu II-124
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.3 Kerangka Pendanaan III-21
BAB IV. Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah IV-1
4.1. Permasalahan IV-1
4.2. Isu Strategis IV-15
BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran V-2
BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah VI-9
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VI-9
6.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 ..... VI-19
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial VI-21
6.4 Program Unggulan VI-23
6.5 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupten Bengkalis VI-31

6.6 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 ..... VI-42
BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII-1
BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII-1
BAB IX. PENUTUP IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1
9.2 Pedoman Transisi IX-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ..... II-3
Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2020 ..... II-5
Tabel II-3 Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Provinsi Riau II-18
Tabel II-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-19
Tabel II-5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2020 ..... II-22
Tabel II-6 Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 – 2019 ..... II-33
Tabel II-7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020 ..... II-34
Tabel II-8 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis 2015-2020 ..... II-45
Tabel II-9. Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis II-45
Tabel II-10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis 2020 ..... II-46
Tabel II-11 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020 ..... II-46
Tabel II-12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten BengkalisTahun 2016 - 2020 ..... II-47
Tabel II-13 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020 ..... II-48
Tabel II-14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-49
Tabel II-15 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020 ..... II-50
Tabel II-16 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020 ..... II-50
Tabel II-17 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2020 ..... II-51
Tabel II-18 Perkembangan Angka Melanjutkan Study Per Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-51
Tabel II-19 Rasio Guru-Murid Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 – 2019/2020 ..... II-53
Tabel II-20 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-53
Tabel II-21. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020 ..... II-54
Tabel II-22 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-55
Tabel II-23 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-57
Tabel II-24 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-58
Tabel II-25 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-58
Tabel II-26 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-59

Tabel II-27 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran hidup dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-60
Tabel II-28 Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-60
Tabel II-29 Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-61
Tabel II-30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-62
Tabel II-31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ... II-62
Tabel II-32 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-63
Tabel II-33 Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-64
Tabel II-34 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-64
Tabel II-35 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-65
Tabel II-36 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-65
Tabel II-37 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-66
Tabel II-38 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-67
Tabel II-39 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-67
Tabel II-40 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-68
Tabel II-41 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-69
Tabel II-42 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-69
Tabel II-43 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel II-44 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020 ..... II-74
Tabel..II-45. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020 ..... II-75
Tabel II-46 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-76
Tabel II-47 Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020 ..... II-77
Tabel II-48 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020 ..... II-78
Tabel II-49 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-79
Tabel II-50 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-80
Tabel II-51 Persentase PMKS yang tertangani Per Kecamatan per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-81
Tabel II-52. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020 ..... II-82

Tabel II-53 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-83
Tabel II-54 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-84
Tabel II-55 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-85
Tabel II-56 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019 ..... II-86
Tabel II-57 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2020 ..... II-88
Tabel II-58 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel II-59 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 ..... II-90
Tabel II-60 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-91
Tabel II-61 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-92
Tabel II-62 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-93
Tabel II-63 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-96
Tabel II-64 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-97
Tabel II-65 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ..... II-98
Tabel II-66 Perkembangan Indikator Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-99
Tabel II-67 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020 ..... II-100
Tabel II-68 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-100
Tabel II-69 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020... II-101
Tabel II-70 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-103
Tabel II-71 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-104
Tabel II-72 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 2015-2019 ..... II-104
Tabel II-73 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel II-74 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-105
Tabel II-75 Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-106
Tabel II-76 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-107
Tabel II-77 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-108
Tabel II-78 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-108

Tabel II-79 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-111
Tabel II-80 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel II-81 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020 ..... II-113
Tabel II-82 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-114
Tabel II-83 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-114
Tabel II-84 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020 ..... II-115
Tabel II-85 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-115
Tabel II-86 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bengkalis II-116
Tabel II-87 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Non Pangan per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel II-88 Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-119
Tabel II-89 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Benkalis Tahun 2015-2019 ..... II-119
Tabel II-90 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebenunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019 ..... II-121
Tabel II-91 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebenunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-121
Tabel II-92 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-122
Tabel II-93 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-124
Tabel II-94 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis II-125
Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-3
Tabel III-2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-7
Tabel III-3 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-11
Tabel III-4 Neraca Daerah Kabupaten Bengkalis 2016-2020. ..... III-13
Tabel III-5 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018-2020 ..... III-15
Tabel III-6 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 Kabupaten Bengkalis III-17
Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Bengkalis III-18
Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan) III-19
Tabel III-9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan) III-20
Tabel III-10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis (dalam %) III-21
Tabel III-11 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah dalam jutaan) III-24
Tabel III-12 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan) III-25
Tabel III-13 Proteksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam Jutaan) III-26
Tabel III-14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan) III-27

Tabel III-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (dalam Juta) III-28
Tabel V-1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ..... V-4
Tabel VI-1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 ..... VI-2
Tabel VI-2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkalis VI-11

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bengkalis (dalam Juta) VII-1
Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkalis VII-3
Tabel VIII-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis VIII-1
Tabel VIII-2 Penetatapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ..... VIII-3

DAFTAR GAMBAR:

Halaman

Gambar I-1.	Keterkaitan - RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD	I-5
Gambar II-1	Peta Administratif Kabupaten Bengkalis	II-2
Gambar II-2	Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis	II-7
Gambar II-3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis	II-9
Gambar II-4	Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis	II-11
Gambar II-5	Peta Pola Ruang Kabupaten BengkalisWilayah Rawan Bencana	II-13
Gambar II-6	Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis	II-15
Gambar II-7	Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis	II-17
Gambar II-8	*Sex Ratio* Kabupaten Bengkalis tahun 2020	II-20
Gambar II-9	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020	II-21
Gambar II-10	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkalis 2020	II-22
Gambar II-11	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020	II-23
Gambar II-12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2016-2020	II-25
Gambar II-13	Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020	II-26
Gambar II-14	Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020	II-27
Gambar II-15	Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020	II-28
Gambar II-16	Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Produksi (Lapangan Usaha)	II-29
Gambar II-17	Struktur Perekonomian (PDRB) ADHB dan ADHK (2010) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Pengeluaran	II-30
Gambar II-18	Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2016-2020	II-30
Gambar II-19	PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-31
Gambar II-20	Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	II-32
Gambar II-21	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 – 2020	II-35
Gambar II-22	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 – 2020	II-35
Gambar II-23	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	II-37
Gambar II-24	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	II-38
Gambar II-25	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020	II-39
Gambar II-26	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020	II-40
Gambar II-27	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	II-41

Gambar II-28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%) II-42
Gambar II-29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%) II-43
Gambar II-30 Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 ..... II-44
Gambar II-31 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018 ..... II-52
Gambar II-32 Persentase Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020 ..... II-87
Gambar II-33 Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 ..... II-95
Gambar II-34 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis 2020 ..... II-102
Gambar II-35 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2018 ..... II-107
Gambar II-36 Luas Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Bengkalis II-110
Gambar II-37 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik (dalam KWh) PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ..... II-110
Gambar II-38 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018- 2020 ..... II-111
Gambar II-39 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan (dalam rupiah) di Kabupaten Bengkalis 2020 ..... II-117
Gambar II-40 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kebupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 ..... II-122
Gambar II-41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis 2016-2020 ..... II-123
Gambar VI-1 Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Bengkalis VI-11
Gambar VI-2 Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkalis VI-13

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dan, sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah mesti dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis serta *top-bottom* dan *bottom-up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik-tematik, integratif-inklusif dan spasial.

Selanjutnya, tata cara perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, dan Kelembagaan. Yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pelaksanaanya secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan menyiapkan dokumen RPJMD yang merupakan tahapan perencanaan 5 (lima) tahunan dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknoktratik, partisipatif dan politis paling lambat 6 (enam) bulan

setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, yang selanjutnya dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempedomani arahan kebijakan pada penggalan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Selain itu, mengacu juga kepada kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta kebijakan pembangunan Nasional yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun sebelumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Suistainable Development Goals,* penerapan standard pelayanan minimal (SPM) dan peruntukan rencana kawasan dan pola ruang wilayah Kabupaten.

RPJMD ini mempunyai peran penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya di lingkup Pemeriintah Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, akan terwujud keselarasan antara perencanaan strategis daerah dengan perencanaan strategis serta perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025 adalah:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g) Undang-undang Republik Indonesia Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

p) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

v) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

w) Peraturan Menteri Negeri Dalam Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

x) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

y) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);

z) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);

aa) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor: 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor: 7);

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupaka bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur perencanaan program dan penganggaran yang berkaitan dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

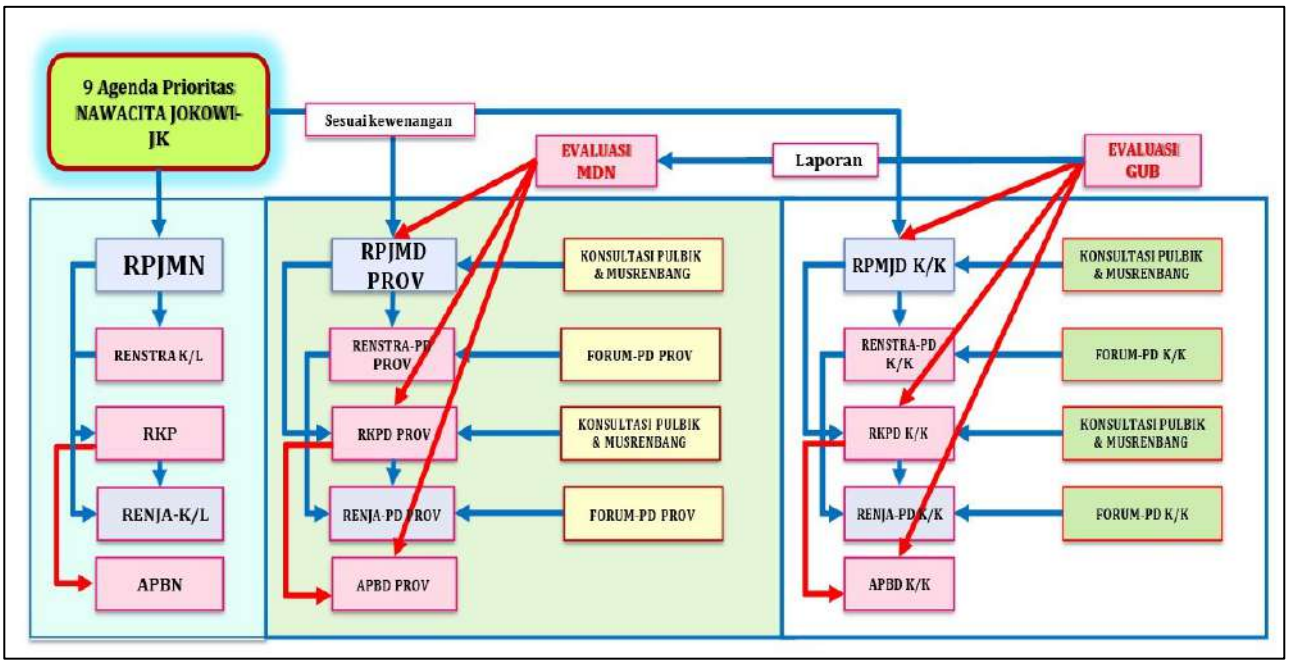

Gambar I-1.Keterkaitan - RPJMD terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJMD Provinsi Riau dan RPJM Nasional, karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2016 merupakan Tahapan Keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.

RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sekaligus sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi acuan dalam perumusan usulan-usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan rancangan arah rencana pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat umum depan yang holistik-tematik, integratif-inklusif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yaitu:

1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis kerangka keuangan daerah.

2) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus menjelaskan strategi dan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah;

3) Memberikan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan perencanaan daerah tahunan RKPD.

4) Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

5) Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan RPJMD disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN	*memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	*memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah 5 (lima) tahun terkahir.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	*memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah masa lalu dan kerangka pendanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	*memuat perumusan permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	*menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	*memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, prioritas pembangunan per tahun termasuk program pembangunan yang tersaji dengan holistik-tematik.* **Dengan struktur Sub Bab terdiri dari:** 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 6.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial 6.4. Program Unggulan 6.5. Integrasi KLHS terhadap RPJMD 6.6. Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	*memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.*
BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	*memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun hingga tahun 2026.*
BAB IX. PENUTUP	*memuat kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman utama Perangkat Daerah dalam membuat Renstra untuk menjaga kesinambungan pembangunan terutama dalam masa periode transisi pembangunan termasuk rencana pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah periode RPJMD.*

BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bengkalis menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki luas 8.426,48 km^2 atau 842.648 Ha, yang terdiri dari kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan lepas pantai. Terdapat dua pulau utama di samping pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau utama lainnya adalah pulau Rupat yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis.

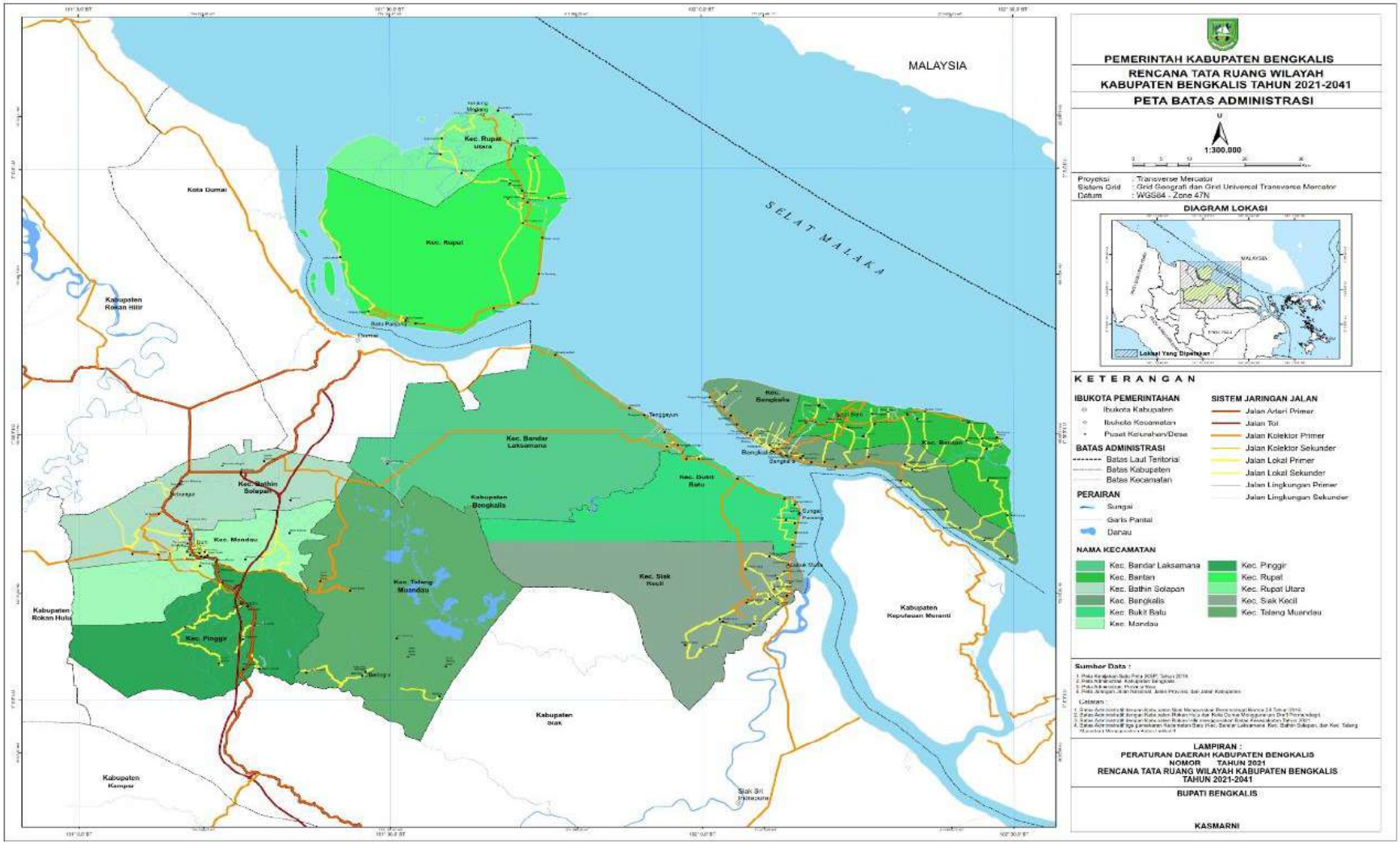

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Berdasarkan luasan per kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdapat ketimpangan luas wilayah, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 54,32% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wiayah 1.244,71 Km² (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km² (14,69%), Kecamatan Rupat dengan luas wilayah 1.136,31 Km² (13,49%) dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas wilayah 957,95 Km² (11,37%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas dibawah 900 Km². Untuk kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupat Utara (4,49%). Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km²)	Persentase Luas Wilayah
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49%
2	Bantan	Selat Baru	-	23	442,93	5,26%
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6%
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.237,70	14,69%
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	957,95	11,37%
6	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42%
7	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	855,62	10,15%
8	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63%
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.244,71	14,77%
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,49%
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,68	4,49%
Kabupaten Bengkalis			**19**	**136**	**8.426,48**	**100%**

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total 905,17 Km^2 atau 90.517 Hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas total 1.514,99 Km^2 atau 151.499 Hekar. Pulau Rupat memiliki 14 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik yang merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Kawasan geografis pesisir Kabupaten Bengkalis terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas total 2.722,27 Km^2 atau 272.227 Hektar. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Sedangkan kawasan geografis daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total 3.284,04 Km2 atau 328.404 Hektar.

Secara geografis, letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan sebagian lainnya berada pada jalur ekonomi penting di Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Letak wilayah tersebut berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis pada masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki potensi dan daya tarik bagi investasi pada bidang pertanian dan perikanan, dan industri pariwisata. Posisi geostrategis dan ketersediaan sumberdaya lahan dan panjang garis pantai Pulau Rupat merupakan potensi sumberdaya alam daerah yang masih dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari sebagai penggerak ekonomi daerah dimasa mendatang.

1.1.2 Topografi

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2 - 6 mdpl. Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3 - 8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat,

Rupat Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Selain berhadapat langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi . Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Secara rinci ketinggian wilayah dan jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten disajikan pada Tabel II-2 berikut ini.

Tabel II-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2020

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu kota Kabupaten
1.	Mandau	55	103
2.	Pinggir	45	100
3.	Bathin Solapan	55	106
4.	Talang Muandau	45	90
5.	Bukit Batu	6	15
6.	Siak Kecil	6	25
7.	Bandar Laksamana	6	24
8.	Rupat	5	71
9.	Rupat Utara	5	86
10.	Bengkalis	5	-
11.	Bantan	5	15

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

Fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis pada umumnya terbagi pada dua klasifikasi, yaitu fisiograsi cekungan rawa dan fisografi daratar, dengan karakteristik sebagai berikut:

a) Cekungan Rawa

Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.

b) Dataran

Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Di samping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu.

Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan

semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.

1.1.3 Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang di antaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuarter terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan. Untuk lebih jelasnya geologi tanah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat apda gambar dibawah ini:

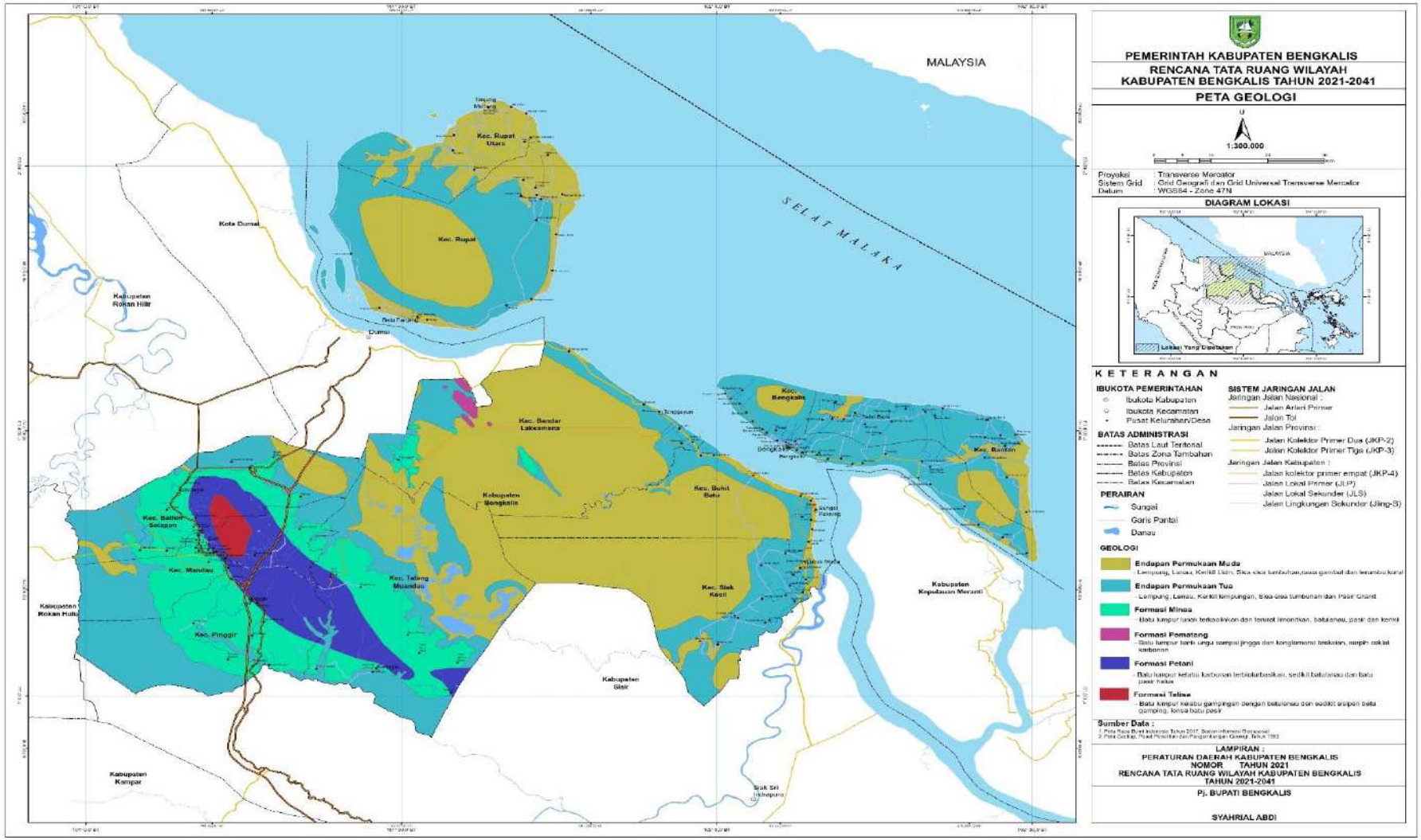

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-2 Peta Geologi di Kabupaten Bengkalis

1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembung Luar. Di antara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang ± 90 Km.

Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa di antaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi.

Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar. Pada gambar berikut dapat dilihat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bengkalis.

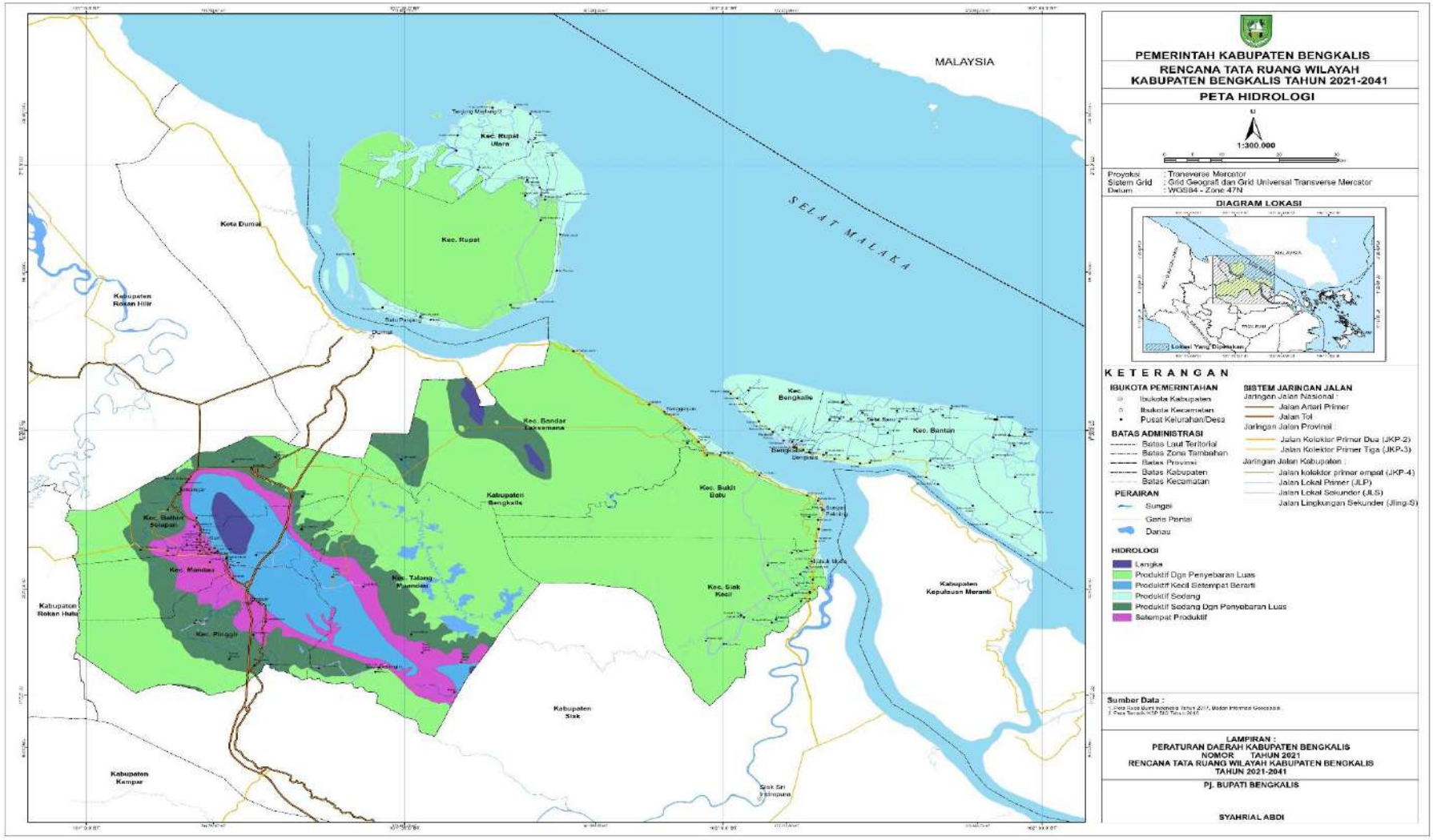

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-3 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bengkalis

1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupat dan Rupat Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Kondisi curah hujan rata-rata Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

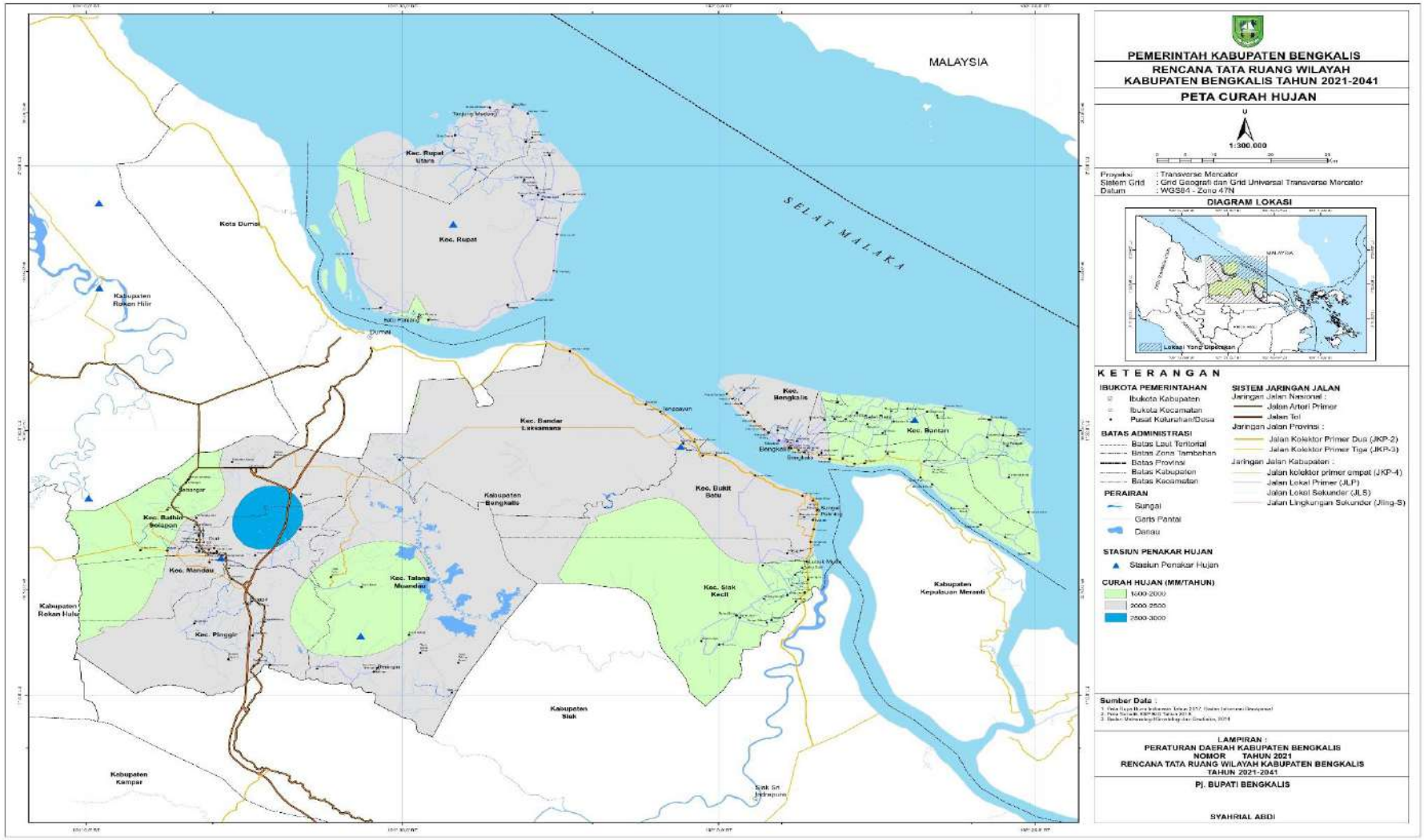

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupat dan Rupat Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

1.1.6 Penggunaan Ruang Wilayah

Rencana jangka panjang penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis untuk rencana tahun 2020-2040 dapat dilihat dari rencana peta pola ruang Kabupaten Bengkalis yang tersaji pada Gambar II-5. Secara umum penggunaan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi dalam dua kategori yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Budidaya diperuntukan penggunaan lahan untuk hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan dan penggunaan lahan untuk perikanan budidaya. Hal ini berimplikasi kepada pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan perekonomian masyarakat skala kecil semakin terbatas yang disebabkan oleh askses terhadap sumberdaya lahan yang juga semakin terbatas. Konsekwensi pengembangan usaha pertanian rakyat akan membutuhkan inovasi teknologi intensifikasi yang dapat mengembangkan produktivitas di masa mendatang.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada pusat-pusat perkotaan diproyeksi akan menyebabkan terjadinya pengembangan kawasan pemukiman perkotaan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kawasan pemukiman perdesaan sehingga membutuhkan kebijakan penataan kawasan pusat perkotaan yang lebih baik nantinya.

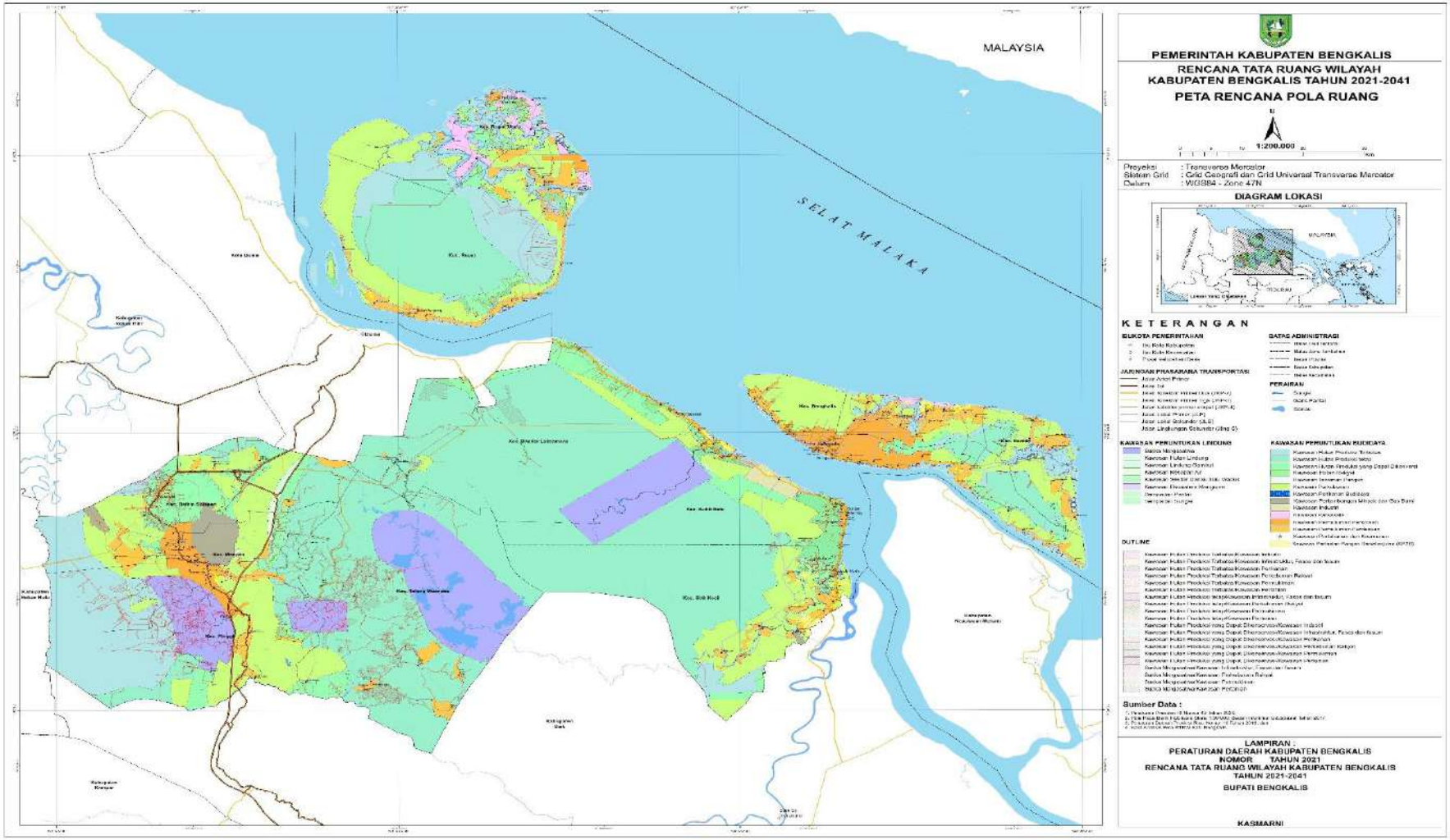

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-5 Peta Pola Ruang Kabupaten BengkalisWilayah Rawan Bencana

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan pentingdalam upaya imitagasi bencana di Kabupaten Bengkalis. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan berikut ini.

1) Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosisitem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.

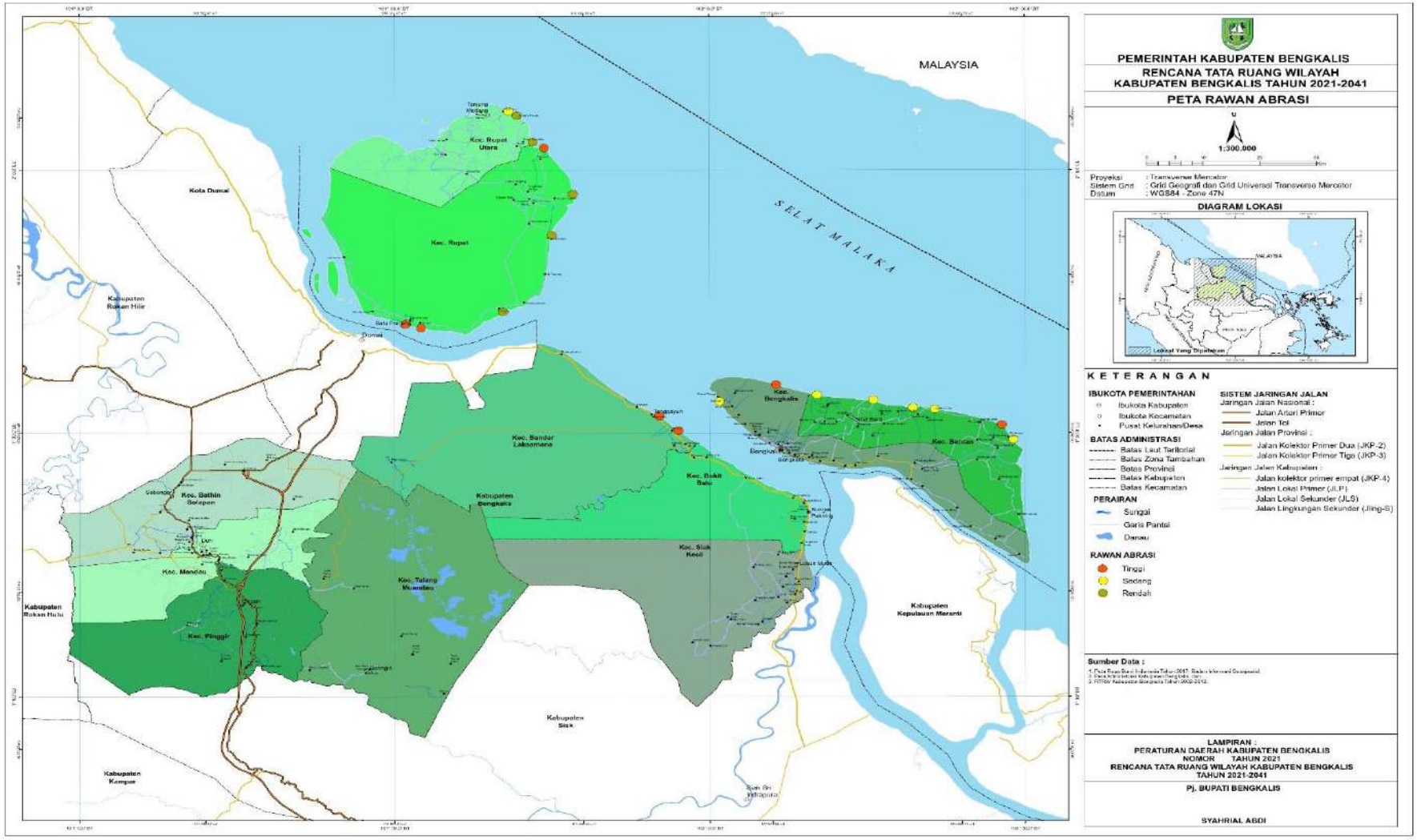

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-6 Peta Rawan Abrasi di Kabupaten Bengkalis

2) Rawan banjir dan gelombang tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupat. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya. Kawasan kerawanan banjir di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

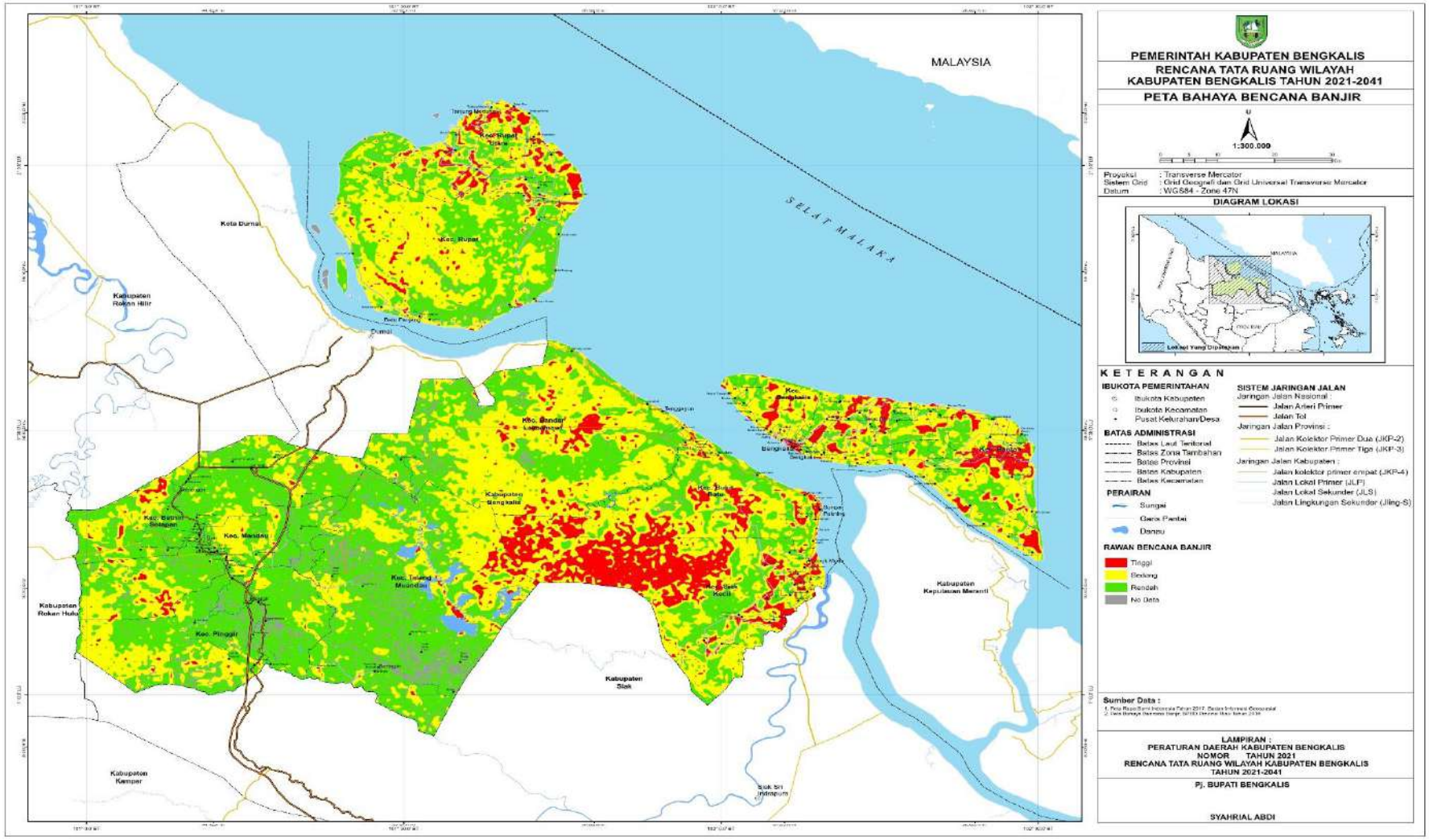

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Gambar II-7 Peta Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bengkalis

Selain banjir, terdapat juga potensi gelombang tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kawasan yang memiliki potensi rawan gelombang tinggi berlokasi di Desa Tanjung Medang dan Selat Baru sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan masyarakat Bengkalis terutama kegiatan pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Sehingga pada kawasan tersebut dibutuhkan rambu-rambu yang dapat memberitahukan adanya bahaya gelombang tinggi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

3) Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau tahun 2016-2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api yang terbanyak ketiga di Provinsi Riau pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel II-4 berikut. Pada tahun 2020 jumlah kebakaran lahan dan hutan telah mengalami penurunan dari 245 titik api pada tahun 2019 mejadi 3 titik api pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin membaik.

Tabel II-3 Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kuantan Singingi	10	9		11	1
2	Indragiri Hulu	14	5	44	210	2
3	Indragiri Hilir	18	14	137	548	1
4	Pelalawan	34	12	63	549	1
5	Siak	26	4	50	144	1
6	Kampar	27	2	7	27	1
7	Rokan Hulu	38	7	3	6	1
8	***Bengkalis***	***76***	***8***	***21***	***245***	***3***
9	Rokan Hilir	96	15	266	309	2
10	Kep. Meranti	17	3	26	154	1
11	Pekanbaru	2	-	-	1	3
12	Dumai	25	2	77	85	4
Provinsi Riau		**383**	**81**	**694**	**2.289**	**21**

Sumber: BAPPEDA Provinsi Riau 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 2020, BPS 2021

1.1.7 Aspek Demografi

a) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 67,12 jiwa per Km^2. Kabupaten Bengkalis temasuk kategori penduduk sangat jarang di Provinsi Riau. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahun semakin bertambah

dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk akibat berkembangan kegiatan ekonomi lokal dan regional di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km²)	Jumlah (Jiwa)	Peresentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jw/Km²)
1.	Mandau	372,25	152.258	26,92%	409,02
2.	Pinggir	811,46	62.098	10,98%	76,53
3.	Bathin Solapan	855,62	91.586	16,19%	107,04
4.	Talang Muandau	1.244,71	24.000	4,24%	19,28
5.	Bukit Batu	526,62	21.771	3,85%	41,34
6.	Siak Kecil	957,95	24.186	4,28%	25,25
7.	Bandar Laksamana	1.237,70	15.842	2,80%	12,8
8.	Rupat	1.136,31	34.719	6,14%	30,55
9.	Rupat Utara	378,68	14.117	2,50%	37,28
10.	Bengkalis	462,24	83.085	14,69%	179,74
11.	Bantan	442,93	41.907	7,41%	94,61
Kabupaten Bengkalis		**8.426,48**	**565.569**	**100,00%**	**67,12**

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2021

Berdasarkan Tabel II-5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 409.02 jiwa/Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 152.258 jiwa atau sebesar 26,92% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupat Utara yaitu sebanyak 14.117 Jiwa atau 2,50% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu peningkatan harga lahan dan keterbatsan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan memicu terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antarwilayah, termasuk permasalahan kriminalitas dan persoalan sosial lainnya.

Penduduk berdasarkan *sex ratio* di Kabupaten Bengkalis terlihat masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan perbandingan 105 dari 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada semua kecamatan lebih banyak dari penduduk perempuan. Namun, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau, Bandar Laksamana, Rupat dan Bantan, ditemukan rata-rata jumlah penduduk laku-laki lebih dari banyak dari rata-rata Kabupaten Bengkalis. Secara rinci perbandingkan penduduk laku-laki dan perempuan menurun kecamatan dapat dilihat pada Gambat II-7 berikut.

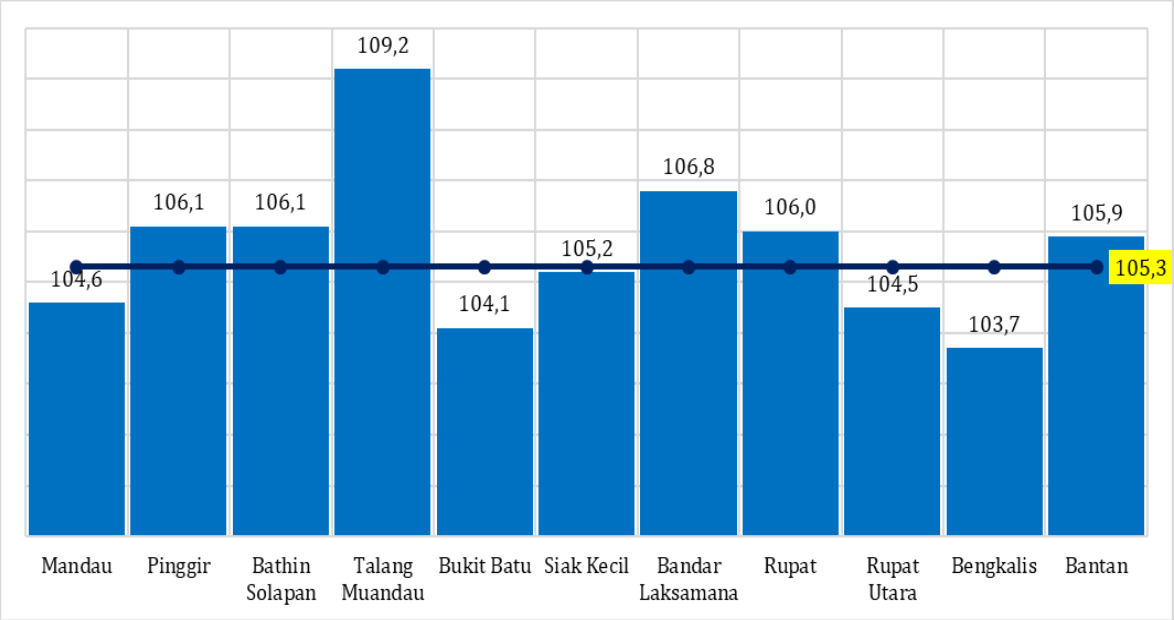

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Gambar II-8 *Sex Ratio* Kabupaten Bengkalis tahun 2020

b) Pertumbuhan Penduduk

Pertambahan penduduk setiap tahun di Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2016 pertambahan penduduk sebesar 1,63% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,80% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,1% per tahun. Letak wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,10% per tahun, lihat Gambar II-8.

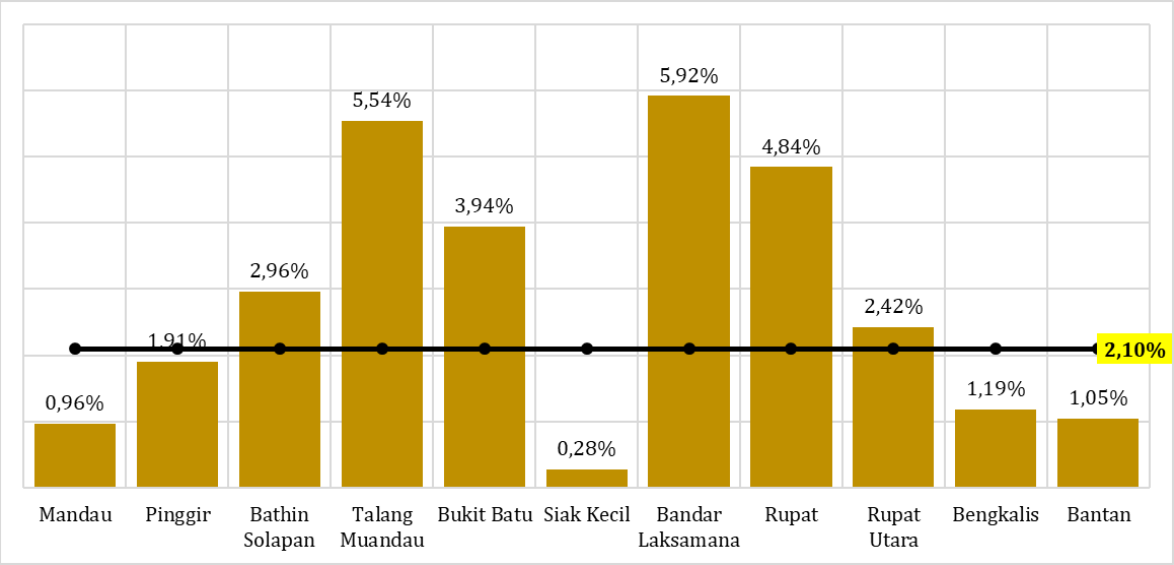

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-9 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pada beberapa kecamatan, dikarenakan tingginya migrasi dari luar Kabupaten yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi masuk perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan terjadi pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, mendorong degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak diantisipa dengan program penanganan yang tepat dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

c) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam kategori piramda penduduk expansive. Dimana penduduk usia muda berada pada jumlah paling banyak, sedangkan penduduk tua jumlahnya sangat sedikit. Piramida penduduk ini juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kelahiran lebih tinggi dibanding tingkat kematian. Penduduk Kabupaten Bengkalis banyak berada pada usia produktif (15-64) yaitu berjumlah 375.974 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 166.372 jiwa dan penduduk pada usia tidak produktif (>64 tahun) berjumlah 22.343 jiwa.

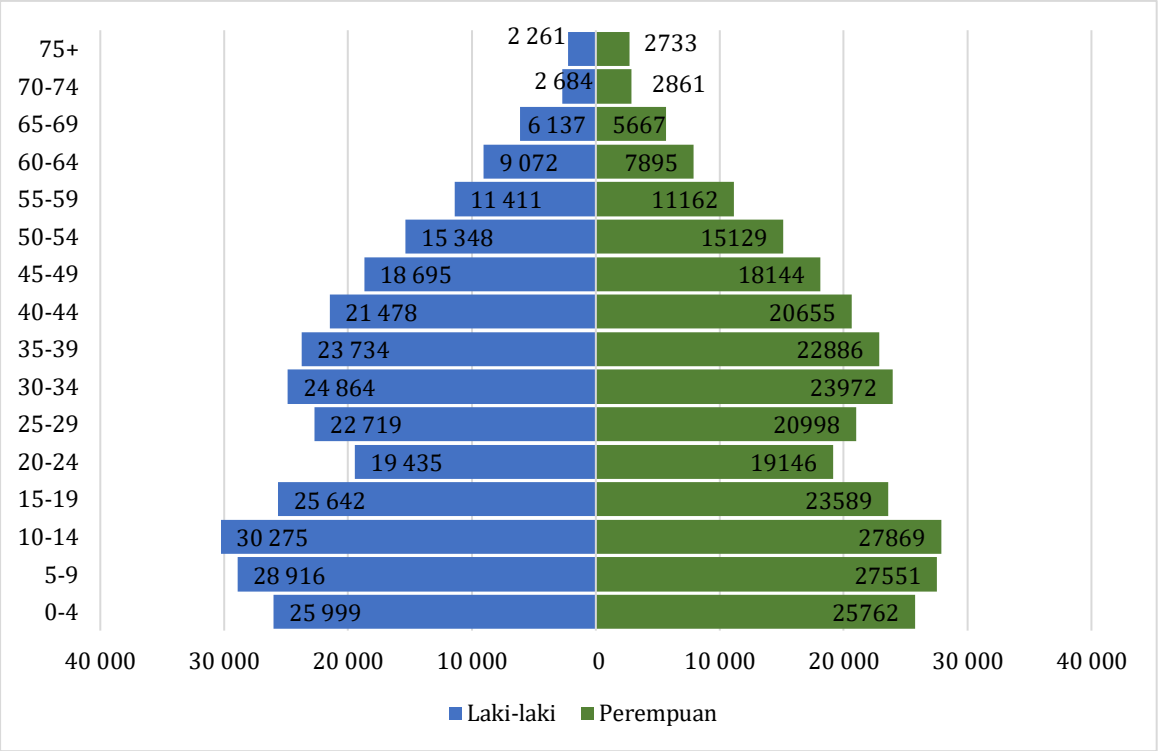

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-10 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bengkalis 2020

d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bengkalis, 2019. Dalam hal ini tahun 2019 menggunakan komposisi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan pekerjaan yang dilakukan seminggu lalu.

Tabel II-5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	23.763	15.901	39.664
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	25.169	8.961	34.130
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.643	834	4.477
Buruh/Karyawan/Pegawai	74.948	32.141	107.089
Pekerja bebas	17.132	3.919	21.051
Pekerja keluarga/tak dibayar	7.667	24.727	32.394
Jumlah	**152.322**	**86.483**	**238.805**

Sumber: BPS Bengkalis Dalam Angka 2021

Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas yang berkerja semingu lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2019. Untuk tenaga kerja

yang tidak dibayar atau pekerja keluarga dinominasi oleh perempuan dengan menduduki 70% lebih dari total 25,058 orang. Untuk tenaga kerja laki laki, yang berumur 15 tahun keatas mendominasi status pekerjaan utama, baik berusaha sendiri, buruh bebas dan buruh bayar. Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang berkerja dalam seminggu terakhir berjumlah 232.055 orang. Tidak merata status pekerjaan utama terhadap gender perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat.

e) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Pertambahan penduduk yang tinggi, yang bersumber dari tingkat kelahiran dan migrasi masuk ke daerah menjadi pendorong pada penyediaan *(supply)* tenaga kerja di daerah. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan dampak negatif bari pembangunan, yaitu munculnya pengangguran dan setengah pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran di Provisi Riau selama periode 2017-2020. Gambar II-9 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis 2016-2020 memiliki kecendrungan meningkat. Kabupaten Bengkalis pernah tercatat dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tingkat pengangguran dapat ditekan hingga pada level 9,62% dan terus menurun hingga 9,31% pada tahun 2020.

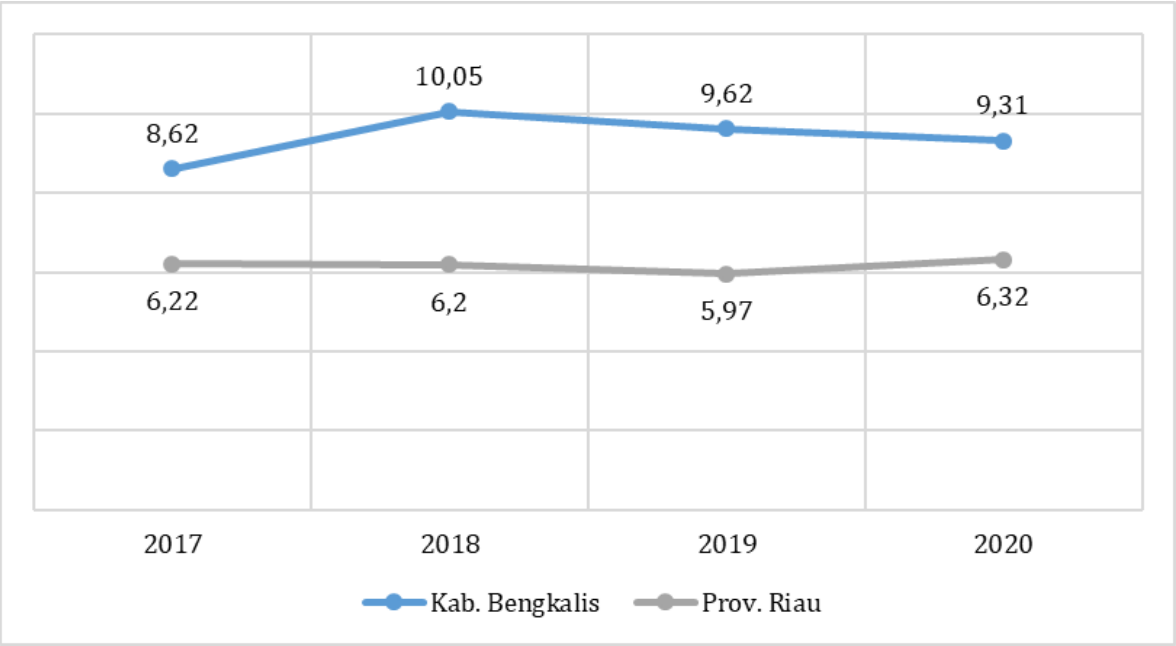

Sumber: BPS Provinsi Riau 2021

Gambar II-11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2016-2020

1.1.8 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah khususnya wilayah strategis di Kabupaten Bengkalis berpedoman kepada kajian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 - 2030.

1) Pengembangan wilayah strategis Duri

Kawasan strategis Duri berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, khususnya untuk instansi yang melayani kegiatan perkotaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan kawasan pertambangan minyak bumi. Dimana pengembangan kawasan strategis ini perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perkotaan Bengkalis, Buruk Bakul dan Sei Pakning dalam satu koridor pengembangan kegiatan ekonomi.

2) Pengembangan wilayah strategis Sei Pakning-Buruk Bakul dan Bengkalis

Kawasan strategis ini ditetapkan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kegiatan ekonomi yang potensial adalah kegiatan sentra perniagaan Asean (perdagangan dan jasa), kawasan permukiman perkotaan, pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat budaya melayu, kawasan Industri dan kawasan pariwisata yang didukung oleh pelayanan pelabuhan yang memadai.

3) Pengembangan wilayah strategis Tanjung Medang (Pulau Rupat)

Pengembangan kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (Pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri. Namun, upaya pengembangan kawasan strategis ini perlu memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengamanan dan pelestarian kawasan hutan bakau (mangrove).

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, indeks gini dan kemiskinan.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi pada setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Secara total PDRB berdasarkan harga konstant tahun 2010, nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan sebesar 8,34% selama periode 2016-2020. Sedangkan berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Bengkalis berdasarkan harga berlaku penurunan lebih besar mencapai 12,34% selama periode 2016-2020.

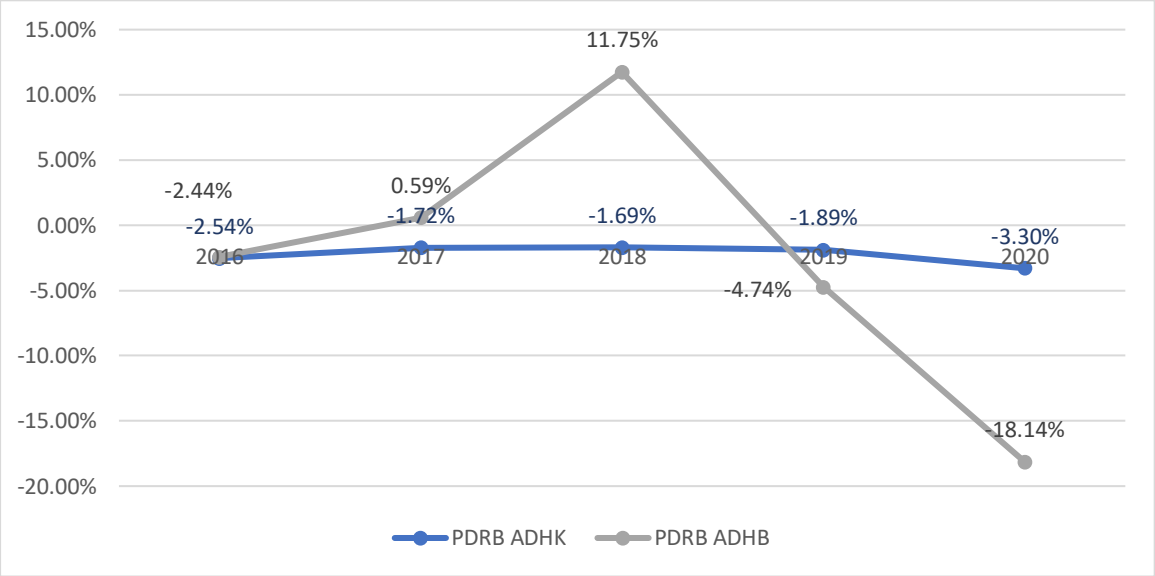

Sumber Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis pada PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 terlihat mengalami fluktuasi yang sangat besar. Laju pertumbuhan Kabupaten Bengkalis berdasarkan harga konstan selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan negatif, atau mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan karena perkembangan nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2016-2020, sehingga mempengaruhi akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5 – 6% pertahun. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2016-2019, khusus tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ada beberapa sektor yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Sektor yang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 selain sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Lainnya . Penurunan nilai output beberapa sektor perekonomian tersebut pada tahun 2020 disebabkan karena pembatasan kegiatan pada masa pandemi, seperti pengalihan biaya pembangunan beberapa infrastruktur untuk penanganan Covid-19 telah menyebabkan banyak kegiatan pembangunan di daerah ditunda. Pengurangan jam operasional pemerintahan pada masa pandemi berdampak pada menurunnya nilai output sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Pembatasan

kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, larangan bepergian dan juga pembatasan jam operasional rumah makan, toko-toko, hotel dan kegiatan usaha lainnya pada masa pandemi ditenggarai menyebabkan menurunnya nilai output sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Jasa Perusahaan dan sektor Jasa Lainnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan dasar harga berlaku selama periode 2016-2020, mengalami pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pada tahun 2016, 2019 dan 2020, dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami pertumbuhan positif atau mengalami ekspansi. Pertumbuhan ekonomi negatif pada PDRB harga konstan tahun 2010 mengindikasikan bahwa nilai produksi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010. Kemudian, pertumbuhan ekonomi positif pada harga berlaku disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pada sektor yang mengalami pertumbuhan positif.

2) Perkembangan PDRB

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, begitu pula dengan perkembangan nilai PDRB pada harga konstant. Kecenderungan penurunan nilai PDRB harga berlaku dan harga konstant ditenggarai karena terjadinya penurunan produksi minyak dan jatuh nya harga minyak mentah dunia. Selain itu pandemi COVID-19 semakin memperparah produksi output daerah Kabupaten Bengkalis yang terus menurun.

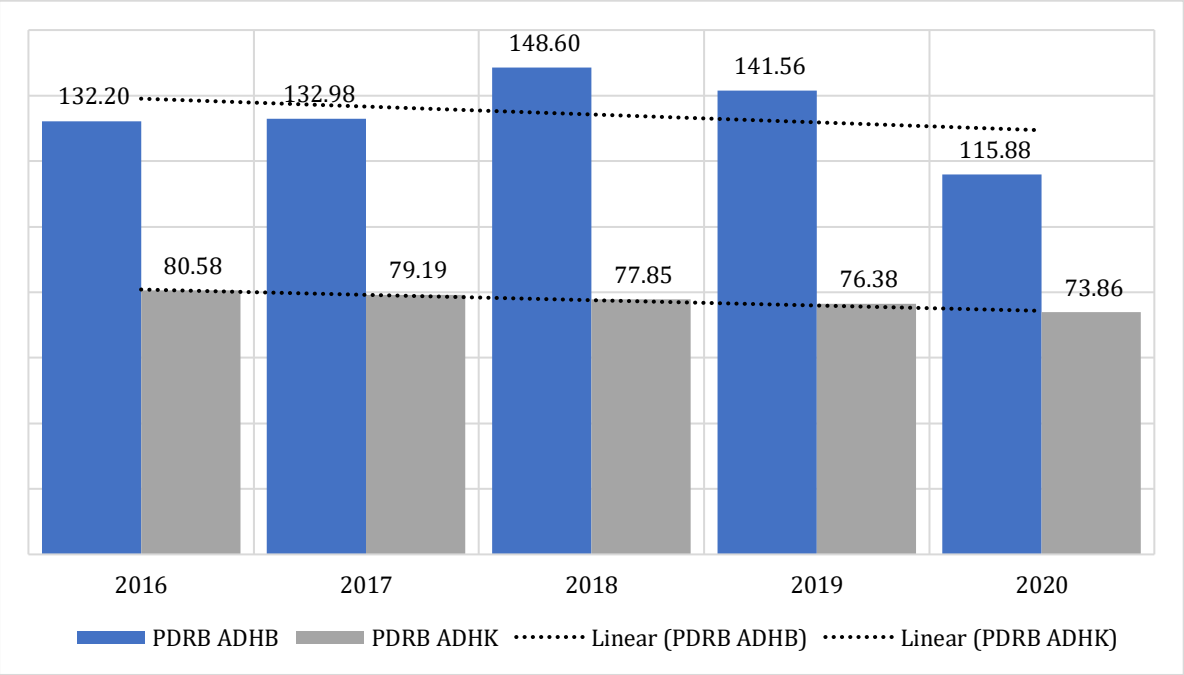

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-13 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp. 132,20 Triliun dan 2017 sedikit meningkat menjadi Rp. 132,98 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 148,60 Triliun Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp. 141,56 Triliun. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku kembali menurun secara signifikan Sedangkan perkembangan nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp. 80,58 Triliun dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 73,86 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara total, nilai produksi dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 mengalami penurunan. Penurunan dominan terjadi pada penurunan produksi minyak pada sektor pertambangan dengan kontribusi mencapai 60% terhadap PDRB atas dasar harga konstant.

3) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga berlaku pada sisi produksi atau lapangan usaha dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar 96,49%. Sedangkan sisanya sebesar 3,51% disumbangkan dari 12 sektor lainnya. Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 69,53% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 55,93%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 11,70% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 16,99% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 8,47% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,65%pada tahun 2020. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,24% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 7,30% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan gabungan beberapa sektor selain empat sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,48% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,91% pada tahun 2020.

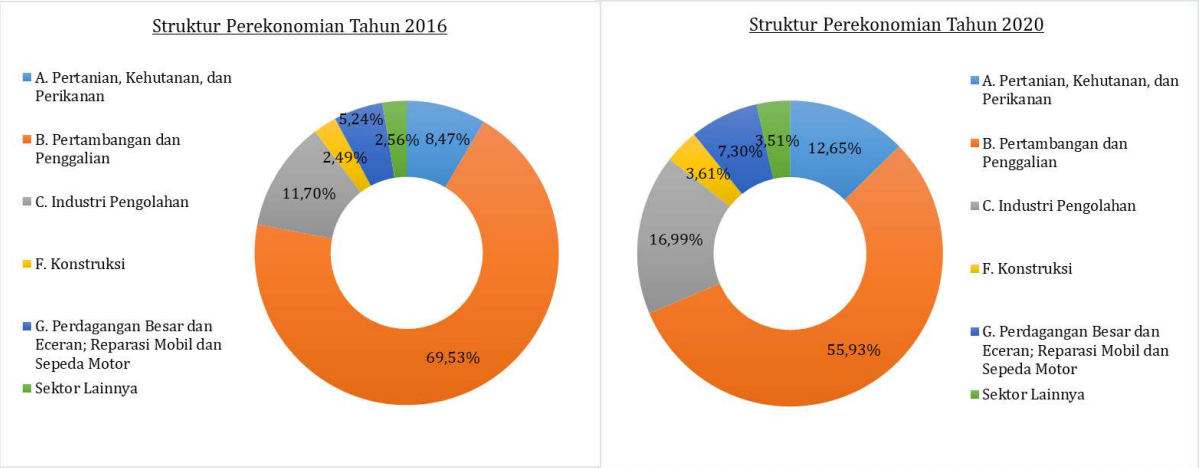

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-14 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020

Struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis pada PDRB atas dasar harga konstant juga dibangun oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi. Kelima sektor ini secara akumulasi berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar 96,42%. Sedangkan sisanya sebesar 3,58% disumbangkan dari 12 sektor lainnya.

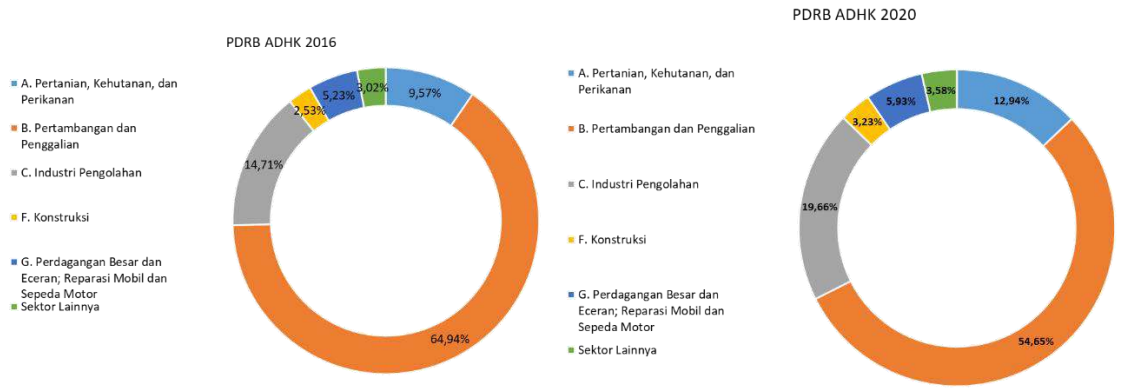

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis

Gambar II-15 Struktur Perekonomian (PDRB) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dan 2020

Pada PDRB atas dasar harga konstat pada tahun 2016, sektor pertambangan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 64,94%dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 54,65%. Kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 14,71%pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 19,66% pada tahun 2020. Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 9,57% pada tahun 2016 dan sedikit meningkatkan menjadi 12,94% pada tahun 2020. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 5,23% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 5,93% pada tahun 2020. Sedangkan sektor lainnya diluar lima sektor dominan tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,02% pada tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 3,58% pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020, terlihat bahwa elemen-elemen penyusun perekonomian adalah sektor yang rentan terhadap dinamika pasar. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan ekonomi harus disusun untuk berfungsi untuk mengatur rumah tangga daerah dalam menciptakan sistem perekonomian yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal diluar sektor pertambangan. Upaya integrasi ekonomi sektor hulu (input) dan sektor hilir (output) yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pertimbangan dinamika pasar domestik dan pasar internasional.

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-16 Struktur Perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Produksi (Lapangan Usaha)

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bengkalis berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan luar negeri melalui aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa merupakan pembentuk dominan, yaitu 59,73% berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 dan sebesar 57,59% berdasarkan PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010. Kontribusi neraca perdagangan dalam pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran sangat terkait erat dengan aktivitas perdagangan pada sektor pertambanan dan industri besar di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain perekonomian Bengkalis adalah perekonomian terbuka dan sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan luar negeri (perekonomian terbuka) yang mengandalkan produk minyak dan gas.

Selain aktivitas perdagangan, aktivitas pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto (investasi). Sedangkan konsumsi pemerintah *(goverment expenditure)* memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Bengkalis saat ini sangat tergantung dengan aktivitas perdagangan pada sektor minyak dan kaitanya dengan pembentukan modal pada perusahaan minyak dan gas di Riau. Peredaran jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dari sumber rumah tangga menjadi penting untuk menjaga dinamika perekonomian di masa mentang.

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-17 Struktur Perekonomian (PDRB) ADHB dan ADHK (2010) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 pada Sisi Pengeluaran

4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

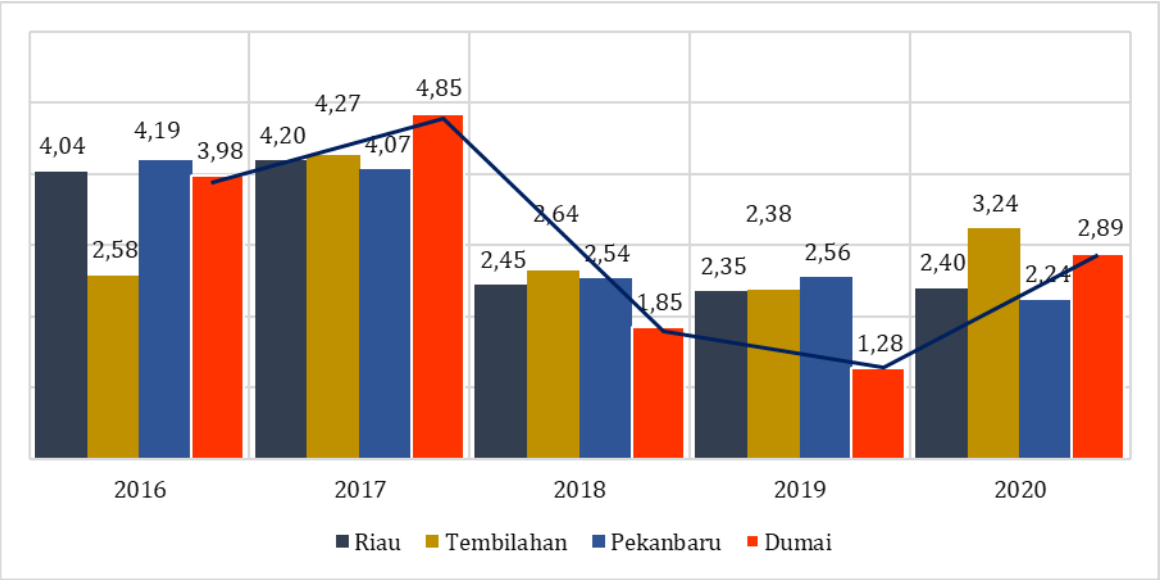

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-18 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2016-2020

Data inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan karena secara geografis Kota Dumai berdekatan dengan Kabupaten Bengkalis. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten

Bengkalis juga banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Sedikit banyak pergerakan harga di Kota Pekanbaru akan berpengaruh langsung terhadap harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis. Inflasi tahun 2020 sebesar 2,89%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 berada pada 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di daerah. Meski begitu, kenaikan inflasi yang terjadi masih dalam batas wajar dan termasuk dalam kategori rendah. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan.

Menilik angka inflasi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 2,89% dan Kota Pekanbaru sebesar 2,24%, maka dapat diperkirakan bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bengkalis secara umum berkisar di angka 2% hingga 3%.

5) PDRB Perkapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bengkalis merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Bengkalis selama satu tahun. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di negara atau daerah tersebut.

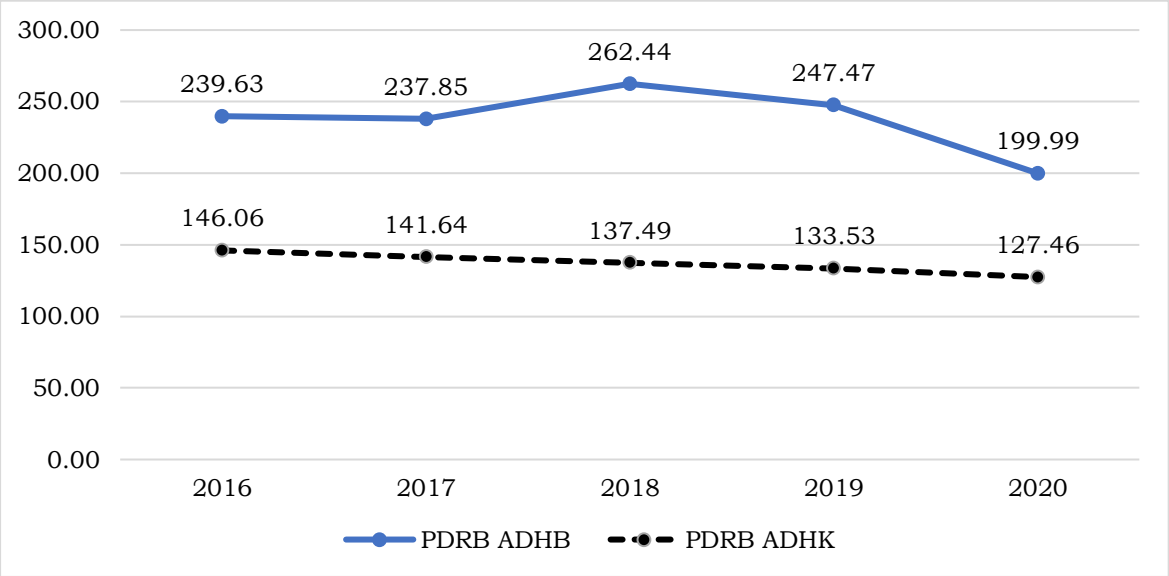

Sumber: PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Gambar II-19 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkalis, pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (2010). Penurunan PDRB per Kapita Kabupaten Bengkalis ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai output total Kabupaten Bengkalis dan pertambahan jumlah

penduduk. Penurunan nilai output total menggambarkan kinerja perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum. Beberapa penyebab utamanya ditenggarai adalah melemahnya produksi minyak Bengkalis dan harga minyak dunia yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir berimbas pada menurunnya pendapatan daerah, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa secara umum. Penyebab utama lainya disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat sementara pertumbuhan PDRB cenderung menurun di Kabupaten Bengkalis.

6) Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

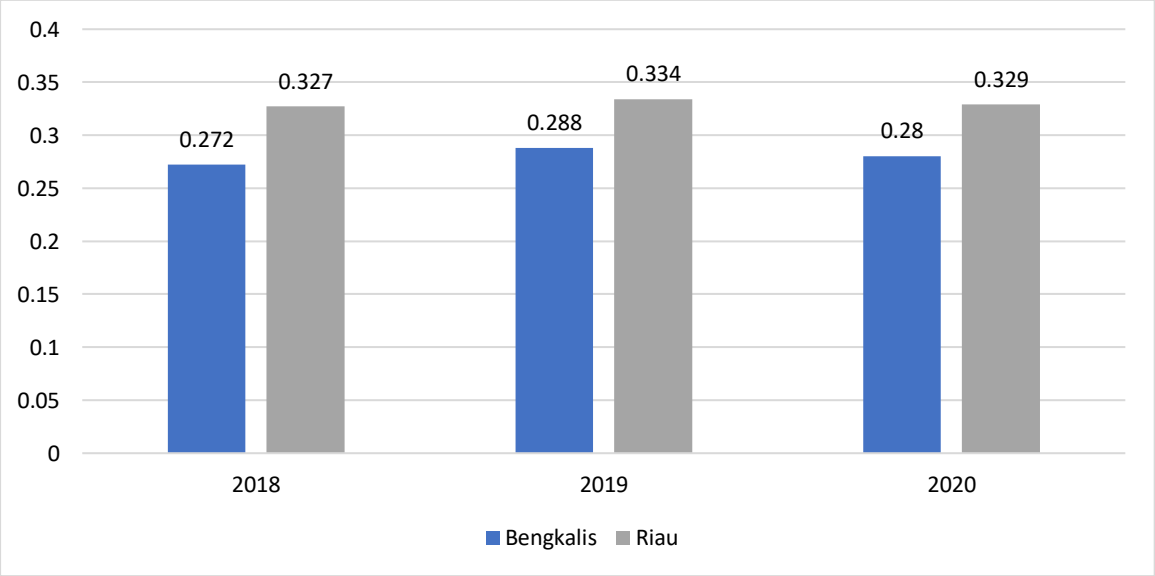

Sumber: Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Bengkalis 2020

Gambar II-20 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa gini ratio Kabupaten Bengkalis jauh lebih rendah dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih merata dibandingkan ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2020 gini rasio Kabupaten Bengkalis mencapai 0,280, angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, sementara gini rasio Provinsi Riau termasuk dalam kategori sedang. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa hasil-hasil pembangunan memiliki dampak positif pada pemerataan pendapatan penduduk, sehingga aliran uang dari produksi dapat ditransfer sampai kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pembangunan berupa pemberian *transfer of payment* dalam bentuk subsidi dan bantual sosial

(social security) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada kelompok rentan dan miskin dapat menikmati. Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi akan menyebabkan terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk yang dapat memicu permasalahan sosial. Oleh sebab itu, permasalahan ketimpangan pendapatan harus dikontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

7) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah tertentu. Untuk memahami posisi Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau dapat dilihat dari perbandingan perkembangan nilai Indeks Williamson antar kabupaten di Provinsi Riau. Pola pembangunan yang tidak merata serta perbedaan karakteristik setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi masalah yang timbul sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota menjadi berbeda-beda. Table berikut menjelaskan perkembangan Indeks Williamson pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015-2019.

Tabel II-6 Ketimpangan Williamson Kabupaten Bengkalis dan Perbandingannya dengan Kabupaten Lain di Provinsi Riau, tahun 2015 – 2019

No.	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	0.039	0.044	0.053	0.060	0.071
2	Indragiri Hulu	0.055	0.039	0.027	0.018	0.011
3	Indragiri Hilir	0.447	0.345	0.271	0.217	0.169
4	Pelalawan	0.016	0.007	0.004	0.001	0.000
5	Siak	2.058	1.846	1.665	1.537	1.418
6	Kampar	0.270	0.255	0.248	0.258	0.234
7	Rokan Hulu	1.677	1.667	1.661	1.678	1.695
8	**Bengkalis**	**7.991**	**6.879**	**5.967**	**5.236**	**4.478**
9	Rokan Hilir	0.003	0.005	0.010	0.030	0.054
10	Kepulauan Meranti	0.036	0.024	0.015	0.006	0.003
11	Pekanbaru	0.539	0.415	0.307	0.222	0.147
12	Dumai	0.001	0.005	0.012	0.030	0.055

Sumber: BPS Riau, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Indek Williamson, ditemukan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan pembangunan yang sangat senjang terhadap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau selama periode 2015-2019. Perbedaan potensi antar kabupaten/kota di Riau dapat menjadi pemicu terjadi kesenjangan antarwilayah. Potensi sumberdaya alam minyak yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Nilai produksi minyak yang menyebabkan nilai perekonomian Kabupaten Bengkalis berada di atas kabupaten lainnya. Proporsi nilai PDRB atas dasar harga konstant (2010) Kabupaten Bengkalis sebesar 15,41%

terhadap total PDRB atas dasar harga konstant (2010) Provinsi Riau. Kontribusi terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sedangkan proporsi jumlah penduduk sebesar 8,22%, masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru.

8) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk msikinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis cenderung menurun baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk.

Tabel II-7 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2016	455.021	37,49	6,82	1,41	0,43
2017	496.657	38,19	6,85	0,95	0,24
2018	508.633	35,11	6,22	0,87	0,18
2019	533.123	35,83	6,27	0,50	0,07
2020	581.416	36,96	6,40	0,72	0.14

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021, BPS (2021)

Jika diperhatikan lebih jauh, bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Bengkalis adalah efek inflasi, dimana garis kemiskinan terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa beban hidup penduduk miskinan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Pengendalian inflasi dan kondisi ekonomi makro menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount ratio* atau jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk, memberikan gambaran tingkat kemiskinan, namun tidak menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. *Headcount index* memenuhi aksioma fokus, namun informasi kemiskinan yang diberikan masih sangat terbatas karena tidak bisamemberikan informasi 'seberapa miskin' orang miskin tersebut atau pemenuhan aksioma kesamaan, serta tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara penduduk miskin atau disebut dengan aksioma transfer.

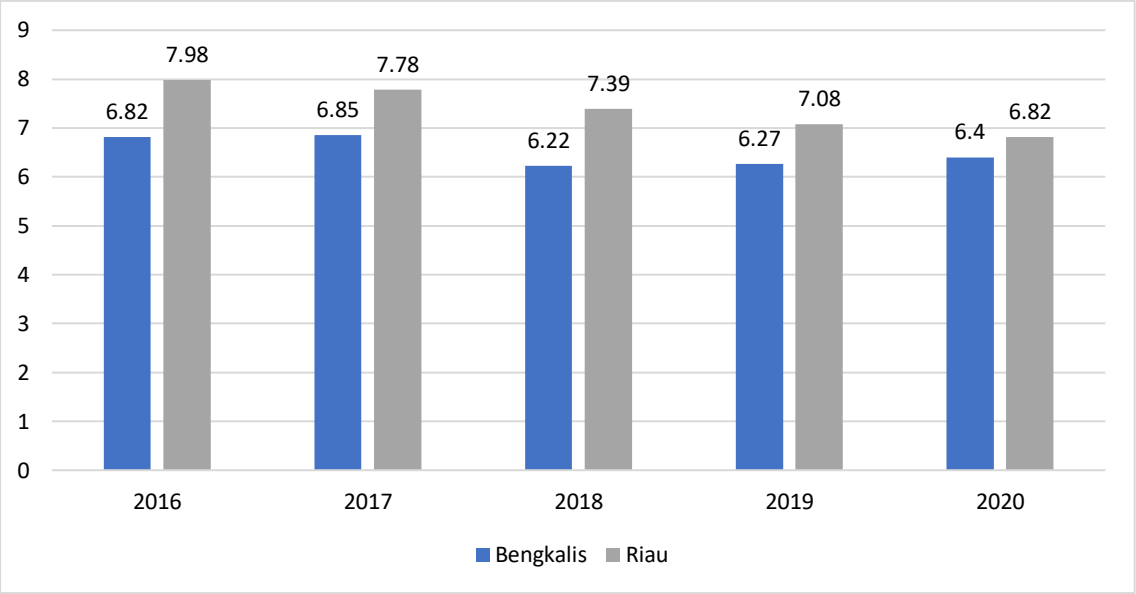

Gambar II-21 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 – 2020

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan pada tahun 2016-2018, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan meskipun masih berada di bawah persentase kemiskinan provinsi. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan Kabupaten Bengkalis mencapai 6,4%, lebih rendah dibandingkan persentase kemiskinan Provinsi Riau yang berada pada angka 6,82%.

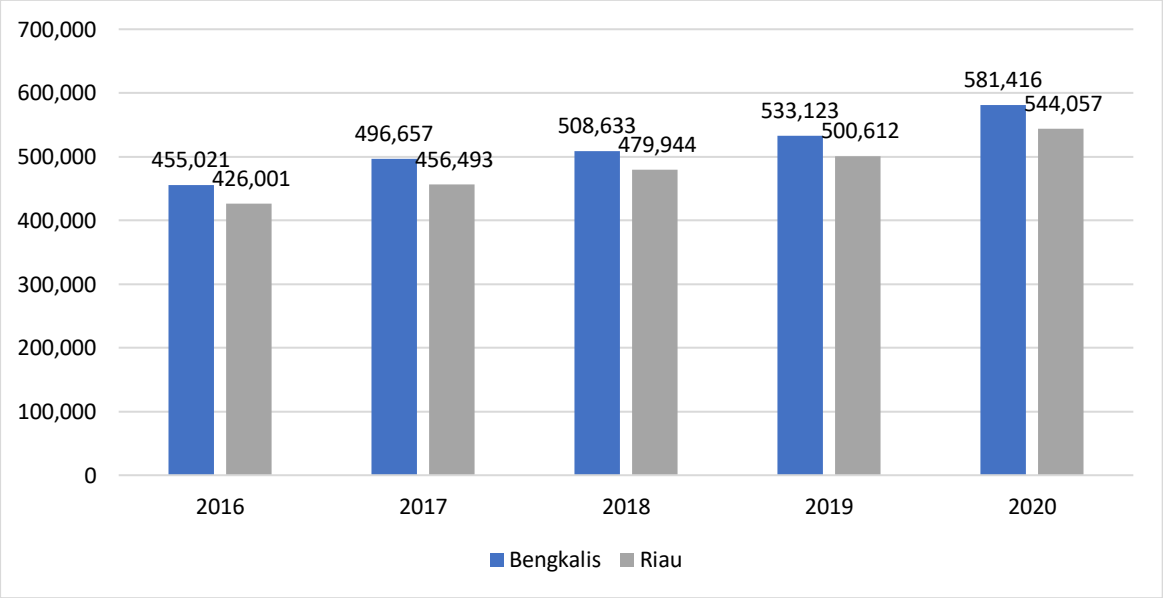

Gambar II-22 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau tahun 2016 – 2020

Secara umum pada periode 2016-2020 garis kemiskinan Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan dan selalu berada di atas garis kemiskinan Provinsi Riau. Kenaikan

persentase penduduk miskin pada tahun 2020 menjadi 6,4% disinyalir sebagai akibat naiknya garis kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sebesar 9,06% pada masa pandemi tahun 2020, dari sebelumnya garis kemiskinan sebesar Rp 533.123 tahun 2019 menjadi Rp 581.416 pada tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan ini membuat sebagian masyarakat masuk ke dalam kategori miskin pada masa pandemi tahun 2020.

Indek kedalaman kemiskinan atau disebutjuga dengan *poverty gap* menggambarkan jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin. Dengan demikian *poverty gap* disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Perkembangan *poverty gap* di Kabupaten Bengkalis semakin membaik, yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan mendekati angka nol. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 semakin tinggi dan berkembang melewati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin semakin merata. Perkembangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis selam periode 2016-2020, menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis semakin merata. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahan Kemiskinan yang mendekati nol dari tahun 2016 dari 0,43 menjadi 0,14 pada tahun 2020.

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan

kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

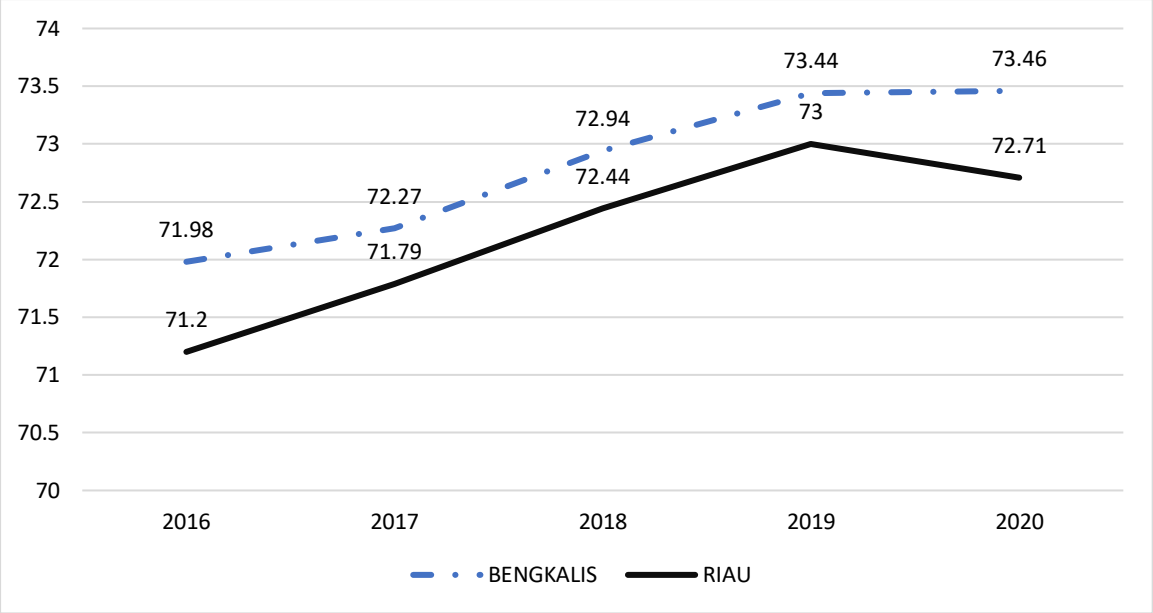

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-23 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020

Pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perkembangan yang baik dan terus meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada tahun 2016 nilai IPM Kebupaten Bengkalis sebesar 71,98 dan terus mengalami peningkatan hingga 73,46 pada tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Bengkalis telah termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian IPM Kabupaten Bengkalis mengalami perubahah yang cukup baik, yaitu sebesar 1,48 selama lima tahun terakhir. Perkembangan IPM medi kabupaten Bengkalis yang cukup baik ini memperlihatkan bahwa hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan tarah pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas hidup penduduk Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami perlambatan akibat Pendemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya.

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

a) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersbeut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan.

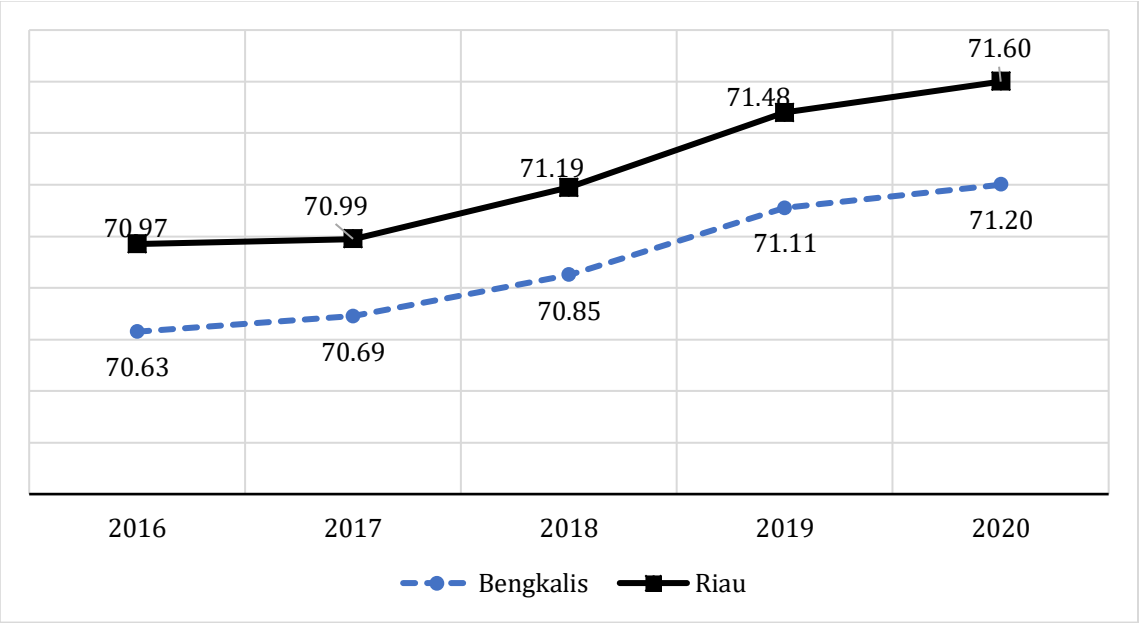

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-24 Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan 0,57 selama periode 2016-2020, yaitu dari angka harapan hidup 70,63 tahun pada tahun 2016 menjadi 71,20 tahun pada tahun 2020. Secara umum angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bengkalis masih lebih rendah dari rata-rata angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan penduduk secara umum masih lebih baik di Provinsi Riau dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, termasuk respon cepat terhadap keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan jangkauan tenaga kesehatan. Selain faktor-faktor tersebut, hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap perbaikan angka harapan hidup penduduk pada suatu daerah adalah gaya hidup sehat penduduk. Secara umum, keberhasilan pembangunan kesehatan, termasuk pembinaan gaya hidup sehat bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Provinsi Riau masih lebih baik jika dibandingkan dengan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020.

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah *(expected years of schooling)* dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama skeolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Secara umum, angka harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis berada di posisi keempat di antara kabupaten/kota lainnya setelah Pekanbaru, Dumai dan Kuantan Singingi.

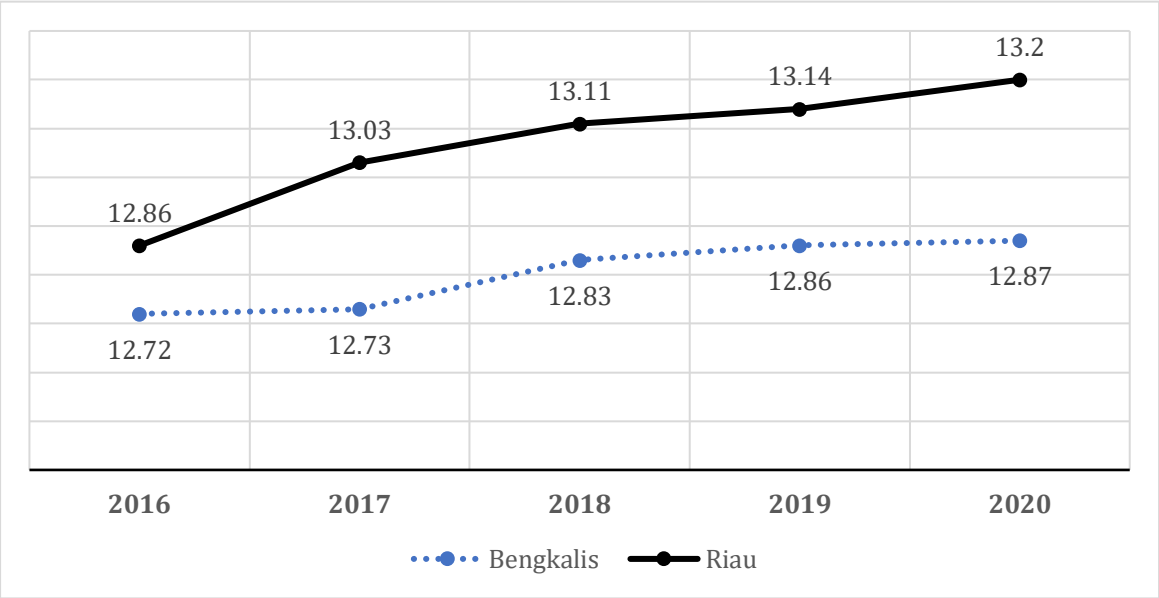

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-25 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 12,72 tahun dan sedikit meningkat menjadi 13,87 tahun pada tahun 2020. Sedangkan angka harapan lama sekolah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah 12,86 tahun dan meningkat menjadi 13,20tahun pada tahun 2019. Rata-rata harapan lama sekolah penduduk baru pada tingkat menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan tepatnya masuk jenjang pendidikan perguruang tinggi semester satu. Sedangkan harapan lama sekolah penduduk di Riau, telah memasuki jenjang perguruan tinggi, tetapnya pada semester tiga.

Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,13 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis.

Kebijakan pendidikan terkait pemberian kemudahan akses masuk perguruan tinggi dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Salah satu bentuk kebijakan yang tersebut adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk Bengkalis yang ingin melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah *(mean years of schooling)* merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019, masih diperlukan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk sampai 5,59 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata-rata lama sekolah bagi Kabupaten Bengkalis.

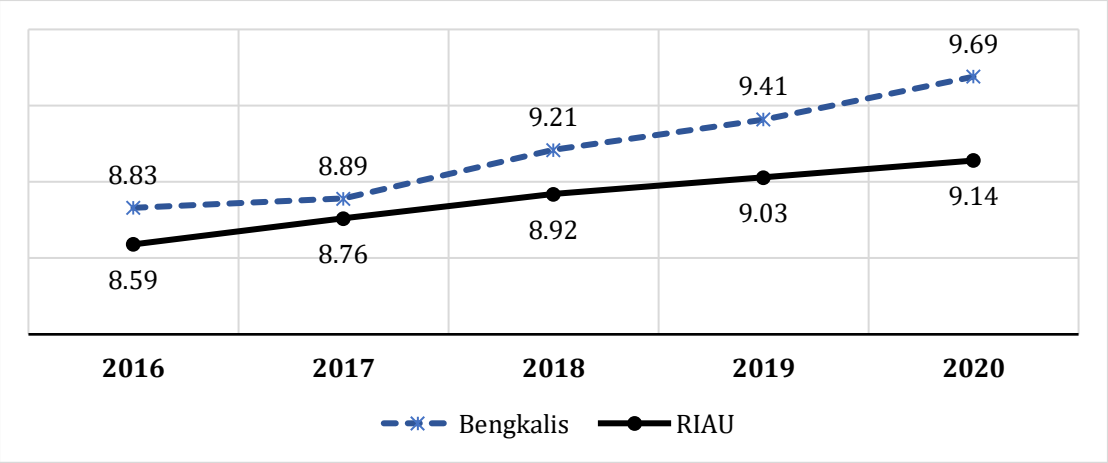

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis mengalami perbaikan 0,59 tahun selama periode 2015-2019. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 adalah 8,82 tahun atau rata-rata kelas tiga SMP dan meningkat menjadi 9,41 tahun pada tahun 2019 atau rata-rata kelas satu SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bengkalis sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Riau. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau berada pada tingkat 8,49 tahun (kelas 3 SMP) dan meningkat menjadi 9,03 tahun pada tahun 2019 (kelas 1 SMA). Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan dalam

rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Riau.

d) Pengeluaran Per Kapita Riil

Pengeluaran perkapita riil dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per kapita riil merupakan besaran biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makan dan non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan. Pengeluaran per kapita riil akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk dari dimensi ekonomi dalam perhitungan IPM. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran riil per kapita penduduk Riau selama periode 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kesejahteraan dan tingkat hidup layak yang lebih baik jika dibandingkan dengan penduduk Riau.

Namun demikian, untuk mencapai batas maksimum pengeluaran per kapita riil di Kabupaten Bengkalis masih perlu ditingkatkan hingga Rp. 14.8 juta per tahun pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis meningkat sebesar Rp. 788 ribu atau sekitar Rp. 157,600 per tahun. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 11,325 ribu jumlah ini meningkat hingga menjadi Rp. 11.753 ribu pada tahun 2019, namun mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2020 menjadi 11,331 diakibatkan pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian global.

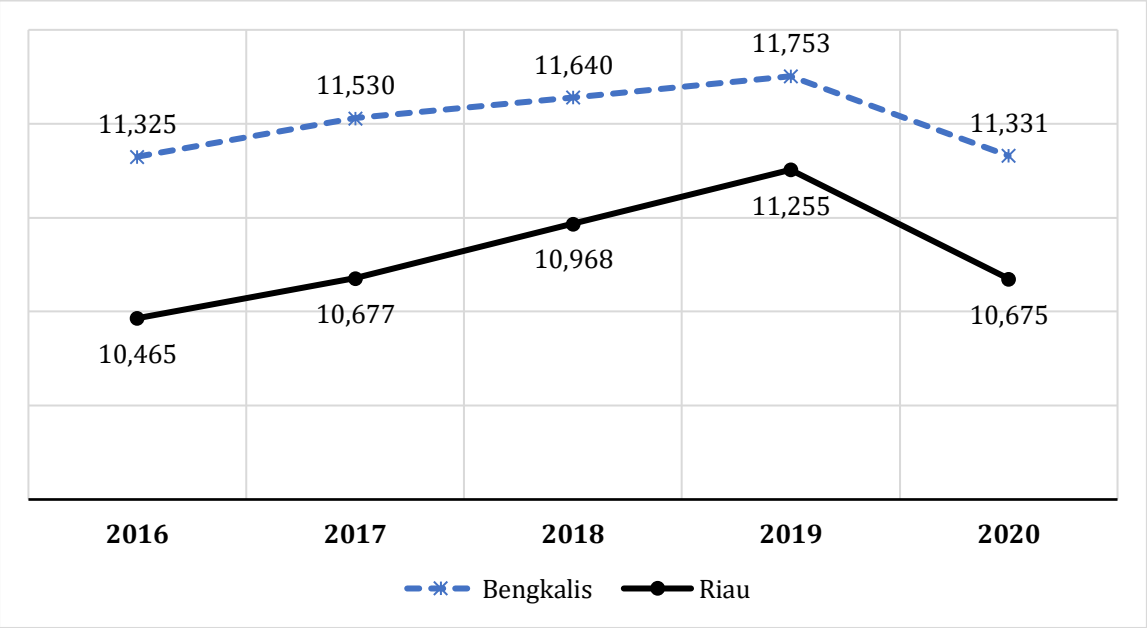

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Gambar II-27 Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. 000/Tahun) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020

Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

2) Rasio Penduduk Bekerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dengan merujuk pada suatu waktu dan periode waktu tertentu. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

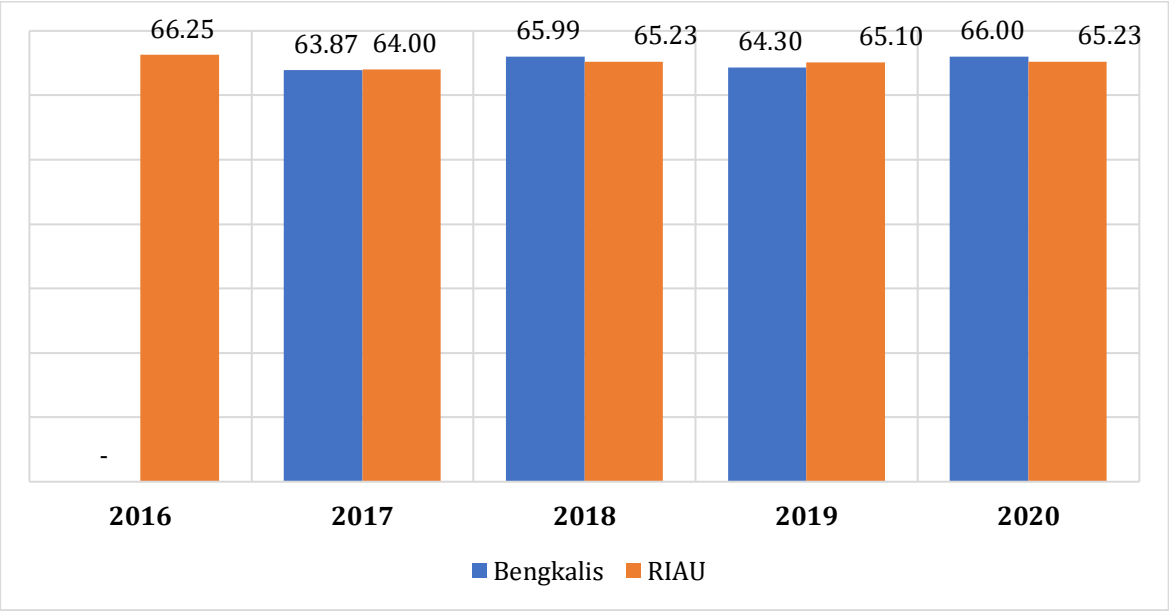

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka 2021

Gambar II-28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%)

TPAK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65%, walaupun sedikit berfluktuasi selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja di Provinsi Riau. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Bengkalis 63,87% dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 66,00%, atau terjadi peningkatan sekitar 2,13%. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada tahun 2020 berada pada tingkat 65,23%, sedikit meningkat dibanding tahun 2019 dengan

TPAK sebesar 65,10%. Adanya peningkatan TPAK Kabupaten Bengkalis menunjukkan adanya perbaikan lapangan kerja yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi akibat angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau malas bekerja. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkalis pada sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat seberapa besar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Bengkalis seperti yang terlihat pada gambar berikut.

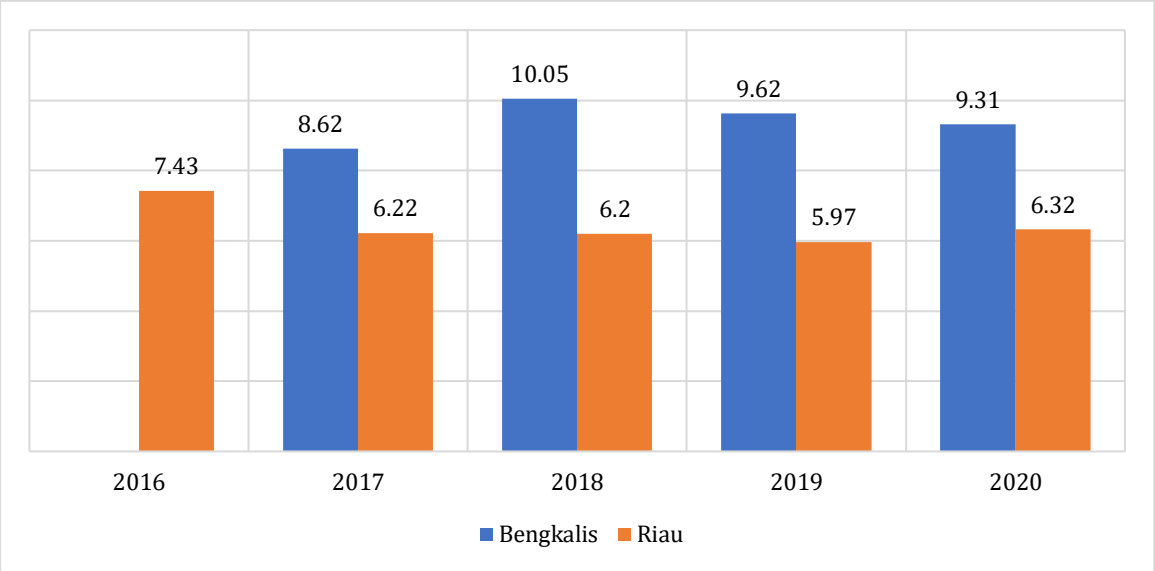

Sumber: BPS Provinsi Riau dan BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 (%)

Berdasarkan grafik pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka ditahun 2017 sebesar 8,62%, kemudian mengalami peningkatan mencapai 10,05% pada tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 9,31%. Tingkat pengguran terbuka di Kabupaten Bengkalis lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada pada tahun 2016, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau adalah 7,43% dan menurun menjadi 6,32% pada tahun 2020. Sedikitnya pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan menjadi salah satu penyebab sempitnya penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bangkalis.

c) Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demmand side* (pengangguran).

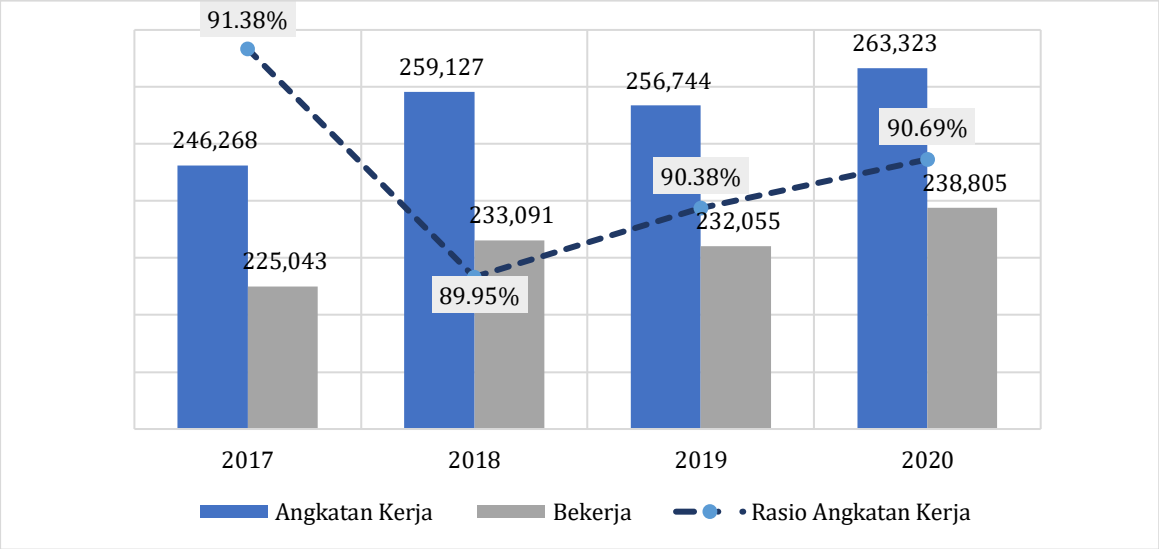

Sumber: Bengkalis Dalam Angka 2021

Gambar II-30 Perkembangan Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

Berdasarkan pada Gambar II-24, terlihat bahwa tren rasio kesempatan kerja menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 1,09 pesen per tahun selama periode 2017-2020, yaitu dari 91,38% pada tahun 2017 menurun menjadi 90,69% pada tahun 2020. Rendahnya peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga dalam setiap sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Kesenjangan antara penawaran tenaga kerja *(labour supply)* dan permintaan tenaga kerjaa *(labour demand)* menjadi salah satu penyebab rendahnya daya serap terhadap angkatan kerja pada dunia kerja. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja perlu menjadi perhatian untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata.

Tabel II-8 Angka Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis 2015-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Buruk	6	4	6	8	35
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,010	0,005	0,007	0,014	0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkalis cukup rendah meski menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2017 hingga 2020. Dimana pada tahun 2018 jumlah bayi menderita gizi buruk sebanyak 6 orang atau sebesar 0.007% dari total semua balita di Kabupaten Bengkalis. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 8 balita menderita gizi buruk atau sebesar 0.014% dari total keseluruhan balita. Terakhir pada tahun 2020 terjadi peningkatan balita gizi buruk menjadi 35 balita sehingga menjadikan prevalensi gizi buruk menjadi 0,07.

Tabel II-9. Persentase Balita Gizi Buruk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Balita Gizi Buruk
1	Bengkalis	0	7136	0
2	Bukit Batu	0	1628	0
3	Bantan	0	3429	0
4	Mandau	0	9787	0
5	Rupat	0	3523	0
6	Rupat Utara	24	1232	1.9
7	Siak Kecil	1	2297	0.04
8	Pinggir	1	6171	0.02
9	Bandar Laksamana	0	1390	0
10	Talang Muandau	5	1750	0.28
11	Bathin Solapan	4	8371	0.04
	Jumlah	35	46714	0.07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis, 2021

Dari Tabel II-10 terlihat bahwa kasus balita gizi buruk terbanyak berada di Kecamatan Rupat Utara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi anak ditenggarai menjadi penyebab utama tingginya kasus gizi buruk di Kecamatan Rupat Utara. Daerah Rupat Utara merupakan daerah terluar dengan aksesibilitas kurang baik, pada daerah ini masih banyak masyarakat yang terisolir dan jauh dari jangkauan tenaga medis, sehingga bisa dipastikan sosialisasi dan pemahaman tentang kebutuhan gizi anak masih kurang baik di daerah ini.

1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan

menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidkan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-10 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis 2020

No	Kecamatan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Belum dilestarikan
1	Bengkalis	4	6	2
2	Bukit Batu	5	6	1
3	Bantan	-	1	1
4	Mandau	-	-	-
5	Rupat	-	-	-
6	Rupat Utara	1	1	-
7	Siak Kecil	-	-	-
8	Pinggir	2	-	-
9	Bandar Laksamana	-	-	-
10	Talang Muandau	-	-	-
11	Bathin Solapan	-	-	-
	Jumlah	12	14	4

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 12 dari total 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini sudah mencakup 86% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-11 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	40	40	40	40	40
2	Jumlah seluruh cabang olahraga terdaftar	40	40	40	40	40
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2021

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terhakhir sudah sangat baik. Sebanyak 40 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bengkalis sudah berhasil dibina seluruhnya pada setiap tahun dalam periode 2016-2020. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidian ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. APK SD/MI selama periode 2016-2020 telah sangat baik dengan capaian telah lebih dari 100%.

**Tabel II-12 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten BengkalisTahun 2016 - 2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK SD/MI	100,44	111,29	106,01	108,63	106,72
2.	APK SMP/MTs	96,86	88,18	94,77	95,01	97,41
3.	APK SMA/MA/SMK	70,07	75,17	79,12	77,29	79,38

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Namun untuk tingkat pendidikan SMP masih terdapat anak usia sekolah SMP yang tidak bersekolah. Hal ini terlihat dari APK SMP/MTs masih mencapai 95,01% pada tahun 2019 dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 83,64%. Beberapa alasan APK SMP/MTs belum mencapai 100% adalah ketersediaan jumlah sekolah yang masih kurang

untuk menampung penduduk usia sekolah SMP untuk bersekolah, masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP, angka putus sekolah, penyebaran sekolah SMP/MTs yang tidak merata sehingga sebagian anak kesulitan untuk menjangkau sekolah, alasan ekonomi seperti orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak atau anak harus berkerja membantu orang tua mencari nafkah. Pada beberapa daerah seperti di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, akses menuju sekolah sangat jauh, memakan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Pengorbanan cukup besar yang dibutuhkan oleh beberapa masyarakat di wilayah pedalaman, membuat angka partisipasi sekolah menjadi kurang dari 100%.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang banyak pulau menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan. Penyebaran sarana pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin kurang merata penyebarannya di Kabupaten Bengkalis, sehingga anak usia sekolah yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjutan. Pada jenjang pendidikan SMA sederajat juga belum mencapai APS pada tingkat 100%, yaitu baru mencapai 79,38% pada tahun 2020 . Hal ini mengindikasikan masih terdapat sekitar 20,62% anak usia sekolah SMA yang tidak bersekolah.

Namun demikian, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkat partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, seperti pemberian dukungan peningkatan akses menuju sekolah, kepastian usia sekolah untuk dapat bersekolah dari pemerintah melalui pemberian bantuan pendidikan/beasiswa serta kebijakan daerah yang menyelenggarakan pendidikan hingga 12 tahun.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perhitungan partisipasi murni sejak tahun 2007, tidak hanya menghitung siswa pada sekolah formal, tetapi juga termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Secara umum, angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan selama periode 2016-2020. APM SD/MI pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 nilai APM SD/MI sebesar 98,06, naik sebanyak 0,15% dibanding tahun 2019. Penurunan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI belum mampu mencukupi kebutuhan.

Tabel II-13 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020

No.	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/MI	97,49	98,54	98,33	97,91	98,06
2.	APM SMP/MTs	82,2	82,03	84,35	85,70	86,50
3.	APM SMA/MA/SMK	64,61	63,95	66,46	66,07	66,97

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

APM SMP/MTs terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,8%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMP/MTs belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMP/MTs sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMP/MTs, terutama di wilayah pedalaman. Kemudian, APM SMA/MA/SMK terjadi peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,90%. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan peserta didik pada usia sekolah SMA/MA/SMK belum sepenuhnya tertampung dijenjang SMA/MA/SMK sementara ketersediaan pendidikan non formal belum mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik untuk dapat menikmati pendidikan ditingkat SMA/MA/SMK.

Pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan angka partisipasi murni di Kabupaten Bengkalis. Selain pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan transportasi dan ekonomi juga dapat memperlancar akses penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut untuk 1000 penduduk. Maka dari Tabel II-13 dapat kita lihat bahwa APS untuk SD/MI/Paket A pada tahun 2020 mencapai 99,66. Dengan makna bahwa dari 1000 penduduk usia 7-12 tahun sudah sebanyak 996 orang berpartisipasi pada SD/MI/Paket A yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain, sudah mencapai 99,66%% penduduk usia 7-12 berpartisipasi di sekolah.

**Tabel II-14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS SD/MI/Paket A	103,2	102,2	115,4	98,0	99,66
2.	APS SMP/MTs/Paket B	77,9	99,4	98,0	79,3	94,56

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Bengkalis 2021

Untuk angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sudah mencapai 94,56%. Dengan makna bahwa dari 100% penduduk usia SMP sederajat (13-15 tahun) telah memasuki sekolah pada jenjang SMP Sederajat termasuk pada sekolah non formal sebanyak 94,56%. Pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diperlukan untuk secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

d) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 jumlah Angka Putus Sekolah sebesar 147, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS berjumlah 220. Besarnya angka putus sekolah pada tahun 2018 ini ditenggarai akses terhadap pendidikan yang belum optimal, terutama dalam hal pemberian bantuan pendidikan. Seiring berjalannyanya waktu pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi siswa putus sekolah di Kabupaten Bengkalis. Perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melanjutkan pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menekan angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-15 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020

No.	Kecamatan	Angka Putus Sekolah SD/MI			Angka Putus Sekolah SMP/MTs		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Bengkalis	25	3	0	20	9	0
2	Bantan	1	0	0	10	4	0
3	Bukit Batu	2	3	0	1	1	0
4	Siak Kecil	3	4	0	20	0	0
5	Rupat	46	0	0	10	7	0
6	Rupat Utara	10	0	0	59	0	0
7	Mandau	13	0	0	24	0	0
8	Pinggir	12	5	0	25	1	0
9	Bandar Laksamana	10	0	0	1	0	0
10	Bathin Solapan	25	0	0	37	2	0
11	Talang Muandau	0	0	0	13	4	0
	Kabupaten Bengkalis	**147**	**15**	**0**	**220**	**28**	**0**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

e) Angka Kelulusan

Indikator lain dari urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis adalah perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkalis. Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa di Kabupaten Bengkalis dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Tabel II-16 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98	99	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

Angka Kelulusan di Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 100% untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2020. Hal ini sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai dan juga sesuai dengan standar penilaian minimal Dinas Pendidikan. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah baik. Namun demikian tingkat melanjutkan pendidikan perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

f) Angka Melanjutkan Studi

Indikator selanjutnya adalah angka melanjutkan studi yang menggambarkan seberapa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu bisa melanjutkan pendidikannya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum dapat dilihat bahwa tingkat melanjutkan pendidikan di Kabupaten Bengkalis belum mencapai 100%, artinya belum seluruh siswa yang lulus dari pendidikan sekolah dasar sederajat dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP sederajat.

Tabel II-17 Perkembangan Angka Melanjutkan Studi Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	11740	11628	11598
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	11921	11965	12240
3	Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs	**98,48**	**97,18**	**94,75**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah angka melanjutkan studi di Kabupaten Bengkalis untuk jenjang SMP/MTS belum mencapai 100% hingga tahun 2020. Masih ada sekitar 5,25% siswa lulusan SD/MI yang belum bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTS. Kecamatan Bukit Batu merupakan daerah dengan angka melanjtkan studi ke SMP/MTs paling rendah. Hanya sebanyak 58,78% dari siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel II-18 Perkembangan Angka Melanjutkan Study Per Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Angka Melanjutkan Study ke SMP/MTs
1	Bengkalis	270	377	71,62
2	Bukit Batu	425	723	58,78
3	Bantan	2.037	2.140	95,19
4	Mandau	1.334	1.633	81,69
5	Rupat	350	434	80,65
6	Rupat Utara	3594	3.146	114,24
7	Siak Kecil	1.598	1.399	114,22

8	Pinggir	718	824	87,14
9	Bandar Laksamana	335	363	92,29
10	Talang Muandau	405	485	83,51
11	Bathin Solapan	532	716	74,30
Kabupaten Bengkalis		**11.598**	**12.240**	**94,75**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2021

g) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru saat ini dipandang sesuatu hal yang sangat penting karena seorang guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai pendidik guru juga turut serta dalam menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas dan bermutu. Sehingga guru diharuskan memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, adapun perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebagai berikut:

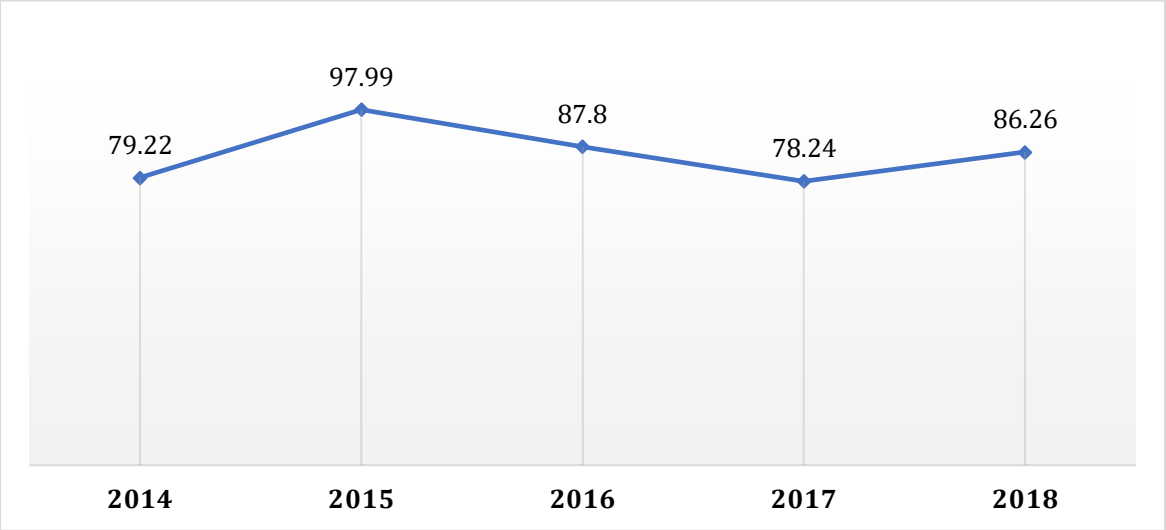

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2020

Gambar II-31 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 - 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan S1/D-IV yang dimiliki guru cenderung meningkat, dimana capaian tertinggi dicapai pada 2015 sebesar 97,99%. Namun, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 87,80% dan hingga akhir tahun 2018 berjumlah 86,26% hal ini dikarenakan bertambah jumlah guru yang ada pada Kabupaten Bengkalis dan adanya pengalihan kewenangan urusan SMA/MA/SMK dari kabupaten menjadi urusan provinsi, serta adanya guru yang pindah tugas.

h) Rasio guru/murid sekolah

Rasio guru dan murid sekolah menggambarkan bagaimana beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin berkurang tinggkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di kelas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ajaran 2018/2019 menuju taun ajaran 2019/2020, untuk rasio guru/murid SD/MI mengalami peningkatan dari 623 menjadi 644, Rasio guru/murid SD/MI

kembali meningkat pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 670. Sama halnya dengan rasio Guru/Murid SMP/MTS juga mengalami peningkatan menjadi 809 pada tahun ajar 2019/2020 dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 774. Peningkatan rasio ini menggambarkan bawa ada lebih banyak murid pada tahun 2019/2020 dibanding tahun 2018/2019 yang menjadi beban kerja guru.

Tabel II-19 Rasio Guru-Murid
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018/2019 – 2019/2020

No	TAHUN AJARAN	2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	Jumlah Murid SD/MI	80.157	81.573	81.090
2	Jumlah Guru	4.996	5.253	5.432
3	**Rasio per 10.000**	**623**	**644**	**670**
4	Jumlah Murid SMP/MTS	36.271	35.772	35.864
5	Jumlah Guru SMP/MTS	2.806	2.894	2.941
6	**Rasio per 10.000**	**774**	**809**	**820**
7	Jumlah Murid SMA/SMK/MA	29.865	31.067	35.569
8	Jumlah Guru SMA/SMK/MA	2.507	2.549	2.748
9	**Rasio per 10.000**	**839**	**820**	**773**

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Sedangkan untuk rasio Guru/Murid SLTA mengalami penurunan dari 839 menjadi 820 pada tahun 2019. Rasio Guru/Murid SLTA kembali mengalami penurunan pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi 773. Hal ini berarti beban kerja guru menjadi lebih sedikit, sehingga dapat bekerja dan mengelola kelas dengan lebih baik untuk menciptakan kualitas Pendidikan yang baik.

i) Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke Atas

Penduduk usia 15 tahu ke atas merupakan penduduk dalam fase usia produktif dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu faktor penting yang harus dimiliki penduduk pada fase ini adalah kemampuan membaca atau melek huruf.

Tabel II-20 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	376.022	372.755	358.597	390.293	-
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	376.195	373.253	359.184	390.655	-
3	Angka Melek Huruf >15	99,95	99,87	99,84	99,91	99,30

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2021

Penduduk kelompok usia 15-44 tahun di Kabupaten Bengkalis telah sepenuhnya melek huruf pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk usia 45 tahun keatas masih terdapat beberapa persen penduduk yang belum melek huruf. Penduduk yang tidak melek huruf ini kebanyakan

adalah penduduk lanjut usia dan penduduk yang tinggal di pedesaan. Faktor usia dan kondisi pedesaan menjadi faktor penghambat penduduk usia lanjut sebagian masih belum melek huruf. Hal ini pula yang menyebabkan capaian angka melek huruf >15 belum mampu mencapai 100%.

j) Capaian perkembangan Standard Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM bidang pendidikan dasar adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari empat indicator yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar SD/MI, Pendidikan Dasar SMP/MTS dan pemenuhan pendidikan kesetaraan. Capaian indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-21. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (xRp.1000) Tahun 2020
1	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	94,01	68.43	6,110,000	10,270,810
2	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar	98,03	99.66	35,987,489	67,624,647
3	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama	79,29	94.56	28,749,141	31,153,699
4	Persentase (%) pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan Kesetaraan	100	23	2,747,058	972,585
	Rata-Rata Capaian	**92,83**	**71.41**	**73,593,689**	**110,021,741**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan anggaran meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan

pada capaian SPM pada pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan, namun tidak mempengaruhi ketercapaian APK dari masing-masing sub urusan pendidikan tersebut.

1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

Angka kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Dimana pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 5,1 per 1000 kelahiran hidup, lalu kemudian berkurang menjadi 4 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis telah membuat penurunan jumlah kematian bayi dari 57 kematian pada tahun 2016, menjadi 42 kematian pada tahun 2020. Perbaikan pelayanan kesehatan secara umum, terutama dalam mengurangi angka kematian bayi, masih perlu ditingkatkan dengan pemerataan pelayanan pada beberapa daerah terpencil yang masih minim fasilitas kesehatan.

Indikator kinerja dalam urusan kesehatan dapat pula dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Dimana, pada periode 2016-2020 AKI per 100.000 kelahiran hidup berfluktuasi cenderung naik, terutama dalam tiga tahun terkahir. Dibandingkan dengan tahun 2016, AKI tahun 2020 masih lebih tinggi, yaitu mencapai 201 kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-22 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,1	4,4	4,5	4,2	4,0
2	Jumlah Kematian bayi	57	48	48	45	42
3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	187	120	116	131	201
4	Jumlah Kematian Ibu	21	13	12	14	21
5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	90%	84%	77%
6	Cakupan Pelayanan Nifas	98%	90%	86%	78%	75%
7	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	17%	9%	21%	60%	14%
8	Angka Kelangsungan Hidup	1-5,1	1-4,4	1-4,5	1-4,2	1-4,0
9	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	5,6	4,7	4,6	4,4	4,1
10	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	4,6	4,4	3,9	3,7	3,6
11	Rasio Posyandu Per 1000 Balita	0,8	0,7	0,7	0,8	1,1

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	4	4	4	4	na
13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1	1	1	1	na
14	Rasio dokter per 1000 penduduk	na	na	50,2	22,3	66,8
15	Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	na	na	50,2	22,3	66,8
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	na	na	73%	72%	61,30%
17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%	89%	86%	81%	79%
18	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	82%	83%	85%	78%	na
19	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	91%	85%	94%	87%	na
20	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	93%	85%	94%	90%	na
21	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62%	67%	69%	90%	69%
22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	77%	87%	100%	100%	100%
24	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	1,5	0
25	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	na	na	100%	100%	100%
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	74%	90%	93%	101%	28%
27	Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	86	123	114	142	121
28	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	1	1	2	2	2
29	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	na	na	93,20%	93,30%	na
30	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	83%	84%	70%	27%	12%
31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
32	Penderita Diare yang di Tangani	12,48	9,56	44%	32%	10%
33	Jumlah Kejadian Malaria	2	4	3	31	11
34	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0
35	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
36	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi	0,10%	0,20%	0,01%	0,01%	0,01%
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	na	na	na	na	60%
38	Cakupan Kunjungan Bayi	76%	85%	89,90%	85,20%	81,60%
39	Cakupan Puskesmas	154%	154%	164%	164%	164%
40	Cakupan Pembantu Puskesmas	43%	43%	36%	36%	36%
41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	76%	75%	65%	65%	23%

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	3%	15%	na	na	5%
43	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	22%	92%	12%	na	40%
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	39%	31%	33%	na	60%
45	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
46	Cakupan Desa Siaga Aktif			94,44%	93,65%	92,86%
47	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian. Kasus kematian bayi berumur kurang 1 tahun paling banyak ditemukan di Kecamatan bantan, yaitu sebanyak 9 kasus, lalu di Kecamatan Bengkalis tercatat sebanyak 6 kejadian dan di Kecamatan Rupat Utara serta Siak Kecil terjadi 5 kasus. Kecamatan lain yang memiliki paling sedikit kejadian kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun adalah kecamatan Pinggir dan Kecamatan Tualang Muandau dengan 1 kejadian.

Tabel II-23 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
1	Bengkalis	6	1.356	4,4
2	Bukit Batu	3	358	8,3
3	Bantan	9	861	10,4
4	Mandau	2	2.851	0,7
5	Rupat	3	666	4,5
6	Rupat Utara	5	254	19,7
7	Siak Kecil	5	424	11,8
8	Pinggir	1	1.505	0,7
9	Bandar Laksamana	3	297	10,1
10	Talang Muandau	1	454	2,2
11	Bathin Solapan	4	1.421	2,8
Kebupaten Bengkalis		**42**	**10.447**	**4,0**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Secara total Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup tertinggi berada di Kecamatan Rupat Utara. Dengan AKB per 1000 kelahiran hidpu mencapai 19,7. Hal ini berarti ada sekitar 20 kematian tiap 1000 bayi lahir hidup di kecamatan Ini. Rasio ini cenderung besar

karena jumlah kelahiran di Kecamatan Rupat Utara yang relatif rendah, namun kasus kematian bayi relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah 4,. Artinya terdapat 4,0 kematian bayi setiap 1000 bayi yang lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Jumlah ini diharapkan dapat terus berkurang hingga mencapai 0 dalam tahun-tahun ke depan.

Tabel II-24 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
1	Bengkalis	6	1.356	4,4	1-4,4
2	Bukit Batu	3	358	8,3	1-8,3
3	Bantan	9	861	10,4	1-10,4
4	Mandau	2	2.851	0,7	1-0,7
5	Rupat	3	666	4,5	1-4,5
6	Rupat Utara	5	254	19,7	1-19,7
7	Siak Kecil	5	424	11,8	1-11,8
8	Pinggir	1	1.505	0,7	1-0,7
9	Bandar Laksamana	3	297	10,1	1-10,1
10	Talang Muandau	1	454	2,2	1-2,2
11	Bathin Solapan	4	1.421	2,8	1-2,8
Kebupaten Bengkalis		**42**	**10.447**	**4,0**	**1-4,0**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Angka Kelangsungan Hidup Bayi paling tinggi ditemukan di Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau. Hal ini tentu saja dikarenakan tidak adanya kematian bayi tahun 2020 di kecamatan tersebut. Tingginya angka kelangsungan hidup bayi di kecamatan Mandau, Pinggir dan Tualang Muandau ditenggarai karena lebih mudahnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik beberapa kecamatan ini. Untuk kecamatan Rupat Utara yang memiliki angka kematian bayi paling tinggi membuatnya menjadi kecamatan dengan angka kelangsungan hidup bayi paling rendah di kabupaten Bengkalis.

Tabel II-25 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (Berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
1	Bengkalis	6	1.356	4,4
2	Bukit Batu	3	358	8,3
3	Bantan	9	861	10,4

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (Berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
4	Mandau	2	2851	0,7
5	Rupat	3	666	4,5
6	Rupat Utara	5	254	19,7
7	Siak Kecil	6	424	14,1
8	Pinggir	1	1.505	0,7
9	Bandar Laksamana	3	297	10,1
10	Talang Muandau	1	454	2,2
11	Bathin Solapan	4	1.421	2,8
Kabupaten Bengkalis		**43**	**10.447**	**4,1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Total Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 berjumlah 4.4. Artinya, setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 4.4 balita yang meninggal pada tahun 2020. Dimana untuk kecamatan dengan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup tertingi adalah Kecamatan Rupat Utara. Hal ini sesuai dengan data bahwa Kecamatan Rupat Utara memiliki angka Kematian Bayi tertinggi di Kabupaten Bengkalis, selain itu Kecamatan Utara juga merupakan salah satu Kecamatan yang jauh dari fasilitas kesehatan utama, seperti rumah sakit umum membuat daerah ini memiliki pelayanan kesehatan yang belum memadai jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain.

Tabel II-26 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup.
1	Bengkalis	6	1.356	4,4
2	Bukit Batu	2	358	8,3
3	Bantan	9	861	10,4
4	Mandau	2	2851	0,7
5	Rupat	2	666	3,0
6	Rupat Utara	4	254	15,7
7	Siak Kecil	5	424	11,8
8	Pinggir	1	1.505	0,7
9	Bandar Laksamana	3	297	10,1
10	Talang Muandau	1	454	2,2
11	Bathin Solapan	3	1.421	2,1
Kabupaten Bengkalis		**38**	**10.447**	**3,7**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 berjumlah 3.7, yang berati bahwa setiap 1000 kelahiran hidup, terdapat 3.7 bayi yang berumur kurang dari 1 bulan meninggal dunia. Kematian bayi neonatal paling banyak ditemukan di Kecamatan Rupat Utara, diikuti oleh Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bantan. Pelayanan kesehatan dan peningkatan kesadaran Ibu hamil dalam pemeriksanaan kehamilan dan perilaku hidup sehat menjadi penting dalam pembangunan kesehatan bayi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-27 Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran hidup dalam Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
1	Bengkalis	2	1.356	147,5
2	Bukit Batu	0	358	0
3	Bantan	6	861	696,9
4	Mandau	5	2.851	175,4
5	Rupat	1	666	150,2
6	Rupat Utara	1	254	393,7
7	Siak Kecil	1	424	235,8
8	Pinggir	0	1.505	0
9	Bandar Laksamana	0	297	0
10	Talang Muandau	1	454	220,3
11	Bathin Solapan	4	1.421	281,5
Kabupaten Bengkalis		14	10.447	201

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kabupaten Bengkalis Berjumlah 201 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi 201 kematian setiap 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Angka ini dinilai cukup tinggi, terutama bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai lebih dari 200 kejadian per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II-28 Rasio posyandu per 1000 balita Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per 1000 Balita
1	Bengkalis	64	7.136	0,9
2	Bukit Batu	25	1.628	1,5
3	Bantan	45	3.429	1,3
4	Mandau	92	9.787	0,9
5	Rupat	63	3.523	1,8

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per 1000 Balita
6	Rupat Utara	20	1.232	1,6
7	Siak Kecil	34	2.297	1,5
8	Pinggir	56	6.171	0,9
9	Bandar Laksamana	18	1.390	1,3
10	Talang Muandau	31	1.750	1,8
11	Bathin Solapan	63	8.371	0,8
	Kabupaten Bengkalis	**511**	**46.714**	**1,1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah posyandu di Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah posyandu berjumlah 503 unit, kemudian meningkat menjadi 506 unit pada tahun 2019 dan kembali meningkat lagi menjadi 511 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah posyandu ini sangat bagus dalam meningkatkan pelayanan kesahat ibu hamil dan balita di tingkat desa/lurah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa setiap 1000 balita terdapat setidaknya 1 posyandu yang melayani.

Tabel II-29 Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk.	Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk
1	Bengkalis	88	83.402	105,5
2	Bukit Batu	8	42.212	19,0
3	Bantan	22	21.550	102,1
4	Mandau	184	152.215	120,9
5	Rupat	11	33.628	32,7
6	Rupat Utara	6	14.222	42,2
7	Siak Kecil	10	24.901	40,2
8	Pinggir	17	62.604	27,2
9	Bandar Laksamana	5	15.714	31,8
10	Talang Muandau	6	23.814	25,2
11	Bathin Solapan	21	91.307	23,0
	Kabupaten Bengkalis	**378**	**565.569**	**66,8**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Jumlah tenaga medis di suatu daerah sangat mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan daerah tersebut. Di Kabupaten Bengkalis, secara total terdapat 378 tenaga medis pada tahun 2020. Namun, jumlah tenaga medis ini tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Pada Kecamatan Mandau, jumlah tenaga medis mencapai hampir 50% dari total tenaga medis di Kabupaten Bengkalis, sementara kecamatan lain seperti Rupat Utara hanya memiliki 6 tenaga medis dan kecamatan Bandar Laksamana hanya memiliki 5 tenaga medis di daerahnya. Ketimpangan ini tentu saja dapat membuat beberapa daerah lebih terbelakang dalam pelayanan kesehatannya.

Tabel II-30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
1	Bengkalis	119	342	34,8
2	Bukit Batu	104	88	118,7
3	Bantan	136	196	69,5
4	Mandau	258	720	35,8
5	Rupat	181	157	115,4
6	Rupat Utara	0	66	0
7	Siak Kecil	118	94	125,5
8	Pinggir	289	363	79,7
9	Bandar Laksamana	40	59	68,3
10	Talang Muandau	161	127	127
11	Bathin Solapan	278	539	51,6
Kabupaten Bengkalis		**1.684**	**2.749**	**61,2**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Bengkalis yang ditangani tahun 2020 sebesar 61,2% dari total komplikasi kebidanan yang terjadi. Capaian terendah terjadi di Kecamatan Rupat Utara dengan komplikasi kebidanan yang tertangani sebesar 0%. Kecamatan Rupat Utara menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapatkan penangan komplikasi kebidanan, padahal penangan komplikasi sangat berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan bayi. Lemahnya infrsatruk kesehatan dan tenaga medis yang tidak memadai membuat pelayanan komplikasi kebidanan di Kecamatan Rupat Utara sangat terbatas sekali.

Tabel II-31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
1	Bengkalis	1.358	1.636	83
2	Bukit Batu	354	416	85,1
3	Bantan	831	955	87
4	Mandau	2.851	3.435	83
5	Rupat	636	806	78,9
6	Rupat Utara	239	316	75,6
7	Siak Kecil	416	430	96,7
8	Pinggir	1.507	1.645	91,6
9	Bandar Laksamana	299	279	107,2
10	Talang Muandau	445	605	73,6

No	Kecamatan	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
11	Bathin Solapan	1.422	2.570	55,3
Kabupaten Bengkalis		**10.358**	**13.093**	**79,1**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020 mencapai 79,1%. Capaian ini terbilang sudah cukup baik dan sudah merata antarkecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkalis secara umum sudah cukup baik dan merata. Hal ini tentu saja didukung dengan program pemerintah satu desa satu bidan.

Tabel II-32 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan UCI.	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
1	Bengkalis	30	31	97
2	Bukit Batu	8	10	80
3	Bantan	21	23	91
4	Mandau	2	11	18
5	Rupat	4	16	25
6	Rupat Utara	2	8	25
7	Siak Kecil	15	17	88
8	Pinggir	10	10	100
9	Bandar Laksamana	6	7	86
10	Talang Muandau	4	9	44
11	Bathin Solapan	5	13	38
Kabupaten Bengkalis		**107**	**155**	**69**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sudah mencapai 69% pada tahun 2020. Dari 155 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah sebanyak 107 desa/kelurahan yang menjadi desa/kelurahan UCL. Hal ini berarti sudah sebagian besar desa/kelurahan mencapai imunisasi dasar dasar secara lengkap pada bayi keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (dibawah 1 tahun). Yang perlu menjadi perhatian adalah, capaian di kecamatan Rupat, Rupat Utara dan Bathin Solapan jauh lebih rendah dibanding kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-33 Penderita Diare yang Ditangani per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare	Penderita diare yang ditangani
1	Bengkalis	558	812	69%
2	Bukit Batu	266	215	124%
3	Bantan	532	460	116%
4	Mandau	646	1.606	40%
5	Rupat	343	405	85%
6	Rupat Utara	108	162	67%
7	Siak Kecil	324	229	142%
8	Pinggir	903	598	151%
9	Bandar Laksamana	189	167	113%
10	Talang Muandau	719	271	265%
11	Bathin Solapan	903	969	93%
Kabupaten Bengkalis		5.491	5.893	93%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator penderita diare yang ditangani di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sudah sangat beik secara keseluruhan dan cukup merata antarkecamatan. Terlihat bahwa pada tahun 2020 sudah sebesar 93% penderita diare datang dan diberikan pelayanan di sarana kesehatan. Meski demikian, perlu menjadi perhatian untuk penanganan penderita diare di Kecamatan Bantan yang hanya mencapai 40% dari total perkiraan penderita.

Tabel II-34 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah pasien HIV dan AIDS	Jumlah penduduk.	Prevalensi HIV/AIDS
1	Bengkalis	18	81.159	0,022%
2	Bukit Batu	1	21.488	0,005%
3	Bantan	1	45.997	0,002%
4	Mandau	39	160.572	0,024%
5	Rupat	1	40.460	0,002%
6	Rupat Utara	1	16.229	0,006%
7	Siak Kecil	1	22.888	0,004%
8	Pinggir	6	59.845	0,010%
9	Bandar Laksamana	0	16.681	0,000%
10	Talang Muandau	0	27.133	0,000%
11	Bathin Solapan	2	96.851	0,002%
Kabupaten Bengkalis		**70**	**589.303**	**0,012%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Prevalensi HIV/AID di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sudah sangat rendah, yaitu 0,012% dari total penduduk. Kecamatan Mandau menjadi daerah dengan jumlah pasien HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 39 penderita tahun 2020. Sementara itu Kecamatan Bandar Laksamana dan Talang Muandau tidak memiliki pasien HIV/AIDS pada tahun 2020.

Tabel II-35 Cakupan Kunjungan Bayi per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	Cakupan Kunjungan Bayi
1	Bengkalis	1.346	1.680	80,1
2	Bukit Batu	348	445	78,2
3	Bantan	872	952	91,5
4	Mandau	2.564	3.324	77,1
5	Rupat	494	837	59,0
6	Rupat Utara	254	336	75,6
7	Siak Kecil	412	474	86,9
8	Pinggir	1.498	1.239	120,9
9	Bandar Laksamana	296	345	85,8
10	Talang Muandau	452	562	80,4
11	Bathin Solapan	1419	2.005	70,8
Kabupaten Bengkalis		**9.955**	**12.199**	**81,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebesar 81,6% dari total bayi lahir hidup di Kabupaten Bengkalis. Secara keseluruhan cakupan kunjungan bayi antarkecamatan sudah menunjukkan adanya pemerataan yang baik. Cakupan kunjungan bayi yang baik akan meningkatkan kesehatan bayi dan mengurangi resiko kesehatan yang mungkin terjadi pada bayi.

Tabel II-36 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
1	Bengkalis	1.501	1.711	87,7
2	Bukit Batu	391	438	89,3
3	Bantan	880	979	89,9
4	Mandau	2.629	3.599	73
5	Rupat	716	784	91,3
6	Rupat Utara	231	331	69,8
7	Siak Kecil	438	470	93,2

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil Yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
8	Pinggir	1.545	1.814	85,2
9	Bandar Laksamana	304	293	103,8
10	Talang Muandau	412	634	65
11	Bathin Solapan	1.516	2.694	56,3
Kabupaten Bengkalis		**10.563**	**13.747**	**76,8**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 76,80%. Dari total 13.747 ibu hami, sudah sebanyak 10.563 ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4. Capaian ini sudah cukup baik dan merata di Kabupaten Bengkalis, menggambarkan bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakke tenaga kesehatan berkompeten.

Tabel II-37 Cakupan Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Seluruh Kecamatan	Cakupan Puskesmas
1	Bengkalis	2	1	200%
2	Bukit Batu	1	1	100%
3	Bantan	2	1	200%
4	Mandau	2	1	200%
5	Rupat	2	1	200%
6	Rupat Utara	1	1	100%
7	Siak Kecil	2	1	200%
8	Pinggir	2	1	200%
9	Bandar Laksamana	1	1	100%
10	Talang Muandau	1	1	100%
11	Bathin Solapan	2	1	200%
Kabupaten Bengkalis		**18**	**11**	**164%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, yaitu mencapai 164% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata terdapat lebih satu Puskesmas pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Setidaknya setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat, bahkan terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki Puskesmas berjumlah 2 unit, khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih padat dan daerah perkotaan. Selain tersedianya Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar masyarakat atau

disebut juga fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga tersedia Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap kecamatan. Puskesmas Pambantu merupakan jaringan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu dan menunjang memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primes kepada masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan seperti halnya Puskesmas.

Tabel II-38 Cakupan Puskesmas Pembantu per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Seluruh Desa/ Kel.	Cakupan Puskesmas Pembantu
1	Bengkalis	10	31	32
2	Bukit Batu	4	10	40
3	Bantan	8	23	35
4	Mandau	3	11	27
5	Rupat	6	16	38
6	Rupat Utara	5	8	63
7	Siak Kecil	5	17	29
8	Pinggir	6	10	60
9	Bandar Laksamana	4	7	57
10	Talang Muandau	3	9	33
11	Bathin Solapan	2	13	15
	Kabupaten Bengkalis	**56**	**155**	**36**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Indikator pelayanan kesehatan berupa cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis sebesar 36% dari total kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 56 Puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bengkalis memiliki puskesmas pembantu paling banyak, yaitu berjumlah 10 unit puskesmas pembantu. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan Puskesmas Pembatu di Kabupaten Bengkalis adalah setiap kecamatan setidaknya terdapat 3 (tiga) unit Puskesmas Pembantu. Dengan demikian, maka pelayana kesehatan primer kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan cukup tersedia.

Tabel II-39 Cakupan Pelayanan Nifas per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
1	Bengkalis	1.188	1.555	76,4
2	Bukit Batu	327	397	82,4
3	Bantan	795	909	87,5
4	Mandau	2.562	3.273	78,3
5	Rupat	327	767	42,6

No	Kecamatan	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas
6	Rupat Utara	238	301	79,1
7	Siak Kecil	398	409	97,3
8	Pinggir	1.392	1.547	90
9	Bandar Laksamana	277	265	104,5
10	Talang Muandau	377	590	63,9
11	Bathin Solapan	1.454	2.448	59,4
Kabupaten Bengkalis		**9.335**	**12.461**	**74,9**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 74,9% dari total seluruh ibu nifas yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hanya terdapat satu kecamatan yang memiliki cakupan pelayanan nifas di bawah 50%, yaitu kecamatan Rupat. Sementara kecamatan lain capaiannya sudah berada di atas 50%.

Tabel II-40 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Yang Mendapat MP-ASI	Jumlah Seluruh Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin.
1	Bengkalis	5	76	6.6
2	Bukit Batu	2	35	5.7
3	Bantan	7	59	11.8
4	Mandau	9	210	4.3
5	Rupat	0	10	0
6	Rupat Utara	4	65	6.2
7	Siak Kecil	0	16	0
8	Pinggir	11	278	3.9
9	Bandar Laksamana	0	10	0
10	Talang Muandau	5	86	5.8
11	Bathin Solapan	2	117	1.7
Kabupaten Bengkalis		**46**	**962**	**4.8**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 baru berkisar di angka 4,8%. Saat ini baru 46 dari 962 orang anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapatkan MP-ASI. Bahkan pada kecamatan Rupat dan Siak Kecil belum ada pemberian MP-ASI terhadap anak berusia 6-24%. Capaian ini masih perlu ditingkatan karena MP-ASI sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskian sangat penting dalam melengkapi zat gizi ASI untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia.

Tabel II-41 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Murid SD dan Setingkat yang Diperiksa Kesehatannya	Jumlah Murid SD dan Setingkat	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
1	Bengkalis	1701	4.225	40%
2	Bukit Batu	2.557	2.966	86%
3	Bantan	3.343	4.772	70%
4	Mandau	5.257	12.047	44%
5	Rupat	2.916	4.628	63%
6	Rupat Utara	919	2.378	39%
7	Siak Kecil	3.093	3.388	91%
8	Pinggir	1.681	10.667	16%
9	Bandar Laksamana	380	2.273	17%
10	Talang Muandau	516	3.020	17%
11	Bathin Solapan	3.856	15.242	25%
Kebupaten Bengkalis		**26.219**	**65.606**	**40%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 baru mencapai 40%. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tertinggi ditemukan di Kecamatan Siak Kecil, yaitu 91% dari total siswa SD dan setingkat. Sedangkan capaian terendah adalah Kecamatan Bandaar Laksamana dan Talang Muandau yaitu mencapai 17% dari total siswa SD setingkat.

Tabel II-42 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1	Bengkalis	15022	37872	40%
2	Bukit Batu	9591	13750	70%
3	Bantan	9679	22331	43%
4	Mandau	16482	35396	47%
5	Rupat	6486	12864	50%
6	Rupat Utara	14898	12364	120%
7	Siak Kecil	8055	13037	62%
8	Pinggir	13191	18237	72%
9	Bandar Laksamana	8685	10181	85%
10	Talang Muandau	3702	10877	34%
11	Bathin Solapan	20941	19310	108%
Kebupaten Bengkalis		**126372**	**210325**	**60%**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 baru mencapai 60% dari total 210.325 masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pada beberapa kecamatan cakupan ini bahkan lebih rendah dari 50%. Seperti pada kecamatan Talang Muandau yang Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin baru mencapai 34% dari total masyarakat miskin.

Sedangkan untuk capaian SPM bidang kesehatan berdasarkan 12 (dua belas) jenis layanan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan 100% bagi masyrakat sesuai kewenangannya. Adapun capaian kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	85,41	76,8	871.420	1.301.270
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	78,45	76,1	4.366.000	643.416.6
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,54	79,9	358.820	238.479
4	Pelayanan kesehatan balita	64,76	23	153.780	63.660
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	92,63	40,9	135.260	428.835
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	37,38	34,0	160.550	373.650
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	92,15	70,2	135.260	426.890
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	79,90	28,1	25.630	-

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	100	149,3	25.630	13.424
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	72,44	53,7	60.490	106.760
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	48,6	25.630	184.343
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	35,43	40,3	207.640	925.177,48
	Rata-rata Capaian	**77,09**	**60,075**	**6.526.110**	**4.705.905,08**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan diikuti dengan penurunan pembiayaan SPM tersebut. Dari 12 (dua belas) indikator SPM tersebut, yang sangat mempengaruhi penurunan rata-rata capaian pada indikator: pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan TB dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan agar pencapaian SPM ditahun berikutnya lebih baik lagi.

1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Beberapa capaian indikator selama periode 2016-2020 menunjukkan perbaikan, meskipun dalam beberapa indikator masih perlu menadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pembanguna infrastruktur jalan memperlihatkan ada sedikit kenaikan dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun tahun 2016 sebesar 51,38%, dan menurun pada 2017 menjadi 38,48%. Selanjutnya, pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 35,93% dan terus menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 37,04%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik cenderung berkurang. Dimana pada tahun 2016 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 731 km, namun pada tahun 2020 hanya sebesar 465,68%.

Sementara itu, untuk Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis masih rendah, yaitu berada pada angka 0.002 atau dalam rasio 1:450 pada tahun 2020. Hal ini berarti tiap satu km jalan berbading setidaknya 450 penduduk. Dalam lima tahun terakhir pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis relatif stagnan dan belum menunjukkan perubahan berarti. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk belum diikuti oleh pembangunan jalan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan peningkatan kemudahan akses penduduk dalam pemenuhan kebutuhan.

Tabel II-43 Perkembangan Indikator Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	731,50	571,74	451,72	449,62	465,68
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	51,38	38,48	35,93	35,77	37,04
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0027	0,0027	0,0022	0,0022	0,0022
4	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1:371	1:376	1:450	1:456	1:450
5	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	na	34,58	77,02	na	na
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	na	84,49	78,47	87,79	89,67
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	na	88,74	86,88	91,19	93,73
8	Ketaatan Terhadap RTRW	na	39,05	39,05	na	na
9	Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	5,51	8,29	8,8	na	na
10	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	62,77	63,48	74,7	77,78	na
11	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidakTersumbat	na	35,75	32,61	na	na

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, 2021

Beberapa hal yang menyebabkan persoalan penurunan kualitas jalan di Kabupaten Bengkalis antara lain adalah (1) Dinas PUPR lebih memprioritaskan pembangunan ruas jalan strategis dengan anggaran yang tersedia dan lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan jalan serta dampak rasionalisasi APBD Kabupaten Bengkalis yang dialihkan untuk pemeliharaan jalan, sehingga target kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik saat ini belum bisa dicapai. (2) Ruas jalan sepanjang 37,04 Km kewenangannya diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau dan terdapat ruas sepanjang 191,64 Km yang tumpang tindih dan masuk dalam status jalan lingkungan. (3) Skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk ruas jalan strategis

yang membutuhkan anggaran besar sehingga anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan agar berkondisi baik mengalami penurunan dari sisi penganggarannya.

Indikator lain dalam urusan pekerjaan umum, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak terlihat sudah memiliki capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 93,73%. Sementara itu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak juga menunjukkan capaian yang baik, sebesar 89,67%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber air minum dan sanitasi yang ada di Kabupaten Bengkalis sebagian besar sudah baik dan layak.

Untuk indikator SPM bidang Pekerjaan Umum berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang teridiri atas 4 (empat) indikator dengan masing-masing target pelayanan masyarakat mencapai 100 %.

Rata-rata capaian dan pembiayaan SPM untuk tahun 2019-2020 bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II ... Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (x Rp. 1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (x Rp. 1.000) Th. 2020	Rencana Pembiayaan (X Rp. 1.000) 2021
1	Jumlah warga nergara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	14,83	19.28	72.908.458	76.376.280	**150.160.600**
2	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Dasar	0	0	-	-	-
3	Capaian SPM Pelayanan SPALD-S akses Aman	0	0	-	-	-
4	Capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman	0	0	-	-	-
	Rata-rata Capaian	**3,71**	**4,82**	**72.908.458**	**76.376.280**	**150.160.600**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Untuk rata-rata capaian SPM bidang Pekerjaan Umum terjadi peningkatan sebesar 1,11 % dengan pembiayaan juga terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.746.822.000,- peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target capaian pelayanan 100 % sesuai dengan standard SPM. Pencapaian SPM hanya pada indikator Jumlah warga nergara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dimana kondisi pencapaian yang kecil ini karena penyediaan layanan air perpipaan ke rumah tangga selain masih kecil juga baru sebatas kepada penyediaan air bersih saja.

Tiga indikator lainnya yang merupakan indikator penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik belum dapat dilaksanakan untuk kawasan permukiman perkotaan dikarenakan belum tersedia pembiyaannya pada dua tahun tersebut.

1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa indikator penting dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di antaranya adalah rasio rumah layak huni, persentase lingkungan permukiman kumuh serta cakupan lingkungan sehat dan aman didukung dengan PSU.

Untuk rasio rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2019 telah mencapai 1. Ini menunjukkan bahwa telah semua rumah yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah layak huni bagi penduduk. Sedangkan untuk indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau pada tahun 2017 sebesar 70,80%. Kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebanyak 65,32% saja Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun 2019 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan menjadi 70,63%. Terakhir pada tahun 2020 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau kembali mengalami peningkatan menjadi 80,49%.

Sementara itu pada sisi lain lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 0,0018% dari total permukiman penduduk. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit kawasan pemukiman yang kumuh di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian upaya pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat sudah sangat baik.

Tabel II-44 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	0,96	0,96	1	1
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1,37%	0,11%	0,74%	0,75%
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	40,47%	45,81%	43,79%	na
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,0032%	na	0,002%	0,0018%
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	6,45%	23,59%	17,42%	5,16%

6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	70,80%	65,32%	70,63%	80,49%

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2021

Cakupan lingkungan sehat dan aman, serta didukung oleh PSU adalah indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan lebih maju jika lingkungannya aman dan sehat serta didukung oleh PSU yang memadai. Pada tahun 2017 capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai hanya sebesar 6,45% saja di kabupaten Bengkalis. Cakupan lingkungan aman dan sehat serta didukung ole PSU yang memadai baru mencapai 5,16% pada tahun 2020. Ini berarti masih banyak lingkungan perumahan dan permukiman yang belum didukung oleh PSU yang memadai. Hal ini jika tidak diperhatikan secara serius akan dapat menimbulkan lingkungan kumuh dan tidak sehat, yang berujung penyakit pada masyarakat.

Standard Pelayanan Minimal Bidang Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator berjumlah 2 (dua) buah dengan target pelayanan masing-masingnya sebesar 100 %. Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan tahun 2019-2020 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-45. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2020
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	9,09	0	702.000	-
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	-	-
	Rata-rata Capaian	**4,55**	**-**	**702.000**	**-**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk tahun 2020 tidak dapat dicapai begitu juga pembiayaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada usulan korban akibat bencana dan relokasi

akibat program pemerintah daerah kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan.

1.3.1.5 Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur melalui indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) menunjukan tren penurunan. Pada tahun 2016 cakupan petugas linmas sebesar 7.22% namun pada tahun 2019 berkurang menjadi 6.73%. Sedangkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mulai dilakukan pada tahun 2016 sebesar 14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 24%. Penegakan Peraturan Daerah mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 18% pada tahun 2016 menjadi 19% pada tahun 2019. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelanggaran peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum semakin berkurang selama periode 2015-2019.

Sementara itu untuk Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bengkalis baru mencakup 37,47% daerah pada tahun 2020. Capaian ini dalam empat tahun terakhir masih belum menunjukkan perkembangan dan cenderung stagnan. Hal ini ditenggarai karena keterbatasan SDM dan anggaran untuk menyediakan fasilitas pelayanan Kebakaran di setiap kecamatan. Angka ini belum mencapai standar pelayanan minimum dengan angka cakupan minimal 80%.

Sementara itu Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sudah mencapai 80%. Hal ini berarti pemadam kebakaran di Kabupaten Bengkalis telah berhasil menyelesaikan sebesar 80% kasus kebakaran dalam waktu 15 maksimal 15 menit. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di Bawah

Tabel II-46 Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	7,22	7,05	6,89	6,73	na
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	14	18	24	24	na
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	23,12	37,47	37,47	37,47	37,47
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	53,11	80	80	90	80
5	Persentase Penegakan PERDA	18	18	19	19	na

Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, 2021

Untuk perhitungan rata-rata capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-47. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (x Rp.1.000) Tahun 2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	95,74	-	3.459.605	0
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	36,64	96.66	202.011,7	1.156.225,2
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	25,37	63.78	442.937	1.704.469,5
4	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,2	97.43	1.705.977	3.128.198,5
5	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	3,86	327.9	6.404.871,2	9.605.361
	Rata-rata Capaian	**32,76**	**117,154**	**12.215.401,9**	**15.594.254,2**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Terjadi peningkatan rata-rata capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2020 sebesar 84,39 % dengan peningkatan pembiayaan untuk pelayanan SPM sebesar Rp. 3.378.852,1 dimana dari lima indikator, hanya satu indikator yang tidak dapat mencapai target pelayanan yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada disebabkan oleh tidak tersedianya pembiayaan untuk pelaksanaan pelayanan indikator tersebut.

1.3.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial dapat diukur melalui indikator jumlah fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan, jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel II-48 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020

No.	Indikator (dalam persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial	22%	23%	75%	82%	75%
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	44%	50%	77%	78%	82%
4	Persentase PMKS yang tertangani	38%	39%	99%	99%	79%
5	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	22%	27%	76%	77%	80%
6	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	4.360	7.667	113.954	na	na
7	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	1.214	1.284	1.232	na	na

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2016 sebanyak 44% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 50%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 77%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2019 sebanyak 78% dari total PMKS, kemudian meningkat menjadi 82% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkalis terus berupaya melakukan penangan terhadap penyandang masalah sosial. Hal ini juga terlihat dari jumlah PMKS yang tertangani dalam lima tahun terakhir yang mengalami perbaikan hingga mencapi 79% pada tahun 2020. Meskipun memiliki anggaran yang terbatas, namun Pemerintah tetap berupaya dan berkomitmen agar permasalahan PMKS ini dapat ditangani. Sementara itu, indikator persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016 sebesar 21% dan hingga akhir 2020 meningkat menjadi 80%.

Salah satu indikator pada urusan sosial yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perbaikan capaian yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada 2016 persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia telah menerima jaminan sosial hanya sebesar 22%, namun pada tahun 2020 capaian meningkat menjadi 75% dari total penyandang cacat fisik dan mental yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan pada tahun 2018 sebesar 113.954 orang, angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 7.667 orang. Fakir Miskin ini diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapatkan dana dekon yang diperuntukan untuk bantuan KUBE FM Perkotaan agar meningkatnya SDM Fakir Miskin.

Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2018 sebesar 1.232 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2017 angka ini mengalami peningkatan dari 1.284 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan dan kemandirian para penyandang disabilitas agar dapat bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menguragi ketergantungan dengan orang lain, sehingga tidak menjadi permasalahan sosial baru.

Tabel II-49 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
1	Bengkalis	22.252	25.116	89%
2	Bukit Batu	7.128	7.372	97%
3	Bantan	15.680	15.953	98%
4	Mandau	14.661	29.018	51%
5	Rupat	15.680	16.963	92%
6	Rupat Utara	5.898	5.986	99%
7	Siak Kecil	6.423	6.659	96%
8	Pinggir	8.832	11.859	74%
9	Bandar Laksamana	3.659	3.803	96%
10	Talang Muandau	4.364	4.499	97%
11	Bathin Solapan	10.276	12.932	79%
Kabupaten Bengkalis		**114.853**	**140.160**	**82%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Data PMKS penerima bantuan Sosial merupakan data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana berdasarkan data ini, pada tahun 2020 terdapat 140.160 orang yang terdaftar di DTKS, dan sudah sebanyak 114.853 penduduk Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari dana APBD dan APBN.

Jumlah PMKS terbanyak berdasarkan DTKS berada di Kecamatan Mandau sebanyak 29.018 orang dan pada Kecamatan Bengkalis dengan jumlah sebanyak 25.116 penduduk. Sedangkan jumlah PMKS paling sedikit berada di Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah 3.803.

Tabel II-50 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah PMKS yang Memperolah Bantuan Sosial	Jumlah PMKS yang Seharusnya Memperolah Bantuan Sosial	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1	Bengkalis	21.756	25.116	87%
2	Bukit Batu	7.101	7.372	96%
3	Bantan	15.248	15.953	95%
4	Mandau	14.511	29.018	50%
5	Rupat	15.500	16.963	91%
6	Rupat Utara	5.708	5.986	95%
7	Siak Kecil	6.408	6.659	96%
8	Pinggir	8.684	11.859	73%
9	Bandar Laksamana	3.656	3.803	96%
10	Talang Muandau	4.344	4.499	96%
11	Bathin Solapan	10.076	12.932	78%
Kabupaten Bengkalis		**112.992**	**140.160**	**80%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Data PMKS penerima bantuan merupakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat dan Otonom. Data yang seharusnya menerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 140.160 penduduk yang berhak menerima bantuan berdasarkan data DTKS, dan sudah sebanyak 80% di antaranya diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Bengkalis melalui KPM dan BPNT secara keseluruhan sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dan merata. Hanya saja, diperlukan perhatian lebih dalam pemberian bantuan sosial di Kecamatan Mandau, yang capaiannya baru 50% dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Pada Kecamatan Mandau masih terdapat setidaknya 14.511 penduduk yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan sosial berdasarkan data DTKS. Dinas Sosial harus lebih memperhatikan hal ini, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan baru karena tidak meratanya bantuan yang diberikan pada PMKS di Kecamatan Mandau ini.

Tabel II-51 Persentase PMKS yang tertangani Per Kecamatan per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah PMKS yang Tertangani	Jumlah PMKS yang Ada	Persentase PMKS yang Tertangani
1	Bengkalis	775	848	91 %
2	Bukit Batu	177	210	84 %
3	Bantan	405	474	85 %
4	Mandau	318	639	50 %
5	Rupat	354	393	90 %
6	Rupat Utara	115	128	90 %
7	Siak Kecil	259	269	96 %
8	Pinggir	198	333	59 %
9	Bandar Laksamana	94	110	85 %
10	Talang Muandau	66	86	77 %
11	Bathin Solapan	343	439	78 %
	Kabupaten Bengkalis	**3.104**	**3.926**	**79 %**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Data PMKS yang tertangani merupakan data PMKS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dimana pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3.104 PMKS yang tertangani dan menerima layanan rehabilitasi sossial. Capaian ini sebesar 79% dari total 3.926 PMKS yang ada. Secara umum penanganan PMKS sudah cukup baik dan merata antarkecamatan, kecuali pada Kecamatan Mandau baru 50% PMKS yang tertangani dan pada Kecamatan Pinggir baru 59% PMKS yang tertangani. Pada dua kecamatan ini masih diperlukan perhatian lebih baik dalm penangan PMKS di Kabupaten Bengkalis.

Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) indikator pelayanan dengan target 100 % setiap tahunnya. Dimana rata-rata capaian SPM Bidang Sosial tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel II-52. Capaian dan Pembiayaan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)	Capaian Tahun 2020 (%)	Pembiayaan (xRp.1.000) Tahun 2019	Pembiayaan (xRp. 1.000) Tahun 2020
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	96	1.314.840	143.967,48
2	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	1.289.728	538.360
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	69	1.930.500	545.790
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0	100	-	162.380
5	Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	559.350	605.896,84
	Rata-rata Capaian	**80**	**93**	**5.094.418**	**1.996.394,32**

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis 2021

Dari kelima indikator, ada dua indikator SPM Bidang Sosial yang belum terpenuhi di tahun 2020, yaitu: Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dan Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti yang menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebakan ada beberapa aktivitas pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kondisi pandemi *Covid-19* baik dari segi pelayanan dan mendapatkan prasarana pelayanan mengalami hambatan dilaksanakan.

1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah di antaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

1.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3, persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan seberapa banyak perkembangan penduduk Kabupaten Bengkalis yang mampu mencapai jenjang Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tentu sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas tenaga kerja yang baik dan memenui permintaan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan membawa perkembangan yang baik untuk kemajuan daerahnya. Dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis semakin berkembang setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 22,15% saja, kemudian mengalami peningkatan menjadi 23,00% pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019, penduduk yang mencapai lulusan S1/S2/S3 meningkat cukup tinggi yaitu 47.53% dari jumlah penduduk.

Tabel II-53 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	22.15	23.00	23.00	47.53	48,38
2	Keselamatan dan Perlindungan (%)	90.32	na	na	na	na
3	Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja (%)	58.24%	72.58%	80,00%		na
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja	na	na	na	18	31
5	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20.60%	30.50%	47.20%	28%	22%
6	Persentase Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	na	na	91.94%	97.74%	93.20%
7	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100.%	na
8	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	na
9	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	na	na	na	100%	na

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2020

Aspek lain yang menjadi ukuran pencapaian urusan ketenagakerjaan adalah persentase penyelesaian sengketa pengusaha dan pekerja pertahun. Pada tahun 2018 penangan sengketa pengusaha dan pekerja yang ditangai cukup tinggi, yaitu 80%. Capaian ini semakin membaik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 72,58%, dan meningkat sangat jauh jika dibandingkan denga tahun 2016 yang baru mencapai 58,24%. Penyediaan mediator penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dari ASN Kabupaten Bengkalis menjadi faktor pendukung peningkatan penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja, yang sebelumnya belum tersedia.

Aspek lain dalam mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah keikutsertaan pekerja dan buruh dan program jaminan sosial. Hingga tahun 2020, persentase

pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sudah sangat baik, yaitu dari 91.94% pada tahun 2018 menjadi 97,74% pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 93,20%. Penurunan ini disinyalir diakibatkan meningkatnya pekerja/buruh yang dirumahkan selama masa pandemi 2020 yang tidak melanjutkan program jamsostek.

Pelayanan tenaga kerja dalam pembangunan juga diindikasikan dari pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, kewirausahaan, dan kompetensi telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tenaga kerja telah mendapatkan pelatihan berbasis berbasis masyarakat, kewirausahaan, dan kompetensi. Kemudian perlindungan tenaga kerja telah mencapai 90,32% pada tahun 2016. Namun, ditahun 2017 dan 2018 urusan keselamatan dan perlindungan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel II-54 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	na	na	1.931	1.412	766
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar.	na	na	1.825	1.482	1.363
3	Persentase Besaran pencarikerja yang terdaftar yang ditempatkan.	na	na	94.50%	95.30%	56,20%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, 2021

Hal lain yag perlu menjadi perhatian dalam urusan ketenagakerjaan adalah penempatan pencari kerja. Pada tahun 2020, sebanyak 56,20% pencari kerja yang terdaftar telah ditempatkan. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, dimana dari sebanyak 1.931 tenaga kerja yang terdaftar, ditempatkan sebanyak 1825 orang atau 94.5% pada tahun 2018 dan sebanyak 95,30% pencari kerja ditempatkan pada tahun 2019. Permasalahan khusus penyebab penempatan kerja yang rendah pada tahun 2020 adalah karena sangat sedikit perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada tahun 2020 karena pandemi, bahkan sebagian perusahaan melakukan pengurangan karyawan pada masa pandemi COVID-19. Selain karena adanya pandemi, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ini kerap terkendala tidak cocoknya antara spesifikasi dan kemampuan dari pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Hal ini pula yang terkadang menyebabkan tenaga kerja hanya bekerja dalam kurun waktu yang sebentar saja, kemudian kembali menjadi pengangguran terbuka dengan mencari pekerjaan baru.

1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diukur dari berberapa indikator penting. Keberdayaan perempuan dari proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada periode 2016-2020 sebesar 8.89% dari total kursi DPRD yang ada. Keberdayaan perempuan dari aspek partisipasi perempuan dalam pekerjaan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan, yaitu dari 18,00% pada tahun 2017, menjadi 17,23% pada tahun 2018.

Kekerasan dalam keluarga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan dapat dikontrol. Rasio KDRT selama periode 2016-2018 hanya sebesar 0,01, sedangkan pada tahun 2019 sedikit meningkat menjadi 0,04. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama periode 2016-2020.

Tabel II-55 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	8.9	na	8.9	8.9	na
2	Rasio KDRT	0.01	0.01	0.01	0,04	na
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	na	18.00	17.23	na	na
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	52	65	100	100	100
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	na	100	100	100	100
7	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	na	47.22	1.39	na	na
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	na	100	100	100	100
9	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	103.2	102.2	115.4	na	na
10	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	77.91	99.41	97.95	na	na
11	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	78.61	82.48	84.19	100.86	115.03

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.3 Urusan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten. Ketersediaan pangan utama menjadi penting untuk menjamin kebutuhan asupan energi dan protein bagi semua peduduk, karena pemenuhan pangan bagi penduduk merupakan kewajiban pemerintah untu memenuhi hak azasi manusia. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam urusan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meski sedikit menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 176,35 kg/kapita dan pada tahun 2019 menjadi 172,63 kg/kapita. Namun jika dibandingkan dengan tahu 2015 lalu perkembangan ketersedian pangan utama sudah jauh bertumbuh. Hal dikarenakan jumlah produksi meningkat yang didapat dari jumlah

produksi dari dalam daerah dan dari luar daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Serta adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat melalui program swasembada pangan.

Tabel II-56 Indikator Urusan Pangan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn)	110,00	118,28	128,22	176,35	172,63
2	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari)	2.602	2.710	2.842	3.186	3.142
3	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	63,99	68,98	73,79	78,36	73,94
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100	70	75.75	70,58

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.

Pasokan bahan pangan untuk menjamin konsumsi penduduk telah dapat dipenuhi di Kabupaten Bengkalis selama periode 2015-2019. Ketersediaan energi pada tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis telah melebihi standar yang ditetapkan, dimana dalam Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaaan pangan adalah 2.400 kalori/kapita/hari. Begitu juga halnya dengan ketersediaan protein pada tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi standar yang dianjurkan untuk ketersediaaan protein adalah 63 gram/kapita/hari. Dari aspek ketersediaan energi dan protein telah terpenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk.

Namun, perhatian pada aspek daya beli dan pemerataan penyebaran atau distribusi bahan pangan agar dapat diakses dengan mudah dan murah sampai pada tingkat rumah tangga masih sangat diperlukan, terutama pada beberapa wilayah terluar sepertu pulau Rupat. Jaminan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek ketersediaan, tetapi juga aspek distribusi dan konsumsi. Kemampuan konsumsi akan ditentukan oleh daya beli dan pengetahuan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, urusan pangan tidak hanya mengurusi ketersediaan tetapi juga advokasi dan pembinaan pengetahuan pangan dan gizi bagi masyarakat.

1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit di

dalam menertibkan aset. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2016 persentase luas lahan bersetifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,98%, jumlah ini tidak banyak mengalami perubahan (cederung stagnan) hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang sangat signifikan. Dimana, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 3,93%.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bengkalis dapat ditingkatkan, agar tidak terjadi berbagai masalah seperti konflik pertanahan.

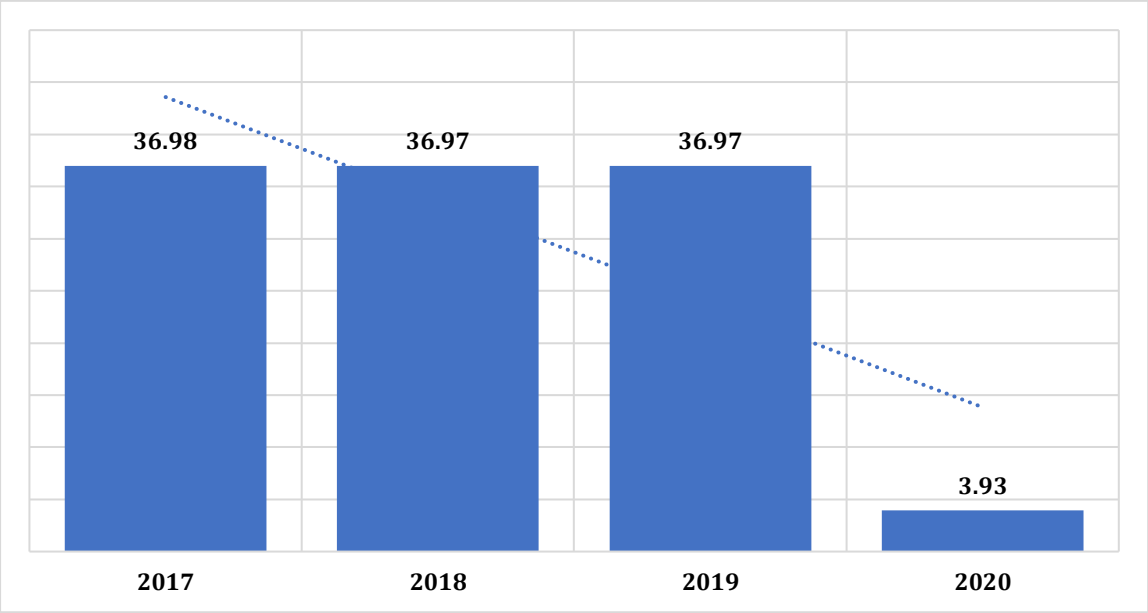

Sumber: Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-32 Persentase Luas Lahan Bersetifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2020

1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengelolaan limbah, izin lingkungan, dan persentase penanganan sampah. Capaian kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator, di antaranya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk capaian indeks kualitas air di Kabupaten Bengkalis dalam tiga tahun terakhir masih berada pada kategori sedang, yaitu mencapai 50,95 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas air; dari 5 (lima) sungai yang dilakukan pengukuran pada parameter BOD, COD dan TSS, kelimanya masih berada pada status cemar ringan dengan Indeks Kualitas Air berada pada angka 50,95.

Sementara itu, Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018mencapai 90,43. Dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berada pada kategori sangat baik. Pada tahun 2019 Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan menjadi 94,90 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi

96,51. Di samping itu, Indeks Kualitas Udara hasil pengukuran kualitas udara dengan parameter SO2 dan NO2 pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 96,51.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis berada pada angka 54,36 pada tahun 2018. Kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 52,60 pada tahun 2019. Terakhir 56,73 pada tahun 2020.

Sementara itu, untuk persentase penanganan sampah didapat dengan menghitung perbandingan antara volume sampah yang ditangani terhadap produksi/timbulan sampah. Pada tahun 2018 persentase penanganan sampah mencapai 66,71%. Hal ini didukung oleh tingkat penanganan sampah yang dipengaruhi kemampuan armada (kapasitas muatan alat angkut dan jumlah rotasi).

Tabel II-57 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2020

NO.	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
I.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				
	1. Indeks Kualitas Air	indeks	55	61,61	50,95
	2. Indeks Kualitas Udara	indeks	90,43	94,90	96,51
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,36	52,60	56,73
II.	**Pengelolaan Limbah B3**				
	1. Jumlah Limbah B3 yang dikelola	ton	na	123.773	651,265
	2. Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	izin	15	25	22
III.	**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**				
	1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	perusahaan	57	54	23
	2. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)	orang	2	2	na
V.	**Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**				
	1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	kelompok	35	70	57
	2. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	kelompok	14	43	22
VI.	**Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkugan**				

NO.	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
	1. Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas kecamatan yang ditangani	pengaduan	14	13	18
VII	**Pengelolaan Sampah Kabupaten**				
	1. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus	%	na	na	na
	2. Persentase Jumlah Sampah Terkurangi melalui 3R	%	10,50%	14,12%	15,50%
	3. Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	31,87%	31,87%	31,87%
	4. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	64,80%	65,06%	68,12%
	5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	%	70%	70%	70%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Capaian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mencapai 651,256 ton limbah, dengan Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten sebanyak 22. Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang berjumlah 25 izin.

Sementara itu Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat hanya sebesar 57 kelompok, berkurang 13 kelompok dibanding tahun 2019. Sedangkan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pemberian penghargaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebanyak 22 kelompok, berkurang 23 kelompok dibanding tahun 2019. Penurunan capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan penjagaan protokol kesehatan dan pelarangan perkumpulan banyak orang, membuat beberapa kegiatan di luar jaringan sulit dilakukan.

Selanjutnya, Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas Kecamatan yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 18 pengaduan yang tertangani. Penanganan pengaduan pada tahun 2020 lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 hanya 14 pengaduan yang tertangani dan pada tahun 2019 hanya 13 pengaduan yang tertangani.

Indikator pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami sedikit perbaikan. Dimana, Persentase Jumlah Sampah Terkurangi melalui 3R meningkat dari 10,50% pada tahun 2018 menjadi 15,50% pada tahun 2020. Sementara itu, Persentase Cakupan Area Pelayanan persampahan masih stagnan di angka 31,87% dalam tiga tahun terakhir. Untuk indikator Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada tahun 2020 sebesar 68,12%, lebih baik dibanding tahun 2019 sebesar 65,06%.

Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan tingkat kerusakan pantai akibat abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pantai terabrasi dengan tingkat kerusakan tinggi, sedang, dan rendah.

1.3.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur melalui beberapa inidkator seperti jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel II-58 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasioanal Bebasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik	344.732	347.822	344.278	370.090	419.275
4	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	96%	98%	92%	na	108%
5	Rasio pasangan berakte nikah	2,29	43	18,93	na	na

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2021

Secara umum capaian indikator administrasi dan catatan sipil di Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik. Hingga 2020 cakupan kepemilikan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis mencapai 108% dari total 389.696 penduduk yang wajib memiliki KTP di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menunjukkan adanya pelayan yang baik dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan tingginya kesadaran masyarakat untuk tertib secara administrasi kependudukan.

Tabel II-59 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Bengkalis	41,91%	51,14%	62,47%	93,91%
2	Bantan	50,69%	61,10%	80,53%	104,61%
3	Bukit Batu	42,88%	47,19%	75,98%	96,48%
4	Mandau	42,07%	50,52%	63,79%	96,42%
5	Rupat	28,12%	37,91%	52,62%	98,25%

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
6	Rupat Utara	31,55%	42,05%	49,31%	104,04%
7	Siak Kecil	51,05%	65,19%	80,66%	104,95%
8	Pinggir	30,75%	36,86%	48,48%	77,81%
9	Bandar Laksamana	37,00%	41,29%	65,56%	98,92%
10	Talang Muandau	24,87%	30,02%	42,13%	90,45%
11	Bathin Solapan	41,41%	49,44%	60,50%	92,45%
Kabupaten Bengkalis		**39,78%**	**48,19%**	**61,72%**	**94,30%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2021

Persentase kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Upaya pemerintah daerah dalam penertiban administrasi pencatatan sipil dengan memperbaiki pelayanan catatan sipil telah menunjukkan perbaikan dalam pencatatan akte kelahiran di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 39,78% jumlah kepemilikan akte kelahiran dari total 112.924 penduduk yang wajib memiliki akte Kelahiran. Namun, perbaikan pelayanan catatan sipil pemerintah daerah telah membawa perubahan besar, sehingga pada tahun 2020 sudah 94,30% jumlah kepemilikan akte kelahiran dari total 182.486 penduduk yang wajib memiliki akte kelahiran.

Tabel II-60 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang Memiliki KIA	Jumlah Anak yang Seharusnya Memiliki KIA	Persecatase Kepemilikan KIA
1	Bengkalis	9713	24323	39,93%
2	Bantan	6430	11499	55,92%
3	Bukit Batu	3053	6383	47,83%
4	Mandau	4468	45538	9,81%
5	Rupat	4321	9939	43,48%
6	Rupat Utara	2821	4218	66,88%
7	Siak Kecil	3353	7567	44,31%
8	Pinggir	1478	19306	7,66%
9	Bandar Laksamana	1884	5138	36,67%
10	Talang Muandau	1786	7781	22,95%
11	Bathin Solapan	3069	28714	10,69%
Kabupaten Bengkalis		**42376**	**170406**	**24,87%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2021

Sementara itu dari indikator kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 baru mencapai 24.87%. KIA yang merupakan bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya merupakan salah satu program baru yang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkannya melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena itu proses penerbitan KIA ini masih dalam tahap pengembangan menuju penyempurnaan sistem penerbitan, sehingga masih banyak penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum memilikinya. Kegiatan sosialisasi

mengenai pentingnya KIA dapat menjadi salah satu solusi dalam mendorong kesadarab masyarakat untuk membuat KIA bagi anak berusia 17 tahun kebawah.

1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui jumlah BUMDesa aktif, kondisi keaktifan LPM, PKK dan Posyandu. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun 2016-2020 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian yang aktif dan adanya penyertaan modal ke BUMDesa aktif. Selain itu keaktifan bumdes juga didukung dengan kondisi sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis yang sangat baik. Dimana dari total 136 desa di Kabupaten Bengkalis, semuanya memiliki sarana prasarana perkantoran yang sangat baik. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-61 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	BUM Desa Aktif	136	136	136	136	136
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	136	136	136	136	136
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155	155
4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	7	7	7	7	7
5	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2021

Indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya adalah persentase LPM dan PKK aktif di Kabupaten Bengkalis. Dalam lima tahun terakhir jumlah LPM di Kabupaten Bengkalis sebanyak 155 dan sudah aktif 100%. Hal ini menunjukkan bahwa LPM dan PKK di Kabupaten Bengkalis sudah berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam penggerak kesejahteraan keluarga.

Indikator lain dalam urusan pemberdayaan masyarakat adalah persentase posyandu aktif di Kabupaten Bengkalis. Pada periode 2016-2020 dari 592 posyandu yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah 100% terkategori posyandu aktif. Ini berarti sebanyak 592 sudah secara aktim memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak.

1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mengetahui perkembangan indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-62 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB		0,17	28,8	28,8	28,8
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		3,13	3,13	3,13	3,13
Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk			-	1	1
Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan		6 Sektor	-	6	6
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan			1	1	1
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	3	3	3	3	3
Rasio Akseptor KB		0,54	68,25		
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	0,37	0,37	56,65	63,65	68,25
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	15,4	15,4	28	33	33
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun		0,37	0,92	0,98	0,98
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11	11	14,9	28,78	19,50
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0,12	8,5	8,78	10,43
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi		0,85	56,9	63,68	68,25
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB		42	90,4	69,55	55,29
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) berKB		56	75,77	48,81	48,81

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB		70	67,51	56,5	42,91
Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) di setiapKecamatan	0,25	2,18		1	1
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa		6,18	40	45	55
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk			25	25	25
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri			-	77	80
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan		465	465	465	465
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100	100	100	100	100
Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100	100
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100	100	100	100	100
Persentase Remaja yang Terkenal Infeksi Menular Seksual (IMS)		-	-	0	0
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga		46,55	50	55,50	75,01
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		50	55	55	60
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita		21,46	21,46	21,46	21,46
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes		100	100	100	100

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, 2021

Indikator kinerja urusan pengendalian penduduk menunjukkan bahwa beberapa program sudah mencapai target dengan sangat baik, sementara beberapa program menunjukkan capaian kurang baik.

Dianta kegiatan dengan capaian sangat baik yaitu mencapai 100% adalah Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa, Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan dan Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat.

Sementara itu di antara program yang perlu lebih diperhatikan adalah Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini perlu ditanggulangi karena semakin meningkatnya kelahiran remaja, maka akan semakin tinggi resiko terjadinya kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi saat lahir.

1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur salah satunya melalui indikator jumlah uji kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah uji kir sebanyak 11.470 kali. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan signifikan dengan uji kir sebanyak 23.033 kali. Hingga tahun 2019 telah dilakukan uji kir sebanyak 23.147 kali. Namun, pada tahun 2020 jumlah uji KIR menurun drastis hingga 14.893 kali. Penurunan uji KIR pada tahun 2020 ditenggarai karena adanya pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia

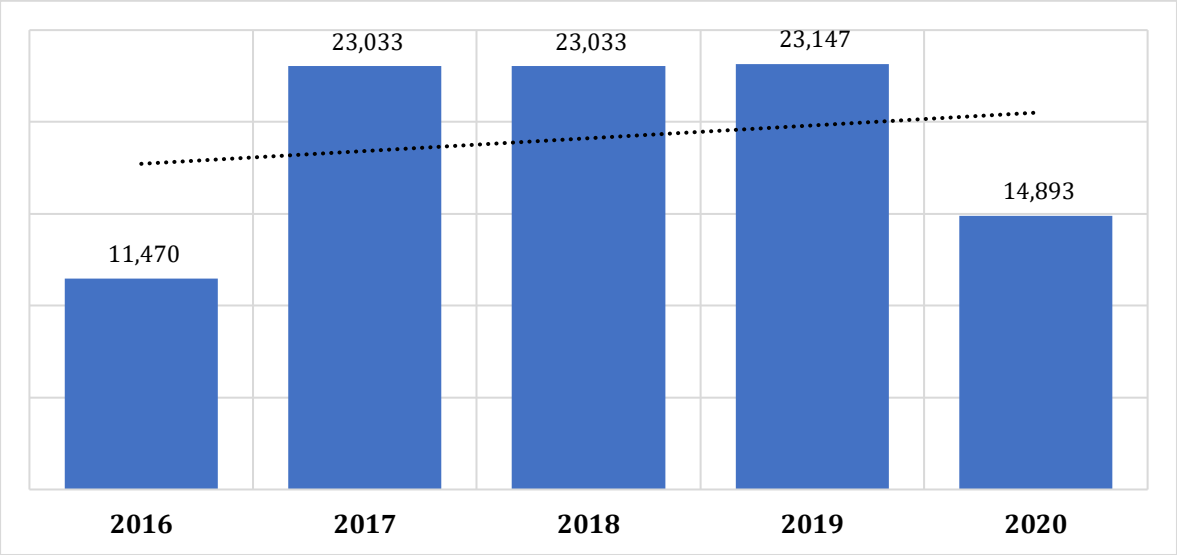

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-33 Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Selain melakukan uji kir angkutan umum, masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi ukuran kinerja dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui perkembangan indikator Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-63 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	-	-	-	276.460	150.302
Rasio Izin Trayek	-	0,000089	0,008909	0,000903	0,000893
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	11,470	23.033	23.033	23.147	14.893
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	88	97	97	97	98
Persentase Layanan Angkutan Darat	1.22	0,28	0,28	3	0,35
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum				6,91	57,35
Pemasangan Rambu-rambu	16,33	8,00	115,7	2,18	0,20
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00552	0,00552	0,01185	0,01002	0,01077
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	20.141	26.445	26.445	1.091.610	909,552
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	918.663	1.041.610	965.054	1.368.070	832.251

Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum terus meningkat setiap tahunnya, terutama dalam periode 2016-2019. Bahkan pada tahun 2019 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun umum mencapai 1.368.070. Meskipun pada tahun 2020 jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal berkurang menjadi 832.251, tapi secara tren pertumbuhan arus orang/barang akan mengalami peningkatan kembali pada tahun yang akan datang. Peningkatan ini ditenggarai oleh bertambah baiknya fasilitas dan pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun. Hal ini tentu diharapkan dapat membawa kelancaran perekonomian Kabupaten Bengkalis. Semakin lancar arus orang dan barang, maka akan semakin lancar pula perekonomian daerah berjalan.

Untuk indikator pemasangan rambu-rambu terlihat mengalami penurunan terutama pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 pemasangan rambu-rambu telah melampaui target yaitu sebesar 115,7% dari total rambu-rambu yang tersedia. Sehingga pada tahun berikutnya pemasangan rambu-rambu menjadi lebih sedikit. Selain itu, keberadaan pandemi Covid-19 telah membuat beberapa anggaran terkena *refocusing* sehingga pada tahun 2020 beberapa program, termasuk pemasangan rambu-rambu belum dapat dilaksanakan.

1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet dan cakupan layanan telekomunikasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-64 Perkembangan Indikator komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	14,16%	19,12%	29,96%	29,96%	29,96%
Cakupan Layanan Telekomunikasi desa/kelurahan	na	na	76,12%	80,00%	96,32%
Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	na	na	24%	100%	100%
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet	na	na	23,25	23,25	23,25
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	na	na	29,96	29,96	29,96
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	na	na	21,43	21,43	21,43
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon	na	na	1,41	1,41	1,41
Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular	na	na	64,66	64,66	64,66

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet pada tahun 2016 sebesar 14,16% dan terus mengalami peningkatan menjadi 19,12% pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 29,96% pada tahun 2018 hingga pada akhir tahun 2020. Hal ini tentu dilatarbelakangi dengan maraknya penggunaan telpon pintar dewasa ini, terutama pada generasi milenial dan generasi Z.

Sementara itu, untuk indikator cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 96,32% atau mencapai 131 dari total 155 desa/keluarahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 80% dan tahun 2018 hanya mencapai 76,12%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini sudah sangat baik perkembangannya dari tahun ke tahun.

Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, yaitu mencapai 100% pada tahun 2020. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2019 yang juga telah berhasil mencapai 100%. Hal ini tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi yang semakin memudahkan inovasi di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Indikator lain, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet di kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 sudah sebesar 23,25% penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan ponsel dan mengakses internet. Hal ini menunjukkan persentase penduduk yang memiliki ponsel pintar untuk mengakses internet masih stagnan dan belum

menunjukkan perkembangan yang berarti. Begitu pula dengan Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi baru mencapai 21,43% pada tahun 2018-2020. Indikator rumah tangga yang memiliki komputer pribadi ini juga masih stagnan dalam tiga tahun terakhir.

Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon di Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 1,41% dari total rumah tangga yang ada pada periode 2018-2020. Kecilnya rumah tangga yang memiliki telepon ini disebabkan sebagian besar masyarakat sudah beralih menggurnakan telepon seluler yang lebih multifungsi dan mudah dibawa kemana-mana. Hal ini terlihat dari Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 64,66% pada periode 2018-2020.

Sementara itu, indikator lain dalam urusan komunikasi dan informatika adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yaitu pada tahun 2020 sudah mecapai 37 KIM per kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan dengan jumlah Kim terbanyakl adalah Kecamatan Rupat dengan 114 KIM. Sedangkan kecamatan Tua;ang Muandau sama sekali belum memiliki Kelompok Informasi Masyarakat.

Tabel II-65 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Kecamatan	JUMAH KIM	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
1.	Bengkalis	1	34	34
2.	Bantan	1	8	8
3.	Siak Kecil	1	16	16
4.	Pinggir	1	19	19
5.	Mandau	1	17	17
6.	Bukit Batu	1	13	13
7.	Rupat	1	114	114
8.	Rupat Utara	1	87	87
9.	Bandar Laksemana	1	56	56
10.	Bathin Solapan	1	81	81
11	Talang Muandau	1	-	-
	Kabupaten Bengkalis	**12**	**445**	**37**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 persentase koperasi aktif sebesar 33.91% dan hingga akhir tahun 2020 persentase koperasi aktif mencapai 43,70%. Tren peningkatan ini tentu disebabkan oleh bertambah banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2016 hanya terdapat sebanyak 293 koperasi aktif, lalu meningkat menjadi 323 pada taun 2017 dan sebanyak 334 pada taun 2018. Jumlah koperasi aktif kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 348 unit koperasi. Meski cenderung mengalami peningkatan, kumlah koperasi aktif masih jauh dari potensi optimal. Ada lebih dari 50% koperasi di Kabupaten Bengkalis yang tidak aktif. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena koperasi adalah

kekuatan ekonomi rakyat yang jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk UKM non BPR/LKM aktif capaiannya sudah sangat baik. Hingga tahun 2020 akhir sudah sebanyak 99.36% UKM non BPR/LKM yang aktif di Kabupaten Bengkalis.. Capaian ini tentu perlu diapresiasi secara positif karena menjadi tanda bahwa perekonomian UKM non BPR di Kabupaten Bengkalis cukup hidup dan berkontribusi baik bagi masyarakat.

Selanjutnya persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bengkalis menunjukkan jumlah yang sangat dominan, mencapai 99,38% dari semua jenis usaha yang ada di kabupaten Bengkalis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Secara lengkap indikator urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel II-66 Perkembangan Indikator Koperasi dan UKM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	33.91%	38.45%	37.99%	42.33%	43,70%
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	96.62%	97.58%	99,38%	99,39%	99,36%
Persentase BPR/LKM Aktif	44.84%	45.45%	47,84%	47,84%	47,84%
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96.45%	97.43%	99.40%	99.41%	99,38%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis

1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu jumlah investor berskala nasional, nilai realisasi investasi, rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai realisasis PMDN. Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 PMA berjumlah 157 dan ditahun 2019 naik menjadi 180 investor. Pada tahun 2020 jumlah investor berskala nasional sedikit menurun menjadi 161 investor.

Jika dilihat dari nilai investasi, pada tahun 2018 nilai investasi berskala nasional berjumlah 1.941.751.700.000 rupiah. Jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2019 meningkat 245% dibanding tahun 2018 menjadi 6.693.783.700.000 rupiah. Terakhir, nilai investasi berskala nasional pada tahun 2020 menurun 21% dibanding tahun 2019 menjadi 5.264.557.600.000 rupiah. Penurunan nilai investasi dan jumlah investor berskala nasional pada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis disinyalir karena memburuknya perekonomian global yang mengakibatkan lemahnya perdagangan internasional pada masa pandemi Covid-19.

Indikator lain dari urusan penanaman modal adalah rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkalis. Dimana capaian indikator ini pada tahun 2020

menunjjukan adanya perbaikan dibanding tahun 2019. rasio daya serap tenaga kerja dari PMA/PMDN di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 adalah sebesar 20,58. Ini artinya, dari setiap penaman modal berskala nasional di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 mampu menyerap setidaknya 20 tenaga kerja.

Tabel II-67 Perkembangan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 - 2020

KETERANGAN	2018	2019	2020
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	157	180	161
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.941.751.700.000	6.693.783.700.000	5.264.557.600.000
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	26,07	18,91	20,58
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Milyar Rupiah)	420.355.900.000	4.401.854.200.000	5.208.743.200.000

Sumber: DPMTSP Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersetifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II-68 Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan olahraga (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelatih yang bersetifikasi(%)	79%	82%	73,33%	73,33%	73,33%
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	na	na	na	100%	100%
Jumlah atlit berprestasi tingkat Nasional	48	49	45	49	na
Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional.	na	na	6	1	na
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75%	80%	80%	80%	80%
Persentase wirausaha muda (%)	70%	70%	80%	80%	75%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2016-2019 cakupan pembinaan olaraga sudah sebesar 100%. Ini berarti, dari 40 cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pembinaan olahraga ini juga diikuti dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi yang cukup baik, mencapai 73,33% pada tahun 2020, atau mencakup 88 dari 120 pelatih yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Cakupan pembinaan atlet muda hingga tahun 2020 sudah mencapai 100%. Dengan demikian dari 473 atlit muda yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pandemi, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan pembinaan kepada atlet muda dengan memperhatikan aturan dan himbauan yang berlaku.

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 49 atlit berprestasi nasional dan sebanyak 1 atlit berprestasi internasional. Untuk atlit berprestasi nasional mengalami peningkatan disbanding tahun 2018 dimana jumlah atlit berprestasi nasional adalah sebanyak 45 atlit. Ini artinya dari tahu 2018 ke tahun 2019 telah terjadi peningkatan atlit berprestasi nasional sebanyak 2.76%, namun secara umum dalam lima tahun terakhir tidak banyak peningkatan atlit berprestasi. Untuk tahun 2020, karena adanya pelarangan berbagai kerumunan masal, membuat berbagai pertandingan olahraga dihentikan sementara, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga tidak ada prestasi atlet pada tahun 2020.

Untuk persentase wirausaha muda juga cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 70% wirausaha muda. Jumlah ini meningkat seiring animo masyarakat yang lebih mandiri dengan memulai usaha sendiri. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 75% wirausaha muda di Kabupaten Bengkalis. Capaian tahun 2020 sedikit menurun dibanding tahun 2019 karena banyak usaha masyarakat yang terhenti selama pendemi Covid-19.

1.3.2.14 Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Bengkalis dapat diukur oleh indikator ketersediaan Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB". Buku Kabupaten Bengkalis Dalam Angka telah tersedia setiap tahunnya, adapun yang telah dirilis sampai dengan tahun 2020. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten Bengkalis, dimana pada tahun 2020 juga telah tersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-69 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.15 Urusan Persandian

Kabupaten Bengkalis telah menggunakan persandian dalam mengelola informasi penting daerah. 76% dari perangkat daerah atau 35 PD belum memiliki akunsanapati persandian pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 sudah 100% perangkat daerah memiliki akun sanapati yang digunakan dalam persandian.

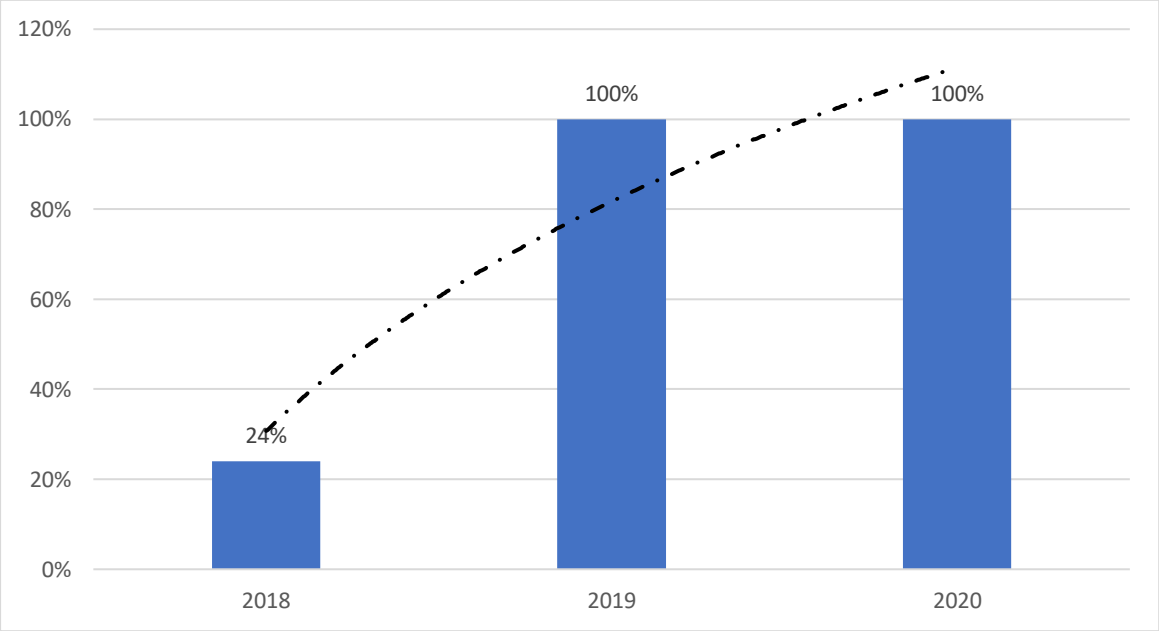

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2021

Gambar II-34 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis 2020

1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan. Lalu pada tahun 2018 dan 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya sebanyak 6 kegiatan saja. Terakhir pada tahun 2020 penyelenggaraan festifal seni dan budaya hanya berlangsung satu kegiatan saja, dikarenakan situasi pandemi yang menuntut berbagai perencanaan yang telah dilakukan di tahun 2020 tidak berjalan seperti biasanya.

Sementara itu, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 9 situs. Kemudian pada tahun 2017meningkat menjadi 11 situs yang dilestarikan, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 14 situs dan tahun 2019 meningkat menjadi 15 situs cagar budaya yang dilestarikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2020 pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis berjumlah 15 situs. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya identifikasi dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lebih baik, semakin baiknya

pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya, serta semakin optimalnya pengelolaan museum dan pengelolaan barang- barang bersejarah.

Jika dilihat secara persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada, capaian pada tahun 2020, sebesar 58%, cenderung lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2016 sebesar 2020. Namun demikian, hal ini bukan berarti adanya penurunan kinerja pelestarian oleh pemerintah daerah, justru sebaliknya. Penurunan capaian ini disebabkan pada tahun 2020 pemerintah daerah semakin gencar menginventarisir dan mendata kekayaan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bengkalis, sehingga kepemilikan benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Bengkalis meningkat menjadi 26 situs, dari sebelumnya hanya 14 situs budaya pada tahun 2020. Upaya pemerintah daerah dalam mendata kekayaan budaya milik daerah ini sangat perlu diapresiasi karena sangat berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan.

Sementara itu, untuk jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 9dan hingga pada tahun 2020meningkat menjadi 15. Adapun secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-70 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 kegiatan	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9 situs	11 situs	14 situs	15 Situs	15 Situs
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	9	11	12	14	26
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100%	100%	116%	107%	58%
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	11	12	15	15

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan diukur melalui indikator jumlah pengunjung perpustakaan pertahun. Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 70.435 orang dan terus meningkat hingga akhir tahun 2019 mencapai 295.982 orang. Namun, Pada tahun 2020 jumlah kunjungan perpustakaan mengalami penurunan drastis menjadi 61.796 kunjungan saja. Hal ini disebabkan karena pengurangan jam buka perpustakaan karena pandemi Covid-19. Pengurangan kunjungan ini membuat persentase pengunjung perpustakaan menurun drastis hingga angka 10,94% pada tahun 2020.

Tabel II-71 Jumlah Pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	70.435	91.271	260.546	295.982	61.796
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	267.519	269.886	557.707	561.358	564.689
3	Persentase pengunjung perpustakaan	26.32%	33.82%	46.71%	52.72%	10.94%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Selain persentase kunjungan perpustakaan, terdapat indikator lain dalam urusan perpustakaan, yaitu rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator ini dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel II-72 Koleksi Buku yang Tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 2015-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	2.010	219	207	129	na
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	9.826	1.020	980	131	na
3	Rasio koleksi buku	20.45%	21.47%	21.12%	98.47%	na

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkalis tampak terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah hanya sebanyak 129 judul buku saja dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak 131. Namun untuk rasio koleksi buku cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 rasio koleksi buku hanya 19.07% saja, namun hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 98.47%.

Tabel II-73 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	116	134	145	186	295
2	Jumlah penduduk	551.683	559.081	566.228	573.003	565.569
3	Rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk	0,021	0,024	0,026	0,032	0,052

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah perpustakaan hanya sebanyak 116 unit saja, lalu mengalami peningkatan menjadi 134 unit pada tahun 2017 dan menjadi 145 unit pada tahun 2018. Jumlah pustaka kembali mengalami peningkatan menjadi 1186 pustaka pada tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020 bertambah sebanyak 109 unit perpustakaan, sehingga pada tahun 2020 jumlah seluruh perpustakaan di Kabupaten Bengkalis menjadi 295 unit.

Pertambahan jumlah pustaka ini menjadi factor penting yang menyebabkan rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahunya. Hingga tahun 2020 rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk sebesar 0.052%. Dengan rasio tersebut satu pustaka di Kabupaten Bengkalis melayani setidaknya 1.917 penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.

1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pengelolaan arsip secara baku baru pada tahun 2016 hanya mencapai 6,81% dan pada tahun 2017dan 2018 meningkat menjadi 6,7% dan 7%. Kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2019 sebesar 80%. Terakhir, pada tahun 2020 sudah 80% perangkat daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku. Ini artinya pada tahun 2020 sudah 38 dari total 46 perangkat daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pengelolaan arsip secara baku

Tabel II-74 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pengelolaan arsip secara baku	6,8%	6,7%	7,0%	80%	80%
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 adalah yang terbanyak dalam lima tahun terakhir. Sementara itu pada tahun 2018 dan 2020 tidak ada kegiatan eningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bengkalis

1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah di antaranya yaitu pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

1.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat indikator produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 produksi perikanan mencapai 7.579 ton namun sempat berkurang hingga 6.777 ton pada tahun 2018, lalu naik Kembali pada tahun 2019 menjadi 7.227 ton, namun kembali berkurang pada tahun 2020 menjadi 7.013 ton. Fluktuasi dari produksi perikanan ini terutama disebabkan oleh tidak menentunya hasil tangkapan nelayan Kabupaten Bengkalis sebagai penghasil utama perikanan di Kabupaten Bengkalis. Nelayan yang mengandalkan hasil tangkap ikan dari laut dan sumber alam lainya lima tahun terakhir mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 7.171 ton ikan dihasilkan kelompok nelayan, namun pada tahun 2020 berkurang hingga lebih dari 10% menjadi 5.948 ton hasil tangkapan ikan.

Pengurangan hasil tangkap nelayan ini harus dibarengi dengan peningkatan produksi dari hasil budi daya agar kebutuhan ikan masyarakat dapat terpenuhi.

Sering dengan perkembangan produksi ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Bengkalis cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016konsumsi ikan hanya sebesar 38,64% dari target, namun pada tahun 2020sudah mengalami perbaikan hingga mencapai 40.89% dari target.

Tabel II-75 Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan	7.579,63	6.966,83	6.777,20	7.227,69	7.013,87
Konsumsi ikan (%)	38.64	39.34	40.14	40.89	40.89
Cakupan bina kelompok nelayan	38	53	50	80	67
Produksi perikanan kelompok nelayan	7.171,44	6.634,59	6.397,67	6.262,43	5.947,97
Produktifitas Perikanan Budidaya	408,19	332,24	379,53	965,26	1.065,91

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.3.2 Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 43.925 orang, namun pada tahun

2017 mengalami peningkatan menjadi 44.800 orang. Tahun 2018 meningkat menjadi 49.321 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap minat wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bengkalis. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di Kabupaten Bengkalis

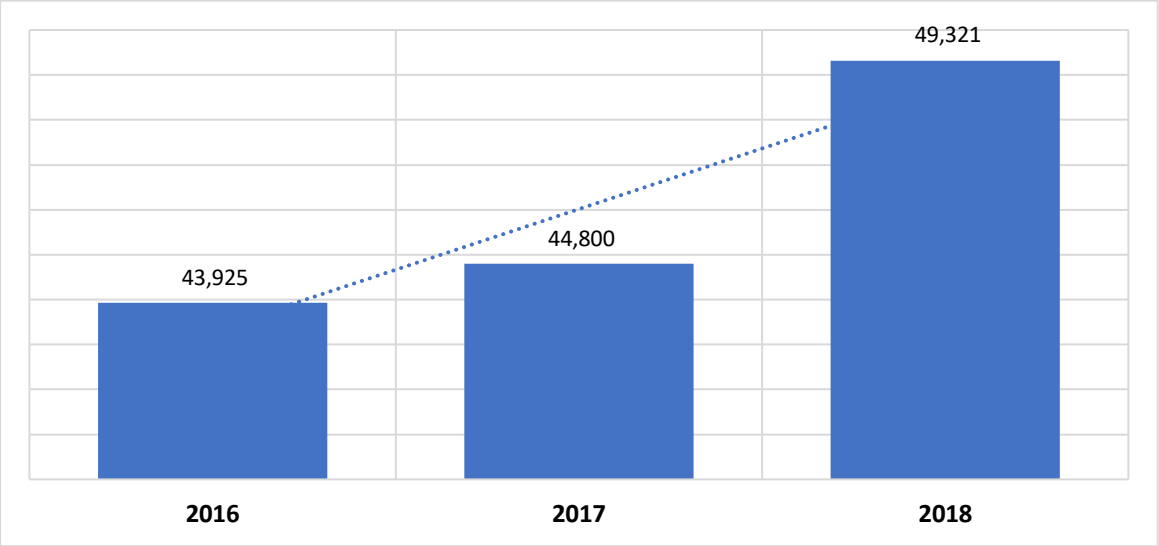

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2020

Gambar II-35 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2018

Untuk lama kunjungan wisata di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2016 hingga 2020 yaitu selama 3 hari. Lama kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya uang yang dihabiskan wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkalis. Semakin lama wisatawan tinggal maka semakin banyak kontribusi sector wisata terhadao PAD daerah. Untuk tahun 2019 kontribusi PAD dari sektor pariwisata adalah sebesar 50 juta rupiah, jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 16.000.000. Kontribusi ini disinyalir lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banyak pengeluaran wisatawan yang tidak dapat dideteksi karena pengeluaran wisatawan cenderung menyasar langsung pada masyarakat dan sulit dihitung angka pastinya.

Tabel II-76 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Bengkalis 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Lama kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
PAD sektor pariwisata	na	na	na	50.000.000	16.000.000

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.3.3 Urusan Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator produksi sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu dapat pula diliha melalui cakupan bina kelompok petani.

Produksi Sektor pertanian di kabupaten Bengkalis dalam tiga tahu terakhir cenderung berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 produksi sektor pertanian sebesar 39.534 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 37.985 ton. Terakhir pada tahun 2020 produksi sektor pertanian kembali naik menjadi 38.786 ton.

Tabel II-77 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Sektor Pertanian (ton)	na	na	39.534	37.985	38.786
Produksi Sektor Perkebunan (ton)	na	na	246.619	243.237	289.736
Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	na	na

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2021

Sementara itu, untuk Produksi Sektor perkebunan di kabupaten Bengkalis dalam tiga tahu terakhir cenderung berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 produksi sektor perkebunan sebesar 246.619 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 243.237 ton. Terakhir pada tahun 2020 produksi sektor perkebunan kembali naik menjadi 289.736 ton.

Indikator lain dari urusan pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis. Tabel berikut memberikan gambaran kontribusi sektor pertanian secara umum terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-78 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Share Terhadap Total PDRB	8,47%	9,01%	8,25%	9,22%	12,65%
Nilai Kontribusi (Juta Rupiah)	11.201.413,5	11.985.422,0	12.256.418,5	13.053.199,9	14.662.023,4

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka 2021

Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Kabupaten Bengkalis setelah pertambangan. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB daerah.

Taun 2016 sektor pertanian/perkebunan/perhutanan memberi kontribusi hingga 8.47% pada PDRB Kabupaten Bengkalis atau setara dengan 11,2 triliun rupiah. Angka ini terus bertambah menjadi 9,01% pada tahun 2017 dan menjadi 8,25% pada tahun 20178. Pada taun 2019 kontribusi sektor pertanian/perkebunan/perhutanan meningkat kembali menjadi 9,22% terhadap PDRB. Terakhir, pada 2020 kembali naik menjadi 12,65% kontribusi teradap PDRB atau setara dengan 14,6 triliun rupiah.

1.3.3.4 Urusan Kehutanan

Pengelolaan hutan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah memiliki kewenangan atas kawasan hutan, mulai dari perencanaan, perizinan, dan implementasi pengelolaan hutan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai kewenangan mengontrol proses perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan termasuk pengukuhan kawasan hutan yang secara implementasi berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengurusan kehutan oleh provinsi meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi huta, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.

Menjaga fungsi lingkungan dengan mempertahankan hutan menjadi sangat penting dalam pelestarian sumberdaya alam melalui pemeliharaan, pengendalian, pemuliaan, serta pengembangan pemanfaatan kawasa hutan untuk keseimbangan ekosistem. Pada tahun 2015, terdapat 27% luas hutan yang termasuk kategori perlindungan dan pelestarian alam (PPA) dari 903.920 Ha luas hutan di Kabupaten Bengkalis dan hutan produksi tetap dengan proporsi 39%. Hutam mangrove masih terdapat seluas 33.016 Ha atau 4% dari luas hutan Kabupaten Bengkalis. Pemanfaatan hutan mangrive untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi dengan tetap memperhatikan konservasi menjadai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Bengkalis.

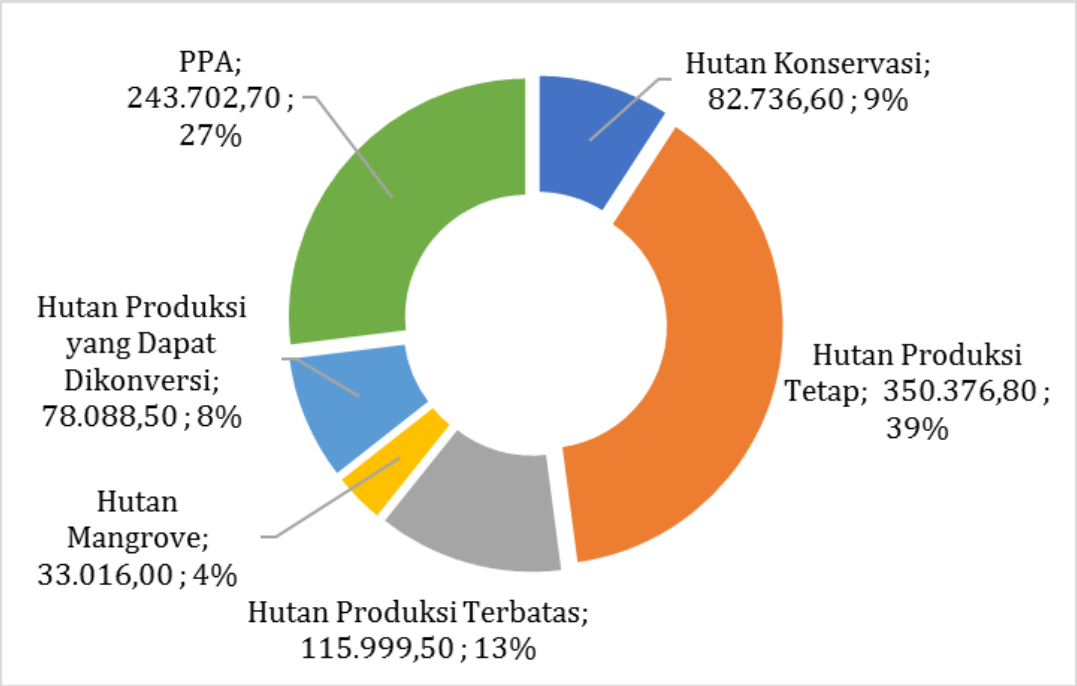

Gambar II-36 Luas Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Bengkalis

1.3.3.5 Urusan energi dan Sumber daya mineral

Ketersediaan energi listrik di kabupaten Bengkalis berdasarkan data statistik dengan daya terpasang sebanyak 226.140 KW. Produksi listrik mencapai 87085613 KWh dan listrik terjual sebanyak 327.727.861 KWh. Sementara itu dari total produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 1.631.194 KWh dipakai sendiri dan sebanyak 17.704.447 KWh mengalami penyusutaan (shrinkage)

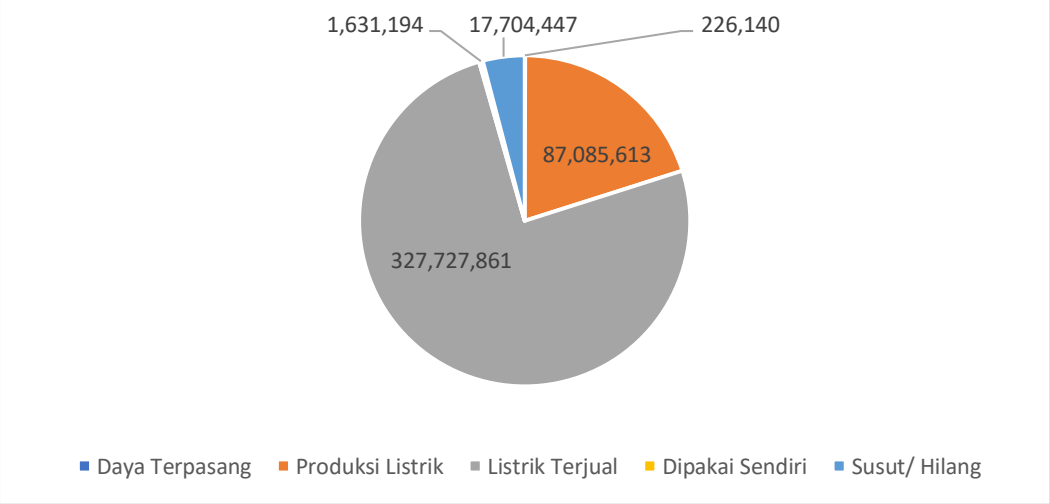

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-37 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik (dalam KWh) PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tahun 2020

1.3.3.6 Urusan Perdagangan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perdagangan dapat dilihat indikator ekspor bersih perdagangan. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan berjumlah US$. 24.039,79 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi US$ 290.602,27. Pada tahun 2018 ekspor bersih perdagangan meningkat menjadi US$. 957.474, kemudian meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2019 menjadi UD$. 250.262.690. Peningkatan ini disebabkan oleh perluasan objek ekspor perdagangan dengan semakin terbukanya kerjasama luar negeri Kabupaten Bengkalis dengan berbagai institusi di negara luar. Perolehan neraca perdagangan yang surplus di Kabupaten Bengkalis sangat erat kaitannya dengan kontribusi nilai ekspor migas yang sangat besar. Dengan demikian, capaian neraca perdagangan yang surplus saat ini sangat tergantung dengan perkembangan produksi minyak di Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi dan aktivitas perdagangan luar negeri masih ditopangoleh satu sektor, yaitu sektor perdagangan. Maka penguatan struktur perekonomian Bengkalis perlu mempertimbangkan pengembangan produksi sektor bukan mingas yang dapat mendukung aktivitas idustri dan perdagangan dimasa mendatang.

Tabel II-79 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	US$. 24.039,79	US$. 290.602,27	US$. 957.474	US$. 250.262,690	na

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.3.7 Urusan Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin. Pembinaan pengrajin memiliki arti penting bagi perkembangan industri kreatif di Kabupaten Bengkalis. Selain menyerap tenaga kerja, kelak juga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah apabila pengrajin dibina dengan baik.

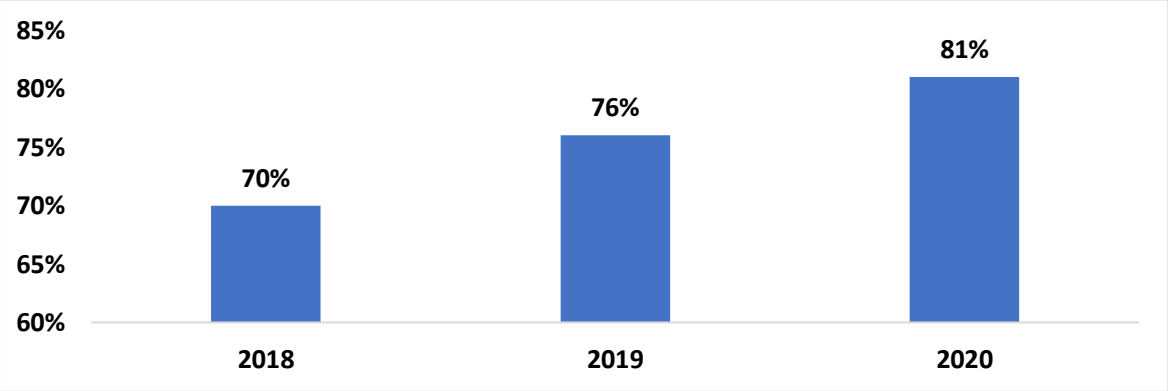

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-38 Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018- 2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok pengrajin semakin meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 70% dan tahun 2017 meningkat menjadi 76%. Kemudian tahun 2020 cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 81% pengrajin yang dibina. Hal ini dikarenakan pasar industri dan kemitraan mulai mengalami peningkatan, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mulai merata, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin mulai meningkat dan terjadi peningkatan terhadap penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku industri.

1.3.4 Fokus Penunjang Urusan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah di antaranya yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan pengawasan.

1.3.4.1 Urusan Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.

Tabel II-80 Perkembangan Indikator Perencanaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	85%	71,43%	88,89%	99,06%	88,78%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80,36%	96,02%	99,86%	99,89%	88,06%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memiliki dokumen RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025. Untuk indikator tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada yang tertuang dala Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga setiap tahunnya menyusun dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. Demikian juga halnya dengan dokumen RTRW yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Untuk persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dalm lima tahun terakhir sudah sangat baik, dengan persentase kesesuaian mencapai 88,78% hingga tahun 2020. Sementara itu penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu mencapai 88,06% pada tahun 2020.

1.3.4.2 Urusan Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan dapat diukur melalui opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase SILPA, persentase belanja pendidikan (20%), persentase belanja kesehatan (10%) dan Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-81 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2020

KEUANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SILPA	100%	100%	100%	100%	1005
Persentase SILPA terhadap APBD	0,24	0,42	6,13	5,3	5,5
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksanakan	-	-	-	-	-
Persentase belanja pendidikan (20%)	6,47	9,07	8,27	23,28	21,29*
Persentase belanja kesehatan (10%)	6,96	6,35	9,27	10,93	12,46*
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	1,6:1,5	2,26:1	1,98:1	2,48:1	1,13:1
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0.17	0,18	0,17	0,19	
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2021

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2016-2020 mendapat predikat WTP, ini artinya adanya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk persentase SILPA terhadap APBD ditahun 2020 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 persentase SILPA terhadap APBD sebesar 5.3%, sedangkan tahun 2020 sebesar 5,5%

Sementara itu, persentase belanja pendidikan (20%) pada tahun 2020 sebesar 21,29% sedikit berkurang dibanding tahun 2019 sebesar 23,28%. Persentase belanja kesehatan (10%) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 10,93% dan ditahun 2020 meningkat

menjadi 12,46%. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya pagu yang dianggarkan untuk urusan kesehatan, terutama menyangkut penangkalan dan pengobatan wabah Covid-19. Peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

1.3.4.3 Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat dapat dilihat pada indikator pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural. Pada indikator ini, pada tahun 2020 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sebanyak 48,96% dari total 1065 jabatan yang ada. Jumlah ini berkurang cukup signifikan dibanding tahun 2019 yang mencapai 71% pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural. Penurunan capaian ini merupakan dampak langsung dari pembatasan kegiatan pemerintahan berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19. Indikator lain dalam urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel II-82 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7,44	10,37	9,96	Na	Na
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	62,93	86,56	77,92	71,00	48,96
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	34	15	40	40	40
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2905	2885	1025	1025	1025
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	4521	4611	4452	na	na

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian indicator urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diketahui dari beberapa indicator seperti tabel berikut.

Tabel II-83 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2016-2020

NO	KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	30	30	30	4	4
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	30	35	75%	75%	70%
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	-	18%	42%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	-	18%	28%

Sumber: Badan Penelitidan dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, 2021

Implementasi rencana kelitbangan baru mencapai 4% dari keseluruhan rencana yang sudah diimplementasikan. Begitu pula dengan pemanfaatan hasil kelitbangan sudah mencapai 70% hingga tahun 2020. Meski begitu Balitbang Kabupaten Bengkalis sudah berusaha dengan baik untuk menerapkan inovasi-inovasi baru di daerah. Diamana kebijakan inovasi yang sudah diterapkan di daerah sudah mencapai 70% pada tahun 2020.

1.3.4.5 Urusan Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan, jumlah temuan BPK dan persentase pelanggaran pegawai. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun Inspektorat Kabupaten Bengkalis terus berusaha menjalankan fungsi pengawasan semaksimal mungkin untuk menindak lanjut temuan-temuan yang didapat. Hingga tahun 2019 Inspektrat sudah berhasil menindak lanjut 66.52% temuan.

Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai juga cenderung menurun dalam periode 2015-2019. Yaitu pada tahun 2015 pelanggaran ASN sebanyak 47 kali, namun pada tahun 2019 sudah mengalami penurunan menjadi 36 pelanggaran saja. Secara lengkap dapat dlihat pada tabel berikut

Tabel II-84 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tindak Lanjut Temuan	63,55	66,52	40,00	65,16	-
Jumlah Temuan BPK	35,08	34,8	37,3	55,66	-
Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN)	na	na	1,55%	0,53%	0,30%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2021

1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Berikut ini adalah perkembangan indikator untuk urusan penunjang atau pendukung daerah di Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-85 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Funsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, 2021

Urusan penunjang untuk indikator penelitian dan pengembangan dalam lima tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik. Dimana ketiga indikator utama udah terlaksana sesuai target yang diinginkan.

1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar 177,5 Juta Rp/RT dan hingga akhir tahun 2020 meningkat menjadi 212,62 Juta Rp/RT. Begitu juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan yang terus meningkat dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan berjumlah 112,68 Juta Rp/RT dan tahun 2020 meningkat menjadi 118,87 Juta Rp/RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-86 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Bengkalis

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Harga Berlaku (juta Rupiah)					
Total Pengeluran RT	22.795.442,71	24.847.827,89	27.020.227,81	28.548.006,89	28.988.335,15
Jumlah RT	128.938	130.667	132.337	134.337	136.337*
Pengeluaran per Kapita	177,5	190,16	204,12	212,14	212,62
Harga Konstan (Juta Rupiah)					
Total Pengeluran RT	14.528.985,25	15.231.276,93	15.996.840,85	16.437.435,81	16.205.868,97
Jumlah RT	128.938	130.667	132.337	134.337	136.337*
Pengeluaran per Kapita	112,68	116,57	120,88	122,36	118,87

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis dan olahan, 2021

Dilihat dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berdasarkan PDRB pengeluaran harga berlaku mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu jika berdasarkan harga konstan terlihat mengalami sedikit penurunan. Fenomena ini disinyalir sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat dan berkurangnya pengeluaran konsumsi masyarakat.

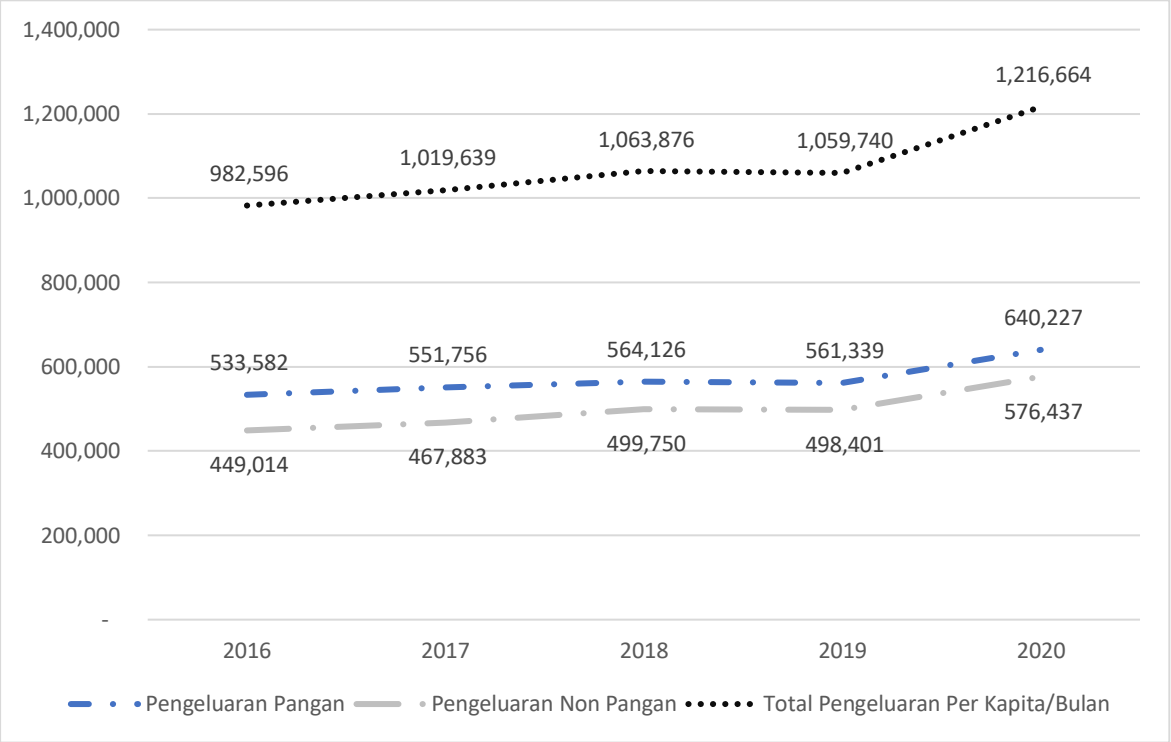

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-39 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan (dalam rupiah) di Kabupaten Bengkalis 2020

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang semakin meningkat selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita penduduk sebesar Rp. 870.432/Kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp. 1.059.740/Kapita/bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi pangan dan non pangan setiap penduduk selama sebulan semakin meningkat. Secara umum terlihat bahwa secara absolut jumlah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan non pangan.

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Proporsi pengeluaran per kapita penduduk untuk pemenuhan kebutuhan non pangan mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, proporsi pengeluaran non pangan sebesar 44,79% terhadap total pengeluaran per kapita penduduk. Kemudian pada tahun 2020mengalami peningkatan hingga menjadi 47,38%. Tidak hanya secara persentase, secara nominal pengeluaran non pangan per kapita juga mengalami kenaikan secara nominal.

Dimana pada tahun 2020 nilai pengeluaran non pangan per kapita sebesar 498.401 rupiah, kemudian meningkat 16% menjadi 576.437 rupiah. Hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan non pangan semakin besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Komponen konsumsi non pangan terbesar dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan aneka komoditas dan jasa. Proporsi pengeluaran untuk pemenuhan non pangan yang meningkat mengindikasikan kesejahteraan rumah tangga semakin meningkat.

Tabel II-87 Rata-Rata Persentase Pengeluaran Non Pangan per Kapita/Bulan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Jenis	Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Pangan (%)	55,21	54,11	53,03	52,97	52,62
Pengeluaran Non Pangan (%)	44,79	45,89	46,97	47,03	47,38

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2021

3) Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan indikator ukuran tingkat kesejahteraan petani. Nilai tukar petani mengambarkan kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup dari nilai produksi yang diperoleh. Nilai tukar petani dapat diukur pada setiap subsektor pertanian. Ketersediaan data nilai tukar petani di Kabupaten Bengkalis masih terbatas, sehingga telaah terhadap capaian kesejahteraan petani menjadi terbatas. Kabupaten Bengkalis mengukur nilai tukar petani fokus kemampuan ekonomi bidang perkebunan. Hal ini didasarkan pada peran subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dominan dalam sektor pertanian. Komoditi kelapa sawit memiliki areal paling luas dalam sub sektor perkebunan yaitu 143.784 Ha dengan produksi 1.188.285 ton pada tahun 2018. Sedangkan areal komoditi perkebunan lainnya relatif lebih sedikit, yaitu luas areal karet 30.841 Ha, kelapa seluas 6.324 Ha. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa sub sektor perkebunan sebagai penyumbang PDRB sektor pertanian dan dominasi pekerja pada lapangan usaha juga berasal dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2019 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa. Sementara NTP petani sawit berada hingga tahun 2018 berada pada NTP > 100 dimana kondisi petani sawit masih surplus dengan demikian tingkat kesejahteraan petani sawit masih baik hingga tahun 2019, sekalipun perlu adanya perbaikan dikarenakan NTP petani sawit masih dibawah tahun target 2019. Secara keseluruhan nilai tukar petani di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 adalah 81,26, mengalami defisit. Jumlah nilai yang dibayar petani untuk memenuhi seluruh pengeluaran per tahun lebih besar dibandingkan dengan nilai penerimaan yang diperoleh dari produksi pertanian.

Tabel II-88 Perkembangan NTP Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani (NTP)	na	na	97,7	95,59	118,77
NTP Petani Perkebunan					
- NTP Petani Karet	20,50	23,50	23,65	23,65*	na
- NTP Petani Kelapa	38,50	40,05	40,15	40,15*	na
- NTP Petani Kelapa sawit	105,50	110,58	112,00	112,00*	na

Sumber: LAKIP Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Kabupaten Bengkalis 2020

4) Rasio Perdagangan Terhadap PDRB

Rasio perdagangan terhadap PDRB merupakan indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara atau wilayah. Rasio perdagangan terhadap PDRB dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor tahun 2015-2019 dengan produk domestik bruto pada waktu yang sama. Rasio merupakan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Rasio ini dapat dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi sebuah negara atau wilayah.

Tabel II-89 Rasio Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Benkalis Tahun 2015-2019

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
Net Ekspor barang dan Jasa	93.393.142,01	84.954.156,06	81.987.837,92	94.312.786,42	85.083.585,84
PDRB	135.504.919,07	132.200.503,50	132.993.993,35	149.406.574,57	142.450.722,80
Rasio Exim Terhadap PDRB	68,92	64,26	61,65	63,12	59,73

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2020

Berdasarkan Tabel II-63 menunjukkan terjadinya penurunan rasio perdagangan terhadap PDRB HB dari 2015-2019. Rasio perdagangan tahun 2015 sebesar 68,92% kemudian menurun menjadi 63,12% pada tahun 2018 dengan laju penurunan pertumbuhan sebesar 1,56% per tahun. Penurunan laju pertumbuhan rasio tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan perdagangan eksport hanya tumbuh sebesar 3,71% per tahun dan import mengalami pertumbuhan negative sebesar 1,45% per tahun dan secara total laju pertumbuhan perdagangan hanya tumbuh sebesar 3,20% per tahun sementara laju pertumbuhan PDRB HB dari tahun 2012-2017 sebesar 4,93% per tahun. Oleh karena itu upaya peningkatan nilai perdagangan eksport harus terus dilakukan dengan meningkatkan nilai eksport barang dan jasa dari barang dan jasa yang bernilai tinggi dari hasil industri unggulan berupa barang akhir atau end produk. Sementara dari sisi import yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan import barang modal terutama teknologi peralatan dan mesin yang dapat digunakan untuk mengolah bahan baku yang terdapat di wilayah ini sehingga barang dan jasa yang dihasilkan bernilai tinggi atau *end produk* sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai perdagangan eksport ke depan.

5) Dana masyarakat di perbankan

Jumlah dana masyarakat pada bank di Kabupaten Bengkalis merupakan jumlah terbanyak kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2020 jumlah masyarakat pada bank mencapai 8,12 triliun rupiah. Dana ini terbagi pada giro sebanyak 709 milyar rupiah atau sebesar 8,74% dari total dana masyarakat pada bank. Sementara itu masyarakat yang memanfaatkan platform deposito sebanyak 2,5 triliun rupiah atau mencapai 30,91% dari total dana masyarakat pada bank. Sementara itu, dana masyarakat di bank lebih banyak dalam bentuk tabungan, yaitu mencapai 4,9 triliun rupiah atau sebesar 60,36% dari total dana masyarakat pada bank

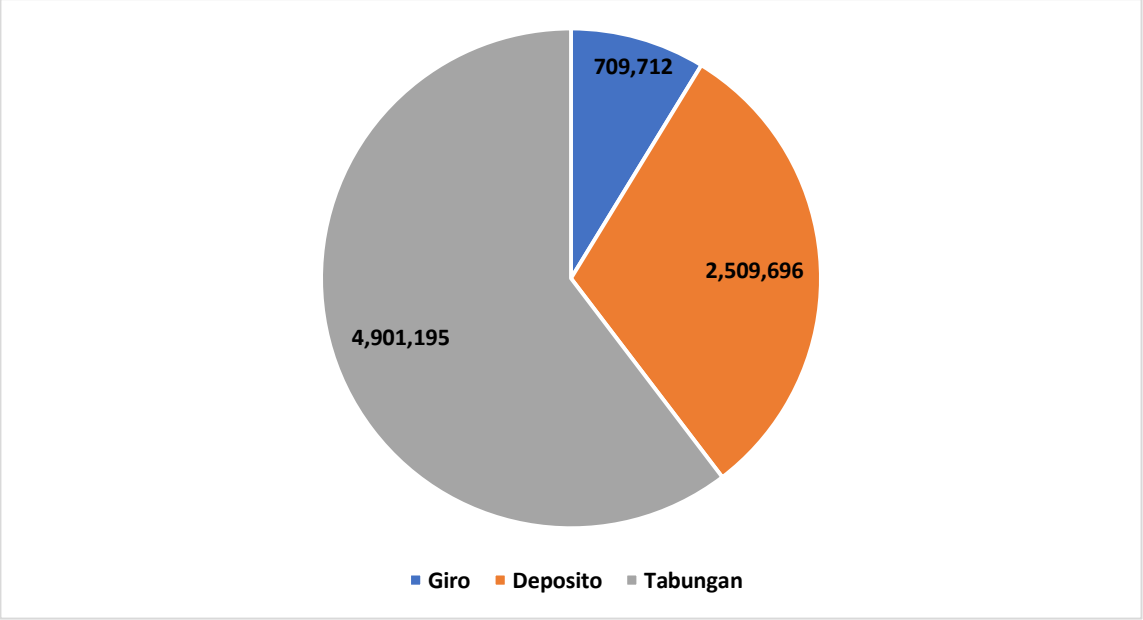

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-Dana Masyarakat pada Perbankan (dalam juta rupiah) di Kabupaten Bengkalis 2020

6) Sektor Unggulan

Sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Namun, sektor pertanian penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 33,07% pada tahun 2018. Subsektor dominan pada sektor pertanian subsektor perkebunan yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan sagu. Tercatat pada tahun 2018 produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis mencapai 1.1825,29 ton atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1.215,44 ton, dengan produktifitas kelapa sawit sebesar 8,21 ton/ha. Produksi ini meningkat lagi menjadi 1.215.440 ton kelapa sawit tahun 2019.

Tabel II-90 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebenunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2019

Komoditas Unggulan	2017		2018		2019	
	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)	Produksi (ribu ton)	Luas Areal (ribu Ha)
Kelapa Sawit	1.215.436	148.117	1.188.285	143.784	1.215.440	148.280
Karet	44.953	30.385	44.383	30.841	44.950	30.380
Kelapa	14.678	6.274	13.609	6.324	14.677	6.270

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2021

1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2018 baru mencapai 49,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis masih memerlukan pengawasan dan perizinan penggunaan lahan. Karena saat ini masih sedikit pembangunan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Ketidak sesuaian realisasi pembangunan dengan RTRW dapat mengancam kelangsungan hidup berupa deforestasi, banjir dan kebakaran lahan.

Tabel II-91 Tabel Jumlah Produksi dan Luas Areal Komoditas Utama Perkebenunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan Terhadap RTRW	na	39,05	39,05	na	na

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2020

1.4.3 Fokus Iklim Berinvetasi

1) Kriminalitas

Secara umum, fungsi angka kriminalitas ini adalah untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, informasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di wilayah Indonesia. Berikut ini adalah angka kriminalitas yang ditangani oleh Polres Bengkalis dari kurun waktu 2016-2020.

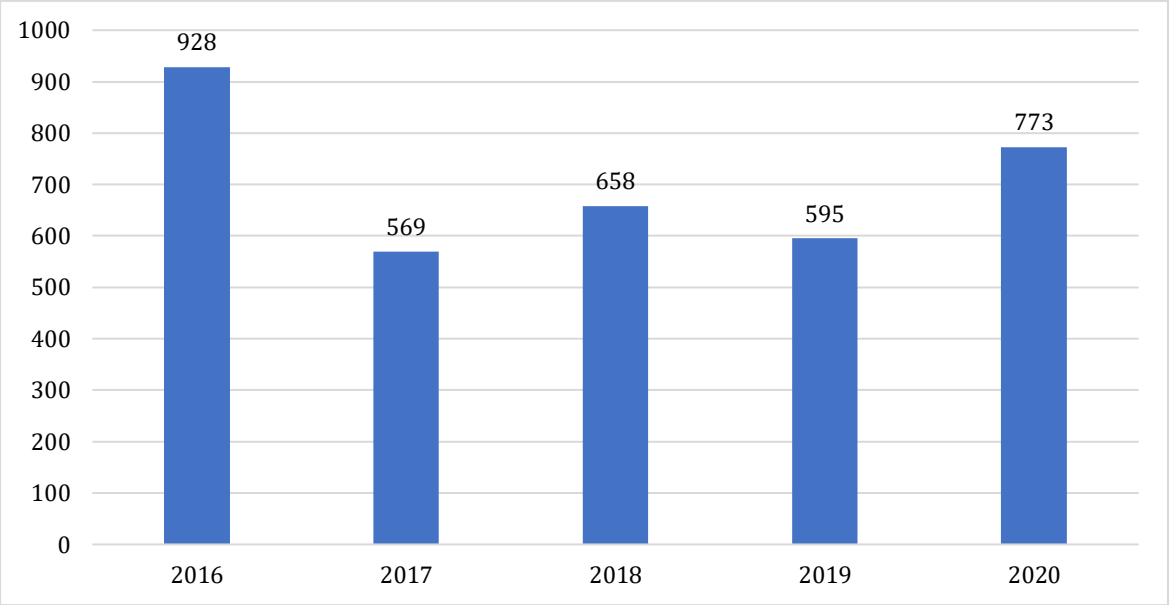

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2021

Gambar II-40 Angka Kriminalitas yang Tercatat di Kebupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah kasus kriminal yang dilaporkan ke Polres Bengkalis. Tampak pada tahun 2016 ada sebanyak 928 kasus yang dilaporkan dan turun cukup signifikan menjadi 569 kasus pada tahun 2017. Kenaikan kasus kembali terjadi pada tahun 2018 sebanyak 658 kasus yang dilaporkan, namun menurun menjadi 595 kasus saja pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 kasus kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 773 kejahatan.

Tabel II-92 Rasio Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Bengkalis 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	928	569	658	595	773
Jumlah Penduduk	551.683	559.081	566.228	573.003	565.569
Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	16,8	10,2	11,6	10,4	13,7

Sumber: Bengkalis dalam Angka 2021

Biasanya semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan semakin rentan terjadi tindak kriminalitas. Secara rasio, tindak kriminalitas di Kabupaten Bengkalis tampak mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Dalam 10.000 penduduk terjadi sebanyak 16,8 kejahatan pada tahun 2016. Rasio kriminalitas kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 10.2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11.6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10.4 kasus kriminal. Namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 16,01 kasus per 10.000 penduduk. Adanya kecenderungan penurunan kasus kriminal ini diharapkan membawa dampak positif terhadap keamanan daerah Kabupaten Bengkalis dan mengundang lebih banyak investasi di Kabupaten Bengkalis.

1.4.4 Fokus Sumberdaya manusia

1) Kualitas Tenaga kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu rasio lulusan S1/S2/S3, persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun, serta keselamatan dan perlindungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan seberapa banyak perkembangan penduduk Kabupaten Bengkalis yang mampu mencapai jenjang Pendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi tentu sangat berperan penting dalam menciptakan kualitas tenaga kerja yang baik dan memenui permintaan pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan membawa perkembangan yang baik untuk kemajuan daerahnya. Dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis semakin berkembang setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 22,15% saja, kemudian mengalami peningkatan menjadi 23,00% pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019, penduduk yang mencapai lulusan S1/S2/S3 meningkat cukup tinggi yaitu 47.53% dari jumlah penduduk.

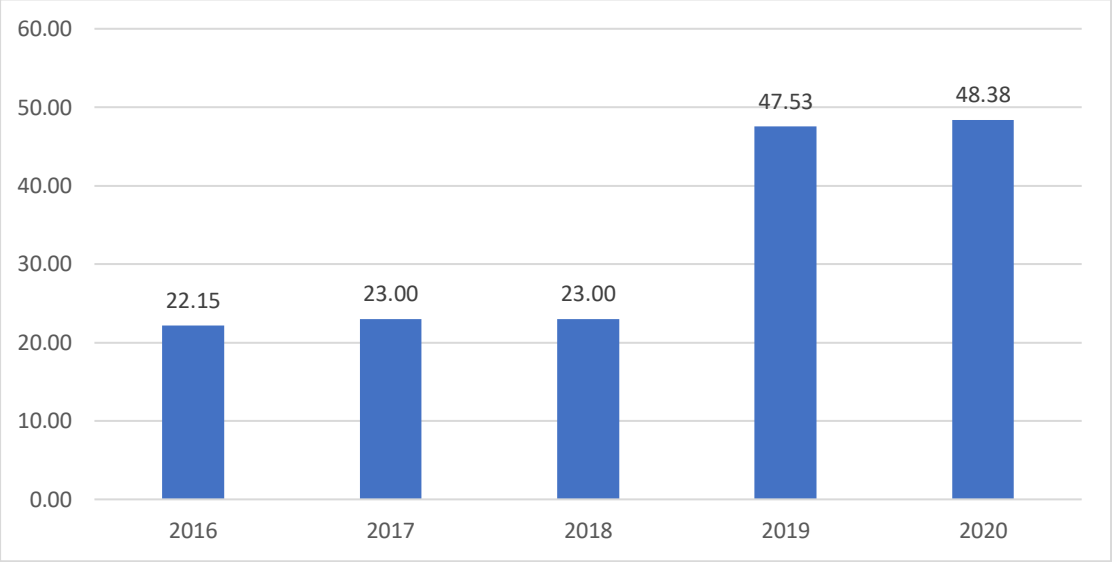

Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis, 2021

Gambar II-41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bengkalis 2016-2020

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi

Dari tahun ke tahun rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis terus berkurang. Hal ini ditenggarai karena semakin meningkatnya penduduk yang memasuki usia produktif, yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang positif. Dimana

dengan semakin rendahnya rasio ketergantungan menandakan bahwa penduduk cenderung lebih sejahtera dan beban perekonomian berkurang. Hal ini dikarenakan penduduk yang berada pada usia produktif 15-64 tahun biasanya menanggung beban perekonomian dan kebutuhan dari penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Tabel II-93 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkalis 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020*
0-14	173.705	174.197	170.416	168.567	166.372
15-64	361.111	367.095	367.989	372.007	375.974
>64	16.867	17.789	19.302	20.784	22.343
Jumlah Penduduk	551.683	55081	557.707	561.358	564.689
Rasio Ketergantungan	0.52	0.52	0.51	0,50	0,50

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2021

Dapat dilihat pada tahun 2016 dan tahun 2017 rasio ketergantungan berada pada angka 0.52. Rasio ketergantungan menurun pada tahun 2018 menjadi 0.51 dan menurun lagi menjadi 0.450 pada tahun 2019. Terakhir pada tahun 2020 rasio ketergantungan di Kabupaten Bengkalis masih berada pada 0,50. Hal ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung beban terhadap 50 orang penduduk tidak produktif, atau setara 1:2.

1.5 Evaluasi Hasil RPJMD Periode lalu

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis tentang Visi, misi, arah Kebijakan dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 2017-2021. Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan misi sampai dengan tahun 2019 disajikan pada table II-94 berikut:

Tabel II-94 Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	-2,54	-1,72	-1,67	-1,86	-3,3	2,05	**belum tercapai (<)**
1.1.2	Perkembangan PDRB (ADHK dalam Triliun Rupiah)	80,58	79,19	77,85	76,38	73,86		
1.1.3	Laju Inflasi	3,98	4,85	1,85	1,28	2,89	5,68	**melampaui (>)**
1.1.4	PDRB Perkapita (ADHK dalam Juta Rupiah)	146,06	160,5	235,8	248,6	199,99	338,81	**belum tercapai (<)**
1.1.5	Gini Ratio	0,347	0,325	0,327	0,334	0,321	0,23	**belum tercapai (<)**
1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson	6,879	5,967	5,236	4,478			
1.1.7	Persentase Kemiskinan	6,82	6,85	6,22	6,27	6,4	6,5	**melampaui (>)**
1.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**							
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46		
1.2.2	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,63	70,99	71,19	71,48	71,2	7,1	**melampaui (>)**
1.2.3	angka harapan lama sekolah	12,72	12,73	12,83	12,86	12,87	12,93	**belum tercapai (<)**
1.2.4	Rata-rata lama sekolah	8,83	8,89	9,21	9,41	9,69	8,97	**melampaui (>)**
1.2.5	Pengeluaran Per Kapita Riil	11.325	11.530	11.640	11.753	11.331		
1.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		63,87	65,99	64,3	66		
1.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka		8,62	10,05	9,62	9,31	8,65	**belum tercapai (<)**
1.2.8	Rasio kesempatan kerja		91,38	89,95	90,38	90,69		
1.2.9	Persentase Balita Gizi Buruk	0,01	0,005	0,007	0,014	0,07	0	**belum tercapai (<)**
1.2	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**							
1.2.1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100	100	**sesuai (=)**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
2.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**							
2.1.1	**Urusan Pendidikan**							
2.1.1.1	APK SD/MI	100,44	111,29	106,01	108,63	106,72	100	melampaui (>)
2.1.1.2	APK SMP/MTs	96,86	88,18	94,77	95,01	97,41	100	belum tercapai (<)
2.1.1.3	APK SMA/MA/SMK	70,07	75,17	79,12	77,29	79,38	100	belum tercapai (<)
2.1.1.4	APM SD/MI	97,49	98,54	79,12	97,91	98,06	100	belum tercapai (<)
2.1.1.5	APM SMP/MTs	82,2	82,03	79,12	85,7	86,5	100	belum tercapai (<)
2.1.1.6	APM SMA/MA/SMK	64,61	63,95	79,12	66,07	66,97	100	belum tercapai (<)
2.1.1.7	APS SD/MI/Paket A	103,2	102,2	115,4	98	99,66	100	belum tercapai (<)
2.1.1.8	APS SMP/MTs/Paket B	77,9	99,4	98	79,3	94,56	100	belum tercapai (<)
2.1.1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	98	99	100	100	100	sesuai (=)
2.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	-	100	100	100	100	100	sesuai (=)
2.1.1.11	Angka Melanjutkan Studi SMP/MTs	-	-	98,48	97,18	94,75	100	belum tercapai (<)
2.1.1.12	Angka Melek Huruf >15	99,95	99,87	99,84	99,91	99,3	100	belum tercapai (<)
2.1.1.13	Rasio Guru Murid SD/MI	1:17	1:15	1:18	1:16	1:15	1:25	melampaui (>)
2.1.1.14	Rasio Guru Murid SMP/MTs	1:16	1:15	1:17	1:15	1:20	1:25	melampaui (>)
2.1.2	**Urusan Kesehatan**							
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,1	4,4	4,5	4,2	4	7	melampaui (>)
2.1.2.2	Jumlah Kematian bayi	57	48	48	45	42	< 35	belum tercapai (<)
2.1.2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	187	120	116	131	201	115	belum tercapai (<)
2.1.2.4	Jumlah Kematian Ibu	21	13	12	14	21	< 274	melampaui (>)
2.1.2.5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	90%	84%	77%	100%	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.6	Cakupan Pelayanan Nifas	98%	90%	86%	78%	75%	100%	belum tercapai (<)
2.1.2.7	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	17%	9%	21%	60%	14%		
2.1.2.8	Angka Kelangsungan Hidup	1-5,1	1-4,4	1-4,5	1-4,2	1-4,0		
2.1.2.9	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	5,6	4,7	4,6	4,4	4,1		
2.1.2.10	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	4,6	4,4	3,9	3,7	3,6		
2.1.2.11	Rasio Posyandu Per 1000 Balita	0,8	0,7	0,7	0,8	1,1		
2.1.2.12	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	4	4	4	4	na		
2.1.2.13	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1	1	1	1	na		
2.1.2.14	Rasio dokter per 1000 penduduk	na	na	50,2	22,3	66,8		
2.1.2.15	Rasio Tenaga Medis Per 1000 Penduduk	na	na	50,2	22,3	66,8		
2.1.2.16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	na	na	73%	72%	61,30%		
2.1.2.17	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97%	89%	86%	81%	79%	100%	belum tercapai (<)
2.1.2.18	Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan	82%	83%	85%	78%	na	100%	
2.1.2.19	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan	91%	85%	94%	87%	na	100%	
2.1.2.20	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi	93%	85%	94%	90%	na	100%	
2.1.2.21	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	62%	67%	69%	90%	69%	95%	belum tercapai (<)
2.1.2.22	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.2.23	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak	77%	87%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.24	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0	0	0	1,5	0	0	sesuai (=)
2.1.2.25	Cakupan Balita Pneumonia yang di Tangani	na	na	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.2.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	74%	90%	93%	101%	28%	100%	belum tercapai (<)
2.1.2.27	Tingkat Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	86	123	114	142	121		
2.1.2.28	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	1	1	2	2	2		
2.1.2.29	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	na	na	93,20%	93,30%	na		
2.1.2.30	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	83%	84%	70%	27%	12%		
2.1.2.31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.2.32	Penderita Diare yang di Tangani	12,48	9,56	44%	32%	10%		
2.1.2.33	Jumlah Kejadian Malaria	2	4	3	31	11		
2.1.2.34	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0		
2.1.2.35	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.2.36	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari Total Populasi	0,10%	0,20%	0,01%	0,01%	0,01%	0.01%	sesuai (=)
2.1.2.37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	na	na	na	na	60%		
2.1.2.38	Cakupan Kunjungan Bayi	76%	85%	89,90%	85,20%	81,60%	100%	belum tercapai (<)
2.1.2.39	Cakupan Puskesmas	154%	154%	164%	164%	164%	100%	melampaui (>)
2.1.2.40	Cakupan Pembantu Puskesmas	43%	43%	36%	36%	36%		
2.1.2.41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	76%	75%	65%	65%	23%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	3%	15%	na	na	5%		
2.1.2.43	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	22%	92%	12%	na	40%		
2.1.2.44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	39%	31%	33%	na	60%		
2.1.2.45	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.2.46	Cakupan Desa Siaga Aktif			94,44%	93,65%	92,86%	100%	belum tercapai (<)
2.1.2.47	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
2.1.3.1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	731,5	571,74	451,72	449,62	465,68		
2.1.3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	51,38	52,6	48,56	47,5	52,53	62,43	belum tercapai (<)
2.1.3.3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0027	0,0027	0,0022	0,0022	0,0022		
2.1.3.4	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,3	0,3	0,35	0,36	0,35		
2.1.3.5	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	na	34,58	77,02	na	na		
2.1.3.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	na	84,49	78,47	87,79	89,67	100	belum tercapai (<)
2.1.3.7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	na	88,74	86,88	91,19	93,73	100	belum tercapai (<)
2.1.3.8	Ketaatan Terhadap RTRW	na	39,05	39,05	na	na		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.3.9	Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik	5,51	8,29	8,8	na	na		
2.1.3.10	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	62,77	63,48	74,7	77,78	na		
2.1.3.11	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidakTersumbat	na	35,75	32,61	na	na		
2.1.4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
2.1.4.1	Rasio rumah layak huni	na	96,20%	96,59%	100,67%	na	100%	
2.1.4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	na	1,37%	0,11%	0,74%	0,75%		
2.1.4.3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	na	40,47%	45,81%	43,79%	na		
2.1.4.4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	na	0,00%	na	0,00%	0,00%		
2.1.4.5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	na	6,45	23,59	30,32	46,45	25	**melampaui (>)**
2.1.5	**Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat**							
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	7,22	7,05	6,89	6,73	na		
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	14	18	24	24	na		
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	23,12	37,47	37,47	37,47	37,47		
2.1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	53,11	80	80	90	80	100	**belum tercapai (<)**
2.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA	18	18	19	19	na		
2.1.6	**Urusan Sosial**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.6.1	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.1.6.2	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial	22%	23%	75%	82%	75%	100%	belum tercapai (<)
2.1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	44%	50%	77%	78%	82%	100%	belum tercapai (<)
2.1.6.4	Persentase PMKS yang tertangani	38%	39%	99%	99%	79%	100%	belum tercapai (<)
2.1.6.5	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	22%	27%	76%	77%	80%	100%	belum tercapai (<)
2.1.6.6	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	4.360	7.667	113.954	na	na		
2.1.6.7	Jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah yang diberikan rehabilitasi sosial	1.214	1.284	1.232	na	na		
2.2	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**							
2.2.1	**Urusan Tenaga Kerja**							
2.2.1.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3	22.15	23.00	23.00	na	48,38		
2.2.1.2	Keselamatan dan Perlindungan (%)	90,32	na	na	na	na		
2.2.1.3	Penyelesaian Sengketa Pengusaha-Pekerja (%)	58,24%	72,58%	80,00%	na	na		
2.2.1.4	Angka sengketa pengusaha-pekerja	na	na	na	18	31		
2.2.1.5	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20.60%	30.50%	47.20%	28%	22%		
2.2.1.6	Persentase Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	na	na	91,94%	97,74%	93,20%	100%	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1.7	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100.%	na		
2.2.1.8	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100%	100%	na		
2.2.1.9	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	na	na	na	100%	na		
2.2.1.10	Persentase Besaran pencarikerja yang terdaftar yang ditempatkan.	Na	na	94,50%	95,30%	56,20%	90%	**belum tercapai (<)**
2.2.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.2.2.1	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR	8,90	na	8,90	8,90	na		
2.2.2.2	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,04	na		
2.2.2.3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	na	18.00	17.23	na	na		
2.2.2.4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	52	65	100	100	100	100	**sesuai (=)**
2.2.2.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	**sesuai (=)**
2.2.2.6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	na	100	100	100	100	100	**sesuai (=)**
2.2.2.7	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	na	47.22.00	01.39	na	na		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2.8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	na	100	100	100	100	100	sesuai (=)
2.2.2.9	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD	103,20	102,20	115,40	na	na		
2.2.2.10	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	77,91	99,41	97,95	na	na		
2.2.2.11	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMA	78,61	82,48	84,19	100,86	115,03		
2.2.3	**Urusan Pangan**							
2.2.3.1	Ketersediaan pangan utama (Kg/kap/thn)	110	118,28	128,22	176,35	172,63		
2.2.3.2	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hari)	2.602	2.710	2.842	3.186	3.142		
2.2.3.3	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	63,99	68,98	73,79	78,36	73,94		
2.2.3.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	100	100	70	75.75	70,58		
2.2.4	**Urusan Pertanahan**							
2.2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersetifikat	na	36,98	36,97	36,97	3,93		
2.2.5	**Urusan Lingkungan Hidup**							
2.2.5.1	Indeks Kualitas Air	na	na	55	61,61	50,95		
2.2.5.2	Indeks Kualitas Udara	na	na	90,43	94,9	96,51		
2.2.5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	na	na	54,36	52,6	56,73		
2.2.5.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	na	63,17	63,44	70,33	70,67	75	belum tercapai (<)
2.2.5.5	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	na	na	na	123.773	651,265		
2.2.5.6	Jumlah Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	na	na	15	25	22		
2.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin	na	na	57	54	23		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten							
2.2.5.8	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)	na	na	2	2	na		
2.2.5.9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	na	na	35	70	57		
2.2.5.10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	na	na	14	43	22		
2.2.5.11	Pengaduan masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak Lintas kecamatan yang ditangani	na	na	14	13	18		
2.2.5.12	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus	na	na	na	na	na		
2.2.5.13	Persentase Jumlah Sampah Terkurangi melalui 3R	na	na	10,50%	14,12%	15,50%		
2.2.5.14	Persentase Cakupan Area Pelayanan	na	na	31,87%	31,87%	31,87%		
2.2.5.15	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	na	na	64,80%	65,06%	68,12%		
2.2.5.16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	na	na	70%	70%	70%		
2.2.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
2.2.6.1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.2.6.2	Penerapan KTP Nasioanal Bebasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.2.6.3	Jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik	344.732	347.822	344.278	370.090	419.275		
2.2.6.4	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	96%	98%	92%	na	108%	100%	**melampaui (>)**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.6.5	Rasio pasangan berakte nikah	2,29	43	18,93	na	na		
2.2.7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
2.2.7.1	BUM Desa Aktif	136	136	136	136	136	136	**sesuai (=)**
2.2.7.2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**sesuai (=)**
2.2.7.3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	155	155	155	155	155	155	**sesuai (=)**
2.2.7.4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	7	7	7	7	7	7	**sesuai (=)**
2.2.7.5	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**sesuai (=)**
2.2.7.6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**sesuai (=)**
2.2.7.7	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**sesuai (=)**
2.2.8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
2.2.8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,85	0,78	0,72	0,65	0,59		
2.2.9	**Urusan Perhubungan**							
2.2.9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	na	na	na	276.460	150.302		
2.2.9.2	Rasio Izin Trayek	na	0,000089	0,008909	0,000903	0,000893		
2.2.9.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	11.470	23.033	23.033	23.147	14.893		
2.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	88	97	97	97	98		
2.2.9.5	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,06	0,28	0,28	3,00	0,35		
2.2.9.6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	na	na	na	6,91	57,35		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.9.7	Pemasangan Rambu-rambu	16,33	8,00	115,70	2,18	0,20		
2.2.9.8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00552	0,00552	0,01185	0,01002	0,01077		
2.2.9.9	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	20.141	26.445	26.445	1.091.610	909.552		
2.2.9.10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	918.663	1.041.610	965.054	1.368.070	832.251		
2.2.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**							
2.2.10.1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	14,16	19,12	29,96	29,96	29,96		
2.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi desa/kelurahan	na	na	76,12%	80,00%	96,32%	100%	**sesuai (=)**
2.2.10.3	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	na	na	24%	100%	100%	100%	**sesuai (=)**
2.2.10.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Hp/Mengakses Internet	na	na	23,25	23,25	23,25		
2.2.10.5	Persentase/Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	na	na	29,96	29,96	29,96		
2.2.10.6	Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	na	na	21,43	21,43	21,43		
2.2.10.7	Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon	na	na	1,41	1,41	1,41		
2.2.10.8	Persentase/Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Selular	na	na	64,66	64,66	64,66		
2.2.11	**Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah**							
2.2.11.1	Persentase Koperasi Aktif	33,91%	38,45%	37,99%	42,33%	43,70%		
2.2.11.2	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	96,62%	97,58%	99,38%	99,39%	99,36%	100%	**belum tercapai (<)**
2.2.11.3	Persentase BPR/LKM Aktif	44,84	45,45	47,84	47,84	47,84		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,45%	97,43%	99,40%	99,41%	99,38%	100%	belum tercapai (<)
2.2.12	**Urusan Penanaman Modal**							
2.2.12.1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	na	na	157	180	161,00		
2.2.12.2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) – Juta Rupiah	na	na	1.941,75	6.693,78	5.264,56	987,69	melampaui (>)
2.2.12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	na	na	26,07	18,91	20,58		
2.2.12.4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Milyar Rupiah)	na	na	420,35	4.401,85	5.208,74		
2.2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**							
2.2.13.1	Cakupan pembinaan olahraga (%)	100	100	100,00	100,00	100,00	100	sesuai (=)
2.2.13.2	Cakupan pelatih yang bersetifikasi(%)	79	82	73,33	73,33	73,33	100	belum tercapai (<)
2.2.13.3	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	na	na	na	100,	100	100	sesuai (=)
2.2.13.4	Jumlah atlit berprestasi tingkat Nasional	48	49	45,00	49,00	na		
2.2.13.5	Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional.	na	na	6,00	1,00	na		
2.2.13.6	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75	80	80,00	80,00	80,00		
2.2.13.7	Persentase wirausaha muda (%)	70	70	80,00	80,00	75,00		
2.2.14	**Urusan Statistik**							
2.2.14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2.2.14.2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2.2.14.3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
2.2.15	**Urusan Persandian**							
2.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	na	na	24	100	100	100	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.16	**Urusan Kebudayaan**							
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 kegiatan	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan		
2.2.16.2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9 situs	11 situs	14 situs	15 situs	15 situs		
2.2.16.3	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	9	11	12	14	26		
2.2.16.4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	116	107	58	100	**belum tercapai (<)**
2.2.16.5	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	11	12	15	15		
2.2.17	**Urusan Perpustakaan**							
2.2.17.1	Persentase pengunjung perpustakaan	26,32	33,82	46,71	52,72	10,94		
2.2.17.2	Rasio koleksi buku (%)	20,45	21,47	21,12	98,47	na		
2.2.17.3	Rasio perpustakaan dengan jumlah penduduk	0,021	0,024	0,026	0,032	0,052		
2.2.18	**Urusan Kearsipan**							
2.2.18.1	Persentase pengelolaan arsip secara baku	6,8	6,7	7	80	80		
2.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0		
2.3	**Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**							
2.3.1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**							
2.3.1.1	Produksi perikanan	7.579,63	6.966,83	6.777,20	7.227,69	7.013,87		
2.3.1.2	Konsumsi ikan (%)	38,64	39,34	40,14	40,89	40,89		
2.3.1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	38	53	50	80	67		
2.3.1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.171,44	6.634,59	6.397,67	6.262,43	5.947,97		
2.3.1	**Urusan Pariwisata**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.3.1.1	Lama kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari		
2.3.1.2	PAD sektor pariwisata	na	na	na	50.000.000	16.000.000		
2.3.1	**Urusan Pertanian**							
2.3.1.1	Produksi Sektor Pertanian (ton)	na	na	39.534	37.985	38.786		
2.3.1.2	Produksi Sektor Perkebunan (ton)	na	na	246.619	243.237	289.736		
2.3.1.3	Cakupan bina kelompok petani	100	100	100	na	na		
2.3.1.4	Nilai Kontribusi (Juta Rupiah)	11.201.413,50	11.985.422,00	12.256.418,50	13.053.199,90	14.662.023,40		
2.3.1	**Urusan Perdagangan**							
2.3.1.1	Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	24.039,79	290.602,27	957.474	250.262,690	na		
2.3.1	**Urusan Perindustrian**							
2.3.1.1	Cakupan Kelompok Pengrajin (%)	na	na	70	76	81		
2.4	**Fokus Penunjang Urusan**							
2.4.1	**Urusan Perencanaan**							
2.4.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.1.5	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	71,43	88,89	81,51	100	94,54	100	**belum tercapai (<)**
2.4.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80,36	96,02	99,86	99,89	88,06		
2.4.2	**Urusan Keuangan**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai (=)
2.4.2.2	Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	sesuai (=)
2.4.2.3	Persentase SILPA	100%	100%	100%	100%	100%	0%	belum tercapai (<)
2.4.2.4	Persentase SILPA terhadap APBD	0,24%	0,42%	6,13%	5,3%	5,5%	0%	belum tercapai (<)
2.4.2.5	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksanakan	-	-	-	-	-		
2.4.2.6	Persentase belanja pendidikan (20%)	6,47	9,07	8,27	23,28	21,29*		
2.4.2.7	Persentase belanja kesehatan (10%)	6,96	6,35	9,27	10,93	12,46*		
2.4.2.8	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	1,6:1,5	2,26:1	1,98:1	2,48:1	1,13:1		
2.4.2.9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	00.17	0,18	0,17	0,19			
2.4.2.10	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	sesuai (=)
2.4.2.11	Persentase peningkatan PAD	na	-27,66	2,73	2,73	-5,05	4,57	belum tercapai (<)
2.4.3	**Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**							
2.4.3.1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7,44	10,37	9,96	na	na		
2.4.3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	62,93	86,56	77,92	71	48,96		
2.4.3.3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	34	15	40	40	40		
2.4.3.4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2905	2885	1025	1025	1025		
2.4.3.5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	4521	4611	4452	na	na		
2.4.4	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	30	30	30	4	4		
2.4.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	30	35	75	75	70		
2.4.4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	na	na	na	18	42		
2.4.4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na	na	na	18	28		
2.4.5	**Urusan Pengawasan**							
2.4.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	63,55	66,52	40	65,16	na		
2.4.5.2	Jumlah Temuan BPK	35,08	34,8	37,3	55,66	na		
2.4.5.3	Persentase Pelanggaran Pegawai (ASN)	na	na	1,55	0,53	0,3		
2.4.6	**Sekretariat Dewan**							
2.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**
2.4.6.3	Terintegrasi Program- program DPRD untuk Melaksanakan Funsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai (=)**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.4.7	**Sekretariat Daerah**							
2.4.7.1	Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis	CC	B	B	B	B	BB	**belum tercapai (<)**
2.4.7.2	Prestasi LPPD	T	ST	ST	ST	ST	ST	**sesuai (=)**
2.4.8	**Kewilayahan**							
2.4.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	50	69,47	84,33	84,29	86,69	74,75	**melampaui (>)**
3	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
3.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**							
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Harga Konstan /Juta Rupiah)	112,68	116,57	120,88	122,36	118,87		
3.1.2	Pengeluaran Pangan (%)	55,21	54,11	53,03	52,97	52,62		
3.1.3	Pengeluaran Non Pangan (%)	44,79	45,89	46,97	47,03	47,38		
3.1.4	Nilai Tukar Petani (NTP)	na	na	97,7	95,59	118,77	95	**melampaui (>)**
3.1.5	Rasio Exim Terhadap PDRB	68,92	64,26	61,65	63,12	59,73		
3.1.6	Komoditas Unggulan							
	Kelapa Sawit	na	1.215.436	1.188.285	1.215.440	na		
	Karet	na	44.953	44.383	44.950	na		
	Kelapa	na	14.678	13.609	14.677	na		
3.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							
3.2.1	Ketaatan Terhadap RTRW	na	39,05	39,05	na	na		
3.3	**Fokus Iklim Berinvetasi**							
3.3.1	Rasio Kriminalitas Per 10.000 penduduk	16,8	10,2	11,6	10,4	13,7		
3.4	**Fokus Sumberdaya manusia**							
3.4.1	Kualitas Tenaga kerja (%)	22,15	23	23	47,53	48,38		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar Capaian Kabupaten	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.2	Rasio Ketergantungan	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50		
3.4.3	Rasio lulusan S1/S2/S3		23	23	47,53	48,34	31,95	melampaui (>)

BAB III.
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah yang tersedia untuk digunakan sebagai belanja pendanaan pembangunan.

Oleh karena itu, perlu dicermati terhadap kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Di samping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka pengolahan data dan analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya.

1.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan terhadap Neraca difokuskan pada perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis dijabarkan sebagai berikut:

1.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

2) Dana Transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan daerah lainnya

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel III-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuahan
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	47.854.327.923	71.781.060.156	65.992.135.999	67.049.392.095	63.710.380.457	5.22
Pendapatan Retribusi Daerah	31.188.867.752	14.565.502.468	14.689.253.182	10.232.707.278	9.387.616.385	(41.46)
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	21.238.125.981	31.492.480.950	31.369.321.102	28.788.248.654	20.920.504.935	(3.60)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	98.745.329.314	154.026.552.335	207.229.800.809	120.209.535.005	172.141.690.460	4.84
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	199.026.650.970	271.865.595.908	319.280.511.092	226.279.883.032	266.160.192.237	3.88
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN						
Dana Bagi Hasil Pajak	1.175.781.702.243	1.378.704.957.739	1.436.254.223.765	1.416.335.599.329	1.050.702.831.784	(4.37)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.088.459.032.938	816.180.939.707	818.101.260.166	1.139.933.590.010	678,078,156,631	(18.25)
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	345.070.716.000	345.070.716.000	373.268.646.000	338.731.609.000	24.34
Dana Alokasi Khusus (DAK)	68.312.742.000	51.401.903.000	183.801.494.841	262.925.372.294	208.140.860.895	10.73
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan	2.332.553.477.181	2.591.358.516.446	2.783.227.694.772	3.192.463.207.633	2.275.653.458.310	(2.65)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
Dana Penyesuaian	199.687.548.625	210.619.354.173	144.783.974.996	131.071.695.996	166.657.936.000	(7.35)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	199.687.548.625	210.619.354.173	144.783.974.996	131.071.695.996	166.657.936.000	(7.35)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	2.532.241.025.806	2.801.977.870.619	2.928.011.669.768	3.323.534.903.629	2.442.311.394.310	(2.56)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.213.477.450	107.512.319.262	105.619.783.671	131.841.460.583	104.662.859.108	(1.90)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuahan
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	37.779.386.335	49.426.893.669	6.816.000.000	7.769.995.000	15.820.500.000	(134.61)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	144.992.863.785	156.939.212.931	112.435.783.671	139.611.455.583	120.483.359.108	2.06
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.677.233.889.591**	**3.017.002.509.143**	**3.040.447.453.439**	**3.463.146.359.212**	**2.562.794.753.416**	**(1.1)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	4.339.071.046		-	85.045.520.000 -	113.615.460.000	31.29
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah					46.326.720.000	25.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	-		-		
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	42.118.457.381	49.426.893.669		85.045.520.000	159.942.180.000	40.40
TOTAL PENDAPATAN	**2.918.378.997.942**	**3.280.209.573.127**	**3.359.727.964.531**	**3.774.471.762.245**	**2.929.311.340.656**	**(0.1)**

Data tabel III. 1 memperlihatkan bahwa komponen pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan yang paling tinggi selama kurun waktu 2016-2020 adalah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tumbuh rata-rata sebesar 40,40%. Namun demikian dilihat sisi kontribusinya bagi pendapatan Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sangat kecil yakni rata-rata sebesar 2,14%. Kemudian komponen pendapatan yang lainnya yang mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu yang sama adalah Pendapatan Asli Daerah, namun pertumbuhan yang dicapai cukup kecil yakni rata-rata sebesar 3,88%.

Berbeda hal dengan dua komponen pendapatan di atas, pada komponen transfer pemerintah pusat yang berasal dana perimbangan selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan yakni sebesar rata-rata (2,65%). Penyumbang terbesar penurunan pendapatan dari komponen transfer pemerintah pusat dana perimbangan ini berasal dari dana bagi hasil sumberdaya alam yakni rata-rata turun sebesar (18,25%). Kondisi ini disebabkan karena menurunnya produksi minyak dan harga minyak dipasaran internasional sebagai komoditi sumberdaya alam penyumbang terbesar dari bagi hasil sumberdaya alam di Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari kontribusi pada masing komponen pendapatan secara keseluruhan, transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangaan memberikan berkontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yakni rata-rata sebesar 81,26%. Hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil minyak dan dan gas terbesar di Provinsi Riau .

Sementara itu komponen Pendapatan Asli Daerah dalam durasi tahun yang sama memberikan kontribusi yang sangat kecil yakni rata-rata sebesar 7,98 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Bengkalis dilihat dari sisi Keuangan Daerah masih jauh dari mandiri atau dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Bengkalis terhadap sumber sumber keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat masih cukup kuat. Kondisi yang demikian tentunya harus menjadi perhatian ke depannya mengingat sumberdaya alam minyak dan gas yang menjadi salah satu sub komponen pendapatan yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dibagi hasilkan dengan Kabupatean Bengkalis adalah merupakan sumberdaya alam yang sulit diperbaharui yang produksinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan

Berkenaan dengan itu pengembangan sumber-sumber pendapatan lainnya terutama pendapatan asli daerah haruslah menjadi perhatian ke depannya. Hal ini mengingat potensi untuk pengembangan tersebut masih cukup banyak. Oleh sebab itu diperlukan komitmen dari semua pihak terutama aparatur birokrasi Pemerintah Daerah melakukan serangkaian inovasi dalam rangka menggali potensi yang ada.

b) Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , menyebutkan bahwa adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Belanja daerah merupakan bentuk upaya untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hakekat dari belanja daerah sebagai perwujudan dan amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara umum komponen belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 antara lain:

1) Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehati hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek Langsung yang di dalamnya terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

2) Belanja Modal, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: Belanja Tanah, Belanja, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Asset Tetap Lainnya dan Belanja Asset Lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. , Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

4) Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer ini terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah dihadapkan pada besarnya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan urusan di satu sisi, sementara di sisi yang lain anggaran yang tersedia sangat terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan skala prioritas dalam dalam mengalokasikan anggaran.

Belanja Daerah harus diprioritaskan pada pendanaan pada urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka untuk mencapai standar pelayanan minimal, kemudian barulah untuk pendanaan pencapaian visi dan misi dan urusan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja belanja dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang dapat diwujudkan terhadap anggaran yang disedikan. Semakin besar realisasi belanja semakin baik kinerja suatu daerah dalam menggunakan anggaran. Realisasi belanja daerah tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada Tabel III.2 berikut:

Tabel III-2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuahan
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	1.046.900.038.190	966.190.476.031	900.644.081.702	1.077.884.549.964	967,266,480,083	(2.66)
Belanja Barang dan Jasa	878.133.119.133	899.948.340.587	886.830.058.509	1.041.509.280.891	933,384,530,032	1.05
Belanja Subsidi	4.853.979.665	14.561.938.995	12.776.416.390	10.895.753.608	9,618,696,893	5.54
Belanja Hibah	78.442.809.950	28.460.755.000	46.060.359.285	59.946.830.651	71,023,667,791	(24.66)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1.697.500.000	0.00	
Jumlah Belanja Operasi	2.373.545.967.549	2.234.571.262.679	1.846.310.915.886	2.191.933.915.114	1,981,293,374,799	(5.53)
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	956.105.657	801.075.000	2.016.855.072	9.634.892.400	815,248,000	(240.46)
Belanja Peralatan dan Mesin	132.791.166.536	129.291.601.656	143.542.877.947	159.074.382.252	97,002,850,638	(11.75)
Belanja Gedung dan Bangunan	155.829.389.573	171.428.935.814	201.503.179.612	254.922.045.127	131,718,395,987	(12.14)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	470.585.283.920	680.372.459.226	551.045.934.750	671.190.951.974	260,976,621,697	(32.98)
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.580.999.760	390.375.000	5.298.501.405	13.036.665.825	9,816,546,659	(302.62)
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Modal	765.742.945.446	982.284.446.696	903.407.348.786	1.107.858.937.578	**500,329,662,982**	(22.41)
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	446.000.000	4.000.000	253.200.000	-	152,938,659,147	(2,712.89)
TOTAL BELANJA	3.139.734.912.995	3.216.859.709.375	2.749.971.464.672	3.299.792.852.692	2,634,561,696,928	(5.79)
TRANSFER						
Transfer Bagi Hasil ke Desa	-	-	-			

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuahan
Bagi Hasil Pajak	5.457.999.998	5.878.043.115	5.042.793.908	6.654.649.412	4,915,347,049	(5.15)
Bagi Hasil Retribusi	1.541.649.978	1.191.820.763	1.171.690.615	1.114.409.571	763,602,328	(20.54)
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-		-		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	365.216.020.611	325.409.752.066	401.404.742.296	448.416.849.050	348,231,605,248	(2.90)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			1.481.843.000	1.508.127.500		25.44
Jumlah Transfer	372,215,670,587	332,479,615,944	409.101.069.819	457.694.035.533	353,910,554,625	2.97
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	3 .146.734.562.971	3.223.929.573.253	3.159.072.534.491	3.757.486.888.225	2,988,472,251,553	(2.37)

Mencermati data yang disajikan pada tabel III.2 bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan rata-rata sebesar (2,37%). Penurunan realisasi belanja ini sejalan dengan menurunnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah. Penurunan ini disebabkan menurunnya pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Bengkalis.

Dilihat dari masing-masing komponen belanja daerah, komponen belanja transfer mengalami pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun yaitu tumbuh rata-rata sebesar 20,14%. Tingginya pertumbuhan belanja transfer ini disebabkan karena adanya kebijakan bantuan keuangan kepada desa yang dimulai pada tahun 2018 sebagai pelaksanaan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa..

Selanjutnya komponen belanja modal, dalam kurun waktu sama mengalami penurunan secara signifikan, yakni turun rata-rata sebesar (22,41%). Penurunan ini disumbangkan dari semua sub komponen belanja modal. Faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut karena menurunnya kapasitas kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan belanja. Kebijakan yang harus diambil atas menurunnya kemampuan pendanaan ini yang berdampak pada menurunnya belanja modal tersebut adalah dengan memprioritaskan belanja modal yang benar benar menyentuh langsung masyarakat khususnya pada belanja modal jalan, jembatan, irigasi dan jaringan. Di samping upaya lain yang harus dilakukan dengan mencari sumber pendanaan lain misalnya melalui APBN, CSR dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan komponen belanja modal, belanja operasi juga mengalami penurunan rata-rata sebesar (5,53%). Penurunan pada belanja operasi ini berasal dari penurunan belanja pegawai .

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Realiasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup besar rata-rata sebesar 327%. Penyumbang peningkatan tersebut semuanya berasal dari Silpa dengan rata rata peningkatan sama dengan

peingkatan penerimaan. Berbeda dengan penerimaan pembiayaan, pada pengeluaraan pembiayaan mengalami penurunan rara-rata sebesar (50%) Penurunan pengeluaran pembiayaan ini adalah karena pengeluaran untuk penyertaan modal hanya dilakukan pada tahun 2016 dan tahun tahun 2019 . Sementara pada tahun 2017, 2018 dan 2020 tidak ada penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan lainnya. Secara lebih rinci pembiayaan dapat dilihat pada Tabel III-3. berikut:

Tabel III-3 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuahan
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN						
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	280.383.249.620	9.909.227.210	14.845.655.400	215.501.085.439	222,090,595,626	327%
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-	0
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	0
Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-	0
Total Penerimaan	**280.383.249.620**	**9.909.227.210**	**14.845.655.400**	**215.501.085.439**	**222,090,595,626**	327%
PENGELUARAN						0
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.339.071.046	-	-	10.000.000.000		(50%)
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	0
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0
ADB	-	-	-	-	-	0
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0
Total Pengeluaran	**4.339.071.046**	**-**	**-**	**10.000.000.000**	**-**	(50)
	-	-			-	
PEMBIAYAAN NETTO	**276.044.178.574**	**9.909.227.210**	**14.845.655.400**	**205.501.085.439**	**222,090,595,626**	311,43%

1.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan daerah yang sangat penting bagi manajemen Pemerintahan Daerah, karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan informasi tersebut diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih terarah sehingga pengelolaan sumberdaya ekonomi daerah dapat dilakukan secara efesien dan efektif. Neraca daerah berisikan posisi asset daerah, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal diterbitkan neraca tersebut.

Selama kurun waktu 2016-2020 asset yang tercatat dalam Neraca Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.24%. Di antara komponen asset yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah asset lancar yang dalam kurun waktu yang sama tumbuh rata-rata sebesar 81,55%. Penyumbang terbesar meningkatnya asset lancar ini berasal dari kas yang tumbuh rata-rata sebesar 316,27% dan piutang rata rata sebesar. Pertumbuhan kas yang cukup besar ini menyebabkan jumlah kas dan piutang ini semakin meningkat. Kondisi yang demikian menguntungkan dari sisi likuiditas, namun dari sisi efektivitas, justru menunjukkan belum maksimalnya tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap anggaran.

Berbeda dengan asset lancar pada aset tetap dalam kurun waktu yang sama mengalami penurunan yakni rata-rata sebesar (1,60%.) Menurunnya tingkat pertumbuhan asset tetap ini disebabkan karena rendahnya menurunnya konstruksi dalam pengerjaan dan kecilnya pertumbuhan asset tetap yang lain sementara penyusutan terhadap asset semakin meningkat. Namun demikian walaupun mengalami penurunan dari sisi nilai nominal relatif cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari proporsi asset tetap dari keseluruhan asset selama 5 tahun tahun yang tercatat rata-rata sebesar 87,65%. Keadaan ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar komponen asset berasal dari asset tetap.

Pada Investasi Jangka Panjang selama kurun waktu yang sama juga mengalami penurunn rata-rata sebesar (0,03%. Menurunnya tingkat pertumbuhan pada investasi jangka panjang ini disebabkan menurunnya pertambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan investasi non permanen lainnya,

Selanjutnya kewajiban daerah pada neraca daerah, selama kurun waktu 2016-2020 tumbuh secara signifikan yakni ,rata-rata turun sebesar 17,07%. Penyumbang terbesar pertumbuhan pada kewajiban daerah ini befrasal dari pendapatan yang diterima di muka yakni rata-rata sebesar 7.919 sementara utang pihak ketiga mengalami penurunan rata-rata sebesar (36,63%).

Sementara itu Ekuitas dana selama kurun waktu 2016-2020 sedikit mengalami peningkatan yakni tumbuh rata-rata sebesar 1,33%. Peningkatan ekuitas dana ini walapupun tidak signifikan namun menjadi hal yang positif karena meningkatkan kemampuan daerah iak untuk mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah. Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4 Neraca Daerah Kabupaten Bengkalis 2016-2020.

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR	**178.761.889.848**	**143.003.899.085**	**564.853.075.386**	**545.546.098.281**	**843,623,800,019**	81.55
Kas	8.024.592.459	16.770.602.244	215.501.085.439	222,093,376,548.	151,011,573,806	316.27
Piutang	33.395.698.734	59.355.653.029	52.716.473.669	556,315,001,209	471,432,588,645	258.07
Persediaan	137.341.598.655	66.877.643.812	296.635.516.277	260,803,124,727	221,179,637,567	66.40
ASET TETAP	**8.588.657.399.844**	**8.122.815.483.071**	**7.788.966.559.250**	**8.101.303.936.229**	**8,028,790,937,646**	(1.60)
Tanah	1.010.119.701.258	825.547.349.302	980.699.224.385	1,064,387,219,001	1,121,014,570,791	3.61
Peralatan dan mesin	1.349.762.741.113	1.390.105.128.620	1.472.013.838.063	1,604,166,831,891	1,720,978,286,828	6.29
Gedung dan bangunan	2.776.339.095.048	2.634.431.787.564	2.757.470.425.996	2,950,718,698,715	3,051,992,554,203	2.49
Jalan, irigasi, dan jaringan	6.594.724.252.382	7.012.556.778.577	7.504.157.593.018	8,226,825,730,072	8,467,252,134,876	6.46
Aset tetap lainnya	75.905.662.296	75.261.182.687	96.229.032.555	117,319,205,805	126,159,716,170	14.11
Konstruksi dalam pengerjaan	1.091.875.458.051	1.044.825.174.290	787.126.441.190	807,736,619,379	805,839,613,132	(6.65)
AKUKUMULASI PENYUSUTAN	(4.310.069.510.305)	(4.859.911.917.969)	(5.808.729.995.958)	(6,535,032,096,29)	(7,264,445,938,355)	13.99
INESTASI JANGKA PANJANG	**519.622.790.517**	**513.928.806.082**	**510.583.993.890**	**519,711,981,948**	**518,962,048,764**	(0.03)
						-
ASET LAINNYA	**142.543.662.857**	**265.862.591.099**	**173.383.076.011**	**115,535,058,649**	**115,464,818,221**	4.51
Tagihan penjualan angsuran						
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	6.309.966.251	6.306.966.251	6.306.966.251	6,306,966,250	6,306,966,250.	(0.01)
Kemitraan dengan pihak ketiga	488.750.000	488.750.000	488.750.000	488,750,000	488,750,000.	0.00
Aset tak berwujud	13.780.180.945	10.278.024.225	8,020,407,736	6,811,093,726	6,304,786,148	(13.70)
ASET LAIN-LAIN	121.964.765.662	248.788.850.624	158.566.952.024	101,928,248,672	102,364,315,822	10.06
JUMLAH ASET DAERAH	**9.429.585.743.067**	**9.045.610.779.336**	**9.037.786.704.536**	**9,910,580,751,653**	**9,506,841,604,651.**	**0.24**
KEWAJIBAN	**435.150.109.351**	**419.076.736.805**	**41.879.286.008**	**24,559,872,739**	**81,622,540,156**	17.07
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**435.150.109.351**	**419.076.736.805**	**41.879.286.008**	**24,559,872,739.**	**81,622,540,156**	17.07
Utang perhitungan pihak ketiga	2.805.542	8.268.829	4.724.631	2.780.922	.	2.68

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Uang muka dari kas daerah						-
Pendapatan diterima dimuka	526.494.340	491.345.822	204.861.283	180,617,509	57,533,376,593	7,919.22
UTANG PIHAK KETIGA	431.600.514.949	415.591.519.286	40.393.493.556	21,185,961,691	21,189,093,569	(36.63)
UTANG PENDEK LAINNYA	3.020.294.520	2.985.602.868	1.276.206.538	3,190,512,616	2,900,069,994	20.61
UTANG PINJAMAN LUAR NEGERI						
EKUITAS DANA	**8.954.673.473.464**	**8.671.038.043.079**	**8.995.912.143.159**	**9,886,020,878,913**	**9.425.219.064.495**	**1.33**
EKUITAS DANA LANCAR						
SILPA						
Cadangan piutang						
Cadangan persediaan						
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam aset tetap						
Diinvestasikan dalam aset lainnya						
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**9.389.823.582.814**	**9.090.114.779.884**	**9.037.791.429.167**	**9,910,580,751,653**	**9,506,841,604,651**	**0.34**

Analisis terhadap neraca daerah dapat mengetahui fundamental keuangan Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan melalui analisis rasio-rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dimaksud terdiri dari tiga jenis yaitu:

1) Rasio likuiditas, yaitu analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat.

2) Rasio aktivitas, adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintahan. Rasio ini terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

3) Rasio solvabilitas (leverage), adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total asset dan rasio total hutang terhadap modal.

Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III-5 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
A.	**Rasio Likuiditas**			
1.	Rasio lancar (current ratio)	0.341	13.488	19.796
2.	Rasio cepat (quick ratio)	0.181	6.404	9.652
B.	**Rasio Solvabilitas**			
1.	Rasio total hutang terhadap total asset	0.046	0.004	0.003
2.	Rasio hutang terhadap modal	0.048	0.004	0.003
C.	**Rasio Aktivitas**			
1.	Rata-rata umur piutang (Hari)			
2.	Rata-rata umur persediaan (Hari)			

Sumber: Data Olahan.

Merujuk pada Tabel III-5 di atas secara ringkas dapat dilihat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1) Rasio Lancar (Current Ratio) menunjukkan selama kurun waktu 3 tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat dari 0,341 pada tahun 2018 meningkat menjadi 13.488 pada tahun 2018. Keadaan ini terus berlanjut pada tahun 2020 yakni meningkat menjadi 19,796. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Pada tahun 2019 rasio lancarnya sebesar 19,986 yang berarti bahwa Rp.1 utang jangka pendek dijamin dengan Rp. 19,796 asset lancar.

2) Rasio Cepat (Quick Ratio) selama 3 tahun juga menunjukkan tren yang semakin membaik dari 0.181pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.404 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 9.652. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asset lancar dikurangi persediaan semakin membaik.

3) Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari 0.046 pada tahun 2018 meningkat menjadi 0.003 pada tahun 2019. Artinya pada tahun 2018 hutang sebesar Rp. 0,046 dijamin dengan Rp. 1 rupiah asset, yang kemudian pada tahun 2020 meningkat dimana Rp. 0.003 hutang dijamin dengan Rp. 1 asset. Ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengaklis dari sisi solvabilitas cukup baik.

4) Rasio Hutang terhadap Modal (Total Debt Equity Ratio) selama kurun waktu 3 tahun terakhir juga menunjukkan tren yang semakin membaik dari 0.048 tahun 2018 meningkat menjadi 0.003 pada tahun 2020. Ini berarti bahwa pada tahun 2018 hutang

sebesar Rp 0,048 dijamin dengan Rp. 1 modal, kemudian meningkat dimana hutang sebesar Rp 0,003 diajmin dengan Rp. 1 modal.

1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.

a) Proporsi Realisasi Belanja

Dalam struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Masing-masing jenis belanja mendapatkan alokasi, yang mencerminkan kebijakan daerah dalam belanja. Adapun realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016–2020 secara nominal dapat dilihat pada Tabel III-6 berikut ini:

Tabel III-6 Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 Kabupaten Bengkalis

Uraian	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%	Rp	%
BELANJA DAERAH	**3,146,734,562,971**		**3,223,929,573,253**	**100**	**3,159,072,534,491**	**100**	**3,757,486,888,225**	**100**	**2,988,472,251,554**	**100**
BELANJA OPERASI	**2,373,545,967,549**	**75.43**	**2.234.571.262.679**	**69,31**	**1,846,310,915,886**	**58.44**	**2,191,933,915,114**	**58.34**	**1,981,293,374,799**	**66.30**
Belanja Pegawai	1,046,900,038,190	33.27	966.190.476.031	29.96	900.644.081.702	28.51	1.077.884.549.964	28.69	967,266,480,083	32.37
Belanja Barang dan Jasa	878,133,119,133	27.91	899.948.340.587	27.91	886.830.058.509	28.07	1.041.509.280.891	27.72	933,384,530,032	31.23
Belanja Subsidi	4,853,979,665	0.15	14.561.938.995	0.45	12.776.416.390	0.40	10.895.753.608	0,28	9,618,696,893	0.32
Belanja Hibah	78,442,809,950	2,49	28.460.755.000	0.88	46.060.359.285	1.45	59.946.830.651	1.60	71,023,667,791	2.38
Belanja Bantuan Sosial	-	-	--	0.00	-	0.0	1.697.500.000	0.05	-	0.0
BELANJA MODAL	**765,742,945,446**	**24.33**	**982.284.446.696**	**30.46**	**903.407.348.786**	**28.59**	**1.107.858.937.578**	**29.48**	**500,329,662,983**	**16.74**
Belanja Tanah	956,105,657	0.03	801.075.000	0.02	2.016.855.072	0.06	9.634.892.400	0.26	815,248,000	0.03
Belanja Peralatan dan Mesin	132,791,166,536	4.22	129.291.601.656	4.01	143.542.877.947	4.54	159.074.382.252	4.23	97,002,850,638	3.25
Belanja Gedung dan Bangunan	155,829,389,573	4.95	171.428.935.814	5.31	201.503.179.612	6.37	254.922.045.127	6.78	131,718,395,988	4.41
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	470,585,283,920	14.95	680.372.459.226	21.10	551.045.934.750	17.44	671.190.951.974	17.86	260,976,621,698	8.73
Belanja Asset Tetap Lainnya	5,580,999,760	0.18	390.375.000	0.01	5.298.501.405	0.16	13.036.665.825	0.35	9,816,546,659	0.33
BELANJA TAK TERDUGA										
Belanja Tak Terduga	**446,000,000**	**0.01**	**4.000.000**	**0.00**	**253.200.000**	**0.008**	**-**		**152,938,659,147**	**5.12**
BELANJA TRANSFER	**372,215,670,587**	**11.83**	**332,479,615,944**	**10.31**	**409,101,069,819**	**12.95**	**457,694,035,533**	**12.18**	**353,910,554,625**	**11.84**

b) Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyediaan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah adalah rangka untuk menjamin terlaksananya secara baik pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Bengkalis

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun anggaran 2017	966.190.476.031	3.223.929.573.253	29,97
2	Tahun anggaran 2018	900.644.081.702	3.159.072.534.491	28,51
3	Tahun anggaran 2019	1.077.884.549.964	3.767.486.888.225	28,61
4	Tahun anggaran 2020	858.289.230.646	2,988,472,251,554	28,72

Data tabel III-7 di atas memperlihatkan bahwa secara nominal selama kurun waktu 3 tahun terakhir belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis berfluktuasi dengan menunjuukan kecenderungan meningkat pada 2 tahun terakhir. Namun demikian dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ini disebabkan meningkatnya total belanja secara keseluruhan lebih besar dibandingkan meningkatnya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara keseluruhan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 4 tahun adalah sebesar 28,95% dari total belanja. Keadaan ini menunjukkan belanja daerah sudah relatif baik, karena proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mendominasi dalam belanja daerah.

1.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaski dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analsis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Silpa tahun lalu, penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan maupun penjualan asset yang dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan adalah anggaran hutang, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	2.880.599	3.230.782	3.359.727	3.774.471	2,929,311
Dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	3.146.734	3.223.929	3.159.072	3.757.486	**2,988,472**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,339	-	-	10,000	-
Defisit/surplus riil	**(270,474)**	**6,853**	**200,655**	**6,984**	**(59.161)**

Merujuk pada data tabel III-8 di atas diketahui bahwa bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat defesit anggaran pada 2 tahun yakni tahun 2016 dan 2020. Artinya dalam 2 tahun tersebut jumlah belanja lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Kemudian 3 tahun berikutnya yakni 2017 s.d 2019, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, berada pada posisi surplus yakni jumlah pendapatan melebihi dari jumlah belanja.

Defisit yang terjadi 2 tahun pertama ditutupi dengan melakukan kebijakan penganggaran memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan pencarian kembali dana cadangan. Secara lebih jelas komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Bengkalis 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan)

NO	URAIAN	Tahun Anggaran				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
A	**PENDAPATAN**	2.880.599	3.230.782	3.359.727	3.774.471	2,929,311
B	**BELANJA**	3.146.734	3.223.929	3.159.072	3.757.486	**2,988,472**
C	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	4,339			10,000	-
A-(B+C)	**DEFISIT RIIL**	(270,474)	6,853	200,655	6,984	**(59.161)**
	Sisa Lebih PerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	280,383	9,909	14,845	215,501	222,090
	Pencairan Dana Cadangan					
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang	-	-	-	-	-
D	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	280,383	9,909	14,845	215,501	222,090
D+ DEFISIT RIIL	**Sisa Lebih PembiayaanAnggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	9,909.23	16,762.33	215,501.09	222,485.96	**162.929**

Dari tabel III-9 dapat dicermati bahwa SiLPA Kabupaten Bengkalis menunjukkan tren yang berfluktuasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya defisit riil yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020 ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun anggatan 2017 dan 2019 realisasi anggaran APBD Kabupaten Bengkalis berada pada posisi surplus, dimana realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja sehingga realisasi pembiayaan pada tahun 2016 dan 2020 tidak digunakan untuk menutup defisit. Adapun secara rinci komposisi penutup defesit rill seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel III-10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkalis (dalam %)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	96,46	-	-		26,63
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-		
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-		
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-		

Data tabel III.11 di atas memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis berada pada posisi surplus, dimana jumlah realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sehingga dengan demikian SiLPA yang dimiliki pada tahun tersebut tidak dipergunakan untuk menutupi defisit riil. Sementara itu tahun 2016 sebesar 96,46% dari Silpa tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 26,63% Silpa digunakan untuk menutupi defisit.

1.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari dari kerangka keuangaan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka memengah daerah lima tahun ke depan.

1.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah adalah untuk memperkirakan besaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah 5 tahun ke depan. Proyeksi pendapatan daerah meruapakan rujukan untuk menentukan kapasistas keuangan daerah daerah dan sebagai dasar untuk membuat perkiraaan besaran belanja daeran untuk 5 tahun ke depannya.

Pada dasar proyeksi pendapatan dan belanja untuk lima tahun ke depan berdasarkan pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama lima tahun kebelakang. Di samping rata-rata pertumbuhan, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan yang mempengaruhi pendapatan daerah. proyeksi untuk lima tahun ke depan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja , dan proteksi kemampuan kapsistas daerah untuk mendanai pembangunan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Proyeksi Pendapatan

Proyeksi terhadap pendapatan daerah dalam hal ini berpedoman kecenderungan ekonomi saat ini dan ke depannya. Perekonomian saat ini dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan sebagai dampak dari pendemik *Covid-19* yang diperkirakan akan berkontribusi bagi penurunan aktivitas perekonomian. Namun demikian saat ini Pemerintah telah sedang melakukan program vaksinasi seara massal dan menerapkan PPKM untuk mengatasi pemyebaran Covid-19. Kondisi ini diharapkan akan dapat menurunkan penyebaran Covid-19 . Sehubungan dengan tersebut pada tahun 2021 diperkirakan ekonomi akan masuk pada masa pemulihan dan bergerak tumbuh walaupun masih lambat. Berkenaan dengan hal itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan walaupun relatif kecil, dan begitu juga pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis ke depannya harus ditingkatkan secara optimal, karena pada dasarnya potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Bengkalis cukup potensial. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk menggali potensi PAD, dengan berbagai kebijakan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi menjadi salah satu kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut di antaranya melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang sudah lama tidak dilakukan penyesuaian sejak dialihkannya pajak ini dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Perbaikan administrasi perpajakan daerah untuk semua jenis pajak untuk meperkuat basis pajak daerah seperti identifikasi subjek dan objek pajak, perbaikan cara penghitungan, penetapan dan memperkuat pengawasan. Begitu juga dengan sumber PAD lainnya, seperti pendapatan dari retribusi daerah akan dilakukan perbaikan administrasi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana daerah akan menambah penyertaan modal daerah secara selektif dan melakukan evaluasi secara menyeleuruh terhadap BUMD yang ada, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penggalian potensi PAD dengan kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi menjadikan hal yang sangat strategis dilakukan dalam mewujudkan kemadirian daerah Di samping itu Pendapatan dari transfer diproyeksikan masih tetap dominan dalam pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis dan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Dengan kebijakan penggalian potensi PAD dan semakin membaiknya perekonomian nasional diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis seperti terlihat pada tabel III-11.

2) Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja dilakukan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Pada tahun 2021-2026 pendapatan daerah diproyeksikan meningkat maka belanja daerah pada juga diproyesi meningkat. Pada tahun 2021-2026 komponen belanja transfer diperkirakan akan naik rata rata sekitar 7,66%. Besarnya peningkatan belanja transfer ini dikarenan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adanya kebijakan bantuan keuangan terhadap Desa sebesar Rp. 1 milyar setiap desa yang mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya komponen Komponen belanja operasi diperkirakan naik rata-rata sekitar sebesar 1,525%. Belanja Modal juga diperkirakan akan meniningkat sebesar 9,84%.

Berdasarkan besaran perkiraan peningkatan pendapatan dan belanja tersebut untuk periode RPJMD 2021-2026 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada tabel III-12.

3) Proyeksi Pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Bengkalis pada dasar adalah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu. Disamping itu kebijakan pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komponen dalam pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan daerah yang akan dilakukan Kabupaten Bengkalis pada pengeluaran pembiayaan dalam periode RPJMD 2021-2026 adalah melakukan investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD yang akan dilakukan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III-11 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah dalam jutaan)

No	Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Rencana (Rp)				
		2020	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN	**2,929,311,34**	**3,209,562.17**	**3,372,741.30**	**3,437,162.86**	**3,505,140.45**	**3,602,117.96**
1	Pendapatan Asli Daerah	**266,160,19**	**355,695.30**	**386,603.16**	**417,820.77**	**452,195.54**	**504,843.05**
1.1	Pajak Daerah	63,710,38	89,252.00	105,504.00	121,329.60	139,529.04	160,458.40
1.2	Retribusi Daerah	9,387,62	20,673.81	22,741.19	25,015.31	27,516.84	30,268.53
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20,920,50	34,000.00	36,000.00	38,000.00	40,000.00	42,000.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172,141,69	211,769.49	222,357.97	233,475.86	245,149.66	272,116.12
2	**Pendapatan Transfer**	**2,562,794,75**	**2,853,866.87**	**2,986,138.14**	**3,019,342.08**	**3,052,944.91**	**3,086,951.96**
2.1	**Transfer Dana Perimbangan**	**2,275,653,46**	**2,532,467.19**	**2,651,882.47**	**2,678,401.30**	**2,705,185.31**	**2,742,560.13**
2.12	Dana Bagi hasil pajak	1,050,702,83	1,182,067.11	1,247,466.39	1,259,941.06	1,272,540.47	1,291,628.58
2.1.3	Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam	678,078,156	746,580.64	776,443.87	784,208.31	792,050.39	803,931.15
2.1.4	Dana alokasi umum	338,731,61	373,021.38	387,942.23	391,821.65	395,739.87	399,697.27
2.1,5	Dana alokasi khusus	208,140,86	230,798.06	240,029.98	242,430.28	244,854.58	247,303.13
2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**166,657,94**	**184,224.69**	**191,593.68**	**195,425.55**	**199,334.06**	**203,320.75**
2.21	Dana Otonomi Khusus			-	-	-	
2.2.1	Dana penyesuaian	166,657,93	184,224.69	191,593.68	195,425.55	199,334.06	203,320.75
2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**120,483,356**	**137,174.99**	**142,661.99**	**145,515.23**	**148,425.53**	**151,394.05**
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104,662,86	119,342.24	124,115.93	126,598.25	129,130.21	131,712.82
2.3.1	Bantuan Keuangan Provinsi	15,820,50	17,832.75	18,546.06	18,916.98	19,295.32	19,681.23
2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya						
3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya**	**159,942,18**					
3.1	Pendapatan Hibah	113,615,46					
3.1.	Pendapatan Hibag dari Daerah	46,326,72					
3.2	Pendapatan Dana Darurat						
3.3	Pendapatan Lainnnya						

Tabel III-12 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)

Uraian	Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Rencana (Rp)				
	2020	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA						
BELANJA OPERASI	**1.981.293,37**	**2.121.326,83**	**2.131.974,59**	**2.142.675,99**	**2.153.431,32**	**2.178.210,90**
Belanja Pegawai	967.266,48	1.067.530,14	1.072.867,79	1.078.232,13	1.083.623,29	1.089.041,41
Belanja Barang dan Jasa	933.384,53	973.638,57	978.506,76	983.399,29	988.316,29	1.005.257,87
Belanja Subsidi	9.618,70	8.224,01	8.306,25	8.389,31	8.473,21	8.557,94
Belanja Hibah	71.023,67	43.129,1	43.344,76	43.561,48	43.779,29	45.968,25
Belanja Bantuan Sosial		28.805,00	28.949,03	29.093,77	29.239,24	29.385,43
BELANJA MODAL	**500.329,66**	**732.836,28**	**757.999,22**	**784.305,51**	**811.811,19**	**881.328,07**
Belanja Tanah	815,25	237,35	239,72	242,12	244,54	246,99
Belanja Peralatan dan Mesin	97.002,85	110.096,88	111.197,85	112,309,83	113.432,93	119.567,26
Belanja Gedung dan Bangunan	131.718,40	176.637,70	178.404,08	180,188,12	181.990,00	188.809,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.976,62	442.742,09	464.879,20	488,123,16	512.529,32	568.155,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.816,55	3.122,25	3.278,36	3,442,28	3.614,39	4.795,12
Belanja Aset Lainnya						
BELANJA TAK TERDUGA		**19.599,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Belanja Tak Terduga	152.938,66	19.599,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL BELANJA	**2.634.561,70**	**2.873.762,30**	**2.899.973,81**	**2.936.981,51**	**2.975.2421,51**	**3.016.785,96**
TRANSFER	**353.910,55**	**385.163,44**	**513.400,12**	**525.916,25**	**528.344,14**	**530.808,09**
Transfer Bagi Hasil ke Desa	-					
Bagi Hasil Pajak	4.915,35	8.655,15	9.087,91	9.542,30	10.019,41	10.520,39
Bagi Hasil Retribusi	763,60	1.467,83	1.541,22	1.618,29	1.699,20	1.784,16
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-					
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	348.231,61	377.400,12	379.287,12	381.183,55	383.089,47	385.004,92
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	**2.988.472,25**	**3.387.162,41**	**3.425.890,06**	**3.465.325,65**	**3.506.050,60**	**3.602.848,44**
SURPLUS (DEFISIT)	**(16.984,87)**	**(177.600,24)**	**(53.148,76)**	**(28.162,79)**	**(910,15)**	**(730,48)**

Tabel III-13 Proteksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam Jutaan)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN	**208,000.00**	**74,000.00**	**49,000.00**	**11,000.00**	1,000.00
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	208,000.00	74,000.00	49,000.00	11,000.00	1,000,00-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	--	
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	--	-	
Total Penerimaan					
PENGELUARAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30,000.00	20,000,00	20,000.00	10,000.00	--
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri					
Pemberian Pinjaman Daerah					
ADB					
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga					
Total Pengeluaran					
PEMBIAYAAN NETTO	**178,000.00**	**54,000.00**	**29,000.00**	**1,000.00**	1,000,00

1.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis untuk kurun waktu 6 tahun mendatang 2021-2026, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah. Sedangkan SILPA diperkirakan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2016-2020. Kemudian selama 4 tahun yakni 2022 -2025 Pemerintah Kabupaten Bengkalis merencanakan akan melakukan penyertaan modal kepada BUMD dalam rangka untuk mendorong peningkatan PAD dan perekonomian daerah. Di samping itu jika kondisi keuangan tahun berjalan semakin membaik Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menjajaki pinjaman daerah, walaupun dari perhitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah belum diperhitungkan.

Perkiraan kapasitas rii kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel III-14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021-2026 (dalam jutaan)

Uraian	Proyeksi Tahun Rencana				
	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	**3,209,562.17**	**3,372,741.30**	**3,437,162.86**	**3,505,140.45**	**3,602,117.96**
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda	-	-	-	--	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	208,000.00	74,000.00	49,000.00	11,000.00	1,000.00
Total Penerimaan	**3,417,562.17**	**3,446,741.30**	**3,486,162.86**	**3,516,140.45**	**3,603.117,96**
Belanja Bagi hasil Pajak	8,655.15	9,087.91	9,542.30	10,019.41	10,520.39
Belanja Bagi Hasil Retibusi	1,467.83	1,541.22	1,618.29	1,699.20	1,784.16
Bantuan Keuangan Kepada desa	377,400.12	379,287.12	381,183.55	383,089.47	385,004.92
Belanja Bantuan Keuangan lainnya	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
Pengeluaran Pembiayaan	30.000.00	20.000,00	20.000.00	10,000.00	
Belanja Tidak Terduga	19,599.18	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Total Belanja transfer dan Pengel, belanja tidak terduga Pembiayaan	**573,122.28**	**555,916.25**	**558,344.14**	**550,808.08**	**543,309.47**
Kapasitas riil kemampuan keuangan	**2,844,439.89**	**2,890,825.05**	**2,927,818.72**	**2,965,332.37**	**3,059,808.49**

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah bupati terpilih resmi dilantik. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

1) Prioritas I

Dialokasikan untuk mendanai belanja langsung wajib mengikat serta pemenuhan penerapan urusan wajib pelayanan dasar, dan di dalamnya termasuk kewajiban mandatori diantaranya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% , anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16%, serta belanja Infrastruktur 25% dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Bengkalis

2) Prioritas II

Dialokasikan untuk pendanaan Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi BUPATI periode 2021-2026 yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

3) Prioritas III.

Dialokasikan untuk rogram-program urusan pemerintahan lainnya, penunjang tugas dan fungsi OPD dan alokasi yang lainnya yang tidak bertentangan dengan Perarutan dan Perundang-undangan. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Tabel III-15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (dalam Juta)

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Prioritas I**	**1.474.060,33**	**1.486.788,73**	**1.511.034,25**	**1.530.370,84**	**1.549.979,23**	**1.599.361,90**
	Pendidkan	648.620,38	654.221,17	664.889,76	673.398,31	682.026,45	703.755,95
	Kesehatan	464.468,60	468.479,25	476.118,89	482.211,74	488.390,24	503.950,46
	Kapasitas Pegawai	8.460,27	8.533,32	8.672,48	8.783,46	8.896,00	9.179,43
	Infrastruktur	352.511,08	355.554,99	361.353,13	365.977,34	370.666,55	382.476,06
2	**Prioritas II**	340.351,00	379.351,00	39.001.878,00	401.220,00	412.981,00	425.330,00
3	**Prioritas III**	1.005.677,30	978.300,16	37.622.087,20	996.227,88	1.002.372,14	1.035.116,59

BAB IV.
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu-isu strategis Kabupaten Bengkalis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting dan telaah terhadap isu strategis internasional, regional maupun kebijakan nasional yang merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi landasan berpijak untuk perumusan program prioritas.

4.1. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap aspek/fokus/urusanpenyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani pemerintah Kabupaten Bengkalis.

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung menurun pada harga konstan 2010 pada periode 2016-2020.

2) Nilai produksi sektor pertambangan mengalami kontraksi selama periode 2016-2020, sehingga mempengarui terhadap akumulasi nilai PDRB Kabupaten Bengkalis. Sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 5–6% pertahun.

3) Pendapatan per kapita penduduk cenderung mengalami penurunan, baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan (2010). Pendapatan per kapita yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun.

4) Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu 0,334.

4.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) IPM Pada tahun 2020 kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami perlambatan akibat Pendemi Covid-19 dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Jika diperhatikan dari komponen pembentuk IPM sebagai indikator kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa aspek ekonomi dominan dalam pembentuk kualitas pembangunan manusia jika dibandingkan dengan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Riau. Selama periode 2016-2020 indeks kesehatan dan indeks pendidikan dalam pembentukan IPM Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup di Kabupaten Bengkalis lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau.

2) Tingkat partisipasi tenaga kerja penduduk Kabupaten Bengkalis cenderung stagnan pada kisaran 65% serta tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari rata rata Provinsi Riau menunjukan bahwa penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bengkalis lebih sempit jika dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada sektor pertambangan dan diperburuk oleh kondisi Covid-19 di tahun 2020.

4.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a) Seni Budaya

1) Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan belum maksimal, berdasarkan data masih ada beberapa benda situs dan Kawasan cagar budaya yang belum dimiliki oleh daerah. Di samping itu diperkiran masih banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang belum diindetifikasi dan dilestrikan.

b) Olahraga

1) Jumlah klub olahraga sebesar 30 klub per 10.000 penduduk, belum didukung dengan sarana/prasarana olahraga (1 unit per 10.000 penduduk).

2) Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

3) Lemahnya sinergi kerjasama antar stakeholder untuk menumbuh kembangkan olahraga berprestasi.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a) Urusan Pendidikan

1) Distribusi sekolah, dan tenaga pengajar yang belum merata di daerah pedesaan dan perkotaan. Ada ketimpangan yang sangat nyata dirasakan masyarakat pedesaan.

2) Akses terhadap sekolah sangat sulit di beberapa desa di Rupat Utara sehingga banyak anak usiawajib sekolah yang tidak bisa bersekolah.

3) Kemampuan ekonomi masyarakat rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama pada wilayah pedalaman seperti Rupat Utara. Anak-anak yang seharusnya bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga.

b) Urusan Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) dan kematian ibu melahirkan masih tinggi.

2) Angka persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan imunisasi lengkap masih belum optimal terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman.

3) Prevalensi Balita Gizi Buruk masih tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena belum dimbangi dengan pemberian makanan pendamping ASI kepada anak usia 6 -24 bulan bagi keluarga miskin.

4) Cakupan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas medis lainnya belum menunjukkan perkembangan signifikan beberapa tahun terakhir.

5) Angka kematian bayi yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Rupat Utara perlu menjadi perhatian serius.

c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Akses jalan dalam kondisi baik masih sangat rendah. Terutama pada wilayah Pulau Rupat, akses jalan dalam kondisi rusak sedang dan rusak parah telah berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok dan biaya produksi. Akses jalan yang buruk di Pulau Rupat juga menyebabkan kunjungan wisata lebih rendah dari potensi sebenarnya.

2) Sistem drainase dalam kondisi baik masih sangat rendah, membuat wilayah perkotaan rawan banjir saat hujan dan rawan DBD.

3) Akses terhadap air minum dan air bersih masih rendah. Banyak penduduk di wilayah pesisir dan kepulauan kesulitan sumber air bersih dan menyebabkan mahalnya air bersih.

d) Urusan Perumahaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ketersediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) seperti air bersih, drainase lingkungan dan jalan lingkungan masih terbatas. Sehingga dapat ditemukan pada beberapa

tempat, terutama perkotaan, banyak drainase bermasalah dan kumuh. Di beberapa wilayah sampah bertumpuk dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

e) Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 37,4% masih jauh di bawah SPM Nasional sebesar 80%.

2) Sementara itu, tingkat waktu tanggap sebesar 90% lebih besar dari nilai nasional sebesar 75%.

3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 24% pada tahun 2019, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, masih tergolong rendah.

f) Sosial

1) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia telah menerima jaminan sosial baru mencapai 75%, masih perlu ditingkatkan.

2) Tren jumlah fakir miskin dan komunitas adat tertinggal cenderung naik secara signifikan tiap tahunnya.

3) PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial masih rendah yaitu 80% dari total PMKS.

4) KAT yang berada di wilayah pedalaman sulit dijangkau dan sulit diberdayakan.

4.1.2.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Urusan Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan angka persentase yang meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan. Permasalahan tenaga kerja saat ini adalah kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, relatif rendahnya kualitas tenaga kerja dan adanya ketimpangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan lapangan kerja yang tersedia.

Capaian, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ini kerap terkendala tidak cocoknya antara spesifikasi dan kemampuan dari pencari kerja dengan longan kerja yang tersedia. Guna menjembatani kesenjangan antara kebutuhan keahlian di pasar tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja maka langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana) serta memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi.

b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Bengkalis.

2) Rasio KDRT cenderung meningkat.

c) Urusan Pangan

1) Ketersediaan Pangan utama mengalami penurunan sebesar 2,1% dari tahun 2018 ke tahun 2019, yang kemudian mengakibatkan turunnya angka ketersediaan energi dan ketersediaan protein di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019. Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh menurunnya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019.

2) Ketimpangan antara masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan sering muncul dalam urusan pangan. Dimana konsumsi pangan per kapita masyarakat pedesaan cenderung lebih rendah dibanding masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan.

3) Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional, dan

4) Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

d) Urusan Pertanahan

Persentase lahan bersertifikat masih rendah. Peningkatan kepemilikan lahan bersertifikat mesti ditingkatkan untuk menghindari terjadinya konflik agraria di Kabupaten Bengkalis. Prioritas untuk Komunitas Adat Terpencil yang sering terusik oleh perusahaan-perusahaan maupun entitas berkepentinngan yang sering membuka lahan baru untuk kebutuhan industri perkebunan.

e) Urusan Lingkungan Hidup

Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten Bengkalis yang secara perlahan memperlihatkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun permasalahan lingkungan hidup di kabupaten Bengkalis terutama yang terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan bencana perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Wilayah kabupaten Bengkalis menghadapi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup terutama permasalahan potensi kebakaran lahan dan hutan, erosi dan abrasi wilayah pesisir pantai dan bahaya banjir rob serta gelombang tinggi yang menjadi perhatian dan keresahan masyarakat secara luas.

Kebakaran lahan dan hutan terjadi di musim kemarau hampir setiap tahun. Tahun 2019 kebakaran lahan dan hutan masih menempatkan kabupaten Bengkalis sebagai wilayah dengan

titik api terbanyak ke empat di Provinsi Riau. Permasalahan kebakaran lahan dan hutan ini sering diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan pembakaran. Selain masalah kesehatan masyarakat yang terdampak langsung seperti ISPA, kebakaran tersebut juga telah mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan dan hutan terutama daerah gambut, berkurangnya daerah cadangan air baku serta terganggunya perekonomian masyarakat setempat.

Di samping itu, masalah abrasi dan erosi wilayah pesisir di bagian utara pulau rupat, bagian timur pulau Bengkalis dan bagian timur wilayah kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis juga sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi tanah pesisir yang aluvial dan gambut yang rentan terhadap kikisan arus dan energi gelombang laut selat Melaka telah mengakibatkan tingkat abrasi yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim laut yang terjadi semakin meningkatkan potensi banjir rob di sebagian wilayah pemukiman serta jalan raya akibat naiknya muka air laut dan potensi bencana badai angin serta hempasan gelombang tinggi.

Pada bagian utara pulau Bengkalis, dimana kondisi lahan pesisir yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, mengalami erosi atau pergerakan tanah ke arah laut yang signifikan. Abrasi, erosi serta banjir rob ini memerlukan strategi tata kelola pesisir yang tepat agar menjamin kelestarian lingkungan hidup dan membantu peningkatan nilai ekomoni wilayah bagi masyarakat.

Upaya-upaya dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup masih terkendala dengan beberapa faktor antara lain; masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, industri dan pembangunan sebagai akibat belum terpenuhinya aparatur pengawas lingkungan hidup, peran serta lembaga adat dan tokoh-tokoh agama yang belum terkoordinasi dengan optimal untuk berpaduserasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan cadangan sumberdaya alam terbarukan di Kabupaten Bengkalis dan masih lemahnya pelaksanaan kearifan lokal masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup serta cadangan sumberdaya alam terbarukan

f) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang masih harus ditingkatkan antara lain bayi berakte kelahiran dan pasangan berakte nikah. Belum maksimalnya pencapaian ini harus dievaluasi apakah menyangkut dengan ketersediaan sumber daya manusia pelayanan, sarana, dan faktor lainnya. Permasalahan lain adalah susahnya akses dari beberapa daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten untuk urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Penduduk dari wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten mengaku kesulitan dan membutuhkan banyak pengorbanan untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dan catatan sipil di ibu kota kabupaten

g) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa permasalahan adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat desa yang menyebabkan rendahnya perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bengkalis.

h) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi di Kabupaten Bengkalis.

2) Rendahnya keberlangsungan pemakaian kontrasepsi telah membuat jumlah anak dalam satu keluarga menjadi lebih tinggi dari standar nasional.

3) Angka kelahiran remaja cukup tinggi, terutama yang masih di bawah umur.

i) Urusan Perhubungan

Permasalahan utama dalam urusan perhubungan antara lain;

1) Masih diperlukan angkutan darat yang terpadu mengingat baru 3% jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang yang dapat terlalayani.

2) Masih rendahnya kepemilikian KIR pada angkutan umum di Kabupaten Bengkalis namun secara tren terjadi peningkatan.

3) Masih rendahnya jumlah rambu rambu yang terpasang pada Kabupaten Bengkalis

j) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permalahan utama dalam urusan Komunikasi dan informatika adalah

1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet saat ini sudah semakin meningkat, namun masih tergolong rendah terutama untuk wilayah pedesaan.

2) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah termasuk keterbukaan informasi publik. Sehingga perlu lebih intensif dalam mewujudkan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan kebijakan satu data dengan menggunakan bank data (data centre).

3) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi.

k) Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Permasalahan utama dalam urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

1) Rendahnya daya saing produk hal ini disebabkan oleh rendahnya inovasi dan pengembangan produk dan belum efektifnya pembinaan dan pemberdayaan UKM.

2) Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UKM adalah rendahnya akses terhadap permodalan, terutama terhadap lembaga keuangan bank. Rendahnya pengetahuan dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan perbankan serta suku bunga yang tinggi menyebabkan akses UKM terhadap modal yang bersumber dari lembaga keuangan bank relatif rendah.

3) Masih rendahnya persentase Koperasi aktif. Walau secara tren koperasi aktif di Kabupaten Bengkalis naik namun masih di bawah 50% saja yang aktif.

l) Urusan Penanaman Modal

Pelaku Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Termasuk Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Bengkalis pada periode 2016-2019 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di akhir tahun. Pemasalahan utama dalam penanaman modal di Kabupaten Bengkalis adalah masih Kepastian dalam berinvestasi terkait dengan aturan dan regulasi daerah yang berubah sesuai dengan peraturan perundangan dari pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah investasi hanya berfokus pada sektor migas dan perkebunan besar. Pemerintah daerah belum bisa menggaet investor untuk sektor wisata yang sangat potensial.

m) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan dalam bidang kepemudahan dan olahraga adalah masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan dan pemuda. Pembinaan olahraga belum dilakukan secara baik. Hal ini terlihat angka persentase pembinaan cabang olahraga yang tidak berubah dari tahun 2014 hingga 2018 yang tetap diangka 40%. angka masih kecilnya jumlah altet muda yang dibina, Jumlah atlit berprestasi dan prestasi olahraga dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang belum signifikan. Peningkatan indikator cakupan pelatih yang berprestasi, pembinaan atlit muda, atlit yang berprestasi dan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga kabupaten, provinsi dan nasional.

Permasalahan lain yang timbul dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah kurangnya pendataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masing-masing kecamatan. Banyak sarana prasarana olahraga yang rusak dan tidak dipelihara dengan baik seperti lapangan sepakbola kecamatan.

n) Urusan Statistik

Permasalahan utaman dalan urusan statistik adalaha;

1) Buku statistik Kabupaten Bengkalis dalam Angka dan Kecamatan dalam angka tersedia setiap tahun namun dengan kualitas data yang masih lemah.

2) Masih lemah koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten dengan BPS Kabupaten Bengkalis.

3) Masih lemahnya penyedian data secara online dan terpadu.

o) Urusan Persandian

Pengelolaan arsip secara baku masih lemah, yaitu masih sebesar 56.2%. Padahal pengelolaan arsip ini penting artinya untuk menjaga data warisan kolektif bangsa.

p) Urusan Kebudayaan

1) Masih rendah ketersediaan sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya khususnya pada wilayah kecamatan.

2) Masih banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum digali mengingat Pulau Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang panjang.

3) Banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang tidak dipelihara dan belum terdata. Bahkan pada beberapa museum terjadi kehilangan benda cagar budaya karena pencurian, pertikaian keluarga dan sebagainya.

q) Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama dalam urusan perpustakaan anatara lain ;

1) Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah terbatas (tidak lebih dari 300 judul buku) selama tiga tahun terakhir. Setidaknya Jumlah koleksi minimal 5000 judul jika bercermin dari standar perpustakaan Nasional untuk wilayah Kabupaten.

2) Masih diperlukan infrastruktur pendukung perpustakaan seperti system perpustakaan yang terintegrasi dengan perpustakaan di kecamatan

4.1.2.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Urusan Perikanan

1) Jumlah produksi perikanan tangkap cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.

2) Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan masih berbasis tradisional oleh nelayan. Penangkapan berbasis tradisional memiliki banyak kekurangan seperti hasil tangkapan yang sangat terbatas bergantung musim, perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan rusaknya ekosistem karena menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

3) Produksi perikanan budidaya belum optimal karena belum didukung dengan sarana dan prasarana.

b) Urusan Pariwisata

Permasalahan utama dalam urusan pariwisata antara lain;

1) Terbatasnya aksesibilitas dan amenitas destinasi wisata

2) Masih banyaknya destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Bengkalis yang belum terdata dan memiliki legalitas status sebagai objek wisata daerah.

3) Promosi wisata masih sangat minim. Belum ada kalender wisata tetap yang menjadi acuan wisatawan.

4) PAD sektor pariwisata masih sangat sedikit, jauh dibawah potensi sebenarnya.

c) Urusan Pertanian

Pertanian sebagian besar masih belum melek teknologi. Masih banyak potensi sektor pertanian yang belum digali sehingga produktivitas hasil pertanian sangat rendah di Kabupaten Bengkalis.

Pembangunan di bidang pertanian hendaknya difokuskan ke peningkatan keahlian petani melalui pelatihan, mekanisasi pertanian, dan peningkatan teknologi peningkatan hasil pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

d) Urusan Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran dan kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan luas lahan kritis tertinggi ketiga di Provinsi Riau. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau, yang terluas adalah Kabupaten Indragiri Hilir (195.702,02 Ha) diikuti Kabupaten Kampar (159.786,38 Ha), dan Kabupaten Bengkalis (127.019,19 Ha).

e) Urusan Energi dan Sumber daya mineral

Rasio elektrifikasi di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil mesti ditingkatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di kawasan terpencil. Masyarakat pedesaan dan kawasan terpencil sebagai satu kesatuan utuh dari Kabupaten Bengkalis mesti mendapat perhatian yang sama dengan masyarakat perkotaan yang sudah menikmati listrik dengan layak.

f) Urusan Perdagangan

Tren ekspor bersih Kabupaten Bengkalis menurun pada periode 2017-2019. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh penurunan ekspor migas karena semakin sedikitnya jumlah cadangan minyak dan diperparah lagi oleh penurunan harga minyak di pasar internasional.Penurunan perdagangan non migas juga terjadi dikarenakan turunnya harga komoditas di pasar global seperti harga kelapa sawit dan karet, sehingga memicu penurunan jumlah ekspor ke negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, India dan Tiongkok.

g) Urusan Perindustrian

Belum berkembangnya industri hilir berbasis sumber daya lokal. Perekonomian kabupaten Bengkalis masih banyak bergantung pada industri migas, padahal potensi industri kreatif sangat besar untuk dikembangkan. Sebut saja industri kuliner melayu, tenun lejo Bengkalis dan oleh-oleh kerajinan khas Bengkalis.

4.1.2.4. Fokus Penunjang Urusan

a) Urusan Perencanaan

Proses perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin keselarasan pembangunan terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis. Karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk bisa menjadi masukan perbaikan di masa mendatang.

b) Urusan Pelatihan dan Pendidikan

Pemasalahan Kepagawaian di Kabupaten Bengkalis saat ini adalah menyangkut pada masih belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan belum optimalnya pembinaan ASN. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya jumlah pengawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Padahal pelatihan tersebut memliki berkontribusi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pegawai.

Balai latihan kerja di Kabupaten Bengkalis juga belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

c) Urusan Keuangan

Menunrunya tren kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah perlu dilakukan kebijakan dan inovasi terhadap kebijakan PAD. Pada masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Karena selama ini pendapatan dari PAD masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya.

d) Pengawasan

Permasalahan dalam urusan pengawasan adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Persentase tindak lanjut temuan juga terbilang masih rendah. Masih terjadi peningkatan temuan selama kurun waktu 2015-2019. Hal yang sama juga terjadi pada indikator jumlah temuan BPK, memilki tren naik. Sedangkan pada persentase Pelanggaran Pegawai (ASN) walau tren sudah menunjukan perubahan yang baik namun masih besar secara kuantitas yaitu 36%.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1) Kebutuhan non pangan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai 46,97% pengeluaran dihabiskan untuk kebutuhan non pangan dan pada tahun 2019 47.03% dihabiskan untuk non pangan. Sebaliknya pengeluaran untuk kebutuhan pangan persentasenya terus menurun setiap tahun. Artinya, masyarakat Bengkalis dapat dikatakan sudah mampu memenuhi kebutuha pangan/pokok dengan baik setiap tahun dan mulai beralih memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan yang baik, fashion, furniture, kendaraan dan sebagainya

1) Nilai NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2018 berada pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan kelapa.

2) Secara umum, angka kriminalitas memiliki tren menurun dari tahun 2015 dari 856 kasus menjadi 595 kasus pada tahun 2019, namun jumlah kriminalitas harus diminimalisir lagi.Rasio kriminalitas kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 10.2 kasus per 10.000 penduduk, sebelum kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 11.6 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 hanya terdapat 10.4 kasus kriminal.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1) **Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertambangan, terutama produk minyak dan gas**. Kontibusi sektor pertambangan pada PDRB atas harga konstant (2010) pada tahun 2019 mencapai 56,45%, kemudian sektor industri pengolahan 18,45% dan sektor pertanian sebesar 11,81%. Dominasi sektor pertambangan secara absolut disumbangkan oleh komoditi minyak termasuk pada aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan, termasuk pada sektor perdagangan. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan pengembangan sektor-sektor ekonomi di luar sektor minyak dan gas, terumata yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Kontribusi minyak dan gas yang dominan dalam struktur perekonomian telah menjadi faktor kesenjangan ekonomi yang tinggi antara Kabupaten Bengkalis dengan daerah lain di Riau.

2) **Tingkat pengeluaran per kapita penduduk masih relatif rendah terhadap daerah lain di Riau**.Ketimpangan pendapatan antar penduduk masih termasuk dalam kategori sedang dengan Gini Rasio 0,334. Kemudian, nilai PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga konstant (2010) pada tahun 2019 merupakan yang terbesar di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau dengan kontribusi 15,14% terhadap total PDRB Riau. Namun pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis lebih rendah 14,07% dari pengeluaran per kapita penduduk Riau pada tahun 2019 dan berada pada urutan kelima terendah di antara kabupaten/kota lain di Riau. Nilai pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis Rp. 1.059.740/bulan,

sedangkan pengeluaran per kapita penduduk Riau Rp. 1.233.245/bulan. Tingkat pengeluaran yang realtif rendah ini tidak seiring dengan nilai PDRB terbesar di Riau dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terbesar kedua setelah Dumai di Riau. Ketimpangan antarsektor menjadi penyebab distribusi pendapatan kepada penduduk tidak berlangsung dengan baik.

3) **Produktivitas pertanian masih rendah**. Produkttivitas tanaman padi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 mencapai 3,64 ton/Ha, masih lebih rendah dari Riau yang telah mencapai 3,66 ton/Ha dan jauh berada dari produktivitas padi nasional yang telah mencapai 5,11 ton/Ha. Produktivitas tanamakan kelapa sawit 1,79 ton/Ha dan lebih rendah dari Riau sebesar 2,84 ton/Ha, demikian juga produktivitas tanaman karet yang hanya mencapai 0,68 ton/Ha, sedangkan Riau mencapai 0,84 ton/Ha dan tanaman kelapa dengan produktivitas 0,52 ton/Ha lebih rendah dari Riau sebesar 0,89 ton/Ha. Kondisi lahan dan usia tanaman karet dan kelapa yang sudah tua menjadikan tanaman ini tidak produktif lagi dan upaya peremajaan tanaman juga masih terbatas.

4) **Pertumbuhan penduduk tinggi dan ketimpangan penyebaran penduduk antarwilayah.**Pertumbuhan penduduk pada wilayah daratan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kepulauan. Secara umum laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis pertahun selama periode 2010-2019 sekitar 1,51% per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Riau yang mencapai 2,52% per tahuan, namun beberapa kecamatan pada wilayah daratan dan pusat pemerintahan di Kabupaten Bangkalis memiliki kepadatan penduduk yang senjang dibandingkan dengan kecamatan lain. Pertambahan penduduk yang tinggi pada beberapa wilayah akan berdampak pada tekanan yang tinggi pada pemafaatan sumberdaya lahan, peningkatan permasalahan sosial, pengangguran dan kemiskinan.

5) **Kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan manusia masih rendah**. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 tergolong tinggi (73,44) dan lebih tinggi dari IPM Riau (73,00), namun hasil-hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai komponen pembentuk IPM masih memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari angkan harapan lama sekolah dan angka harapan hidup penduduk sebagai komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis masih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Capaian pembangunan ekonomi terlihat lebih baik sebagai komponen pembentuk IPM Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan Riau, yang terlihat dari besaran pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bengkalis yang lebih tinggi dari Provinsi Riau.

6) **Kualitas pelayanan kesehatan masih rendah.** Balita dengan status gizi buruk ditemukan meningkat dari 4 orang pada tahun 2018 menjadi 8 orang pada tahun 2019. Angka kesakitan DBD sebanyak 195 per 100.000 penduduk, terbanyak di Riau.

Penduduk dengan keluhan kesehatan merupakan terendah di Riau, yaitu 19,49% sedangkan Riau sebesar 26,44%. Kemudian penyebaran dokter sudah cukup baik dimana Kabupaten Bengkalis memiliki Dokter terbanyak di Riau yaitu 223 atau 11,19% dari total Dokter di Riau, perawat sebanyak 653 orang atau 9,18% dari total perawat di Riau, Bidan sebanyak 470 atau 6,86% dari total bidan di Riau. Jumlah fasilitas kesehatan sudah mencukup, yaitu Rumah Sakit sebanyak 7 unit , Puskesmas 18 unit dan Klinik Pratama sebanyak 23 unit. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi penyebab masih ditemukannya masalah-masalah kesetan di Kabupaten Bengkalis.

7) **Angka partisipasi sekolah masih relatif rendah**. Angka parsisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 untuk penduduk usia sekolah SD sebesar 98,77% merupakan kedua terendah di Provinsi Riau yang telah mencapai 99,36%, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP sebesar 94,35% merupakan terendah kelima di Riau yang telah mencapai 95,37% dan angka partisipasi sekolah penduduk usia SMA sebesar 80,90% lebih tinggi dari Riau sebesar 77,29% atau tertinggi kelima di Riau. Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 16 pulau-pulau utama, menyebabkan partisipasi sekolah pada setiap wilayah tidak merata, akibat penyebaran fasilitas pendidikan dasar dan pendidikan lanjut (SMP Sederajat dan SMA Sederajat). Kondisi ini juga akan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

8) **Tingkat pengangguran masih relatif lebih tinggi**. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis sebesar 9,62% pada tahun 2019, merupakan terbesar di antara kabupaten/kota lain di Riau. Rata-rata tingkat pengguran terbuka di Riau sebesar 5,97% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,10%, sedangkan TPAK Kabupaten Bengkalis sebesar 64,30%. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bengkalis sebanyak 7,75% dan merupakan jumlah keenam terbesar dari total penduduk usia kerja di Provinsi Riau. Jumlah pencarikerja terdaftar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.482 orang pada tahun 2019 atau sebanyak 5,69% dengan urutan kelima terbesar dari total pencari kerja terdaftar di Riau.

9) **Pembangunan infrastruktur antarwilayah belum merata**. Panjang jalan bertambah di Kabupaten Bengkalis telah bertambah setiap tahun dengan rasio panjang jalan dengan penduduk sebesar 27,69 Km/10.000 penduduk. Panjang jalan kondisi baik hanya 37,04% pada tahun 2019. Ketersediaan infrastruktur antarwilayah perkotaan dan perdesaan masih belum seimbang. Ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas mengakibatkan konektivitas antarwilayah menjadi terbatas. Infrastruktur pengaman tebing sungai dan pantai baru mencapai 8,8% dalam kondisi baik, kondisi irigasi dalam kondisi baik 77,78%, drainase kondisi baik baru 30%, rumah layak huni baru mencapai 64,31% dan rumah tangga akses pada air minum layak 14,83%. Kondisi geografis wilayah yang berupa pulau dan sungai-sungai dengan tofografi dataran rendah menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan penyediaan infrastruktur wilayah dan pemukiman menjadi terbatas.

10) **Tingginya tingkat abrasi pada pada pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis**, khususnya pulau Bengkalis dan pulau Rupat serta 16 pulau utama dan juga terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa kecamatan. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah daratan dan lautan dengan dengan rata-rata ketinggian antara 2 – 6,1 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memiliki resiko terhadap tingkat abrasi yang berdampak pada mundurnya garis pantai, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada kondisi Sumberdaya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, infrastruktur wilayah, pemukiman penduduk termasuk penyediaan air bersih dalam hal ketesediaan air baku dan air baku beresiko mengalami instrusi air laut, ancaman pada kodisi fasilitas umum dan fasilitas sosial pada wilayah-wilayah beresiko abrasi.

11) **Resiko kebakaran lahan dan hutan yang tinggi,** mempunyai luas lahan gambut terbesar kedua di Provinsi Riau memiliki resiko kebakaran yang tinggi, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 245 titik api atau sekitar 10,70% dari total titik api di Provinsi Riau. Kondisi hidrologi daerah rawa dan kondisi sungai-sungai yang mulai terdegradasi Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah, menjadi penyebab resiko kebakaran lahan hutan semakin tinggi. Resiko kebakaran lahan dan hutan semakin tinggi juga disebabkan oleh perilaku pembukaan lahan untuk kegiatan ekonomi oleh masyarakat pada musim kering dengan intensitas hujan rendah.

4.2. Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dike depankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam

menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

1.1.1.1 Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;

2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;

3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;

4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;

5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;

6) Memastikan ketersediaan daan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;

7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9) Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi;

10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;

11) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

12) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan

17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

1.1.1.2 Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesnjangan dalam pembangunan manusia merupakan satu hal utama yang ditekankan dalam laporan Human Development Report 2019. Lebih lanjut diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh terkait pemahaman kesenjangan dalam perspektif manusia. Laporan PPB menunjukkan bahwa secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain: pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini, maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender. Tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan, sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Dalam konteks persaingan global, pemerintah Indonesia khususnya daerah daerah yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti Kabupaten Bengkalis.

1.1.1.3 Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri disetiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif, era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.1.2 Isu Strategis Regional

1.1.2.1 Perang dagang China dan Amerika Serikat

Perang dagang China dan Amerika Serikat dimulai sejak Maret 2018 yang ditandai dengan penetapan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk dari China yang masuk ke Amerika Serikat. Hal ini disebabkan China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dengan cara melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke China, sehingga memperburuk defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.

Ketegangan kedua Negara adidaya ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis di Indonesia, mengingat selama ini kedua negara tersebut merupakan partner yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari data ekspor dan impor Indonesia cukup besar, sehingga secara ekonomi akan berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

1.1.2.2 Sengketa wilayah di laut China Selatan

Sengketa laut China Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di wilayah tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah Brunei Darussalam, Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Sejak Maret 2016 Indonesia terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakuinya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh China dan berkembang kearah konflik terhadap Kepulauan Natuna Utara. China menganggap wilayah tersebut bukan wilayah Indonesia, sehingga setiap upaya petugas pengamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan China dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya Indonesia

menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran batas wilayah dan diproses secara hukum Indonesia. Perkembangan kondisi di wilayah laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan, mengingat sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut, sehingga terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan pertahanan keamanan.

1.1.3 Isu Kebijakan Nasional

1.1.3.1 RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu: 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, 3) pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga, 8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas nasional dan isu strategis dalam pembangunan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dengan isu strategisnya: keberlanjutan sumberdaya alam; efektifitas tata kelola sumberdaya ekonomi; transformasi struktural berjalan lambat; dan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; dengan isu strategisnya: ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan tingginya kemiskinan dikawasan timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi dikawasan barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal didaerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan.

3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dengan isu strategisnya: pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; pemenuhan layanan dasar; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktifitas dan daya saing.

4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dengan isu strategisnya: melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa; belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai nilai ajaran agama; belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan; belum optimalnya peran keluarga; dan rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreatifitas.

5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dengan isu strategis: penyediaan akses dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; penyediaan akses air minum, dan sanitasi layak dan aman; pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; keselamatan dan keamanan transportasi; ketahanan kebencanaan; infrastruktur waduk multiguna dan modernisasi irigasi; konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau; energi kelistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan kecukupan; penyediaan transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital.

6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan isu strategis: peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan iklim pembangunan rendah karbon.

7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dengan isu strategis: konsolidasi demokrasi; optimalisasi kebijakan luar negeri; penegakan hukum nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola; dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

1.1.3.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas Tahun 2020-2024, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional melalu surat bernomor: B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. PKSN Bengkalis memiliki fungsi sekurang kurangnya sebagai: 1) pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara; 3) pusat pemerintahan; 4) pusat perdagangan dan jasa; 5) pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan; 6) pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; 7) pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; 8) pusat pelayanan kesehatan; dan 9) pusat pelayanan transportasi laut.

1.1.3.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan target pada akhir tahun 2019 mencapai 100% masyarakat dapat mengakses layanan air minum yang aman.SPAM Regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis) ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/detik yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini dimulai pembangunannya pada TA. 2017 dan akan melayani enam kecamatan di Kota Dumai (Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan), empat kecamatan di Rokan Hilir (TP TJ Melawan, Bangko, Rimba Melintang, Batu Hampar, Bangko Pusako) dan dua kecamatan di Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR. Sumber air yang digunakan dalam pembangunan SPAM Regional Durolis berasal dari Sungai Rokan yang menjadi sumber air baku satu-satunya yang layak digunakan untuk pelayanaan air minum di ketiga wilayah tersebut.

1.1.3.4 Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Tentang New Normal

Pandemi Covid-19 melanda hampir semua negara dalam waktu singkat, dengan waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara negara untuk meresponnya sangat bervariasi. Negara maju memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk melakukan recovery dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, sehingga berdampak serius pada bidang ekonomi dan sosial. Meskipun demikian negara berkembang memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi. Menurut studi yang dilakukan McKinsey Global Institute (2020), terdapat 5 (lima) sektor yang sangat berpotensi, yaitu: 1) sebagai pusat manufaktur, 2) infrastruktur hijau, 3) investasi dalam sektor digital, 4) pelatihan ulang bakat, dan 5) industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dikelola dengan baik, dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara negara berkembang.

1.1.4 Isu Strategis Riau

Kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 diarahkan untuk mencapai Visi Riau yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkuaitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, 2) mewujudkan pembangunan infrastrktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, 3) mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, 4) mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dan 5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Isu strategis pembangunan Provinsi Riau tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing**, dilakukan dengan: peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan; peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, upaya peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan dan penyembuhan; pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat.Peningkatan sumberdaya manusia yang beriman, dilakukan melalui; peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan; dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

2) **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan,**dilakukan melalui: peningkatan konektifitas untuk penguatan daya saing melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi; peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan; peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat; peningkatan rasio elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastuktur energi keseluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; peningkatan infrastruktur sumber daya air; dan peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan.

3) **Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan,**dilakukan melalui; peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal; peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan peningkatan produksi industri dan nilai tambah dan peningkatan keunggulan kompetitif untuk pasar regional dan global; peningkatan daya tarik investasi; peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Penanggulangan kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin; dan peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

4) **Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata**, dilakukan melalui: peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau; peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi; peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau; peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata

Kebudayaan.Pengembangan pariwisata dilakukan melalui: pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan pengelolaan pariwisata.

5) **PeningkatanTata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi**, dilakukan melalui: peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

1.1.5 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis

Isu strategis Kabupaten Bengkalis merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu isu strategis internasional, regional, nasional dan Provinsi Riau. Isu Strategis Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1) Pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan dan tepat sasaran

2) Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari

3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing

4) Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif

5) Peningkatan kualitas pemahaman nilai nilai budaya Melayu dan kearifan lokal

6) Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan perbatasan

7) Sinergitas kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya

BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"

dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bermarwah, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

2) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;

3) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Misi 3: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis merupakan cita-cita masyarakat Bengkalis yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

- Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkalis periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tabel V-1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA										
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian										
1.1	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman.		Pertumbuhan Ekonomi (ADHK Dengan Migas)	-1,08%	-1,02%	-0,64%	-0,25%	0,13%	0,51%	0,51%
	1.1.1	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomin daerah.	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	0,95%	1,25%	1,75%	2,25%	2,75%	3,25%	3,25%
			Angka Pengangguran	9%	8,75%	8,64%	8,54%	8,44%	8,34%	8,34%
	1.1.2	Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi.	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB)	202,54	201,17	201,29	201,78	203,21	205,59	205,59
			Angka Kemiskinan	6,19%	6,07%	5,94%	5,81%	5,69%	5,56%	5,56%

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Gini Ratio	0,28	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275	0,275
1.2	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing.		Indeks Pembangunan Manusia	74,06	74,47	74,88	75,3	75,71	76,12	76,12
	1.2.1	Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing.	Rata rata Lama Sekolah	9,88	10,15	10,37	10,62	10,85	11,1	11,1
	1.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2	72,2
1.3	Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.		Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	10,76%	11,86%	12,77%	13,75%	14,84%	15,98%	15,98%
	1.3.1	Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset.	Persentase Petumbuhan PAD	23,2	16,1	13,13	13,3	13,48	13,68	13,68
			Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	1.3.2	Terciptanya iklim investasi yang kondusif.	Nilai investasi (PMDN/PMA)	4,6 Triliun	4,8 Triliun	5,1 Triliun	5,3 Triliun	5,6 Triliun	5,9 Triliun	5,9 Triliun

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter										
2.1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.		Indek Reformasi Birokrasi	50	55	60	63	65	72	72
	2.1.1	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	B	BB	BB	A	A	A
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	87	90	95	95	95
			Indek Sistem Pemerintahan Berbasis electronik (SPBE)	1,8	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
2.2	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Harmonis.		Persetase penurunan potensi konflik	65%	60%	55%	50%	45%	40%	40%
	2.2.1	Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu.	Persetase Penyelesaian Konflik Keagaman	55%	50%	45%	40%	35%	30%	30%
			Persetase Pemajuan Kebudayan Melayu	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
	2.2.2.	Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olah raga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Angka Prestasi olah raga	13	15	16	20	25	30	30
			Jumlah Penurunan Penghuni Tindak Pidana	900	850	800	750	700	650	650

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis							
	2.2.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	90,5	90,75	91	91,5	92	92,1	92,1
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat										
3.1	Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.		Rasio konektivitas Kabupaten	91	93	94	95	96	97	97
	3.1.1	Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik.	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	53,50%	55,49%	57,47%	59,46%	61,44%	63,43%	63,43%
			Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah perbatasan dalam kondisi baik (Km).	11,041	16,562	22,083	27,604	33,125	38,646	38,646
	3.1.2	Meningkatnya kapasitas angkutan penyeberangan.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan:							
			a. Orang	910.000	950.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
			b. Barang	28.800	32.400	36.000	39.600	43.200	46.800	46.800

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,33	70,61	70,88	71,16	71,29	71,44	71,44
	3.2.1	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.	Rasio permukiman layak huni	97,85	97,92	97,98	98,05	98,11	98,18	98,18
	3.2.2	Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56	56,06	56,11	56,17	56,22	67	67
			Indek Resiko Bencana	109,48	100,1	90,71	81,33	71,94	62,56	62,56

BAB VI.
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis berdasarkan strategi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kebijakan yang terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang efektif serta efisien, Bupati dapat didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi atau profesional.

Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 tersaji pada Tabel 6.1 sebagai berikut

Tabel VI-1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian				
1.1. Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman.	1.1.1. Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomin daerah.	1.1.1.1. Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas. 1.1.1.2. Angka Pengangguran.	1.1.1.1.1. Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.	1.1.1.1.1.1. Menumbuhkan dan Mengembangankan Industri Kreatif.
			1.1.1.1.2. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, buruh dan pekerja informal.	1.1.1.1.2.1. Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja.
				1.1.1.1.2.2. Memfasilitasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi.
			1.1.1.1.3. Penguatan ekonomi petani dan nelayan.	1.1.1.1.3.1. Memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan.
				1.1.1.1.3.2. Melaksanakan kerjasama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.
			1.1.1.1.4. Penyediaan lahan pertanian pada kawasan hutan.	1.1.1.1.4.1. Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.1.1.5. Penguatan sektor kepariwisataan unggulan	1.1.1.1.5.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal.
				1.1.1.1.5.2. Mengembangkan dan mengimplemantasikan model tata kelola potensi wisata terpadu.
			1.1.1.1.6. Penataan kelembagaan dan penguatan produktivitas sub sektor ekonomi kreatif.	1.1.1.1.6.1. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk perluasan jangkauan promosi produk usaha mikro dan kecil serta menengah.
				1.1.1.1.6.2. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung produktivitas usaha mikro dan kecil serta menengah.
			1.1.1.1.7. Penguatan peran BUMDes dalam peningkatan PAD desa dan soko perekonomian masyarakat perdesaan.	1.1.1.1.7.1. Melaksanakan peningkatan inovasi unit usaha, kompetensi SDM dan moderenisasi manajemen BUMDes.
			1.1.1.1.8. Penguatan pertumbuhan ekonomi spasial.	1.1.1.1.8.1. Melaksanakan penyiapan, penataan dan pengembangan kawasan khusus seperti: kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis potensial lainnya.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.2. Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi	1.1.2.1. Pendapatan Perkapita Penduduk. 1.1.2.2. Angka Kemiskinan. 1.1.2.3. Gini Ratio.	1.1.2.1.1. Penguatan kemampuan daya beli masyarakat	1.1.2.1.1.1. Meningkatkan struktur sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dan kelurahan.
				1.1.2.1.1.2. Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.
			1.1.2.1.2. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	1.1.2.1.2.1. Menjamin ketersedian Pangan bagi masyarakat.
1.2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing.	1.2.1. Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing.	1.2.1.1. Rata-rata Lama Sekolah	1.2.1.1.1. Peningkatan kualitas standard pelayanan minimal pendidikan.	1.2.1.1.1.1. Mengupayakan kesinambungan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak tempatan dan berprestasi.
				1.2.1.1.1.2. Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang PAUD.
				1.2.1.1.1.3. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard pendidikan.
	1.2.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1.2.2.1. Angka Harapan Hidup.	1.2.2.1.1. Peningkatan layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan	1.2.2.1.1.1. Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat.
				1.2.2.1.1.2. Fasilitasi ketercakupan jumlah, dan kompetensi tenaga kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.2.2.1.2. Peningkatkan keterpaduan penanganan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi berbasis masyarakat.	1.2.2.1.2.1. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Posyandu dalam keterpaduan penangananan stunting, serta penyelenggaraan PHBS dan pelayanan gizi masyarakat.
1.3. Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.	1.3.1. Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset.	1.3.1.1. Persentase Petumbuhan PAD. 1.3.1.2. Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur.	1.3.1.1.1. Peningkatan upaya peneriman PAD.	1.3.1.1.1.1. Melaksanakan peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah.
				1.3.1.1.1.2. Menyesuaiakan semua regulasi daerah terkait penerimaan sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi serta potemsi-potensi penerimaan daerah.
				1.3.1.1.1.3. Reformulasi tata kelola pendapatan, penggunaan belanja dan pembiayaan daerah yang efektif dan efisien.
			1.3.1.1.2. Penguatan tata kelola aset dan kekayaan daerah yang baik, efektif dan efisien.	1.3.1.1.2.1. Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolan aset dan kekayaan daerah tepat guna.
	1.3.2. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.	1.3.2.1. Nilai investasi (PMDN/PMA).	1.3.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	1.3.2.1.1.1. Menyederhanakan perizinan dan menguatankan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter				
2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. 2.1.1.2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 2.1.1.3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis electronik (SPBE).	2.1.1.1.1. Penguatan akselerasi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
			2.1.1.1.2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan sinergisitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
			2.1.1.1.3. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien, professional.	2.1.1.1.3.1. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien.
				2.1.1.1.3.2. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan.
			2.1.1.1.4. Penguatan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan capaian kinerja.	2.1.1.1.4.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan terukur hasilnya.
			2.1.1.1.5. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1.5.1. Menyedaikan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.2. Mewujudkan masyakarat yang berkarakter dan harmonis.	2.2.1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu.	2.2.1.1. Persetase Penyelesaian Konflik Keagaaman. 2.2.1.2. Persetase Pemajuan Kebudayan Melayu.	2.2.1.1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat.	2.2.1.1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level.
			2.2.1.1.2. Introduksi nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan.	2.2.1.1.2.1. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kurikulum muatan lokal di jenjang usia dini, dasar dan lanjut.
			2.2.1.1.3. Pelestraian peninggalan sejarah kebudayaan melayu.	2.2.1.1.3.1. Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu.
			2.2.1.1.4. Penguatan sinergi pemajuan kebudayaan melayu dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	2.2.1.1.4.1. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.
	2.2.2. Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	2.2.2.1. Angka Prestasi Olah Raga. 2.2.2.2. Jumlah Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis.	2.2.2.1.1. Peningkatan kualitas atlit muda pada cabang olah raga prestasi	2.2.2.1.1.1. Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan standard nasional.
			2.2.2.1.2. Penguatan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.	2.2.2.1.2.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNKK).

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2.2.2.1.2.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
	2.2.3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	2.2.3.1. Indek Pembangunan Gender.	2.2.3.1.1. Penguatan agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera.	2.2.3.1.1.1. Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat.
Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat				
3.1. Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik.	3.1.1.1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik. 3.1.1.2. Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik.	3.1.1.1.1. Penguatan kualitas jaringan jalan dan jembatan antar kawasan dan antar wilayah.	3.1.1.1.1.1. Fasilitasi peningkatan kualitas jalan (jembatan) strategis pada kluster kawasan yang bersumber dari anggaran non APBD.
				3.1.1.1.1.2. Mengembangkan jaringan jalan poros, jembatan dan penataan drainase pada wilayah kecamatan dan perdesaan.
			3.1.1.1.2. Penguatan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan	3.1.1.1.2.1. Mengupayakan pemerataan penyediaan serta fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan pada wilayah LOKPRI (perbatasan).
	3.1.2. Meningkatnya kapasitas angkutan penyebrangan.	3.1.2.1. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Penyeberangan.	3.1.2.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyebrangan.	3.1.2.1.1.1. Mengembangkan sistem pelayanan jasa transportasi roro yang lebih memadai.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.1. Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.	3.2.1.1. Rasio permukiman layak huni.	3.2.1.1.1. Revitalisasi perumahan rakyat.	3.2.2.1.1.1. Fasilitasi penyediaan; serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat.
			3.2.1.1.2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik.	3.2.1.1.2.1. Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh.
				3.2.1.1.2.2. Melaksanakan penanganan berkelanjutan abrasi sempadan sungai dan pantai yang berdampak langsung/tidak langsung kepada kelangsungan kawasan permukiman.
			3.2.1.1.3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana utilitas umum kawasan pemukiman.	3.2.1.1.3.1. Mengupayakan penyediaaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.
				3.2.1.1.3.2. Melaksanakan pemberdayaan desa dan kelurahan dalam pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum.
				3.2.1.1.3.3. Mengupayakan pembangunan dan pengembangan Duri Central Park sebagai ruang hijau terbuka publik perkotaan kecil.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.2.1.1.4. Penguatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.	3.2.1.1.4.1. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga.
			3.2.1.1.5. Pengoptimalan pengelolaan persampahan permukiman.	3.2.1.1.5.1. Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangankan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas.
	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan. 3.2.2.2. Indeks Resiko Bencana.	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan.	3.2.2.1.1.1. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.
				3.2.2.1.1.2. Memfungsikan dengan baik Pemanfaatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang.
				3.2.2.1.1.3. Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang repsonsif dan dinamis.
			3.2.2.2.2. Peningkatan tata kelola potensi lestari kawasan perbatasan.	3.2.2.2.2.1. Kemitraan pengembangan potensi kawasan perbatasan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup.

1.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan dalam periode lima tahun pembangunan ini dirumuskan lagi menjadi rencana kerja tahunan pembangunan daerah dengan berfokus kepada penetapan tema dan prioritas sasaran makro yang akan dicapai.

Adapun arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bengkalis dengan fokus atau penekanan arah pembangunan tahunan yang dideskripsikan pada Gambar VI-1 dan Tabel VI-2 berikut:

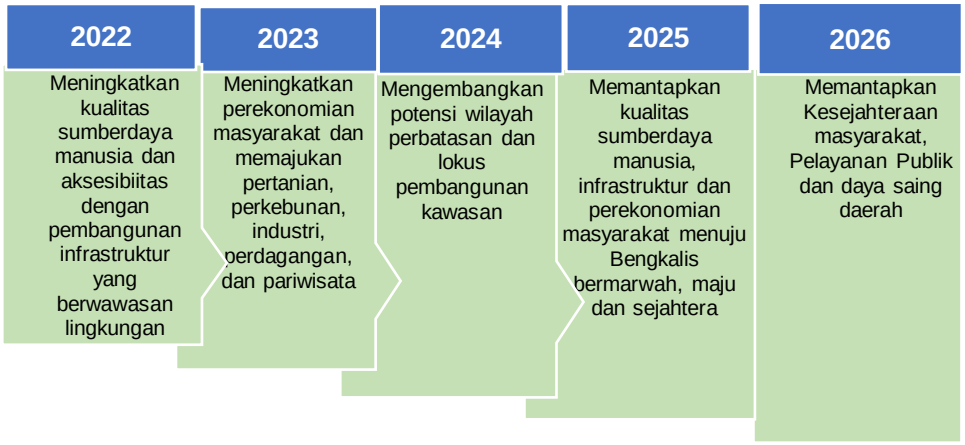

Gambar VI-1 Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Bengkalis

Tabel VI-2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkalis

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
• Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia • Meningkatkan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan perekonomian masyarakat • Memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata	Mengembangkan potensi wilayah perbatasan dan lokus pembangunan kawasan	• Memantapkan kualitas sumberdaya manusia • Memantapkan infrastruktur • Memantapkan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera	• Memantapkan Kesejahteraan masyarakat, • Memantapkan Pelayanan Publik • Memantapkan daya saing daerah

Tahun 2022 (Tahun Pertama RPJMD)

Pada tahun pertama ini diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat sudah mulai membaik Kembali. Fokus pembangunan pada penggalan kedua ini difokuskan pada Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Tahun 2023 (Tahun Kedua RPJMD)

Pada tahun kedua ini pembangunan daerah difokuskan pada kebijakan-kebijakan yang mendukung Peningkatan perekonomian masyarakat dan memajukan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan perekonomian diharapkan lebih terintegrasi dengan infrastruktur pendukung yang kokoh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Pembangunan perekonomian baik pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata yang mengarah pada industrialisasi dikuatkan pada penggalan ini dan dikoordinasikan secara lebih intesif dengan pemerintah pusat dan provinsi terutama pada lokasi-lokasi pengembangan ekonomi potensial dan merupakan prioritas nasional serta lokasi prioritas perbatasan negara.

Tahun 2024 (Tahun Ketiga RPJMD)

Pada penggalan ketiga pembangunan jangka menengah ini difokuskan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi wilayah perbatasan dan lokus pembangunan kawasan yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spasial Kabupaten Bengkalis. Penguatan lokus-lokus pembangunan ini dilakukan secara terintegrasi dan mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Pembangunan yang terarah dan terintegrasi pada lokus-lokus ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas secara ekonomi dan efektifitas pembangunan spasial daerah

Tahun 2025 (Tahun Keempat RPJMD)

Pada penggalan keempat apada RPJMD ini diarahkan pada Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sebelumnya yang diharapkan telah membentuk struktur perekonomian daerah yang kuat baik perekonomian yang mendukung industri maupun perekonomian berbasis masyarakat, kualitas sumberdaya yang memiliki daya saing yang baik serta infrastruktur konektifitas yang telah lancar antarkawasan.

Tahun 2026 (Tahun Kelima RPJMD)

Pada penggalan kelima atau penggalan terakhir pada RPJMD ini diarahkan pada Memantapkan Kesejahteraan masyarakat, Pelayanan Publik dan daya saing daerah. Pemantapan kesejahteraan masyarakat ini merupakan lanjutan dari peningkatan pembangunan sumberdaya Manuasia sebelumnya yang diharapkan akan meningkat baik pada Pendidikan, Kesehatan serta pendapatan masyarakat Kabupten Bengkalis. Pembangunan pada penggalan terakhir ini diharapkan dapat menyempurnakan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pendekatan Spasial

Pembangunan dengan pendekatan spasial dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah sehingga lebih terfokus dan mudah dikoordinasikan. Pembangunan dengan pendekatan spasial di Kabupaten Bengkalis diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Pengembangan Empat Klaster Pembangunan Kawasan

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klater pembangunan kawasan. Pembangunan secara spasial ini dimaksudkan agar potensi keruangan dan integrasi dari pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Klaster-klater pembangunan kawasan ini dapat dideskripsikan pada gambar berikut ini:

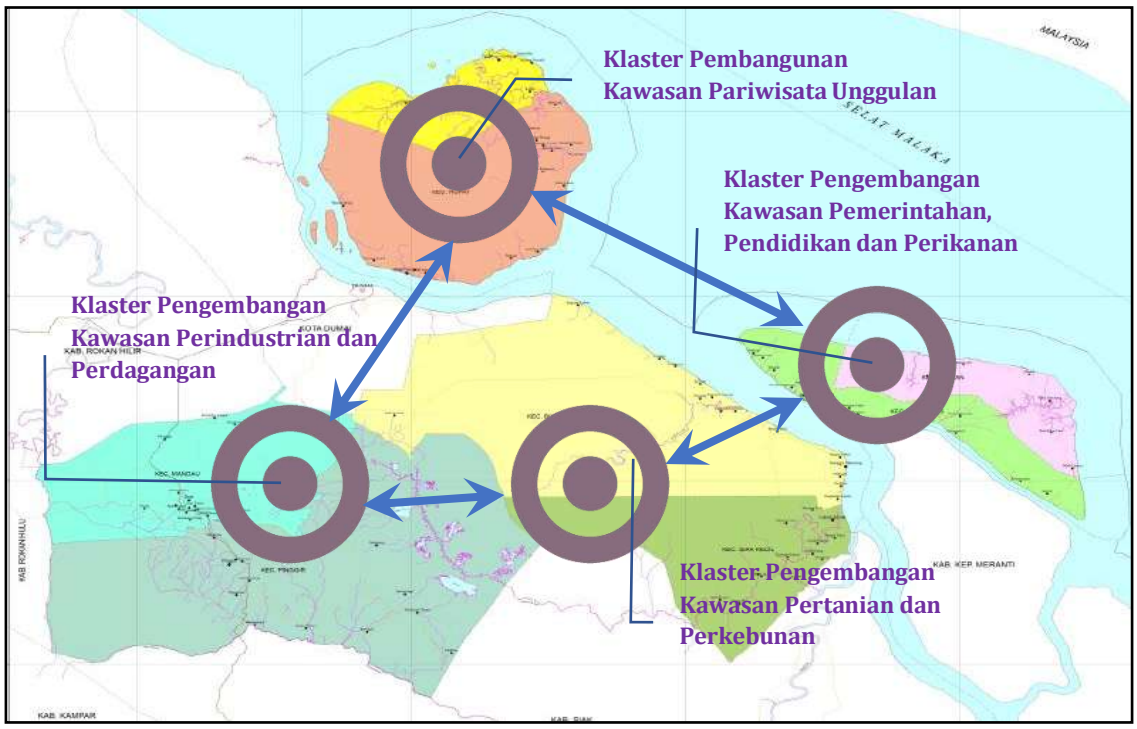

Gambar VI-2 Klaster Pembangunan Kawasan Kabupaten Bengkalis

Keempat klaster pembangunan kawasan di Kabupaten Bengkalis seperti yang tertera pada Gambar 6.2 tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi yang telah tersedia di kawasan tersebut. Potensi ini perlu diperkuat sehingga membentuk struktur wilayah dan struktur perekonomian lokal yang unggul dari kawasan-kawasan tersebut. Keempat klaster pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Klaster pembangunan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan dan Perikanan.

2. Klaster pembangunan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.

3. Klaster pembangunan Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.

4. Klaster pembangunan Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Keterpaduan pembangunan di klaster-klaster tersebut akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien baik dari segi potensi keruangan maupun potensi alami kawasan tersebut. Pembangunan yang berorientasi pada klaster-klaster tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur konektifitas antarkawasan yaitu jaringan jalan, jembatan dan penyeberangan (ro-ro) yang kuat dan lancar serta pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat seperti air bersih, listrik dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pengembangan keempat klaster pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan pola ruang pada RTRW Provinsi Riau, arah kebijakan pembangunan spasial Provinsi Riau dan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJM Nasional 2020-2024 telah tertuang prioritas pembangunan nasional melalui kementrian dan Lembaga Negara antara lain seperti prioritas pengembangan sektor unggulan di Provinsi Riau yaitu pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya, minyak bumi, dan gas bumi. Komoditas-komoditas tersebut merupakan potensi alami di wilayah klaster pembangunan kawasan ke 2 dan ke 4.

Selain itu, untuk pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas juga meliputi pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang di Riau terdapat di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Prioritas ini merupakan potensi pada klaster 1 dan klaster 2. Sedangkan klaster 1 merupakan kawasan PKSN pariwisata nasional. Pemerintah pusat telah menekankan prioritas pengembangan Kawasan Pariwisata Rupat sebagai Kawasan Wisata Nasional. Hal ini tentunya sinergi dengan kebijakan klaster pengembangan kawasan pariwisata Pulau Rupat.

1.3.2 Pembangunan Kawasan Perbatasan Nasional

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sebagai wilayah perbatasan Republik Indonesia, Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian khusus dengan menetapkan lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan khususnya di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara dan Bandar Laksamana.

Untuk kawasan perbatasan ini, Kabupaten Bengkalis telah menetapkan kawasan perbatasan di lima kecamatan tersebut sebagai lokasi prioritas untuk akselerasi pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini memperkuat koordinasi dan dukungan serta pemantapan pembangunan daerah perbatasan yang umumnya juga merupakan daerah yang terisolir atau tertinggal. Beberapa prioritas nasional yang terkait dengan percepatan pembangunan lokasi prioritas perbatasan antara lain:

a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan yaitu kecamatan: Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara dan Bandar Laksamana

b) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Bengkalis.

c) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup:

1. Perbaikan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi.

1. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;

2. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa;

3. Pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;

4. Penataan ruang dan penatapan batas desa;

5. Serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

d) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:

1. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;

2. Peningkatan konservasi hutan

1.4 Program Unggulan

Dalam pencapaian Visi dan Misi daerah, kepala daerah telah mengajukan beberapa kebijakan yang relatif spesifik pada kebijakan ataupun rencana program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut dipertimbangkan akan memberikan pengaruh besar secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan disinkronisasi kedalam bentuk formal rumusan arah kebijakan atau program maupun kedalam kegiatan pembangunan lima tahun ke depan.

Teradapat 8 kebijakan khusus dalam rencana program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kemudian dijabar melalui 18 nomenklatur promram. Delapan kebijakan khusus tersebut adalah Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurahan, Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera, Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi, Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat, Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau, Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi dan terakhir Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain, Peningkatan.

Untuk merealisasikan delapan kebijakan khusus ini, akan menyerap anggaran sebesar Rp. 372.653.797.644,00 pada tahun 2022. Target penggunaan anggaran ini selanjutnya meningkat menjadi Rp. 375.604.951.730,30 pada tahun 2023. Kebutuhan anggaran untuk delapan kebijakan khusus ini akan terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp. 386.422.542.802,13, lalu pada tahun 2025 akan menelan anggaran hingga Rp. 397.258.620.332,36 dan terakhir pada tahun 2026 penggunaan anggaran untuk membiayai delapan program unggulan meningkat menjadi Rp. 407.917.479.315,75.

Penggunaan anggaran yang sangat besar untuk delapan kebijakan khusus ini diharapkan dapat direalisasikan dengan baik demi mencapai sasaran yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Lebih rinci tentang kebijakan khusus daerah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel VI-3 Program Unggulan Daerah Kabupaten Bengkalis 2022-2026

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
1. Bantuan keuangan satu milyar satu desa dan dana tambahan untuk kecamatan dan kelurah)	(Belanja Transfer)	(Bantuan Keuangan)	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	BPKAD
	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	14.500.000.000,00	15.225.000.000,00	15.986.250.000,00	16.785.562.500,00	17.624.840.625,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.900.000.000,00	1.995.000.000,00	2.094.750.000,00	2.199.487.500,00	2.309.461.875,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	220.000.000,00	231.000.000,00	242.550.000,00	254.677.500,00	267.411.375,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	400.000.000,00	420.000.000,00	441.000.000,00	463.050.000,00	486.202.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.200.000.000,00	1.260.000.000,00	1.323.000.000,00	1.389.150.000,00	1.458.607.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Beasiswa pendidikan khusus dan berprestasi	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	1.621.330.737,00	1.647.770.279,00	1.668.856.670,00	1.690.239.451,00	1.744.090.839,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.559.995.901,00	2.601.742.545,00	2.635.036.848,00	2.668.799.133,00	2.753.827.641,000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	2.295.585.100,00	2.410.364.355,00	2.530.882.572,75	2.657.426.701,39	2.790.298.036,46	Dinas Pendidikan
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.644.000.000,00	17.476.200.000,00	18.350.010.000,00	19.267.510.500,00	20.230.886.025,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
4. Akses Jaminan Sosial dan Kesehatan Total Bagi Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.037.919.000,00	68.289.814.950,00	71.704.305.697,50	75.289.520.982,38	79.053.997.031,49	Dinas Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	454.350.000,00	477.067.500,00	500.920.875,00	525.966.918,75	552.265.264,69	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	830.873.000,00	872.416.650,00	916.037.482,50	961.839.356,63	1.009.931.324,46	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	18.393.262.600,00	19.312.925.730,00	20.278.572.016,50	21.292.500.617,33	22.357.125.648,20	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	1.299.220.000,00	1.364.181.000,00	1.432.390.050,00	1.504.009.552,50	1.579.210.030,13	Dinas Sosial
5. Optimalisasi Pelayanan Transportasi Antar Pulau	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	35.989.096.000,00	37.788.550.800,00	39.677.978.340,00	41.661.877.257,00	43.744.971.119,85	Dinas Perhubungan
6. Menjadikan Wisma Daerah Sebagai Rumah Aspirasi	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
7. Pelayanan Sistem Kependudukan Berbasis Mobile	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.400.000.000,00	-	-	-	-	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
	Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	393.547.500,00	413.224.875,00	433.886.118,75	455.580.424,69	478.359.445,92	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Stimulus Ekonomi bagi Pekerja Sektor Informal seperti buruh petani peternak nelayan dan lain-lain Peningkatan Lapangan Pekerjaan dan Penerapan Tekhnologi serta Inovasi Bidang Perekonomian	Urusan Pemerintah Bidang Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.063.134.300,00	3.216.291.015,00	3.377.105.565,75	3.545.960.844,04	3.723.258.886,24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	7.500.000.000,00	7.875.000.000,00	8.268.750.000,00	8.682.187.500,00	9.116.296.875,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	867.398.200,00	910.768.110,00	956.306.515,50	1.004.121.841,28	1.054.327.933,34	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.950.000.000,00	2.047.500.000,00	2.149.875.000,00	2.257.368.750,00	2.370.237.187,50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenangah
		Program Pengembangan UMKM	750.000.000,00	787.500.000,00	826.875.000,00	868.218.750,00	911.629.687,50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenangah
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	702.908.154,00	738.053.561,70	774.956.239,79	813.704.051,77	854.389.254,36	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	509.983.334,00	535.482.500,70	562.256.625,74	590.369.457,02	619.887.929,87	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	843.115.000,00	885.270.750,00	929.534.287,50	976.011.001,88	1.024.811.551,96	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.068.271.000,00	1.121.684.550,00	1.177.768.777,50	1.236.657.216,38	1.298.490.077,19	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	296.100.000,00	310.905.000,00	326.450.250,00	342.772.762,50	359.911.400,63	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.313.381.818,00	1.379.050.908,90	1.448.003.454,35	1.520.403.627,06	1.596.423.808,42	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	2.756.250.000,00	2.894.062.500,00	3.038.765.625,00	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.052.053.000,00	3.759.000.000,00	4.467.388.432,50	4.690.757.854,13	4.925.295.746,83	Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	514.501.000,00	540.226.050,00	567.237.352,50	595.599.220,13	625.379.181,13	Dinas Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	925.000.000,00	971.250.000,00	1.019.812.500,00	1.070.803.125,00	1.124.343.281,25	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	725.000.000,00	761.250.000,00	799.312.500,00	839.278.125,00	81.242.031,25	Dinas Perkebunan
	Urusan Pemerintahan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.525.000.000,00	2.651.250.000,00	2.783.812.500,00	2.923.003.125,00	3.069.153.281,25	Dinas Perikanan

Program Unggulan	Bidang Urusan	Program	Tahun					OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026	
			372.653.797.644,00	375.604.951.730,30	386.422.542.802,13	397.258.620.332,36	407.917.479.315,75	
	Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.943.772.000,00	3.090.960.600,00	3.245.508.630,00	3.407.784.061,50	3.578.173.264,58	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	965.000.000,00	1.013.250.000,00	1.063.912.500,00	1.117.108.125,00	1.172.963.531,25	Dinas Perikanan
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	250.000.000,00	262.500.000,00	275.625.000,00	289.406.250,00	303.876.562,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.650.000.000,00	1.732.500.000,00	1.819.125.000,00	1.910.081.250,00	2.005.585.312,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	115.762.500,00	121.550.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program unggulan daerah pada periode RPJMD 2021-2026 ini yang telah dituangkan dalam arahan-arahan kebijakan daerah merupakan hasil identifikasi dari kepala daerah beserta tim pendukung untuk memetakan masalah-masalah yang dipandang penting yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah teridentifikasi tersebut secara umum disusun sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, percepatan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat serta penguatan sumberdaya daerah mulai dari ujung awal pengembangan keluarga yang kuat dan sehat terutama ibu dan anak. Program unggulan ini merupakan prioritas pembangunan yang telah disampaikan dan dijanjikan oleh calon kepala daerah yang telah terpilih pada saat kampanye pilkada. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ini telah tertuang dalam program-program prioritas daerah pada RPJMD 2021-2026 ini. Selanjutnya diharapkan agar semua OPD dan komponen pelaksana pembangunan lainnya dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan yang merupakan prioritas ini dalam penyusunan detail kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan pada periode RPJMD 2021-2026 ini.

1.5 Integrasi KLHS Terhadap RPJMD 2021-2026 Kabupten Bengkalis

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikanpotensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusun RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata Kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis identifikasi isu strategis di Kabupaten Bengkalis baik dilihat dari relevansi DDDTLH maupun pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bab V dokumen KLHS Kabupaten Bengkalis, maka didapat isu strategis Kabupaten Bengkalis sebanyak 32 isu strategis. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel VI-4 Isu Strategis Kabupaten Bengkalis dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No	TPB	No Isu	Isu Strategis	Deskripsi Permasalahan
1	Tujuan 1 Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	1	Rendahnya perlindungan jaminan kesehatan, bantuan keluarga harapan, dan partisipasi kepemilikan akta kelahiran	Proporsi peserta jaminan kesehatan pada tahun 2019 hanya sebesar 68%. Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak hanya sebesar 65%. Selain itu, jumlah rumah tangga yang mendapat program bantuan keluarga harapan belum mengalami penurunan (masih meningkat).
		2	Belum optimalnya ketersediaan data program kemiskinan, dampak ekonomi bencana sosial, dan layanan pokok	Pendataan sumber daya untuk program pengurangan kemiskinan dan dampak ekonomi akibat bencana sosial belum optimal.
2	Tujuan 2 Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	3	Rendahnya ketahanan pangan dan pola pangan harapan	Tingkat Pola Pangan harapan tahun 2019 sebesar 92% sedangkan target nasional 92,5%. Selain itu, prevalensi kerawanan pangan cenderung meningkat.
		4	Belum tersedianya data nilai tambah tenaga kerja dari sektor pertanian	Pendataan tenaga kerja khusus sektor pertanian belum tersedia.
3	Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	5	Masih tingginya persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas dan Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) belum mencapai target nasional yakni menurun menjadi 2,28. Selain itu, tingkat persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas masih tinggi
		6	Belum tersedianya data eliminasi filariasisi, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan	Pendataan eliminasi filariasisi, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan belum optimal
4	Tujuan 4 Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	7	Belum optimalnya peningkatan APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar	Nilai APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar belum mencapai target nasional. APK pada SD/MI hanya 108,6% (Target: 114,09%), dan APK SMP/MTs hanya 95% (Target: 106,94%).
		8	Belum tersedianya data keterampilan teknologi dan proporsi kelengkapan infrastruktur di sekolah	Belum tersedianya data proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
5	Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	9	Belum optimalnya sistem pendataan kesejahteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan belum optimal. Persentase layanan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan belum mencapai target nasional, yakni sebesar 25%.
		10	Belum optimalnya pemahaman dan kemandirian dalam pelaksanaan program KB	Sistem pendataan dan sosialisasi mencapai kemandirian program KB belum optimal dilakukan. Unmeet need KB sebsar 14,9% (Target 9,9%).
6	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	11	Terbatasnya akses air minum, air baku, sanitasi layak dan pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 93,1% (Target 100%). Sistem Pengelolaan air limbah komunal, khususnya limbah domestik belum optimal dilaksanakan.
		12	Belum optimalnya konservasi sumber daya air tanah dan permukaan	Sebagian besar Kab Bengkalis berada dilahan gambut dan pesisir. Penerapan kebijakan pengelolaan konservasi sumberdaya air tanah dan permukaan (sungai dan danau) dinilai belum optimal.
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	13	Rendahnya pertumbuhan kontribusi PDB	Pertumbuhan PDB Kabupaten Bengkalis tergolong rendah dan cenderung menurun yakni -1,9% pada tahun 2019
		14	Belum tersedianya data sebaran lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata	Sistem pendataan lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata belum optimal

No	TPB	No Isu	Isu Strategis	Deskripsi Permasalahan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	15	Belum optimalnya pengembangan dermaga penyeberangan	Dermaga penyeberangan yang tersedia sebanyak 3 unit. Namun pengembangan dermaga yang dilakukan belum optimal
		16	Belum tersedianya data tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil	Sistem pendataan tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil belum tersedia
		17	Belum tersedianya data layanan mobile *boardband*	Data layanan mobile *boardband* belum tersedia
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	18	Belum tersedianya data pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas	Sistem pendataan pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas belum tersedia
		19	Masih rendahnya indeks kebebasan sipil	Indeks kebebasan sipil hanya 80,0% (Target 87%)
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	20	Belum tersedianya data lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan	Sistem pendataan lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan belum tersedia
		21	Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan	Persentase sampah yang tertangani sebesar 51,9% (Target 80%)
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	22	Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister pada fasilitas publik belum optimal
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	23	Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah belum tersedia
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	24	Belum tersedianya data kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut	Pengelolaan sumberdaya laut telah menjadi kewenangan provinsi. Namun aktifitas pemanfaatan perikanan seperti nelayan tetap perlu menjadi perhatian. Namun kebijakan kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut belum tersedia.
		25	Belum optimalnya peningkatan luas konservasi kawasan perairan	Kab Bengkalis merupakan kawasan pesisir yang rentan terjadi abrasi pantai. Luas kawasan konservasi perairan (sempadan pantai) yakni 65,7 ha. Upaya konservasi perairan tersebut perlu dioptimalkan.
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	26	Belum tersedianya data kerangka legislasi dan kebijakan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan genetik.	Kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan pembagian keuntungan yang adil dan merata terhadap perlindungan ekosistem dan sumber daya alam belum tersedia ditingkat daerah.
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	27	Belum tersedianya data persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak	Sistem pendataan persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak belum tersedia
		28	Belum tersedianya data tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurment, Indek Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi	Pendataan tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurement, Indek Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi belum tersedia
		29	Belum optimalnya persentase kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada kelompok berpendapatan bawah	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih rendah yakni sebesar 62%. Untuk data kepemilikan akta kelahiran secara khususnya pada kelompok berpendapatan bawah belum tersedia
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	30	Masih rendahnya kontribusi pajak terhadap PDB dan pembangunan daerah	Kontribusi pajak terhadap PDB belum mencapai target nasional yakni 10,3% (Target 12%)

No	TPB	No Isu	Isu Strategis	Deskripsi Permasalahan
		31	Belum tersedianya informasi pembangunan daerah dengan melibatkan peran badan usaha	Perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan badan usaha dan filantropi belum dilakukan secara optimal.
		32	Belum tersedianya data akses telekomunikasi universal dan internet pada berbagai wilayah	Sistem pendataan akses telekomunikasi universal dan internet didaerah belum tersedia

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis, 2020

Untuk selanjutnya isu strategis dalam KLHS disingkronkan pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis yang menghasilkan 25 arah kebijakan yang bersingungan langsung terhadap 32 isu strategis yang terdapat dalam rekomendasi dokumen KLHS. Hal ini dilakukan untuk menentukan prioritas di dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah. Untuk melihat hasil dari singkorinsai isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabe VI-5. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan di Daerah dalam mencapai beberapa target TPB.

Tabel VI-5 Sikronisasi Isu Strategis KLHS Terhadap Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	Rendahnya perlindungan jaminan kesehatan, bantuan keluarga harapan, dan partisipasi kepemilikan akta kelahiran	Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
		Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
			Program Pemberdayaan Sosial.
		Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk.
			Program Pencatatan Sipil.
	Belum optimalnya ketersediaan data program kemiskinan, dampak ekonomi bencana sosial, dan layanan pokok	Menyedaikan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
			Program Penanganan Bencana.
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	Rendahnya ketahanan pangan dan pola pangan harapan	Menjamin ketersedian Pangan bagi masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
			Program Penanganan Kerawanan Pangan.
			Program Pengawasan Keamanan Pangan.
	Belum tersedianya data nilai tambah tenaga kerja dari sektor pertanian	Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
			Program Penyuluhan Pertanian.
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	Masih tingginya persentase penduduk mengkonsumsi alkohol, merokok, obesitas dan Total Fertility Rate (TFR)	Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
	Belum tersedianya data eliminasi filariasisi, unmeet need pelayanan kesehatan dan proporsi kematian akibat keracunan	Mengupayakan keterjaminan akses kesehatan bagi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	Belum optimalnya peningkatan APK dan persentase akreditasi pada pendidikan dasar	Fasilitasi cakupan jumlah, kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang PAUD.	Program Pengelolaan Pendidikan.
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
	Belum tersedianya data keterampilan teknologi dan proporsi kelengkapan infrastruktur di sekolah	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
			Program Pengelolaan Pendidikan.
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Belum optimalnya sistem pendataan kesejahteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.	Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak
	Belum optimalnya pemahaman dan kemandirian dalam pelaksanaan program KB	Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat.	Program Pengendalian Penduduk.
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Terbatasnya akses air minum, air baku, sanitasi layak dan pengelolaan air limbah	Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air bersih bagi rumah tangga.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
		Mengupayakan penyediaaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.
			Program Pengembangan Perumahan.
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
		Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembanganka	Program Pengelolaan Persampahan

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
		n sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
	Belum optimalnya konservasi sumber daya air tanah dan permukaan	Menyelenggarakan tata kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Rendahnya pertumbuhan kontribusi PDB	Menumbuhkan dan Mengembangan kan Industri Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota.
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
		Meningkatkan kualitas kelembagaan pelatihan kerja.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
			Program Penempatan Tenaga Kerja.
			Program Perencanaan Tenaga Kerja.
		Memberikan stimulus ekonomi dan penyediaan sarana prasarana pendukung usaha pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
		Melaksanakan kerjasama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			Program Perekonomian Dan Pembangunan.
		Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
			Program Perizinan Usaha Pertanian.
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
		Mengembangkan dan mengimplemen tasikan model tata kelola potensi wisata terpadu.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik.
		Mengupayakan penyediaan sarana	Program Pengembangan UMKM.

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
		dan prasarana pendukung produktivitas usaha mikro dan kecil serta menengah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
	Belum tersedianya data sebaran lembaga keuangan dan akses UMKM, usia muda tidak sekolah, serta persentase pekerja sektor informal dan pariwisata	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi perluasan jangkauan promosi produk usaha mikro dan kecil serta menengah.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik.
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
		Mengembangkan dan mengimplementasikan model tata kelola potensi wisata terpadu.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik.
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Belum optimalnya pengembangan dermaga penyeberangan	Mengembangkan sistem jasa pelayanan ro-ro yang lebih memadai.	Program Pengelolaan Pelayaran.
	Belum tersedianya data tenaga kerja manufaktur, serta proporsi kontribusi dan pinjaman industri kecil	Menumbuhkan dan Mengembangkan Industri Kreatif.	Program Penempatan Tenaga Kerja.
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
	Belum tersedianya data layanan mobile boardband	Pengembangan kebijakan, tata Kelola dan pengembangan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik.
			Program Aplikasi Informatika.
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Belum tersedianya data pertumbuhan ekonomi pada daerah tertinggal dan penyandang difabilitas	Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
		Meningkatkan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
			Program Rehabilitasi Sosial.
			Program Pemberdayaan Sosial.

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
	Masih rendahnya indeks kebebasan sipil	Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Belum tersedianya data lembaga pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi kebencanaan	Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan	Menyediakan sarana dan prasarana; serta mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang berkualitas.	Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
			Program Pencatatan Sipil

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan non kependudukan.	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Belum tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah	Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adpatif dengan pelestarian lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.	Program Penanggulangan Bencana
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Belum tersedianya data kesepakatan pengelolaan sumberdaya perikanan laut.	Pelaksanaan kerja sama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Belum optimalnya peningkatan luas konservasi kawasan perairan	Pelaksanaan kerja sama pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.	Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Belum tersedianya data kerangka legislasi dan kebijakan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan genetik.	Menyelenggarakan tata Kelola pembangunan yang adaptif dengan pelestarian lingkungan hidup.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses	Belum tersedianya data persepsi keamanan masyarakat dan kekerasan anak	Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Belum tersedianya data tingkat kepatuhan UU dalam pelayanan publik, pengadaan E-Procurement, Indek Reformasi Birokrasi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi	Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Program Pengelolaan Arsip
		Melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjangan terhadap pelaksanaan kegiatan.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Belum optimalnya persentase kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada kelompok berpendapatan bawah	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan non kependudukan.	Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Masih rendahnya kontribusi pajak terhadap PDB dan pembangunan daerah	Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Menyesuaikan semua regulasi daerah terkait penerimaan sesuai dengan perkembangan kebijkan nasional dan provinsi serta potensi-potensi penerimaan daerah.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Belum tersedianya informasi pembangunan daerah dengan melibatkan peran badan usaha	Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Sinergisitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta provinsi dan seluruh pemangku kepentingan.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Isu Strategis	Deskripsi Permaslahan	Arah Kebijakan Dalam RPJMD 2021-2026	Program
	Belum tersedianya data akses telekomunikasi universal dan internet pada berbagai wilayah	Menyediakan kebijakan tata kelola dalam mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1.6 Program Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis akan dijabarkan dalam program pembangunan. Program pembangunan berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada subbab ini akan disajikan program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 disajikan per misi yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-masing. Lebih detail mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 disajikan pada table berikut ini.

Tabel VI-6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian														
	1.1 Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	**Pertumbuhan Ekonomi**	**-1,08%**	**-1,02%**		**-0,64%**		**-0,25%**		**0,13%**		**0,51%**		**0,51%**	
	1.1.1 Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomin daerah	**Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas (%)**	**0.95%**	**1.25%**		**1.75%**		**2.25%**		**2.75%**		**3.25%**		**3.25%**	
		Angka Pengangguran	**9,00%**	**8,75%**		**8,64%**		**8,54%**		**8,44%**		**8,34%**		**8,34%**	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra IKM yg dikembangkan; Jumlah IKM baru	5; 50	5; 50	1.962.663.524	8; 50	1.994.669.285	10;50	2.020.194.917	10; 50	2.046.079.335	15; 50	2.111.267.858	15; 100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kreatifias usaha ekonomi yang dihasilkan	60%	65%	628.621.216	70%	638.872.336	75%	647.047.937	80%	655.338.454	85%	676.217.676	95%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan IKM yg dipromosikan	64%	71%	853.331.967	78%	867.247.515	85%	878.345.616	92%	889.599.711	100%	917.942.547	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	275.000.000	100%	302.000.600	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.000	100%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha IKM yg difasilitasi izinnya	100%	100%	341.332.787	100%	346.899.006	100%	351.338.246	100%	355.839.884	100%	367.177.019	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase tersedianya data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan serta Ketrasnmigrasian se Kabupaten Bengkalis	50%	85%	383.999.385	87%	390.261.382	90%	395.255.527	92%	400.319.870	93%	413.074.146	93%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dengan sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis	10%	15%	1.535.997.541	20%	1.561.045.527	25%	1.581.022.109	30%	1.601.279.480	35%	1.652.296.585	35%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bengkalis	75%	80%	255.999.590	83%	260.174.255	85%	263.503.685	87%	266.879.913	90%	275.382.764	90%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis	86%	90%	383.999.385	93%	390.261.382	95%	395.255.527	97%	400.319.870	100%	413.074.146	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	2.827.373.251	100%	2.873.480.100	100%	2.910.251.808	100%	2.947.540.376	100%	3.041.449.639	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana produksi Perkebunan	75%	80%	477.865.902	82%	485.658.608	85%	491.873.545	87%	498.175.838	90%	514.047.826	90%	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dikembangkan	100%	100%	2.468.973.825	100%	2.509.236.143	100%	2.541.346.649	100%	2.573.908.497	100%	2.655.913.769	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana produksi Perkebunan	75%	80%	3.583.994.261	82%	3.642.439.563	85%	3.689.051.587	87%	3.736.318.786	90%	3.855.358.697	90%	Dinas Perkebunan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	85,63%	89,51%	2.190.218.715	92,83%	2.225.935.289	94,23%	2.254.420.414	100%	2.283.305.925	100%	2.356.052.537	100%	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	82,50%	83,33%	3.783.105.054	90%	3.844.797.317	95,88%	3.893.998.898	98,75%	3.943.892.052	100%	4.069.545.292	100%	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tingkat konsumsi ikan	90%	95,16%	995.553.962	95,70%	1.011.788.768	97,59%	1.024.736.552	98,18%	1.037.866.330	100%	1.070.932.972	100%	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	89%	318.577.268	89,50%	323.772.406	90%	174.297.118	90,50%	177.401.298	91%	184.541.938	91%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh	100%	100%	3.345.061.311	100%	3.399.610.259	100%	3.443.114.815	100%	3.487.230.867	100%	3.598.334.784	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan	75%	80%	637.154.535	82%	647.544.811	85%	655.831.393	87%	664.234.451	90%	685.397.102	90%	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Kesehatan Hewan, dan pencegahan/ penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular	100%	100%	2.429.151.666	100%	2.468.764.593	100%	2.500.357.187	100%	2.532.393.844	100%	2.613.076.450	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya	82%	85%	597.332.377	90%	607.073.261	94%	614.841.931	97%	622.719.798	100%	642.559.783	100%	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	5%	5%	162.133.074	8%	164.777.028	11%	166.885.667	14%	169.023.945	17%	174.409.084	17%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengawasan dan perizinan usaha perkebunan	75%	80%	358.399.426	82%	364.243.956	85%	368.905.159	87%	373.631.879	90%	385.535.870	90%	Dinas Perkebunan
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	8%	8%	298.666.188	8%	303.536.630	9%	307.420.966	10%	311.359.899	13%	321.279.891	15%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase pelaksanaan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	5%	5%	238.932.951	8%	242.829.304	11%	245.936.772	14%	249.087.919	17%	257.023.913	17%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan	10%	15%	3.094.750.600	20%	3.145.217.654	25%	3.185.466.767	30%	3.226.281.619	35%	3.329.071.637	35%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	80%	85%	290.132.869	90%	294.864.155	95%	298.637.509	100%	302.463.902	100%	312.100.466	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase kewirausahawan kreatif baru	25%	30%	3.288.172.513	40%	3.341.793.758	45%	3.384.558.440	50%	3.427.924.220	55%	3.537.138.614	55%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan UMKM	Persentase fasilitasi peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan	15%	16%	614.399.016	17%	624.418.211	18%	632.408.844	19%	640.511.792	20%	660.918.634	20%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase produk UMKM yang diberdayakan	11%	15%	1.604.264.098	20%	1.630.425.328	25%	1.651.289.758	30%	1.672.447.457	35%	1.725.731.988	40%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diurus	45%	50%	819.198.688	55%	832.557.614	60%	843.211.791	65%	854.015.723	70%	881.224.845	70%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perkoperasian	45%	50%	699.732.213	55%	711.142.962	60%	720.243.405	65%	729.471.763	70%	752.712.889	70%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilakukan	45%	50%	409.599.344	55%	416.278.807	60%	421.605.896	65%	427.007.861	70%	440.612.423	70%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilakukan	45%	50%	665.598.934	55%	676.453.062	60%	685.109.580	65%	693.887.775	70%	715.995.187	70%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	20%	22%	597.332.377	25%	607.073.261	28%	614.841.931	32%	622.719.798	35%	642.559.783	35%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaksanaan tertib ukur UTTP	4293	88%	910.220.765	91%	925.064.016	95%	936.901.990	97%	948.906.358	100%	979.138.717	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Desa yang dilakukan	100%	100%	5.560.879.985	100%	5.651.562.973	100%	5.723.885.598	100%	5.797.224.783	100%	5.981.925.598	100%	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang dikelola Pemda	30%	100%	2.616.884.699	100%	2.659.559.046	100%	2.693.593.222	100%	2.728.105.780	100%	2.815.023.811	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Penataan Kebijakan	40%	50%	12.515.535.516	60%	12.719.630.220	70%	12.882.402.368	80%	13.047.462.428	90%	13.463.157.356	95%	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data IKM yang dipublikasikan	60%	65%	540.443.579	79%	549.256.760	85%	556.285.557	90%	563.413.150	95%	581.363.613	98%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi	100%	100%	113.777.596	100%	115.633.002	100%	117.112.749	100%	118.613.295	100%	122.392.340	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan Transmigrasi	100%	100%	113.777.596	100%	115.633.002	100%	117.112.749	100%	118.613.295	100%	122.392.340	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penataan Desa	Persentase Sarana Desa yang didefenitifkan	100%	12 Desa	981.331.762	12 Desa	997.334.642	-	1.010.097.458	-	1.023.039.668	-	1.055.633.929	36 Desa	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentasae pelaksanaan pembentukan BKAD yang difasilitasi	100%	100%	327.110.587	100%	332.444.881	100%	336.699.153	100%	341.013.223	100%	351.877.976	100%	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	1.1.2 Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi	**Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB)**	**202,54**	**201,17**		**201,29**		**201,78**		**203,21**		**205,59**		**205,59**	
		Angka Kemiskinan	**6%**	**6,07%**		**5,94%**		**5,81%**		**5,69%**		**5,56%**		**5,56%**	
		Gini Ratio	**0,283**	**0,279**		**0,278**		**0,277**		**0,276**		**0,275**		**0,275**	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.036.798.340	100%	1.053.705.731	100%	1.067.189.923	100%	1.080.863.649	100%	1.115.300.195	100%	Kecamatan Bantan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	844.798.647	100%	858.575.040	100%	869.562.160	100%	880.703.714	100%	908.763.122	100%	Kecamatan Siak Kecil
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.036.798.340	100%	1.053.705.731	100%	1.067.189.923	100%	1.080.863.649	100%	1.115.300.195	100%	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.107.198.227	100%	1.125.253.651	100%	1.139.653.437	100%	1.154.255.625	100%	1.191.030.455	100%	Kecamatan Talang Muandau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.013.189.489	100%	1.029.711.883	100%	1.042.889.028	100%	1.056.251.390	100%	1.089.903.784	100%	Kecamatan Rupat Utara
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	100%	100%	1.092.264.918	100%	1.110.076.819	100%	1.124.282.388	100%	1.138.687.630	100%	1.174.966.460	100%	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	78%	80%	18.022.371.143	90%	18.316.267.517	91%	18.550.659.410	92%	18.788.345.896	95%	19.386.946.593	95%	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun	100%	100%	102.399.836	100%	104.069.702	100%	105.401.474	100%	106.751.965	100%	110.153.106	100%	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88	89	1.592.886.338	89,5	1.618.862.028	90	1.946.999.449	90,5	1.971.946.026	91	2.034.772.646	91	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan lumbung pangan dan pembinaan kelompok	100%	100%	487.821.441	100%	495.776.496	100%	502.120.910	100%	508.554.501	100%	524.757.156	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengujian Mutu dan Keamanan PSAT	100%	100%	109.510.936	100%	111.296.764	100%	112.721.021	100%	114.165.296	100%	117.802.627	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase tingkat capaian Indeks Ketahanan Pangan	72%	75%	99.555.396	85%	101.178.877	90%	102.473.655	92%	103.786.633	95%	107.093.297	95%	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan Bapokting; jumlah paket bahan pokok penting yg diserahkan ke masyarakat kurang mampu	100%; 0	100%; 13.000	625.776.776	100%; 13.000	635.981.511	100%; 13.000	644.120.118	100%; 13.000	652.373.121	100%; 13.000	673.157.868	100%; 13.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,06**	**74,47**		**74,88**		**75,3**		**75,71**		**76,12**		**76,12**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	1.2.1 Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing	**Rata rata Lama Sekolah**	**9,88**	**10,15**		**10,37**		**10,62**		**10,85**		**11,1**		**11,1**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APSe) Rata-Rata	96,82%	97,1%	192.995.246.537	97,5%	196.142.479.643	97,8%	198.652.500.152	98,2%	201.197.801.305	98,56%	207.608.006.047	98,56%	Dinas Pendidikan
	1.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**71,36**	**71,55**		**71,71**		**71,86**		**72,03**		**72,2**		**72,2**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90%	95%	147.020.032.115	100%	149.417.533.197	100%	151.329.618.093	100%	153.268.579.098	100%	151.992.297.430	100%	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit	90%	95%	4.318.441.725	100%	4.388.863.889	100%	4.445.027.849	100%	4.501.981.245	100%	4.645.415.325	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit	100%	100%	8.706.686.859	100%	8.848.669.491	100%	8.961.905.247	100%	9.076.732.635	100%	9.365.919.268	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80%	85%	629.636.112	90%	639.903.782	95%	648.092.583	95%	656.396.484	95%	755.925.687	95%	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentae peningkatan kapasitas seumber daya manusia kesehatan	100%	100%	13.720.820.271	100%	13.944.569.925	100%	14.123.017.534	100%	14.303.973.388	100%	15.118.513.749	100%	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan	100%	100%	15.449.508.703	100%	15.701.448.614	100%	15.902.378.867	100%	16.106.133.379	100%	16.619.278.214	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan Kapasitas sumberdaya Aparatur	100%	100%	15.750.740.860	100%	16.007.593.057	100%	16.212.441.018	100%	16.420.168.304	100%	16.943.318.359	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pembinaan posyandu	100%	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	839.514.816	100%	853.205.043	100%	864.123.444	100%	875.195.312	100%	10.079.009.166	100%	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	49.190.321	100%	49.992.483	100%	50.632.233	100%	51.280.975	100%	52.914.798	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	1.3 Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	**Rasio PAD terhadap Total Pendapatan**	**10,76%**	**11,86%**		**12,77%**		**13,75%**		**14,84%**		**15,98%**		**15,98%**	
	1.3.1 Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset.	**Persentase Petumbuhan PAD**	**23,20%**	**16,10%**		**13,13%**		**13,30%**		**13,48%**		**13,68%**		**13,68%**	
		Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	**45%**	**50%**		**55%**		**60%**		**65%**		**70%**		**70%**	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	7.913.231.774	100%	8.042.275.289	100%	8.145.191.679	100%	8.249.554.653	100%	8.512.387.219	100%	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD	100%	100%	324.442.502.733	100%	329.733.286.853	100%	333.952.858.841	100%	338.231.740.787	100%	349.007.875.986	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset yang tertib dan terukur	100%	100%	5.934.923.830	100%	6.031.706.467	100%	6.108.893.759	100%	6.187.165.990	100%	6.384.290.414	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1.3.2 Terciptanya iklim investasi yang kondusif	**Nilai investasi (PMDN/PMA)**	**5,2 Triliun**	**4,8 Triliun**		**5,1 Triliun**		**5,3 Triliun**		**5,6 Triliun**		**5,9 Triliun**		**5,9 Triliun**	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	34.133.279	100%	34.689.901	100%	35.133.825	100%	35.583.988	100%	36.717.702	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentae Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	204.799.672	100%	208.139.404	100%	210.802.948	100%	213.503.931	100%	220.306.211	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	136.533.115	100%	138.759.602	100%	140.535.299	100%	142.335.954	100%	146.870.808	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentae Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	318.577.268	100%	323.772.406	100%	327.915.697	100%	332.117.225	100%	342.698.551	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi	15%	15%	153.599.754	15%	156.104.553	16%	158.102.211	18%	160.127.948	20%	165.229.658	20%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	443.732.623	100%	450.968.708	100%	456.739.720	100%	462.591.850	100%	477.330.124	100%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (U$)	554,9	558,76	341.332.787	559	346.899.006	562,98	351.338.246	568,26	355.839.884	568,26	367.177.019	568,26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter														
	2.1 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	**Indek Reformasi Birokrasi**	**53**	**56**		**59**		**63**		**67**		**72**		**72**	
	2.1.1 Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	**Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	**85**	**86**		**87**		**90**		**95**		**95**		**95**	
		Indek Sistem Pemerintahan Berbasis electronik (SPBE)	**2**	**2,2**		**2,4**		**2,6**		**2,8**		**2,8**		**2,8**	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	95%	95%	5.176.880.600	96%	5.261.301.591	97	5.328.630.070	98	5.396.904.913	99	5.568.851.452	99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupoksi DPRD	100%	100%	42.808.820.345	100%	43.506.917.003	100	44.063.671.736	100	44.628.252.169	100	46.050.117.775	100	Sekretariat DPRD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	95%	95%	8.504.875.271	96%	8.643.566.900	97	8.754.177.973	98	8.866.343.786	99	9.148.827.385	99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan	80%	85%	457.954.822.290	88%	465.422.833.050	90%	471.378.813.920	95%	477.418.511.570	97%	492.629.166.890	100%	Dinas Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan	100%	100%	100.138.376.621	100%	101.771.364.064	100%	103.073.724.529	100%	104.394.390.867	100%	100.790.091.661	100%	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	100%	100%	83.297.484.546	100%	84.655.842.359	100%	85.739.176.785	100%	86.837.738.471	100%	89.604.407.288	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	100%	100%	73.874.024.435	100%	75.078.710.973	100%	76.039.487.571	100%	77.013.768.767	100%	79.467.443.819	100%	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	25.599.959.010	100%	26.017.425.450	100%	26.350.368.480	100%	26.687.991.330	100%	27.538.276.410	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaranya penunjang Urusan dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	100%	100%	10.097.761.610	100%	10.262.428.928	100%	10.979.320.200	100%	11.119.996.388	100%	11.474.281.838	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%	10.094.917.170	100%	10.259.538.102	100%	10.390.828.637	100%	10.523.964.581	100%	10.859.260.331	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	100%	6.249.234.438	100%	6.351.142.635	100%	6.432.417.728	100%	6.514.835.217	100%	6.722.399.253	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	7.210.655.121	100%	7.328.241.502	100%	7.422.020.455	100%	7.517.117.558	100%	7.756.614.522	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial	100%	100%	9.932.784.096	100%	10.094.761.075	100%	10.223.942.970	100%	10.354.940.636	100%	10.684.851.247	100%	Dinas Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100%	10.239.983.604	100%	10.406.970.180	100%	10.540.147.392	100%	10.675.196.532	100%	11.015.310.564	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	100%	100%	10.751.982.784	100%	10.927.318.689	100%	11.067.154.762	100%	11.208.956.359	100%	11.566.076.092	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan	100%	100%	7.347.188.236	100%	7.467.001.104	100%	714.973.331	100%	724.134.165	100%	747.205.233	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	17.242.994.613	100%	17.524.181.453	100%	17.748.437.081	100%	17.975.844.827	100%	18.548.559.066	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	17.834.638.110	100%	18.125.473.064	100%	18.357.423.374	100%	18.592.633.960	100%	19.184.999.232	100%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	100%	10.140.428.208	100%	10.305.791.303	100%	10.437.673.737	100%	10.571.409.899	100%	10.908.217.267	100%	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilakanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	8.021.320.490	100%	8.152.126.641	100%	8.256.448.790	100%	8.362.237.283	100%	8.628.659.942	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan	100%	100%	30.947.506.003	100%	31.452.176.544	100%	32.850.126.038	100%	33.271.029.191	100%	34.331.051.258	100%	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Dinas Komunikasi Informastik dan Statistik	100%	100%	6.940.433.332	100%	7.053.613.122	100%	6.558.313.933	100%	6.642.344.509	100%	6.853.971.018	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	100%	100%	11.656.514.669	100%	11.846.601.055	100%	11.998.201.115	100%	12.151.932.052	100%	12.539.095.192	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%	10.239.983.604	100%	10.406.970.180	100%	10.540.147.392	100%	10.675.196.532	100%	11.015.310.564	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	21.053.800.932	100%	21.723.277.947	100%	22.257.207.586	100%	22.798.642.096	100%	24.162.215.936	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	78,50%	4.938.107.310	80%	4.844.245.388	85%	7.837.743.441	88,50%	7.838.661.096	90%	7.952.296.585	90%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan	100%	100%	12.344.869.123	100%	12.546.180.717	100%	12.706.733.245	100%	12.869.542.486	100%	13.279.568.847	100%	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Tanamana Pangan Holtikultura dan Peternakan	100%	100%	1.473.419.863	100%	1.497.447.376	100%	1.516.610.097	100%	1.536.042.168	100%	1.584.980.798	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan	100%	100%	21.265.032.618	100%	21.611.808.074	100%	21.888.372.751	100%	22.168.824.798	100%	22.875.128.271	100%	Dinas Perkebunan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100%	100%	6.030.212.567	100%	6.128.549.106	100%	6.206.975.686	100%	6.286.504.624	100%	6.486.793.999	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksankan di Sekretriat Daerah	100%	100%	104.817.609.947	100%	106.526.903.093	100%	107.890.119.832	100%	109.272.497.835	100%	112.753.942.857	100%	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksankan di Sekretriat DPRD	100%	100%	56.746.575.806	100%	57.671.959.748	100%	58.409.983.464	100%	59.158.380.782	100%	61.043.179.376	100%	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Bappeda	100%	100%	23.295.962.699	100%	23.675.857.160	100%	23.978.835.317	100%	24.286.072.110	100%	25.059.831.533	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	21.761.387.378	100%	22.116.257.045	100%	22.399.277.117	100%	22.686.275.297	100%	23.409.064.853	100%	Badan Pendapatan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100%	100%	35.609.542.983	100%	36.190.238.801	100%	36.653.362.556	100%	37.122.995.940	100%	38.305.742.486	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	6.911.988.933	100%	7.024.704.872	100%	7.114.599.490	100%	7.205.757.659	100%	7.435.334.631	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	100%	10.168.872.607	100%	10.334.699.554	100%	10.466.951.924	100%	10.601.063.223	100%	10.938.815.352	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat	100%	100%	12.799.979.505	100%	13.008.712.725	100%	13.175.184.240	100%	13.343.995.665	100%	13.769.138.205	100%	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis	100%	100%	10.137.583.768	100%	10.302.900.478	100%	10.434.745.918	100%	10.568.444.567	100%	11.905.157.458	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bantan	100%	100%	5.049.591.915	100%	5.131.937.170	100%	5.197.610.183	100%	5.264.206.290	100%	5.431.925.022	100%	Kecamatan Bantan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin Solapan	100%	100%	4.742.392.407	100%	4.819.728.065	100%	4.881.405.761	100%	4.943.950.394	100%	6.101.465.705	100%	Kecamatan Bathin Solapan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Mandau	100%	100%	20.053.301.225	100%	20.380.316.603	100%	20.641.121.976	100%	20.905.593.209	100%	21.571.649.855	100%	Kecamatan Mandau
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Pinggir	100%	100%	6.242.123.339	100%	6.343.915.572	100%	6.425.098.181	100%	6.507.421.886	100%	7.714.749.731	100%	Kecamatan Pinggir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Muandau	100%	100%	4.633.592.581	100%	4.709.154.006	100%	4.769.416.695	100%	4.830.526.431	100%	4.984.428.030	100%	Kecamatan Talang Muandau
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bandar Laksamana	100%	100%	403.514.652	100%	4.380.200.521	100%	4.430.200.521	100%	4.516.481.913	100%	4.733.776.990	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Bukti Batu	100%	100%	5.996.932.620	100%	6.094.726.453	100%	6.172.720.207	100%	6.251.810.236	100%	6.450.994.239	100%	Kecamatan Bukit Batu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Siak Kecil	100%	100%	5.286.391.536	100%	5.372.598.355	100%	5.441.351.091	100%	5.511.070.210	100%	5.686.654.079	100%	Kecamatan Siak Kecil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Rupat	100%	100%	9.850.010.895	100%	10.010.638.066	100%	10.138.743.445	100%	10.268.649.464	100%	10.595.810.820	100%	Kecamatan Rupat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Rupat Utara	100%	100%	5.258.231.581	100%	5.343.979.187	100%	5.412.365.686	100%	5.481.713.419	100%	5.656.361.975	100%	Kecamatan Rupat Utara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	7.377.054.855	100%	7.497.354.767	100%	7.593.297.850	100%	7.690.589.502	100%	7.935.613.319	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	3.413.327.868	100%	3.468.990.060	100	3.513.382.464	100	3.558.398.844	100	3.671.770.188	100	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tindak lanjut hasil asistensi	100%	100%	853.331.967	100%	867.247.515	100	878.345.616	100	889.599.711	100	917.942.547	100	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	61.439.902	100%	62.441.821	100%	63.240.884	100%	64.051.179	100%	66.091.863	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	Kecamatan Bantan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	41.244.378	100%	41.916.963	100%	42.453.371	100%	42.997.319	100%	44.367.223	100%	Kecamatan Bukit Batu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	Kecamatan Siak Kecil
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	19.199.969	100%	19.513.069	100%	19.762.776	100%	20.015.993	100%	20.653.707	100%	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	56.888.798	100%	57.816.501	100%	58.556.374	100%	59.306.647	100%	61.196.170	100%	Kecamatan Mandau
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	46.933.258	100%	47.698.613	100%	48.309.009	100%	48.927.984	100%	50.486.840	100%	Kecamatan Pinggir

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	140.799.775	100%	143.095.840	100%	144.927.027	100%	146.783.952	100%	151.460.520	100%	Kecamatan Talang Muandau
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	72.533.217	100%	73.716.039	100%	74.659.377	100%	75.615.975	100%	78.025.116	100%	Kecamatan Rupat
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	81.350.981	100%	82.677.596	100%	83.735.615	100%	84.808.506	100%	87.510.523	100%	Kecamatan Rupat Utara
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	4.323.548.633	100%	4.394.054.076	100%	4.450.284.454	100%	4.507.305.202	100%	4.650.908.905	100%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	2.161.774.316	100%	2.197.027.038	100%	2.225.142.227	100%	2.253.652.601	100%	2.325.454.452	100%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	2.296.885.211	100%	2.334.341.228	100%	2.364.213.616	100%	2.394.505.889	100%	2.470.795.356	100%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Kependudukan	100%	100%	135.110.895	100%	137.314.190	100%	139.071.389	100%	140.853.288	100%	145.340.903	100%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	140.799.775	100%	143.095.840	100%	144.927.027	100%	146.783.952	100%	151.460.520	100%	Kecamatan Bantan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	197.973.016	100%	201.201.423	100%	203.776.183	100%	206.387.133	100%	212.962.671	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	189.724.141	100%	192.818.031	100%	195.285.509	100%	197.787.669	100%	204.089.226	100%	Kecamatan Bukit Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	134.399.785	100%	136.591.484	100%	138.339.435	100%	140.111.954	100%	144.575.951	100%	Kecamatan Siak Kecil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	159.999.744	100%	162.608.909	100%	164.689.803	100%	166.799.946	100%	172.114.228	100%	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	248.888.490	100%	252.947.192	100%	256.184.138	100%	259.466.582	100%	267.733.243	100%	Kecamatan Mandau
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	112.639.820	100%	114.476.672	100%	115.941.621	100%	117.427.162	100%	121.168.416	100%	Kecamatan Pinggir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	121.599.805	100%	123.582.771	100%	125.164.250	100%	126.767.959	100%	130.806.813	100%	Kecamatan Talang Muandau
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	116.053.148	100%	117.945.662	100%	119.455.004	100%	120.985.561	100%	124.840.186	100%	Kecamatan Rupat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	199.679.680	100%	202.935.919	100%	205.532.874	100%	208.166.332	100%	214.798.556	100%	Kecamatan Rupat Utara
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah	60%	67%	8.319.986.678	70%	8.455.663.271	75%	8.563.869.756	80%	8.673.597.182	85%	8.949.939.833	85%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan	75%	78,50%	537.599.139	80%	546.365.934	85%	553.357.738	88,50%	560.447.818	90%	578.303.805	90%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengeloaan Arsip	65%	68,50%	127.555.191	70%	131.266.004	75%	134.225.498	78,50%	137.226.590	80%	144.784.679	80%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100,00%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan peraturan daerah	24%	24%	9.614.206.828	24%	9.770.988.669	24%	9.896.027.274	24%	10.022.823.411	24%	10.342.152.696	24%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	Kecamatan Bantan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	40.959.934	100%	41.627.881	100%	42.160.590	100%	42.700.786	100%	44.061.242	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	32.995.503	100%	33.533.571	100%	33.962.697	100%	34.397.855	100%	35.493.778	100%	Kecamatan Bukit Batu
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	25.599.959	100%	26.017.425	100%	26.350.368	100%	26.687.991	100%	27.538.276	100%	Kecamatan Siak Kecil
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	115.199.816	100%	117.078.415	100%	118.576.658	100%	120.095.961	100%	123.922.244	100%	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	263.110.690	100%	267.401.317	100%	270.823.232	100%	274.293.244	100%	283.032.285	100%	Kecamatan Mandau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	42.008.000	100%	43.108.400	100%	44.263.820	100%	45.477.011	100%	46.750.860	100%	Kecamatan Pinggir
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	102.399.836	100%	104.069.702	100%	105.401.474	100%	106.751.965	100%	110.153.106	100%	Kecamatan Talang Muandau
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	79.786.539	100%	81.087.643	100%	82.125.315	100%	83.177.573	100%	85.827.628	100%	Kecamatan Rupat
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	88.746.525	100%	90.193.742	100%	91.347.944	100%	92.518.370	100%	95.466.025	100%	Kecamatan Rupat Utara
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	1.621.330.737	100%	1.647.770.279	100%	1.668.856.670	100%	1.690.239.451	100%	1.744.090.839	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	2.559.995.901	100%	2.601.742.545	100%	2.635.036.848	100%	2.668.799.133	100%	2.753.827.641	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	1,8	2	2.047.996.721	2,1	2.081.394.036	2,2	2.108.029.478	2,3	2.135.039.306	2,4	2.203.062.113	2,4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktivitas komunikassi dan informasi	12%	15%	426.665.984	20%	433.623.758	25%	439.172.808	30%	444.799.856	35%	458.971.274	35%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis	70%	75%	284.443.989	80%	289.082.505	85%	292.781.872	90%	296.533.237	95%	305.980.849	95%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	75%	80%	2.389.329.508	85%	2.428.293.042	90%	2.459.367.725	95%	2.490.879.191	100%	2.570.239.132	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.2 Mewujudkan masyakarat yang berkarakter dan harmonis.	**Persentase penurunan potensi konflik**	**65%**	**60%**		**55%**		**50%**		**45%**		**40%**		**40%**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	2.2.1 Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu.	**Persentase Penyelesaian Konflik Keagamaan**	**65%**	**60%**		**55%**		**50%**		**45%**		**40%**		**40%**	
		Persetase Pemajuan Kebudayan Melayu	**80%**	**85%**		**90%**		**95%**		**100%**		**100%**		**100%**	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan	100%	100%	39.111.048.488	100%	39.748.844.438	100%	40.257.507.400	100%	40.773.320.088	100%	42.072.366.738	100%	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0%	85%	3.271.105.874	87%	3.324.448.808	90%	3.366.991.528	95%	3.410.132.226	97%	3.518.779.764	100%	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan	75%	80%	177.777.493	85%	180.676.566	85%	182.988.670	90%	185.333.273	90%	191.238.031	90%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45%	47%	151.998.155	50%	170.784.145	50%	185.766.582	50%	200.959.610	50%	239.222.438	50%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan ke museum	60%	65%	92.444.296	70%	93.951.814	75%	95.154.108	80%	96.373.302	85%	99.443.776	85%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian koleksi nasional naskah kuno	75%	78,50%	486.399.221	80%	494.331.084	85%	500.657.001	88,50%	507.071.835	90%	523.227.252	90%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun	100%	100%	375.466.065	100%	381.588.907	100%	386.472.071	100%	391.423.873	100%	403.894.721	100%	Dinas Sosial
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan	80%	85%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	95%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50%	50%	99.555.396	50%	101.178.877	50%	102.473.655	50%	103.786.633	50%	107.093.297	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan Penanganan Konflik di Daerah	40%	40%	268.799.570	40%	273.182.967	40%	276.678.869	40%	280.223.909	40%	289.151.902	40%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	50%	50%	258.844.030	50%	263.065.080	50%	266.431.504	50%	269.845.246	50%	278.442.573	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan pembinaan Pendidikan Politik	50%	50%	1.800.000.000	50%	2.000.000.000	50%	2.000.000.000	50%	1.800.000.000	50%	1.800.000.000	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	20.479.967	100%	20.813.940	100%	21.080.295	100%	21.350.393	100%	22.030.621	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	108.799.826	100%	110.574.058	100%	111.989.066	100%	113.423.963	100%	117.037.675	100%	Kecamatan Bantan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	262.314.969	100%	292.314.969	100%	327.400.411	100%	327.400.411	100%	327.400.411	100%	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	329.955.027	100%	335.335.706	100%	339.626.972	100%	343.978.555	100%	354.937.785	100%	Kecamatan Bukit Batu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	76.799.877	100%	78.052.276	100%	79.051.105	100%	80.063.974	100%	82.614.829	100%	Kecamatan Siak Kecil
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	326.399.477	100%	331.722.174	100%	335.967.198	100%	340.271.889	100%	351.113.024	100%	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	782.220.970	100%	794.976.889	100%	805.150.148	100%	815.466.402	100%	841.447.335	100%	Kecamatan Mandau
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	187.733.033	100%	190.794.453	100%	193.236.036	100%	195.711.936	100%	201.947.360	100%	Kecamatan Pinggir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	294.399.529	100%	299.200.393	100%	303.029.238	100%	306.911.900	100%	316.690.179	100%	Kecamatan Talang Muandau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	369.919.408	100%	375.951.798	100%	380.762.825	100%	385.641.475	100%	397.928.094	100%	Kecamatan Rupat
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	754.345.459	100%	766.646.803	100%	776.457.525	100%	786.406.145	100%	811.461.212	100%	Kecamatan Rupat Utara
	2.2.2 Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	**Angka Prestasi olah raga (Povinsi dan Nasioanal dan Internasional)**	**13**	**15**		**16**		**20**		**25**		**30**		**30**	
		Jumlah Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis	**900**	**850**		**800**		**750**		**700**		**650**		**650**	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	80%	80%	767.998.770	80%	780.522.764	80%	790.511.054	80%	800.639.740	80%	826.148.292	80%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan Ketahanan Ekonomi, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	40%	50%	278.755.109	50%	283.300.855	50%	286.926.235	50%	290.602.572	50%	299.861.232	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	70%	80%	22.559.995.901	85%	22.601.742.545	90%	22.635.036.848	95%	22.668.799.133	100%	22.753.827.641	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Fasilitasi Organisasi Gerakan Pramuka	60%	70%	938.665.164	80%	953.972.267	85%	966.180.178	90%	978.559.682	100%	1.009.736.802	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pelaksanaan fasilitas, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta hukum adat masyarakat	100%	100%	13.401.308.193	100%	13.657.354.276	100%	13.861.559.334	100%	14.068.634.682	100%	14.590.142.865	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.2.3.Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	**Indeks Pembangunan Gender**	**90,5**	**90,75**		**91**		**91,5**		**92**		**92,1**		**92**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Deerah yang melaksanakan PPRG	69.23%	72%	2.389.329.508	75%	2.428.293.042	80%	2.459.367.725	90%	2.490.879.191	100%	2.570.239.132	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan	1%	1%	938.665.164	1%	953.972.267	1%	966.180.178	1%	978.559.682	0%	1.009.736.802	0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS yang aktif; persentase kelompok PIK-R aktif	60; 60	65; 65	296.109.306	70;70	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	5%	12%	853.331.967	19%	867.247.515	25%	878.345.616	30%	889.599.711	35%	917.942.547	35%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); presentase kesertaan KB Baru	66; 66,5	67; 66,1	511.999.180	69;66,5	520.348.509	70;67	527.007.370	70; 67	533.759.827	70; 67	550.765.528	70; 67	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	5%	20%	170.666.393	25%	173.449.503	30%	175.669.123	35%	177.919.942	0	183.588.509	45%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	30%	20%	767.998.770	18%	780.522.764	15%	790.511.054	10%	800.639.740	5%	826.148.292	5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	1.194.664.754	NINDYA	1.214.146.521	NINDYA	1.229.683.862	UTAMA	1.245.439.595	UTAMA	1.285.119.566	UTAMA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan angka laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1,62%; 78 jiwa/km2; 2,51%	1,61%; 79 jiwa/km2; 2,50%	211.506.647	1,60%; 80 jiwa/km2; 2,49%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Misi 3: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat														
	3.1 Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	**Rasio konektivitas Kabupaten**	**91**	**93**		**94**		**95**		**96**		**97**		**97**	
	3.1.1. Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik.	**Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik**	**53,50%**	**55,49%**		**57,47%**		**59,46%**		**61,44%**		**63,43%**		**63,43%**	
		Panjang Jalan Poros dan Jembatan Pada Wilayah Perbatasan Dalam Kondisi Baik.	**11.041 Km**	**16.562 Km**		**22.083 Km**		**27.604 Km**		**33.125 Km**		**38.646 Km**		**38.646 Km**	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (Km)	480,097 Km	528,096 Km	152.888.644.088	576.104 Km	155.381.846.438	624.113 Km	158.102.210.880	672.122 Km	160.127.947.980	720.131 Km	165.229.658.460	720.131 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan bebas banjir	78.10%	79,10%	6.968.877.731	81,10%	7.082.521.373	83,1	7.173.155.864	85,1	7.265.064.307	87,1	7.496.530.801	87,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan; Perangkat pendukung dan penunjang untuk layanan jasa konstruksi; Laporan SIPJAKI; Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang memadai; Laporan IUJK; Persentase SDM yang mengerti undang-undang jasa konstruksi; Persentase tenaga terampil yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi;	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.844.439.890	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.890.825.050	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.927.818.720	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.965.332.370	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	3.059.808.490	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.1.2. Meningkatnya kapasitas angkutan penyebrangan.	**Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyebrangan: a. orang; b. barang**	**910.000; 28.800**	**950.000;32.400**		**1.100.000;36.000**		**1.200.000;39.600**		**1.300.000;43.200**		**1.350.000;46.800**		**1.350.000; 46.800**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi	50	50	36.750.163.379	61	37.349.459.646	71	38.822.876.227	80	39.320.307.226	86	40.573.060.577	88	Dinas Perhubungan
	3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**70,7**	**70,85**		**71**		**71,14**		**71,29**		**71,44**		**71,44**	
	3.2.1. Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.	**Rasio permukiman layak huni.**	**97,85**	**97,92**		**97,98**		**98,05**		**98,11**		**98,18**		**98,18**	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	2.844.439.890	100%	2.890.825.050	100%	2.927.818.720	100%	2.965.332.370	100%	4.059.808.490	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	100%	100%	2.133.329.918	100%	2.168.118.788	100%	2.195.864.040	100%	2.223.999.278	100%	2.294.856.368	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang layak	20%	24%	25.599.959.010	35%	26.017.425.450	46%	26.350.368.480	57,40%	26.687.991.330	68,35%	27.538.276.410	68,35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pencegahan perumahan kumuh	100%	100%	12.799.979.505	100%	13.008.712.725	100%	13.175.184.240	100%	13.343.995.665	100%	13.769.138.205	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik; Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur; Panjang infrastruktur pengaman tebing untuk daerah rawan longsor; Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	70,04%; 32,6 km; 2 km; 4 unit	71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit	31.288.838.790	73,49%; 35,6 km; 4 km; 5 unit	31.799.075.550	75,77%; 37,6 km; 6 km; 6 unit	32.206.005.920	75,85%; 39,6 km; 8 km; 6 unit	32.618.656.070	78,59%; 41,6 km; 10 km; 6 unit	33.657.893.390	71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100%	100%	41.955.488.378	100%	42.639.669.488	100%	43.917.280.800	100%	44.479.985.550	100%	45.897.127.350	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pengolahan air limbah yang ditangani	100%	100%	2.815.995.491	100%	2.861.916.800	100%	2.898.540.533	100%	2.935.679.046	100%	3.029.210.405	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase TPU yang dipelihara/ditata	100%	100%	1.194.664.754	100%	1.214.146.521	100%	1.229.683.862	100%	1.245.439.595	100%	1.285.119.566	100%	Dinas Sosial
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi	23%	23%	29.013.286.878	42%	29.486.415.510	57%	30.184.639.875	70%	30.571.390.601	83%	31.545.401.609	83%	Dinas Perhubungan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	3.194.874.884	100%	3.246.974.696	100%	3.288.525.986	100%	3.330.661.318	100%	3.436.776.896	100%	Kecamatan Bengkalis
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	1.658.024.012	100%	1.685.061.922	100%	1.706.625.532	100%	1.728.492.238	100%	1.783.562.369	100%	Kecamatan Bukit Batu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	14.151.088.453	100%	14.381.854.624	100%	14.565.898.132	100%	14.752.528.541	100%	15.222.547.238	100%	Kecamatan Mandau
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	2.797.222.188	100%	2.842.837.354	100%	2.879.216.929	100%	2.916.107.853	100%	3.009.015.669	100%	Kecamatan Pinggir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	4.018.340.233	100%	4.083.868.548	100%	4.136.129.506	100%	4.189.125.039	100%	4.322.591.454	100%	Kecamatan Rupat
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati	60%	70%	1.871.641.448	80%	1.902.162.883	90%	1.926.504.718	95%	1.951.188.699	100%	2.013.353.986	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, panjang jaringan perpipaan yang terbangun	94,96%	96,88%; 5000 m	36.977.718.570	98,81%; 5000 m	37.580.725.650	100%; 5000 m	38.061.643.360	100%; 5000 m	38.549.320.810	100%; 5000 m	39.777.510.370	100%; 5000 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	72%	74%	16.327.084.969	76%	16.593.335.787	80%	16.805.679.453	83%	17.021.007.804	85%	17.563.300.733	85%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Regional	100%	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**56**	**56,06**		**56,11**		**56,17**		**56,22**		**67**		**67**	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		Indek Resiko Bencana	**109,48**	**100,1**		**90,71**		**81,33**		**71,94**		**62,56**		**62,56**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	75%	80%	796.443.169	85%	809.431.014	90%	819.789.242	95%	830.293.064	100%	856.746.377	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	70%	75%	1.991.107.923	80%	2.023.577.535	85%	2.049.473.104	95%	2.075.732.659	100%	2.141.865.943	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan Limbah B3	70%	75%	119.466.475	80%	121.414.652	85%	122.968.386	95%	124.543.960	100%	128.511.957	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	80%	85%	796.443.169	90%	809.431.014	92%	819.789.242	95%	830.293.064	100%	856.746.377	100%	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang telah ditangani	100%	100%	278.755.109	100%	283.300.855	100%	286.926.235	100%	290.602.572	100%	299.861.232	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait DenganPPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang telah mendapatkan pengakuan	20%	40%	79.644.317	50%	80.943.101	70%	81.978.924	85%	83.029.306	100%	85.674.638	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup	25%	30%	318.577.268	35%	323.772.406	40%	327.915.697	50%	332.117.225	60%	342.698.551	60%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepastian pemberian informasi dan perizinan terkait tata ruang; Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Penataan Ruang; Jumlah Koordinasi Tata Ruang	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	738.740.244	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	750.787.110	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	760.394.876	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	770.137.688	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	794.674.438	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkalis	100%	100%	6.729.944.780	100%	6.839.692.068	100%	6.927.219.092	100%	7.015.976.387	100%	7.239.506.887	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	Dinas Sosial
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	8.172.075.804	100%	8.305.340.369	100%	8.411.623.183	100%	8.519.399.899	100%	8.790.829.792	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian di Kabupaten Bengkalis yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100%	100%	278.755.109	100%	283.300.855	100%	286.926.235	100%	290.602.572	100%	299.861.232	100%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana produksi Perkebunan	75%	80%	676.976.694	82%	688.016.362	85%	696.820.855	87%	705.749.104	90%	728.234.421	90%	Dinas Perkebunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan	100%	100%	824.887.568	100%	838.339.265	100%	849.067.429	100%	859.946.387	100%	887.344.462	100%	Sekretariat Daerah

BAB VII.
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1) penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bengkalis terpilih;

2) berbasis pada target pencapaian dalam indikator sasaran;

3) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;

4) penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026 berjumlah 144 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah tertuang dan dianalisis pada Bab III dokumen ini.

Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel VII-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bengkalis (dalam Juta)

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**3,224,851.26**	**3,417,562.17**	**3,446,741.30**	**3,486,162.86**	**3,516,140.45**	**3,603.117,96**
			BELANJA DAN TRANSFER	**3.224.258,42**	**3,387,162.41**	**3,425,890.06**	**3,465,325.65**	**3,506,050.60**	**3,602,848.44**
			BELANJA	**2.634.561,70**	**2.839.094,98**	**2,873,762.30**	**2,899,973.81**	**2,936,981.51**	**2,975,2421.51**
			Belanja Operasi	**2.110.732,46**	**2,121,326.83**	**2,131,974.59**	**2,142,675.99**	**2,153,431.32**	**2,178,210.90**
			Belanja Pegawai	**1.062.219,04**	**1,067,530.14**	**1,072,867.79**	**1,078,232.13**	**1,083,623.29**	**1,089,041.41**
			Belanja Barang dan Jasa	968.794,60	973,638.57	978,506.76	983,399.29	988,316.29	1,005,257.87

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Belanja Subsidi	**8.142,58**	**8,224.01**	**8,306.25**	**8,389.31**	**8,473.21**	**8,557.94**
			Belanja Hibah	**42.914,54**	**43,129.1**	**43,344,76**	**43,561.48**	**43,779.29**	**45,968.25**
			Belanja Bantuan Sosial	**28.661,70**	**28,805.00**	**28,949.03**	**29,093.77**	**29,239.24**	**29,385.43**
			Belanja Modal	**708.763,34**	**732,836.28**	**757,999.22**	**784,305.51**	**811,811.19**	**881,328.07**
			Belanja Tanah	235,00	237.35	239.72	242.12	244.54	246.99
			Belanja Peralatan dan Mesin	109.006,81	110,096.88	111,197.85	112,309.83	113,432.93	119,567.26
			Belanja Gedung dan Bangunan	174.888,82	176,637.70	178,404.08	180,188.12	181,990.00	188,809.90
			Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	421.659,14	442,742.09	464,879.20	488,123.16	512,529.32	568,155.79
			Belanja Aset Tetap Lainnya	2.973,57	3,122.25	3,278.36	3,442.28	3,614.39	4,795.12
			Belanja Aset Lainnya	-	-	-	--	-	
			Belanja Tidak Terduga	19.599,18	19,599.18	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			Belanja Transfer	**385.163,44**	**513,400,12**	**525,916.25**	**528,344.14**	**530,808.09**	**533,309.47**
			Belanja Bagi Hasil Pajak	8.243,00	8,655.15	9,087.91	9,542.30	10,019.41	10,520.39
			Belanja Bagi Hasil Retirbusi	1.397,94	1,467.83	1,541.22	1,618.29	1,699.20	1,784.16
			Belanja Bantuan Keuangan	375.522,51	513.400,12	515.287,12	517.183,55	519.089,47	521.004,92
			Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00

Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkalis

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**1.556.417.750.366**		**1.581.788.239.509**		**1.604.071.500.809**		**1.624.615.953.035**		**1.673.879.637.587**		**1.673.879.637.587**	
1	**1**	**Pendidikan**				**654.221.174.701**		**664.889.761.501**		**673.398.305.600**		**682.026.445.101**		**703.755.952.701**		**703.755.952.701**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan	80%	85%	457.954.822.290	88%	465.422.833.050	90%	471.378.813.920	95%	477.418.511.570	97%	492.629.166.890	97%	492.629.166.890	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekoolah (APSe) Rata-rata	96,82%	97,1%	192.995.246.537	97,50%	196.142.479.643	97,8%	198.652.500.152	98,2%	201.197.801.305	98,56%	207.608.006.047	98,56%	207.608.006.047	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0%	85%	3.271.105.874	87%	3.324.448.808	90%	3.366.991.528	95%	3.410.132.226	97%	3.518.779.764	97%	3.518.779.764	DINAS PENDIDIKAN
1	**2**	**Kesehatan**				**463.794.457.384**		**471.357.696.877**		**477.389.625.753**		**483.506.338.925**		**495.434.534.764**		**495.434.534.764**	
		Kesehatan				**262.348.379.935**		**266.626.576.011**		**270.038.576.183**		**273.498.535.149**		**278.735.837.693**		**278.735.837.693**	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	839.514.816	100%	853.205.043	100%	864.123.444	100%	875.195.312	100%	10.079.009.166	100%	10.079.009.166	DINAS KESEHATAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90%	95%	147.020.032.115	100%	149.417.533.197	100%	151.329.618.093	100%	153.268.579.098	100%	151.992.297.430	100%	151.992.297.430	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentae peningkatan kapasitas seumber daya manusia kesehatan	100%	100%	13.720.820.271	100%	13.944.569.925	100%	14.123.017.534	100%	14.303.973.388	100%	15.118.513.749	100%	15.118.513.749	DINAS KESEHATAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan	100%	100%	100.138.376.621	100%	101.771.364.064	100%	103.073.724.529	100%	104.394.390.867	100%	100.790.091.661	100%	100.790.091.661	DINAS KESEHATAN
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80%	85%	629.636.112	90%	639.903.782	95%	648.092.583	95%	656.396.484	95%	755.925.687	95%	755.925.687	DINAS KESEHATAN
		RSUD Kab Bengkalis				**103.065.434.974**		**104.746.154.862**		**106.086.583.501**		**107.445.853.095**		**110.869.100.827**		**110.869.100.827**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit	90%	95%	4.318.441.725	100%	4.388.863.889	100%	4.445.027.849	100%	4.501.981.245	100%	4.645.415.325	100%	4.645.415.325	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan tenaga kesehatan	100%	100%	15.449.508.703	100%	15.701.448.614	100%	15.902.378.867	100%	16.106.133.379	100%	16.619.278.214	100%	16.619.278.214	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Bengkalis	100%	100%	83.297.484.546	100%	84.655.842.359	100%	85.739.176.785	100%	86.837.738.471	100%	89.604.407.288	100%	89.604.407.288	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis
		RSUD Kec Mandau				**98.380.642.475**		**99.984.966.004**		**101.264.466.069**		**102.561.950.681**		**105.829.596.244**		**105.829.596.244**	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	49.190.321	100%	49.992.483	100%	50.632.233	100%	51.280.975	100%	52.914.798	100%	52.914.798	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan Rumah Sakit	100%	100%	8.706.686.859	100%	8.848.669.491	100%	8.961.905.247	100%	9.076.732.635	100%	9.365.919.268	100%	9.365.919.268	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan tenaga kesehatan	100%	100%	15.750.740.860	100%	16.007.593.057	100%	16.212.441.018	100%	16.420.168.304	100%	16.943.318.359	100%	16.943.318.359	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di RSUD Kecamatan Mandau	100%	100%	73.874.024.435	100%	75.078.710.973	100%	76.039.487.571	100%	77.013.768.767	100%	79.467.443.819	100%	79.467.443.819	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
1	**3**	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**286.366.806.159**		**291.026.182.206**		**295.474.140.448**		**299.251.754.266**		**308.765.472.509**		**308.765.472.509**	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang layak	20%	24%	25.599.959.010	35%	26.017.425.450	46%	26.350.368.480	57,40%	26.687.991.330	68,35%	27.538.276.410	68,35%	27.538.276.410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan bebas banjir	78.10%	79,10%	6.968.877.731	81,10%	7.082.521.373	83,10%	7.173.155.864	85,10%	7.265.064.307	87,10%	7.496.530.801	87,10%	7.496.530.801	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, panjang jaringan perpipaan yang terbangun	94,96%	96,88% ; 5000m	36.977.718.570	98,81% ; 5000m	37.580.725.650	100% ; 5000m	38.061.643.360	100% ; 5000m	38.549.320.810	100% ; 5000m	39.777.510.370	100% ; 5000m	39.777.510.370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik; Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur; Panjang infrastruktur pengaman tebing untuk daerah rawan longsor; Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	70,04%; 32,6 km; 2 km; 4 unit	71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit	31.288.838.790	73,49%; 35,6 km; 4 km; 5 unit	31.799.075.550	75,77%; 37,6 km; 6 km; 6 unit	32.206.005.920	75,85%; 39,6 km; 8 km; 6 unit	32.618.656.070	78,59%; 41,6 km; 10 km; 6 unit	33.657.893.390	71,04%; 33,6 km; 2 km; 4 unit	33.657.893.390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pengolahan air limbah yang ditangani	100%	100%	2.815.995.491	100%	2.861.916.800	100%	2.898.540.533	100%	2.935.679.046	100%	3.029.210.405	100%	3.029.210.405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Regional	100%	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	100%	643.633.335	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan; Perangkat pendukung dan penunjang untuk layanan jasa konstruksi; Laporan SIPJAKI; Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang memadai; Laporan IUJK; Persentase SDM yang mengerti undang-undang jasa konstruksi; Persentase tenaga terampil yang mempunyai keahlian di bidang konstruksi;	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.844.439.890	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.890.825.050	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.927.818.720	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	2.965.332.370	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	3.059.808.490	100%; 100%; 1 tahun; 100%; 200 dokumen; 100%; 30 org	3.059.808.490	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	25.599.959.010	100%	26.017.425.450	100%	26.350.368.480	100%	26.687.991.330	100%	27.538.276.410	100%	27.538.276.410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik (Km)	480,097 Km	528.096 Km	152.888.644.088	576.104 Km	155.381.846.438	624.113 Km	158.102.210.880	672.122 Km	160.127.947.980	720.131 Km	165.229.658.460	720.131 Km	165.229.658.460	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepastian pemberian informasi dan perizinan terkait tata ruang; Jumlah Dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Penataan Ruang; Jumlah Koordinasi Tata Ruang	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	738.740.244	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	750.787.110	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	760.394.876	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	770.137.688	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	794.674.438	100 %; 1 dokumen; 50 orang; 20 koordinasi	794.674.438	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**4**	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**69.830.999.301**		**70.969.754.979**		**73.195.468.000**		**74.133.309.251**		**77.495.212.251**		**77.495.212.251**	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	100%	100%	2.133.329.918	100%	2.168.118.788	100%	2.195.864.040	100%	2.223.999.278	100%	2.294.856.368	100%	2.294.856.368	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	2.844.439.890	100%	2.890.825.050	100%	2.927.818.720	100%	2.965.332.370	100%	4.059.808.490	100%	4.059.808.490	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100%	100%	41.955.488.378	100%	42.639.669.488	100%	43.917.280.800	100%	44.479.985.550	100%	45.897.127.350	100%	45.897.127.350	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Perumahan Permukiman Dan Pertanahan	100%	100%	10.097.761.610	100%	10.262.428.928	100%	10.979.320.200	100%	11.119.996.388	100%	11.474.281.838	100%	11.474.281.838	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pencegahan perumahan kumuh	100%	100%	12.799.979.505	100%	13.008.712.725	100%	13.175.184.240	100%	13.343.995.665	100%	13.769.138.205	100%	13.769.138.205	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	**5**	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**48.071.034.141**		**48.854.943.345**		**49.480.136.369**		**50.114.117.053**		**51.710.763.481**		**51.710.763.481**	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkalis	100%	100%	6.729.944.780	100%	6.839.692.068	100%	6.927.219.092	100%	7.015.976.387	100%	7.239.506.887	100%	7.239.506.887	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	100%	6.249.234.438	100%	6.351.142.635	100%	6.432.417.728	100%	6.514.835.217	100%	6.722.399.253	100%	6.722.399.253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	8.172.075.804	100%	8.305.340.369	100%	8.411.623.183	100%	8.519.399.899	100%	8.790.829.792	100%	8.790.829.792	Dinas Pemadam Kebakaran

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	7.210.655.121	100%	7.328.241.502	100%	7.422.020.455	100%	7.517.117.558	100%	7.756.614.522	100%	7.756.614.522	Dinas Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan peraturan daerah	24%	24%	9.614.206.828	24%	9.770.988.669	24%	9.896.027.274	24%	10.022.823.411	24%	10.342.152.696	24%	10.342.152.696	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%	10.094.917.170	100%	10.259.538.102	100%	10.390.828.637	100%	10.523.964.581	100%	10.859.260.331	100%	10.859.260.331	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**6**	**Sosial**				**34.133.278.680**		**34.689.900.601**		**35.133.824.639**		**35.583.988.439**		**36.717.701.881**		**36.717.701.881**	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	100%	100%	1.092.264.918	100%	1.110.076.819	100%	1.124.282.388	100%	1.138.687.630	100%	1.174.966.460	100%	1.174.966.460	DINAS SOSIAL
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	1.835.885.094	DINAS SOSIAL
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun	100%	100%	102.399.836	100%	104.069.702	100%	105.401.474	100%	106.751.965	100%	110.153.106	100%	110.153.106	DINAS SOSIAL
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam satu tahun	100%	100%	375.466.065	100%	381.588.907	100%	386.472.071	100%	391.423.873	100%	403.894.721	100%	403.894.721	DINAS SOSIAL

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial	100%	100%	9.932.784.096	100%	10.094.761.075	100%	10.223.942.970	100%	10.354.940.636	100%	10.684.851.247	100%	10.684.851.247	DINAS SOSIAL
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial	78%	80%	18.022.371.143	90%	18.316.267.517	91%	18.550.659.410	92%	18.788.345.896	95%	19.386.946.593	95%	19.386.946.593	DINAS SOSIAL
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	1.706.663.934	100%	1.734.495.030	100%	1.756.691.232	100%	1.779.199.422	100%	1.835.885.094	100%	1.835.885.094	DINAS SOSIAL
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase TPU yang dipelihara/ditata	85%	90%	1.194.664.754	90%	1.214.146.521	95%	1.229.683.862	95%	1.245.439.595	95%	1.285.119.566	95%	1.285.119.566	DINAS SOSIAL
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan				**318.124.365.744**		**322.803.304.866**		**324.635.728.470**		**328.743.835.850**		**338.109.813.386**		**338.109.813.386**	
		Pelayanan Dasar															
2	**7**	**Tenaga Kerja**				**12.799.979.505**		**13.008.712.726**		**13.175.184.240**		**13.343.995.665**		**13.769.138.205**		**13.769.138.205**	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Bengkalis	86%	90%	383.999.385	93%	390.261.382	95%	395.255.527	97%	400.319.870	100%	413.074.146	100%	413.074.146	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dengan sertifikasi Kompetensi di Kabupaten Bengkalis	10%	15%	1.535.997.541	20%	1.561.045.527	25%	1.581.022.109	30%	1.601.279.480	35%	1.652.296.585	35%	1.652.296.585	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bengkalis	75%	80%	255.999.590	83%	260.174.255	85%	263.503.685	87%	266.879.913	90%	275.382.764	90%	275.382.764	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100%	10.239.983.604	100%	10.406.970.180	100%	10.540.147.392	100%	10.675.196.532	100%	11.015.310.564	100%	11.015.310.564	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenaga Kerjaan serta Ketrasnmigrasian se Kabupaten Bengkalis	55%	85%	383.999.385	87%	390.261.382	90%	395.255.527	92%	400.319.870	93%	413.074.146	93%	413.074.146	DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI
2	**8**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**17.066.639.340**		**17.344.950.301**		**17.566.912.320**		**17.791.994.220**		**18.358.850.940**		**18.358.850.940**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	100%	100%	10.751.982.784	100%	10.927.318.689	100%	11.067.154.762	100%	11.208.956.359	100%	11.566.076.092	100%	11.566.076.092	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	1.194.664.754	NINDYA	1.214.146.521	NINDYA	1.229.683.862	UTAMA	1.245.439.595	UTAMA	1.285.119.566	UTAMA	1.285.119.566	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Deerah yang melaksanakan PPRG	69.23%	72%	2.389.329.508	75%	2.428.293.042	80%	2.459.367.725	90%	2.490.879.191	100%	2.570.239.132	100%	2.570.239.132	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak	5%	20%	170.666.393	25%	173.449.503	30%	175.669.123	35%	177.919.942	0	183.588.509	45%	183.588.509	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	5%	12%	853.331.967	19%	867.247.515	25%	878.345.616	30%	889.599.711	35%	917.942.547	35%	917.942.547	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	30%	20%	767.998.770	18%	780.522.764	15%	790.511.054	10%	800.639.740	5%	826.148.292	5%	826.148.292	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Perlindungan Perempuan	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan	1%	1%	938.665.164	1%	953.972.267	1%	966.180.178	1%	978.559.682	0%	1.009.736.802	0%	1.009.736.802	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**9**	**Pangan**				**9.955.539.615**		**10.117.887.675**		**3.553.585.484**		**3.599.987.919**		**3.716.172.897**		**3.716.172.897**	
		Dinas Ketahanan Pangan															
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase tingkat capaian Indeks Ketahanan Pangan	72%	75%	99.555.396	85%	101.178.877	90%	102.473.655	92%	103.786.633	95%	107.093.297	95%	107.093.297	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengujian Mutu dan Keamanan PSAT	100%	100%	109.510.936	100%	111.296.764	100%	112.721.021	100%	114.165.296	100%	117.802.627	100%	117.802.627	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan lumbung pangan dan pembinaan kelompok	100%	100%	487.821.441	100%	495.776.496	100%	502.120.910	100%	508.554.501	100%	524.757.156	100%	524.757.156	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	89%	1.592.886.338	89,50%	1.618.862.028	90%	1.946.999.449	90,50%	1.971.946.026	91%	2.034.772.646	91%	2.034.772.646	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan	100%	100%	7.347.188.236	100%	7.467.001.104	100%	714.973.331	100%	724.134.165	100%	747.205.233	100%	747.205.233	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan															
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan pada Masyarakat	100%	100%	318.577.268	100%	323.772.406	100%	174.297.118	100%	177.401.298	100%	184.541.938	100%	184.541.938	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2	**#**	**Pertanahan**				**853.331.967**		**867.247.515**		**878.345.616**		**889.599.711**		**917.942.546**		**917.942.546**	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	8%	8%	298.666.188	8%	303.536.630	9%	307.420.966	10%	311.359.899	13%	321.279.891	15%	321.279.891	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi	15%	15%	153.599.754	15%	156.104.553	16%	158.102.211	18%	160.127.948	20%	165.229.658	20%	165.229.658	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	15%	5%	162.133.074	8%	164.777.028	11%	166.885.667	14%	169.023.945	17%	174.409.084	17%	174.409.084	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase pelaksanaan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	5%	5%	238.932.951	8%	242.829.304	11%	245.936.772	14%	249.087.919	17%	257.023.913	17%	257.023.913	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**11**	**Lingkungan Hidup**				**39.822.158.460**		**40.471.550.700**		**40.989.462.082**		**41.514.653.180**		**42.837.318.860**		**42.837.318.860**	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	80%	85%	796.443.169	90%	809.431.014	92%	819.789.242	95%	830.293.064	100%	856.746.377	100%	856.746.377	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	278.755.109	100%	283.300.855	100%	286.926.235	100%	290.602.572	100%	299.861.232	100%	299.861.232	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang mendapatkan pengakuan	20%	40%	79.644.317	50%	80.943.101	70%	81.978.924	85%	83.029.306	100%	85.674.638	100%	85.674.638	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati	60%	70%	1.871.641.448	80%	1.902.162.883	90%	1.926.504.718	95%	1.951.188.699	100%	2.013.353.986	100%	2.013.353.986	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan yang yang dikelola	72%	74%	16.327.084.969	76%	16.593.335.787	80%	16.805.679.453	83%	17.021.007.804	85%	17.563.300.733	85%	17.563.300.733	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau terhadap ketentuan pengelolaan B3 dan Limbah B3	70%	75%	119.466.475	80%	121.414.652	85%	122.968.386	95%	124.543.960	100%	128.511.957	100%	128.511.957	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	70%	75%	1.991.107.923	80%	2.023.577.535	85%	2.049.473.104	95%	2.075.732.659	100%	2.141.865.943	100%	2.141.865.943	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup	25%	30%	318.577.268	35%	323.772.406	40%	327.915.697	50%	332.117.225	60%	342.698.551	60%	342.698.551	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	17.242.994.613	100%	17.524.181.453	100%	17.748.437.081	100%	17.975.844.827	100%	18.548.559.066	100%	18.548.559.066	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	75%	80%	796.443.169	85%	809.431.014	90%	819.789.242	95%	830.293.064	100%	856.746.377	100%	856.746.377	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**#**	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**26.751.957.165**		**27.188.209.596**		**27.536.135.060**		**27.888.950.940**		**28.777.498.848**		**28.777.498.848**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	2.161.774.316	100%	2.197.027.038	100%	2.225.142.227	100%	2.253.652.601	100%	2.325.454.452	100%	2.325.454.452	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	4.323.548.633	100%	4.394.054.076	100%	4.450.284.454	100%	4.507.305.202	100%	4.650.908.905	100%	4.650.908.905	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	100%	2.296.885.211	100%	2.334.341.228	100%	2.364.213.616	100%	2.394.505.889	100%	2.470.795.356	100%	2.470.795.356	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	135.110.895	100%	137.314.190	100%	139.071.389	100%	140.853.288	100%	145.340.903	100%	145.340.903	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil	100%	100%	17.834.638.110	100%	18.125.473.064	100%	18.357.423.374	100%	18.592.633.960	100%	19.184.999.232	100%	19.184.999.232	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**#**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**32.711.058.735**		**33.244.488.075**		**33.669.915.280**		**34.101.322.255**		**35.187.797.635**		**35.187.797.635**	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Penataan Administrasi Desa yang dilakukan	100%	100%	5.560.879.985	100%	5.651.562.973	100%	5.723.885.598	100%	5.797.224.783	100%	5.981.925.598	100%	5.981.925.598	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pelaksanaan fasilitasi, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta hukum adat masyarakat	100%	100%	15.701.308.193	100%	15.957.354.276	100%	16.161.559.334	100%	16.368.634.682	100%	16.890.142.865	100%	16.890.142.865	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Program Penataan Desa	Persentase Sarana Desa yang di Defenitifkan	100%	100%	981.331.762	100%	997.334.642	100%	1.010.097.458	100%	1.023.039.668	100%	1.055.633.929	100%	1.055.633.929	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentasae pelaksanaan pembentukan BKAD yang difasilitasi	100%	100%	327.110.587	100%	332.444.881	100%	336.699.153	100%	341.013.223	100%	351.877.976	100%	351.877.976	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	10.140.428.208	100%	10.305.791.303	100%	10.437.673.737	100%	10.571.409.899	100%	10.908.217.267	100%	10.908.217.267	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**#**	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**9.040.935.623**		**9.180.091.103**		**9.291.072.113**		**9.403.613.063**		**9.687.041.423**		**9.687.041.423**	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kelompok BKB, BKL, BKR, dan UPPKS yang aktif; persentase kelompok PIK-R aktif	60; 60	65; 65	296.109.306	70;70	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	296.109.306	75; 75	296.109.306	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR); presentase kesertaan KB Baru	66; 66,5	67; 66,1	511.999.180	69;66,5	520.348.509	70;67	527.007.370	70; 67	533.759.827	70; 67	550.765.528	70; 67	550.765.528	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penurunan angka laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1,62%; 78 jiwa/km2; 2,51%	1,61%; 79 jiwa/km2; 2,50%	211.506.647	1,60%; 80 jiwa/km2; 2,49%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	1,59%; 81 jiwa/km2; 2,48%	211.506.647	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	8.021.320.490	100%	8.152.126.641	100%	8.256.448.790	100%	8.362.237.283	100%	8.628.659.942	100%	8.628.659.942	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2	**#**	**Perhubungan**				**96.710.956.260**		**98.288.051.700**		**101.857.642.140**		**103.162.727.018**		**106.449.513.444**		**106.449.513.444**	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi	50%	50%	36.750.163.379	61%	37.349.459.646	71%	38.822.876.227	80%	39.320.307.226	86%	40.573.060.577	88%	40.573.060.577	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	100%	100%	30.947.506.003	100%	31.452.176.544	100%	32.850.126.038	100%	33.271.029.191	100%	34.331.051.258	100%	34.331.051.258	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi	23%	23%	29.013.286.878	42%	29.486.415.510	57%	30.184.639.875	70%	30.571.390.601	83%	31.545.401.609	83%	31.545.401.609	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi	100%	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	**#**	**Komunikasi dan Informatika**				**11.377.759.561**		**11.563.300.200**		**11.125.711.136**		**11.268.263.006**		**11.627.272.263**		**11.627.272.263**	
		Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	2	2,2	2.047.996.721	2,4	2.081.394.036	2,6	2.108.029.478	2,8	2.135.039.306	2,8	2.203.062.113	2,8	2.203.062.113	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	100	100	2.389.329.508	100	2.428.293.042	100	2.459.367.725	100	2.490.879.191	100	2.570.239.132	100	2.570.239.132	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100%	6.940.433.332	100%	7.053.613.122	100%	6.558.313.933	100%	6.642.344.509	100%	6.853.971.018	100%	6.853.971.018	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**#**	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**17.066.639.339**		**17.344.950.300**		**17.566.912.320**		**18.101.994.221**		**18.358.850.941**		**18.358.850.941**	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diurus	45%	50%	819.198.688	55%	832.557.614	60%	843.211.791	65%	854.015.723	70%	881.224.845	70%	881.224.845	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang dilakukan	45%	50%	409.599.344	55%	416.278.807	60%	421.605.896	65%	427.007.861	70%	440.612.423	70%	440.612.423	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase produk UMKM yang diberdayakan	0,11	0,15	1.604.264.098	0,2	1.630.425.328	0,25	1.651.289.758	0,3	1.672.447.457	0,35	1.725.731.988	0,4	1.725.731.988	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perkoperasian	45%	50%	699.732.213	55%	711.142.962	60%	720.243.405	65%	729.471.763	70%	752.712.889	70%	752.712.889	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi yang dilakukan	45%	50%	665.598.934	55%	676.453.062	60%	685.109.580	65%	693.887.775	70%	715.995.187	70%	715.995.187	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Pengembangan Umkm	Persentase fasilitasi Peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan	1,50%	1,60%	614.399.016	1,70%	624.418.211	1,80%	632.408.844	1,90%	640.511.792	2%	660.918.634	2%	660.918.634	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	20%	22%	597.332.377	25%	607.073.261	28%	614.841.931	32%	622.719.798	35%	642.559.783	35%	642.559.783	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100%	100%	11.656.514.669	100%	11.846.601.055	100%	11.998.201.115	100%	12.461.932.052	100%	12.539.095.192	100%	12.539.095.192	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	**#**	**Penanaman Modal**				**11.377.759.561**		**11.563.300.201**		**11.711.274.881**		**11.861.329.480**		**12.239.233.960**		**12.239.233.960**	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentae Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	318.577.268	100%	323.772.406	100%	327.915.697	100%	332.117.225	100%	342.698.551	100%	342.698.551	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%	34.133.279	100%	34.689.901	100%	35.133.825	100%	35.583.988	100%	36.717.702	100%	36.717.702	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	136.533.115	100%	138.759.602	100%	140.535.299	100%	142.335.954	100%	146.870.808	100%	146.870.808	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	100%	10.239.983.604	100%	10.406.970.180	100%	10.540.147.392	100%	10.675.196.532	100%	11.015.310.564	100%	11.015.310.564	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	443.732.623	100%	450.968.708	100%	456.739.720	100%	462.591.850	100%	477.330.124	100%	477.330.124	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentae Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	204.799.672	100%	208.139.404	100%	210.802.948	100%	213.503.931	100%	220.306.211	100%	220.306.211	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**#**	**Kepemudaan dan Olahraga**				**24.266.659.835**		**24.336.237.576**		**24.391.728.080**		**24.447.998.555**		**24.589.712.735**		**24.589.712.735**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	80%	80%	767.998.770	80%	780.522.764	80%	790.511.054	80%	800.639.740	80%	826.148.292	80%	826.148.292	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	75%	80%	22.559.995.901	85%	22.601.742.545	90%	22.635.036.848	95%	22.668.799.133	100%	22.753.827.641	100%	22.753.827.641	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Fasilitasi Organisasi Gerakan Pramuka	65%	70%	938.665.164	80%	953.972.267	85%	966.180.178	90%	978.559.682	100%	1.009.736.802	100%	1.009.736.802	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**Statistik**				**284.443.989**		**289.082.505**		**292.781.872**		**296.533.237**		**305.980.849**		**305.980.849**	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD dengan statistik sektoral terintegrasi pada portal data	80%	100%	284.443.989	100%	289.082.505	100%	292.781.872	100%	296.533.237	100%	305.980.849	100%	305.980.849	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**#**	**Persandian**				**426.665.984**		**433.623.758**		**439.172.808**		**444.799.856**		**458.971.274**		**458.971.274**	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	100%	100%	426.665.984	100%	433.623.758	100%	439.172.808	100%	444.799.856	100%	458.971.274	100%	458.971.274	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	**#**	**Kebudayaan**				**1.422.219.944**		**1.445.412.525**		**1.463.909.360**		**1.482.666.185**		**1.529.904.245**		**1.529.904.245**	
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Bernilai Sejarah yang dilestarikan	75%	80%	177.777.493	85%	180.676.566	85%	182.988.670	90%	185.333.273	90%	191.238.031	90%	191.238.031	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	45%	47%	151.998.155	50%	170.784.145	50%	185.766.582	50%	200.959.610	50%	239.222.438	50%	239.222.438	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan ke museum	60%	65%	92.444.296	70%	93.951.814	75%	95.154.108	80%	96.373.302	85%	99.443.776	85%	99.443.776	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tradisi Budaya yang Dilestarikan	80%	85%	1.000.000.000	90%	1.000.000.000	95%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	**#**	**Perpustakaan**				**5.962.105.670**		**5.884.942.406**		**8.891.758.180**		**8.906.180.749**		**9.053.827.642**		**9.053.827.642**	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengelolaan Perpustakaan	75%	78,50%	537.599.139	80%	546.365.934	85%	553.357.738	88,50%	560.447.818	90%	578.303.805	90%	578.303.805	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian koleksi nasional naskah kuno	75%	78,50%	486.399.221	80%	494.331.084	85%	500.657.001	88,50%	507.071.835	90%	523.227.252	90%	523.227.252	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	78,50%	4.938.107.310	80%	4.844.245.388	85%	7.837.743.441	88,50%	7.838.661.096	90%	7.952.296.585	90%	7.952.296.585	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**#**	**Kearsipan**				**227.555.191**		**231.266.004**		**234.225.498**		**237.226.590**		**244.784.679**		**244.784.679**	
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	65%	68,50%	127.555.191	70%	131.266.004	75%	134.225.498	78,50%	137.226.590	80%	144.784.679	80%	144.784.679	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100,00%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100,00%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Urusan Pemerintahan Pilihan				**102.813.470.465**		**104.838.743.757**		**106.463.180.456**		**108.112.543.499**		**112.219.176.750**		**112.219.176.750**	
3	**#**	**Kelautan dan Perikanan**				**19.911.079.231**		**20.235.775.352**		**20.494.731.040**		**20.757.326.591**		**21.418.659.431**		**21.418.659.431**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya	82%	85%	597.332.377	90%	607.073.261	94%	614.841.931	97%	622.719.798	100%	642.559.783	100%	642.559.783	DINAS PERIKANAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	82,50%	83,33%	3.783.105.054	90%	3.844.797.317	95,88%	3.893.998.898	98,75%	3.943.892.052	100%	4.069.545.292	100%	4.069.545.292	DINAS PERIKANAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	85,63%	89,51%	2.190.218.715	92,83%	2.225.935.289	94,23%	2.254.420.414	100%	2.283.305.925	100%	2.356.052.537	100%	2.356.052.537	DINAS PERIKANAN
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tingkat konsumsi ikan	90%	95,16%	995.553.962	95,70%	1.011.788.768	97,59%	1.024.736.552	98,18%	1.037.866.330	100%	1.070.932.972	100%	1.070.932.972	DINAS PERIKANAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Perikanan	100%	100%	12.344.869.123	100%	12.546.180.717	100%	12.706.733.245	100%	12.869.542.486	100%	13.279.568.847	100%	13.279.568.847	DINAS PERIKANAN
3	**#**	**Pariwisata**				**28.355.478.130**		**29.144.025.850**		**29.772.918.239**		**30.410.650.291**		**32.016.744.329**		**32.016.744.329**	
		Program Pemasaran Pariwisata	PersentaseKunjungan wisata	80%	85%	290.132.869	90%	294.864.155	95%	298.637.509	100%	302.463.902	100%	312.100.466	100%	312.100.466	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kreatifias usaha ekonomi yang dihasilkan	60%	65%	628.621.216	70%	638.872.336	75%	647.047.937	80%	655.338.454	85%	676.217.676	95%	676.217.676	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase kewirausahawan kreatif baru	25%	30%	3.288.172.513	40%	3.341.793.758	45%	3.384.558.440	50%	3.427.924.220	55%	3.537.138.614	55%	3.537.138.614	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan	10%	15%	3.094.750.600	20%	3.145.217.654	25%	3.185.466.767	30%	3.226.281.619	35%	3.329.071.637	35%	3.329.071.637	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	100%	100%	21.053.800.932	100%	21.723.277.947	100%	22.257.207.586	100%	22.798.642.096	100%	24.162.215.936	100%	24.162.215.936	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**#**	**Pertanian**				**39.822.158.461**		**40.471.550.700**		**40.989.462.081**		**41.514.653.180**		**42.837.318.859**		**42.837.318.859**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan	100%	100%	21.265.032.618	100%	21.611.808.074	100%	21.888.372.751	100%	22.168.824.798	100%	22.875.128.271	100%	22.875.128.271	DINAS PERKEBUNAN
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana produksi Perkebunan	75%	80%	3.583.994.261	82%	3.642.439.563	85%	3.689.051.587	87%	3.736.318.786	90%	3.855.358.697	90%	3.855.358.697	DINAS PERKEBUNAN
		Rogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan prasarana produksi Perkebunan	75%	80%	477.865.902	82%	485.658.608	85%	491.873.545	87%	498.175.838	90%	514.047.826	90%	514.047.826	DINAS PERKEBUNAN
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian bencana produksi Perkebunan	75%	80%	676.976.694	82%	688.016.362	85%	696.820.855	87%	705.749.104	90%	728.234.421	90%	728.234.421	DINAS PERKEBUNAN
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh perkebunan	75%	80%	637.154.535	82%	647.544.811	85%	655.831.393	87%	664.234.451	90%	685.397.102	90%	685.397.102	DINAS PERKEBUNAN
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengawasan dan perizinan usaha perkebunan	75%	80%	358.399.426	82%	364.243.956	85%	368.905.159	87%	373.631.879	90%	385.535.870	90%	385.535.870	DINAS PERKEBUNAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Hortikultura Tanaman Pangan Dan Peternakan	100%	100%	1.473.419.863	100%	1.497.447.376	100%	1.516.610.097	100%	1.536.042.168	100%	1.584.980.798	100%	1.584.980.798	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian di Kabupaten Bengkalis yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100%	100%	278.755.109	100%	283.300.855	100%	286.926.235	100%	290.602.572	100%	299.861.232	100%	299.861.232	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Kesehatan Hewan, dan pencegahan/ penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular	100%	100%	2.429.151.666	100%	2.468.764.593	100%	2.500.357.187	100%	2.532.393.844	100%	2.613.076.450	100%	2.613.076.450	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sarana dan sarana pertanian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	2.827.373.251	100%	2.873.480.100	100%	2.910.251.808	100%	2.947.540.376	100%	3.041.449.639	100%	3.041.449.639	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang dikembangkan	100%	100%	2.468.973.825	100%	2.509.236.143	100%	2.541.346.649	100%	2.573.908.497	100%	2.655.913.769	100%	2.655.913.769	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi penyuluh	100%	100%	3.345.061.311	100%	3.399.610.259	100%	3.443.114.815	100%	3.487.230.867	100%	3.598.334.784	100%	3.598.334.784	DINAS HORTIKULTURA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	**#**	**Perdagangan**				**11.652.759.561**		**11.865.300.800**		**12.044.024.878**		**12.227.354.478**		**12.641.860.961**		**12.641.860.961**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100%	100%	6.030.212.567	100%	6.128.549.106	100%	6.206.975.686	100%	6.286.504.624	100%	6.486.793.999	100%	6.486.793.999	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	275.000.000	100%	302.000.600	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.000	100%	402.627.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (U$)	554,90%	558,76	341.332.787	559	346.899.006	562,98	351.338.246	568,26	355.839.884	568,26	367.177.019	568,26	367.177.019	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan IKM yg dipromosikan	64%	71%	853.331.967	78%	867.247.515	85%	878.345.616	92%	889.599.711	100%	917.942.547	100%	917.942.547	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang dikelola Pemda	30%	100%	2.616.884.699	100%	2.659.559.046	100%	2.693.593.222	100%	2.728.105.780	100%	2.815.023.811	100%	2.815.023.811	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan Bapokting; jumlah paket bahan pokok penting yg diserahkan ke masy kurang mampu	100%; 0	100%; 13.000	625.776.776	100%; 13.000	635.981.511	100%; 13.000	644.120.118	100%; 13.000	652.373.121	100%; 13.000	673.157.868	100%; 13.000	673.157.868	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaksanaan tertib ukur UTTP	85%	88%	910.220.765	91%	925.064.016	95%	936.901.990	97%	948.906.358	100%	979.138.717	100%	979.138.717	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	**#**	**Perindustrian**				**2.844.439.890**		**2.890.825.051**		**2.927.818.720**		**2.965.332.369**		**3.059.808.490**		**3.059.808.490**	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data IKM yg dipublikasikan	60%	65%	540.443.579	79%	549.256.760	85%	556.285.557	90%	563.413.150	95%	581.363.613	98%	581.363.613	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha IKM yg difasilitasi izinnya	100 %	100%	341.332.787	100%	346.899.006	100%	351.338.246	100%	355.839.884	100%	367.177.019	100%	367.177.019	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase sentra IKM yg dikembangkan; Peningkatan IKM baru	5; 50	5; 50	1.962.663.524	8; 50	1.994.669.285	10;50	2.020.194.917	10; 50	2.046.079.335	15; 50	2.111.267.858	15; 100	2.111.267.858	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	**#**	**Transmigrasi**				**227.555.192**		**231.266.004**		**234.225.498**		**237.226.590**		**244.784.680**		**244.784.680**	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan Transmigrasi	100%	100%	113.777.596	100%	115.633.002	100%	117.112.749	100%	118.613.295	100%	122.392.340	100%	122.392.340	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi	100%	100%	113.777.596	100%	115.633.002	100%	117.112.749	100%	118.613.295	100%	122.392.340	100%	122.392.340	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Unsur Penunjang				**255.999.590.102**		**260.174.254.502**		**263.503.684.800**		**266.879.913.302**		**275.382.764.102**		**275.382.764.102**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	**1**	**Sekretariat Daerah**				**156.444.193.951**		**158.995.377.751**		**161.030.029.600**		**163.093.280.351**		**168.289.466.951**		**168.289.466.951**	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya administrasi pemerintahan dan kewilayahan	100%	100%	39.111.048.488	100%	39.748.844.438	100%	40.257.507.400	100%	40.773.320.088	100%	42.072.366.738	100%	42.072.366.738	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah	100%	100%	104.817.609.947	100%	106.526.903.093	100%	107.890.119.832	100%	109.272.497.835	100%	112.753.942.857	100%	112.753.942.857	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Koordinasi, Pemantauan dan Penataan Kebijakan	40%	50%	12.515.535.516	60%	12.719.630.220	70%	12.882.402.368	80%	13.047.462.428	90%	13.463.157.356	95%	13.463.157.356	SEKRETARIAT DAERAH
4	**2**	**Sekretariat DPRD**				**99.555.396.151**		**101.178.876.751**		**102.473.655.200**		**103.786.632.951**		**107.093.297.151**		**107.093.297.151**	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupoksi DPRD	100%	100%	42.808.820.345	100%	43.506.917.003	100%	44.063.671.736	100%	44.628.252.169	100%	46.050.117.775	100%	46.050.117.775	SEKRETARIAT DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD	100%	100%	56.746.575.806	100%	57.671.959.748	100%	58.409.983.464	100%	59.158.380.782	100%	61.043.179.376	100%	61.043.179.376	SEKRETARIAT DPRD
		Unsur Pendukung				**463.046.369.692**		**470.597.409.892**		**476.619.609.429**		**482.726.456.511**		**498.106.224.086**		**498.106.224.086**	
5	**1**	**Perencanaan**				**36.977.718.570**		**37.580.725.651**		**38.061.643.360**		**38.549.320.809**		**39.777.510.370**		**39.777.510.370**	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	95%	95%	8.504.875.271	96%	8.643.566.900	97%	8.754.177.973	98%	8.866.343.786	99%	9.148.827.385	99%	9.148.827.385	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Bappeda	100%	100%	23.295.962.699	100%	23.675.857.160	100%	23.978.835.317	100%	24.286.072.110	100%	25.059.831.533	100%	25.059.831.533	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	95%	95%	5.176.880.600	96%	5.261.301.591	97%	5.328.630.070	98%	5.396.904.913	99%	5.568.851.452	99%	5.568.851.452	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	**2**	**Keuangan**				**395.661.588.698**		**402.113.764.455**		**407.259.583.952**		**412.477.732.667**		**425.619.360.958**		**425.619.360.958**	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	100%	100%	7.913.231.774	100%	8.042.275.289	100%	8.145.191.679	100%	8.249.554.653	100%	8.512.387.219	100%	8.512.387.219	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	21.761.387.378	100%	22.116.257.045	100%	22.399.277.117	100%	22.686.275.297	100%	23.409.064.853	100%	23.409.064.853	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset yang tertib dan terukur	100%	100%	5.934.923.830	100%	6.031.706.467	100%	6.108.893.759	100%	6.187.165.990	100%	6.384.290.414	100%	6.384.290.414	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD	100%	100%	324.442.502.733	100%	329.733.286.853	100%	333.952.858.841	100%	338.231.740.787	100%	349.007.875.986	100%	349.007.875.986	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100%	100%	35.609.542.983	100%	36.190.238.801	100%	36.653.362.556	100%	37.122.995.940	100%	38.305.742.486	100%	38.305.742.486	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**3**	**Kepegawaian**				**8.533.319.670**		**8.672.475.151**		**8.783.456.160**		**8.895.997.110**		**9.179.425.470**		**9.179.425.470**	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	1.621.330.737	100%	1.647.770.279	100%	1.668.856.670	100%	1.690.239.451	100%	1.744.090.839	100%	1.744.090.839	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Pendidkan Dan Pelatihan	100%	100%	6.911.988.933	100%	7.024.704.872	100%	7.114.599.490	100%	7.205.757.659	100%	7.435.334.631	100%	7.435.334.631	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	**4**	**Pendidikan dan Pelatihan**				**2.559.995.901**		**2.601.742.545**		**2.635.036.848**		**2.668.799.133**		**2.753.827.641**		**2.753.827.641**	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	100%	100%	2.559.995.901	100%	2.601.742.545	100%	2.635.036.848	100%	2.668.799.133	100%	2.753.827.641	100%	2.753.827.641	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	**5**	**Penelitian dan Pengembangan**				**18.488.859.285**		**18.790.362.825**		**19.030.821.680**		**19.274.660.405**		**19.888.755.185**		**19.888.755.185**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	100%	10.168.872.607	100%	10.334.699.554	100%	10.466.951.924	100%	10.601.063.223	100%	10.938.815.352	100%	10.938.815.352	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan daerah	65%	67%	8.319.986.678	70%	8.455.663.271	75%	8.563.869.756	80%	8.673.597.182	85%	8.949.939.833	85%	8.949.939.833	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**6**	**Pengelola Perbatasan Daerah**				**824.887.568**		**838.339.265**		**849.067.429**		**859.946.387**		**887.344.462**		**887.344.462**	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Tertib Administrasi Kewilayahan	100%		824.887.568		838.339.265		849.067.429		859.946.387		887.344.462		887.344.462	SEKRETARIAT DAERAH
		Unsur Pengawasan				**17.066.639.340**		**17.344.950.300**		**17.566.912.320**		**17.791.994.220**		**18.358.850.940**		**18.358.850.940**	
6	**1**	**Insektorat**				**17.066.639.340**		**17.344.950.300**		**17.566.912.320**		**17.791.994.220**		**18.358.850.940**		**18.358.850.940**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penujang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat	100%	100%	12.799.979.505	100%	13.008.712.725	100%	13.175.184.240	100%	13.343.995.665	100%	13.769.138.205	100%	13.769.138.205	INSPEKTORAT
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100%	100%	3.413.327.868	100%	3.468.990.060	100%	3.513.382.464	100%	3.558.398.844	100%	3.671.770.188	100%	3.671.770.188	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tindak lanjut hasil asistensi	100%	100%	853.331.967	100%	867.247.515	100%	878.345.616	100%	889.599.711	100%	917.942.547	100%	917.942.547	INSPEKTORAT
		Unsur Kewilayahan			**0**	**120.930.703.331**	**0**	**122.903.173.028**	**0**	**124.476.559.423**		**126.072.102.732**	**0**	**133.088.611.686**	**0**	**133.088.611.686**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kecamatan Bandar Laksamana				**6.542.211.747**		**6.648.897.616**		**6.733.983.058**		**6.820.264.450**		**7.037.559.527**		**7.037.559.527**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	4.303.514.652	100%	4.380.200.521	100%	4.430.200.521	100%	4.516.481.913	100%	4.733.776.990	100%	4.733.776.990	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persenstase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	100%	750.358.188	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	100%	1.027.127.244	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	100%	162.914.529	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	262.314.969	100%	292.314.969	100%	327.400.411	100%	327.400.411	100%	327.400.411	100%	327.400.411	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	100%	35.982.165	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
		Kecamatan Bantan				**6.399.989.754**		**6.504.356.363**		**6.587.592.121**		**6.671.997.832**		**6.884.569.104**		**6.884.569.104**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	34.422.846	KECAMATAN BANTAN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.036.798.340	100%	1.053.705.731	100%	1.067.189.923	100%	1.080.863.649	100%	1.115.300.195	100%	1.115.300.195	KECAMATAN BANTAN
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	34.422.846	KECAMATAN BANTAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	5.049.591.915	100%	5.131.937.170	100%	5.197.610.183	100%	5.264.206.290	100%	5.431.925.022	100%	5.431.925.022	KECAMATAN BANTAN
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	140.799.775	100%	143.095.840	100%	144.927.027	100%	146.783.952	100%	151.460.520	100%	151.460.520	KECAMATAN BANTAN
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	108.799.826	100%	110.574.058	100%	111.989.066	100%	113.423.963	100%	117.037.675	100%	117.037.675	KECAMATAN BANTAN
		Kecamatan Bathin Solapan				**6.399.989.753**		**6.504.356.363**		**6.587.592.119**		**6.671.997.832**		**7.884.569.103**		**7.884.569.103**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	115.199.816	100%	117.078.415	100%	118.576.658	100%	120.095.961	100%	123.922.244	100%	123.922.244	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.036.798.340	100%	1.053.705.731	100%	1.067.189.923	100%	1.080.863.649	100%	1.115.300.195	100%	1.115.300.195	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	19.199.969	100%	19.513.069	100%	19.762.776	100%	20.015.993	100%	20.653.707	100%	20.653.707	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	4.742.392.407	100%	4.819.728.065	100%	4.881.405.761	100%	4.943.950.394	100%	6.101.465.705	100%	6.101.465.705	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	159.999.744	100%	162.608.909	100%	164.689.803	100%	166.799.946	100%	172.114.228	100%	172.114.228	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	326.399.477	100%	331.722.174	100%	335.967.198	100%	340.271.889	100%	351.113.024	100%	351.113.024	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
		Kecamatan Bengkalis				**13.653.311.471**		**13.875.960.239**		**14.053.529.856**		**14.233.595.376**		**15.687.080.751**		**15.687.080.751**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	10.137.583.768	100%	10.302.900.478	100%	10.434.745.918	100%	10.568.444.567	100%	11.905.157.458	100%	11.905.157.458	KECAMATAN BENGKALIS
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	40.959.934	100%	41.627.881	100%	42.160.590	100%	42.700.786	100%	44.061.242	100%	44.061.242	KECAMATAN BENGKALIS
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	3.194.874.884	100%	3.246.974.696	100%	3.288.525.986	100%	3.330.661.318	100%	3.436.776.896	100%	3.436.776.896	KECAMATAN BENGKALIS

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	61.439.902	100%	62.441.821	100%	63.240.884	100%	64.051.179	100%	66.091.863	100%	66.091.863	KECAMATAN BENGKALIS
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	197.973.016	100%	201.201.423	100%	203.776.183	100%	206.387.133	100%	212.962.671	100%	212.962.671	KECAMATAN BENGKALIS
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	20.479.967	100%	20.813.940	100%	21.080.295	100%	21.350.393	100%	22.030.621	100%	22.030.621	KECAMATAN BENGKALIS
		Kecamatan Bukit Batu				**8.248.875.681**		**8.383.392.646**		**8.490.674.288**		**8.599.463.872**		**8.873.444.620**		**8.873.444.620**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	32.995.503	100%	33.533.571	100%	33.962.697	100%	34.397.855	100%	35.493.778	100%	35.493.778	KECAMATAN BUKIT BATU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.658.024.012	100%	1.685.061.922	100%	1.706.625.532	100%	1.728.492.238	100%	1.783.562.369	100%	1.783.562.369	KECAMATAN BUKIT BATU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	41.244.378	100%	41.916.963	100%	42.453.371	100%	42.997.319	100%	44.367.223	100%	44.367.223	KECAMATAN BUKIT BATU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	5.996.932.620	100%	6.094.726.453	100%	6.172.720.207	100%	6.251.810.236	100%	6.450.994.239	100%	6.450.994.239	KECAMATAN BUKIT BATU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	189.724.141	100%	192.818.031	100%	195.285.509	100%	197.787.669	100%	204.089.226	100%	204.089.226	KECAMATAN BUKIT BATU

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	329.955.027	100%	335.335.706	100%	339.626.972	100%	343.978.555	100%	354.937.785	100%	354.937.785	KECAMATAN BUKIT BATU
		Kecamatan Mandau				**35.555.498.626**		**36.135.313.126**		**36.597.734.000**		**37.066.654.625**		**38.247.606.126**		**38.247.606.126**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	263.110.690	100%	267.401.317	100%	270.823.232	100%	274.293.244	100%	283.032.285	100%	283.032.285	KECAMATAN MANDAU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	14.151.088.453	100%	14.381.854.624	100%	14.565.898.132	100%	14.752.528.541	100%	15.222.547.238	100%	15.222.547.238	KECAMATAN MANDAU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	56.888.798	100%	57.816.501	100%	58.556.374	100%	59.306.647	100%	61.196.170	100%	61.196.170	KECAMATAN MANDAU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	20.053.301.225	100%	20.380.316.603	100%	20.641.121.976	100%	20.905.593.209	100%	21.571.649.855	100%	21.571.649.855	KECAMATAN MANDAU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	248.888.490	100%	252.947.192	100%	256.184.138	100%	259.466.582	100%	267.733.243	100%	267.733.243	KECAMATAN MANDAU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	782.220.970	100%	794.976.889	100%	805.150.148	100%	815.466.402	100%	841.447.335	100%	841.447.335	KECAMATAN MANDAU
		Kecamatan Pinggir				**9.428.659.638**		**9.582.831.064**		**9.706.065.596**		**9.831.073.832**		**11.144.118.876**		**11.144.118.876**	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	2.797.222.188	100%	2.842.837.354	100%	2.879.216.929	100%	2.916.107.853	100%	3.009.015.669	100%	3.009.015.669	KECAMATAN PINGGIR
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	46.933.258	100%	47.698.613	100%	48.309.009	100%	48.927.984	100%	50.486.840	100%	50.486.840	KECAMATAN PINGGIR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	6.242.123.339	100%	6.343.915.572	100%	6.425.098.181	100%	6.507.421.886	100%	7.714.749.731	100%	7.714.749.731	KECAMATAN PINGGIR
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	112.639.820	100%	114.476.672	100%	115.941.621	100%	117.427.162	100%	121.168.416	100%	121.168.416	KECAMATAN PINGGIR
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	42.008.000	100%	43.108.400	100%	44.263.820	100%	45.477.011	100%	46.750.860	100%	46.750.860	KECAMATAN PINGGIR
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	187.733.033	100%	190.794.453	100%	193.236.036	100%	195.711.936	100%	201.947.360	100%	201.947.360	KECAMATAN PINGGIR
		Kecamatan Rupat				**14.506.643.440**		**14.743.207.756**		**14.931.875.472**		**15.123.195.087**		**15.605.023.298**		**15.605.023.298**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	79.786.539	100%	81.087.643	100%	82.125.315	100%	83.177.573	100%	85.827.628	100%	85.827.628	KECAMATAN RUPAT
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	4.018.340.233	100%	4.083.868.548	100%	4.136.129.506	100%	4.189.125.039	100%	4.322.591.454	100%	4.322.591.454	KECAMATAN RUPAT

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	72.533.217	100%	73.716.039	100%	74.659.377	100%	75.615.975	100%	78.025.116	100%	78.025.116	KECAMATAN RUPAT
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	9.850.010.895	100%	10.010.638.066	100%	10.138.743.445	100%	10.268.649.464	100%	10.595.810.820	100%	10.595.810.820	KECAMATAN RUPAT
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	116.053.148	100%	117.945.662	100%	119.455.004	100%	120.985.561	100%	124.840.186	100%	124.840.186	KECAMATAN RUPAT
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	369.919.408	100%	375.951.798	100%	380.762.825	100%	385.641.475	100%	397.928.094	100%	397.928.094	KECAMATAN RUPAT
		Kecamatan Rupat Utara				**7.395.543.715**		**7.516.145.130**		**7.612.328.672**		**7.709.864.162**		**7.955.502.075**		**7.955.502.075**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	88.746.525	100%	90.193.742	100%	91.347.944	100%	92.518.370	100%	95.466.025	100%	95.466.025	KECAMATAN RUPAT UTARA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.013.189.489	100%	1.029.711.883	100%	1.042.889.028	100%	1.056.251.390	100%	1.089.903.784	100%	1.089.903.784	KECAMATAN RUPAT UTARA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	81.350.981	100%	82.677.596	100%	83.735.615	100%	84.808.506	100%	87.510.523	100%	87.510.523	KECAMATAN RUPAT UTARA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	5.258.231.581	100%	5.343.979.187	100%	5.412.365.686	100%	5.481.713.419	100%	5.656.361.975	100%	5.656.361.975	KECAMATAN RUPAT UTARA
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	199.679.680	100%	202.935.919	100%	205.532.874	100%	208.166.332	100%	214.798.556	100%	214.798.556	KECAMATAN RUPAT UTARA
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	754.345.459	100%	766.646.803	100%	776.457.525	100%	786.406.145	100%	811.461.212	100%	811.461.212	KECAMATAN RUPAT UTARA
		Kecamatan Siak Kecil				**6.399.989.753**		**6.504.356.362**		**6.587.592.120**		**6.671.997.832**		**6.884.569.103**		**6.884.569.103**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	25.599.959	100%	26.017.425	100%	26.350.368	100%	26.687.991	100%	27.538.276	100%	27.538.276	KECAMATAN SIAK KECIL
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	844.798.647	100%	858.575.040	100%	869.562.160	100%	880.703.714	100%	908.763.122	100%	908.763.122	KECAMATAN SIAK KECIL
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	31.999.949	100%	32.521.782	100%	32.937.961	100%	33.359.989	100%	34.422.846	100%	34.422.846	KECAMATAN SIAK KECIL
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	5.286.391.536	100%	5.372.598.355	100%	5.441.351.091	100%	5.511.070.210	100%	5.686.654.079	100%	5.686.654.079	KECAMATAN SIAK KECIL
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	134.399.785	100%	136.591.484	100%	138.339.435	100%	140.111.954	100%	144.575.951	100%	144.575.951	KECAMATAN SIAK KECIL

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	76.799.877	100%	78.052.276	100%	79.051.105	100%	80.063.974	100%	82.614.829	100%	82.614.829	KECAMATAN SIAK KECIL
		Kecamatan Talang Muandau				**6.399.989.753**		**6.504.356.363**		**6.587.592.121**		**6.671.997.832**		**6.884.569.103**		**6.884.569.103**	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100%	100%	102.399.836	100%	104.069.702	100%	105.401.474	100%	106.751.965	100%	110.153.106	100%	110.153.106	KECAMATAN TALANG MANDAU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan	100%	100%	1.107.198.227	100%	1.125.253.651	100%	1.139.653.437	100%	1.154.255.625	100%	1.191.030.455	100%	1.191.030.455	KECAMATAN TALANG MANDAU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	140.799.775	100%	143.095.840	100%	144.927.027	100%	146.783.952	100%	151.460.520	100%	151.460.520	KECAMATAN TALANG MANDAU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	100%	4.633.592.581	100%	4.709.154.006	100%	4.769.416.695	100%	4.830.526.431	100%	4.984.428.030	100%	4.984.428.030	KECAMATAN TALANG MANDAU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	121.599.805	100%	123.582.771	100%	125.164.250	100%	126.767.959	100%	130.806.813	100%	130.806.813	KECAMATAN TALANG MANDAU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	294.399.529	100%	299.200.393	100%	303.029.238	100%	306.911.900	100%	316.690.179	100%	316.690.179	KECAMATAN TALANG MANDAU

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Unsur Pemerintahan Umum				**10.083.008.960**		**10.418.082.546**		**10.525.808.113**		**10.435.047.862**		**10.710.162.323**		**10.710.162.323**	
8	**1**	**Kesatuan Bangsa dan Politik**			**53**	**10.083.008.960**	**53**	**10.418.082.546**	**53**	**10.525.808.113**	**56.384.566**	**10.435.047.862**	**53**	**10.710.162.323**	**53**	**10.710.162.323**	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50%	50%	99.555.396	50%	101.178.877	50%	102.473.655	50%	103.786.633	50%	107.093.297	50%	107.093.297	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan Ketahanan Ekonomi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	40%	50%	278.755.109	50%	283.300.855	50%	286.926.235	50%	290.602.572	50%	299.861.232	50%	299.861.232	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	50%	50%	258.844.030	50%	263.065.080	50%	266.431.504	50%	269.845.246	50%	278.442.573	50%	278.442.573	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan Penanganan Konflik di Daerah	40%	40%	268.799.570	40%	273.182.967	40%	276.678.869	40%	280.223.909	40%	289.151.902	40%	289.151.902	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan pembinaan Pendidikan Politik	50%	50	1.800.000.000	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	50	1.800.000.000	50	1.800.000.000	50	1.800.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100%	100%	7.377.054.855	100%	7.497.354.767	100%	7.593.297.850	100%	7.690.589.502	100%	7.935.613.319	100%	7.935.613.319	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		TOTAL				**2.844.481.898.000**		**2.890.868.158.400**		**2.927.862.983.820**		**2.965.377.847.011**		**3.059.855.240.860**		**3.059.855.240.860**	

BAB VIII.
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Indikator Kinerj Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkalis selama periode 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada pencapaian *outcomes* dan *impact* yang dirumuskan berdasarkan target pencapaian Visi dan Misi yang diseralarkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Penetapan IKU akan menjadi alat ukur tingkat pencapaian keberhasilan, efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasran serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berikut disajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis selama periode 2021-2026.

Tabel VIII-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	% *ADHK	-1,08%	-1,02%	-0,64%	-0,25%	0,13%	0,51%
2.	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	% *ADHK	0,95%	1,25%	1,75%	2,25%	2,75%	3,25%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	74,06	74,47	74,88	75,3	75,71	76,12
4.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	%	10,76%	11,86%	12,77%	13,75%	14,84%	15,98%
5.	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	50	55	60	63	65	72
6.	Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rp/ Kapita/ Tahun *ADHB	202,54	201,17	201,29	201,78	203,21	205,59
7.	Angka pengangguran	%	9	8,75	8,64	8,54	8,44	8,34
8.	Angka Kemiskinan	%	6,19	6,07	5,94	5,81	5,69	5,56
9.	Gini Rasio	Point	0,28	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275
10.	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	53,5	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan:							
	a. Orang		910.000	950.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000
	b. Barang		28.800	32.400	36.000	39.600	43.200	46.800
12.	IKLH	%	70,33	70,61	70,88	71,16	71,29	71,44
13.	Indek Resiko Bencana	Nilai	109,48	100,1	90,71	81,33	71,94	62,56

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator penyelenggaraan urusan dari perangkat daerah setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan dari Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel VIII.2 dibawah ini:

Tabel VIII-2 Penetatapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9	8,54	8,44	8,54	8,64	8,75	8,75
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,88	10,15	10,37	10,62	10,85	11,1	11,1
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2	72,2
	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,21	66,22	67,18	67,29	67,77	68,3	68,3
	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,08	91,45	91,82	92,19	92,56	92,93	92,93
II	**Aspek Pelayanan Umum**								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
	Pendidikan								
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun (SD)	Persen	100,31	99,18	98,05	96,92	95,8	94,67	94,67
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun (SMP)	Persen	93,8	95,12	96,44	97,76	99,09	100,41	100,41
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	109,58	107,63	108,98	108,79	109,41	109,12	109,12
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	96,82	97,62	98,41	99,2	100	100,79	100,79
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98,22	98,27	98,32	98,37	98,42	98,47	98,47

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	87,84	89,06	90,29	91,52	92,74	93,97	93,97
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	95	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan								
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Penduduk	3,7	3,5	3,2	3	2,8	2,5	2,5
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Penduduk	3,7	3,4	3	2,7	2,4	2	2
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 Penduduk	3,2	3	2,7	2,4	2,1	1,9	1,9
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Penduduk	191	181	172	164	156	148	148
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Persen	20	17	15	14	12	10	10
	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	65	65	65	65	65	65	65
	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Angka kesembuhan penderita TB dan paru	Angka	376	414	455	546	546	546	546
	Prevalensi HIV	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Rumah Sakit								
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88	89	91	92	93	95	95
	Akreditasi Rumah Sakit	Nilai	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
	Cost Recovery Rate	Persen	38	38	39	40	41	42	42

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Pekerjaan Umum:								
	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53,5	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43	63,43
	Panjang infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	Kilo Meter	480,087	528,096	576,104	624,113	672,122	720,131	720,131
	Panjang Jalan Poros dan jembatan pada wilayah perbatasan dalam kondisi baik	Kilo Meter	11,041	16,562	22,083	27,604	33,125	38,646	38,646
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	98,89	98,89	98,89	98,89	98,89	98,89	98,89
	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Persen	69,18	71,04	73,49	75,77	75,85	78,59	78,59
	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	Kilo Meter	31,6	33,6	35,6	37,6	39,6	41,6	41,6
	Panjang infrastruktur pengaman daerah rawan longsor	Kilo Meter	0	2	4	6	8	10	10
	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	Unit	4	4	5	6	6	6	6
	Persentase luas kawasan bebas banjir	Persen	77,1	79,1	81,1	83,1	85,1	87,1	87,1
	Penataan Ruang:								
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase RT akses air bersih	Persen	58,03%	60,53%	63,03%	65,53%	68,03%	70,53%	70,53%
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,32	93,81	96,29	98,78	100	100	100
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Persentase lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Persen	48	50	52	54	56	58	58

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Rasio permukiman layak huni	Rasio	97,85	97,92	97,98	98,05	98,11	98,18	98,18
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	4,28	4,15	4,02	3,89	3,76	3,63	3,63
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Trantibumlinmas:								
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	83	85	90	93	95	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kebencanaan:								
	Indeks Resiko Bencana	Persen	109,48	100,1	90,71	81,33	71,94	62,56	62,56
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	95	95	95	95	95	100	100
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persen	95	95	95	95	95	100	100
	Junlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kebakaran:								
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Sosial								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	74	79	84	89	94	99	99
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	96	97	98	99	100	100	100
	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
	Tenaga Kerja								
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	95	95	96	96	97	97	97
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	23	24	25	27	28	29	29
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	90,5	90,75	91	91,5	92	92,1	92,1
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	10	15	20	25	30	32	32
	Persentase layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Ketahanan Pangan								
	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	70	75	82	90	92	95	95
	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	Persen	81	85	90	94	97	100	100
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91
	Pertanahan								
	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	74,25	77,19	80,13	83,07	86,01	88,94	88,94
	Persentase pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	Persen	72	74	76	80	83	85	85
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	70,7	70,85	71	71,14	71,29	71,44	71,44
	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	80	85	90	92	95	100	100
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Persentase penduduk memiliki KPT Elektronik	Persen	99	99	99	99	99	99	99
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	35	50	60	70	80	90	90
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	Persen	95	97	98	100	100	100	100
	Cakupan kepemilikan akte kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	91	93	95	97	98	98	98

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Persentase pasangan suami istri yang memiliki Akta Perkawinan	Persen	60	60	60	100	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Jumlah Desa status Desa Mandiri	Angka	38	50	65	80	95	100	100
	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Bumdesa Aktif	Angka	136	136	136	136	136	136	136
	Kontribusi PADes terhadap APBDes	Persen	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,52	0,46	0,39	0,33	0,26	0,2	0,2
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,51	2,5	2,49	2,48	2,48	2,48	2,48
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	66	67	69	69	70	70	70
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	18,5	17,5	15,5	15,5	14,5	14,5	14,5
	Perhubungan								
	Cakupan konektivitas wilayah	Persen	91	93	94	95	96	97	97
	Rasio ijin trayek	Unit	0,001	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	21.203	21.899	22.595	23.291	23.987	24.683	24.683
	Persentase layanan angkutan darat	Persen	2	2	2	3	3	3	3
	Pemasangan rambu-rambu	Persen	21	21	22	23	23	24	24
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan:								
	a. Orang	Orang	910000	950.000	1.1.00.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	b. Barang	Barang	28800	32.400	36.000	39.600	43.200	46.800	46.800
	Cakupan sarana dan prasarana transportasi layak operasi	Persen	95	98	100	100	100	100	100
	Komunikasi dan Informatika								
	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Angka	1,8	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
	Indeks keterbukaan informasi publik (KIP)	Persen	75	80	85	90	95	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Persantaase Jumlah Koperasi Sehat	Persen	20	22	25	28	30	30	30
	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	Persen	0,11	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,35
	Persentase koperasi aktif	Persen	46,31	48,66	51,01	53,35	55,7	58,04	58,04
	Persentase UKM non BPR atau LKM aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penanaman Modal								
	Nilai investasi (PMDN/PMA)	Persen	4,6 Terliun	4,8 Terliun	5,1 Terliun	5,3 Terliun	5,6 Terliun	5,9 Terliun	5,9 Terliun
	Kepemudaan dan Olahraga								
	Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor	Angka	2	5	8	12	15	18	18
	Jumlah prestasi olahraga	Cabang	10	10	15	20	25	25	25
	Persentase Wirausaha Muda	Persen	80	80	80	85	90	90	90
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	82	82	84	84	86	86	86
	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	49	50	50	50	50	50	50
	Statistik								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Persentase Satu Data Kabupaten Bengkalis	Persen	70	75	80	85	90	95	95
	Persandian								
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktivitas komunikassi dan informasi	Persen	12	15	20	25	30	35	35
	Kebudayaan								
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	6	7	7	7	7
	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	15	16	17	18	19	20	20
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jumlah	2	4	5	5	6	6	6
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Jumlah	15	16	17	18	19	20	20
	Perpustakaan								
	Pembangunan literasi masyarakat	Jumlah	200	250	300	350	400	450	450
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	260.546	273.573	287.252	301.615	316.695	332.536	332.536
	Kearsipan								
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	80	80	85	85	90	90	90
	Layanan Urusan Pilihan								
	Kelautan dan Perikanan								
	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	6.852	6.765	6.678	6.591	6.504	6.417	6.417
	Pendapatan rata rata Nelayan	Juta Rupiah/tahun	39,6	41,2	43,5	45,6	47,8	49,3	49,3
	Pariwisata								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah	1458	1.895	2.559	3.71	5.565	8.347	8.347
	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah	21.000	24.150	30.188	39.244	52.979	74.17	74.17
	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	47	47	47	47	47	47	47
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	7	8	10	11	12	13	13
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	persen	0.05	0.08	0.1	0.15	0.18	0.2	0.2
	Pertanian								
	Tanaman Pangan, Holtukultura dan Peternakan								
	Produksi tanaman pangan (Padi)	Ton	20744,5	21.366,84	22.648,85	24.687,24	27.402,84	30.828,19	30.828,19
	Produksi tanaman holtikultura	Ton	987,05	1.006,79	1.036,99	1.078,47	1.132,40	1.200,34	1.200,34
	Populasi ternak sapi	Ekor	16.579	17.076	18.101	19.730	21.900	24.638	24.638
	Perkebunan								
	Produksi Tanaman Perkebunan:	Ton							
	a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)		19.142	19.342	19.542	19.742	19.942	20.142	20.142
	b. Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa)		4.062	4.112	4.162	4.212	4.262	4.312	4.312
	c. Kelapa Sawit (setara CPO)		262.292	262.500	263.00	263.500	264.00	265.000	265.00
	d. Sagu (Tepung Sagu Kering)		3.189	3.489	3.789	4.089	4.389	4.689	4.689
	Produktivitas Tanaman Perkebunan	Ton/Ha							
	a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)		0,777	0,778	0,779	0,78	0,781	0,782	0,782
	b. Kelapa (Kopra setara 4,5 butir kelapa)		0,914	0,915	0,916	0,917	0,918	0,919	0,919
	c. Kelapa Sawit (setara CPO)		2677	2.678	2.679	2.680	2.681	2.682	2.682

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	d. Sagu (Tepung Sagu Kering)		1533	1.534	1.535	1.536	1.537	1.538	1.538
	Presentase Perkebun dengan Penghasilan minimal setara UMR	Persen	62,67	62,68	62,69	62,7	62,71	62,72	62,72
	Perdagangan								
	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Penting bagi Masyarakat	Persen	70	74	84	88	92	95	95
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	45	52	58	65	69	74	74
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	32	48	64	79	100	100	100
	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Perindustrian								
	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	45	10	20	25	30	40	40
	Persentase Pelaku Usaha IKM yang difasilitasi izin produknya	Persen	70	50	60	70	75	80	80
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	17,01	17,2	17,9	18,02	18,08	18,25	18,5
	Transmigrasi								
	Memonitoring dan evaluasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Penunjang								
	Sekretariat Daerah								
	IKM	Persen	85	86	87	90	95	95	95

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	65	70	75	80	85	85	85
	Indeks Kelembagaan	Persen	55	60	65	70	75	80	80
	Persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi	Persen	75	75	75	80	80	85	85
	Prediket LPPD	Predikat	T	T	T	ST	ST	ST	ST
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	A
	Sekretariat DPRD								
	Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Unsur Pendukung								
	Perencanaan								
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Status	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	96	97	99	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	95	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	94,83	100	100	100	100	100	100
	Keuangan								
	Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	Persen	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	1076,00%	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98	15,98
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Angka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Kepegawaian								
	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,5	1,65	1,78	1,93	2,06	2,21	2,21
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,79	0.18	3,94	4,02	4,1	4,17	4,17
	Pendidikan dan Pelatihan								
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pengembangan								
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Persen	65	67	70	75	80	85	85
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	2.000 (sangat inovvatif)	2.500 (sangat inovatif)	3.000 (sangat inovatif)	3.500 (sangat inovatif)	3.750 (sangat inovatif)	4.000 (sangat inovatif)	4.000 (sangat inovatif)
	Pengelola Perbatasan Daerah								
	Persentase pengelolaan wilayah perbatasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Unsur Pengawas								
	Inspektorat								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	"(9)	(10)
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Layanan Urusan Kewilayahan								
	Kecamatan								
	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86	87	90	95	95	95
	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsanaan	Orang	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang kerukunan umat beragama	Orang	100	100	100	100	100	100	100
III	**Aspek Daya Saing**								
	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	50	55	60	63	65	72	72
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Keterangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB IX.
PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupatih terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bertolak dari hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, dan masyarakat termasuk dunia usaha;

2) Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;

3) Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;

4) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;

5) Penyusunan RKPD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026; dan

6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode RPJMD ini. Penyusunan RKPD Tahun

2027 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Riau, RKP Tahun 2026, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2027. RPJMD ini dapat pula dilakukan penyesuaian mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJMD.

Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD adalah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2026. Agenda penting lainnya RKPD adalah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027, baik nasional maupun provinsi. Kesemua hal tersebut hendaknya dipertimbangkan secara tepat dan cermat dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.